



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2018 - 2023**



**PEMERINTAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2019**



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3459);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-

- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 13);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
dan
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2018-2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4. Bupati adalah Bupati Temanggung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Temanggung.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah berjangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepada Daerah.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Strategis PD yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan pembangunan PD berjangka waktu 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja PD yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan pembangunan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah dokumen yang berisi penetapan dan rencana pemanfaatan tata ruang wilayah Kabupaten Temanggung.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
17. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
18. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai.

BAB II RPJMD

Pasal 2

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 dan pelaksanaan lebih lanjut dijabarkan dalam RKPD.

Pasal 3

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati Hasil pilkada Tahun 2018 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) RPJMD disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN dengan memperhatikan :
 - a. RPJMD Provinsi;
 - b. Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan
 - c. RPJMD Daerah Sekitar.

Pasal 4

RPJMD menjadi pedoman:

- a. penyusunan RKPD, Renstra PD, Renja PD;

- b. instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
- c. bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu Tahun 2018-2023.

Pasal 5

RPJMD wajib dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Daerah.

BAB III SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 6

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. BAB III : Gambaran Keuangan Daerah;
 - d. BAB IV : Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;
 - e. BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
 - f. BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah;
 - g. BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
 - h. BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - i. BAB IX : Penutup
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Bupati melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan

- c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.
- (3) Pelaksanaan Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh PD yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PERUBAHAN RPJMD

Pasal 8

- (1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Dalam rangka efektifitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Dalam hal RPJMD Tahun 2023-2028 belum diundangkan, maka penyusunan RKPD Tahun 2024 berpedoman pada RPJPD serta mengacu pada RPJMN.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 21 Maret 2019

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 21 Maret 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA

ttd

SUYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2019 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, PROVINSI
JAWA TENGAH : (2-70/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG



RUSLIANA INDRAWATI, S.H, M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 196110271989032001

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2018-2023

I. UMUM

RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun periode masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung tahun 2018-2023. RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 memuat isu-isu strategis, visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah, arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah, program prioritas pembangunan daerah, dan indikator kinerja daerah yang akan dicapai. Pelaksanaan pembangunan daerah pada periode RPJMD tahun 2018-2023 tersebut diharapkan mampu membawa dan mewujudkan masyarakat Temanggung yang tentrem, marem, dan gendem.

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah maka RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 akan menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Temanggung pada tahun 2018-2023. Demikian juga bagi penyelenggara pemerintahan daerah maka RPJMD tersebut selanjutnya akan menjadi pedoman bagi penyusunan RKPD dan Renstra PD.

Oleh karena itu guna meningkatkan akuntabilitas perencanaan pembangunan daerah dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasannya, maka RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 disusun secara menyeluruh dan terpadu, berkeadilan, responsif, partisipatif, aspiratif, efisien, efektif, terukur, dapat dilaksanakan, dan berkelanjutan.

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah Bupati dan Wakil Bupati terpilih dilantik. Proses penyusunan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 dilakukan melalui serangkaian penyusunan rancangan awal sementara, rancangan awal, penyusunan rancangan, penyelenggaraan musrenbang, penyusunan rancangan akhir dan penetapan, yang melibatkan seluruh unsur pemangku kepentingan pembangunan daerah dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah. Dengan

demikian maka substansi rencana pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 merupakan kesepakatan dan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Daerah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Tahun transisi merupakan tahun terakhir periode RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dimana saat pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2023 guna penyusunan RKPD tahun 2024 belum ditetapkan dokumen perencanaan jangka menengah daerah yang dapat menjadi pedoman dan arah pembangunan daerah di tahun 2024.

Pasal 10

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 98

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	I-3
B. Dasar Hukum Penyusunan	I-6
C. Hubungan Antar Dokumen	I-7
D. Maksud dan Tujuan	I-9
E. Sistematika Penulisan	I-10

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

A. Aspek Geografi dan Administrasi	II-3
1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi	II-3
2. Letak dan Kondisi Geografis	II-3
3. Topografi	II-3
4. Geologi	II-5
5. Klimatologi	II-5
6. Penggunaan Lahan	II-8
7. Hidrologi	II-10
8. Demografi	II-10
B. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-14
1. Pertumbuhan Ekonomi	II-14
2. Struktur Ekonomi	II-15
3. PDRB Perkapita	II-20
4. Indeks Gini	II-21
5. Laju Inflasi	II-23
6. Indeks Pembangunan Manusia	II-23
7. Kemiskinan	II-31
8. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	II-33
9. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	II-35

C. Aspek Daya Saing Daerah	II-35
1. Nilai Tukar Petani	II-35
2. Klasifikasi Tingkat Perkembangan Desa	II-37
3. Rasio Ketergantungan	II-38
D. Aspek Pelayanan Umum	II-40
1. Layanan Umum Urusan Wajib Dasar	II-40
a. Bidang Pendidikan	II-40
b. Bidang Kesehatan	II-55
c. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	II-75
d. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	II-77
e. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	II-81
f. Bidang Sosial	II-89
2. Layanan Umum Urusan Wajib Non Dasar	II-94
a. Bidang Tenaga Kerja	II-94
b. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II-100
c. Bidang Pangan	II-108
d. Bidang Pertahanan	II-111
e. Bidang Lingkungan Hidup	II-113
f. Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	II-116
g. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	II-120
h. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	II-124
i. Bidang Perhubungan	II-126
j. Bidang Komunikasi dan Informatika	II-131
k. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	II-133
l. Bidang Penanaman Modal.....	II-135
m. Bidang Kepemudaan dan Olahraga	II-137
n. Bidang Statistik	II-138
o. Bidang Persandian	II-139

p.	Bidang Kebudayaan	II-139
q.	Bidang Perpustakaan	II-142
r.	Bidang Kearsipan.....	II-144
3.	Layanan Umum Urusan Pilihan	II-144
a.	Bidang Kelautan dan Perikanan	II-144
b.	Bidang Pertanian	II-146
c.	Bidang Pariwisata	II-154
d.	Bidang Perdagangan	II-159
g.	Bidang Perindustrian	II-160
h.	Bidang Transmigrasi	II-166
4.	Penunjang Urusan Pemerintahan	II-167
a.	Fungsi Penunjang Perencanaan	II-167
b.	Fungsi Penunjang Keuangan.....	II-168
c.	Fungsi Penunjang Pengawasan	II-171
d.	Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	II-175
e.	Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan	II-179
f.	Fungsi Penunjang Pelayanan Urusan Pemerintahan	II-181

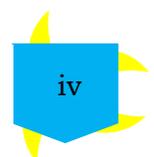
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

A.	Kinerja Keuangan Daerah Tahun 2013-2017.....	III-3
1.	Kinerja Pelaksanaan APBD	III-4
a.	Pendapatan Daerah	III-4
b.	Belanja Daerah.....	III-8
c.	Pembiayaan Daerah	III-11
2.	Analisis Keuangan Daerah	III-13
B.	Neraca Daerah dan Rasio Keuangan	III-25

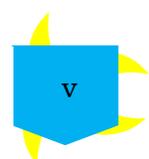
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

A.	Lingkungan Strategis	IV-3
1.	Lingkungan Globa.....	IV-3
2.	Lingkungan Nasional.....	IV-4

B. Permasalahan Pembangunan	IV-6
1. Pelayanan Umum Urusan Wajib Dasar	IV-6
2. Pelayanan Umum Urusan Wajib Non-Dasar	IV-8
3. Pelayanan Umum Urusan Pilihan	IV-11
4. Penunjang Urusan Pemerintahan	IV-12
C. Isu-Isu Strategis	IV-13
1. Kemiskinan	IV-13
2. Kualitas Sumber Daya Manusia	IV-15
3. Ekonomi Kerakyatan	IV-15
4. Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik	IV-17
 BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN	
A. Visi Pembangunan Daerah	V-3
B. Misi Pembangunan Daerah	V-3
1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya	V-4
2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan	V-4
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	V-5
C. Tujuan dan Sasaran	V-5
1. Tujuan dan sasaran misi 1 “Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya”	V-5
2. Tujuan dan sasaran misi 2 “Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan”	V-6
3. Tujuan dan sasaran Misi 3 “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas”	V-6
 BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
A. Strategi	VI-3
1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya	VI-3
2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan	VI-3



3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.....	VI-4
B. Arah Kebijakan	VI-8
1. Arah Kebijakan Pembangunan Tahunan dan Program Prioritas dalam RPJMD Tahun 2018-2023	VI-8
2. Arah Pengembangan Wilayah berbasis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Temanggung	VI-15
a. Pengembangan Wilayah Terpadu di Kab. Temanggung.....	VI-19
b. Rencana Pengelolaan Kawasan Agropolitan	VI-40
c. Kawasan Strategis Ekonomi Cepat Tumbuh di Kabupaten Temanggung.....	VI-40
d. Pengendalian Pemanfaatan Ruang.....	VI-45
BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	
A. Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2018-2023.....	VII-3
B. Indikasi Rencana Program Prioritas Perangkat Daerah	VII-13
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	
BAB IX PENUTUP	



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Temanggung	II-3
Tabel 2.2	Pembagian Wilayah Berdasarkan Ketinggian Kabupaten Temanggung	II-4
Tabel 2.3	Luas Lahan Sawah Menurut Kecamatan (Ha) Kabupaten Temanggung	II-8
Tabel 2.4	Luas Lahan Bukan Sawah Menurut Kecamatan (Ha) Kabupaten Temanggung	II-9
Tabel 2.5	Sebaran Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kepadatan Penduduk di Tiap Kecamatan, Tahun 2017	II-11
Tabel 2.6	Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017	II-12
Tabel 2.7	Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Per Kec. Kabupaten Temanggung Tahun 2017	II-13
Tabel 2.8	Pertumbuhan Ekonomi Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2017	II-14
Tabel 2.9	Nilai PDRB Tahun 2014-2017 Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Temanggung	II-16
Tabel 2.10	Nilai PDRB Tahun 2014-2017 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kabupaten Temanggung	II-17
Tabel 2.11	Pertumbuhan Ekonomi per Kategori Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017 (persen)	II-19
Tabel 2.12	PDRB Perkapita Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017	II-20
Tabel 2.13	PDRB Perkapita ADHB Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013 – 2017 (dalam Juta Rupiah)	II-21
Tabel 2.14	Indeks Gini Kabupaten Temanggung 2013-2017	II-22
Tabel 2.15	Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2017	II-23
Tabel 2.16	IPM dan Peringkat IPM Kabupaten/Kota di Eks Karesidenan Kedu, Tahun 2013-2017	II-24
Tabel 2.17	Perkembangan IPM Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017	II-25
Tabel 2.18	Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan di Kabupaten Temanggung, 2017	II-34
Tabel 2.19	Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Temanggung Tahun 2013 – 2017	II-36

Tabel 2.20	Klasifikasi Tingkat Perkembangan Desa di Kabupaten Temanggung Tahun 2013 – 2017	II-38
Tabel 2.21	Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2017	II-40
Tabel 2.22	Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2017	II-41
Tabel 2.23	Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017	II-42
Tabel 2.24	Angka Partisipasi Murni Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017	II-43
Tabel 2.25	Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017	II-44
Tabel 2.26	Angka Putus Sekolah (APtS) Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017	II-45
Tabel 2.27	Angka Kelulusan SD/MI, SMP/MTs dan Pendidikan Kesetaraan Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017	II-56
Tabel 2.28	Persentase Angka Melanjutkan SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017	II-47
Tabel 2.29	Rasio Ketersediaan Sekolah Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017	II-47
Tabel 2.30	Rasio Guru dan Murid Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017	II-49
Tabel 2.31	Angka Melek Huruf Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017	II-51
Tabel 2.32	Jumlah Guru Memiliki Kualifikasi S1/D4, S2 atau lebih Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017	II-52
Tabel 2.33	Persentase Ruang Kelas Kondisi Baik	II-54
Tabel 2.34	Persentase Sekolah Terakreditasi Minimal B Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017	II-54
Tabel 2.35	Angka Harapan Hidup Kab. Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2017	II-55
Tabel 2.36	Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017	II-57
Tabel 2.37	Kondisi Status Gizi Balita Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017	II-58

Tabel 2.38	Prevalensi Stunting Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017	II-58
Tabel 2.39	Presentase Rumah Tangga Yang Memiliki Jamban Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017	II-60
Tabel 2.40	Angka Kematian Balita Per 1.000 Kelahiran Hidup Kab. Temanggung dan Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2013-2017	II-60
Tabel 2.41	Angka Kematian Neonatus Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017	II-61
Tabel 2.42	Rasio Posyandu dan Balita Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017	II-61
Tabel 2.43	Jumlah dan Rasio Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Pos Kesehatan Desa (PKD) Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017	II-62
Tabel 2.44	Rasio Rumah Sakit Per jumlah Penduduk Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017	II-63
Tabel 2.45	Jumlah dan Rasio Dokter per Satuan Penduduk Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017	II-64
Tabel 2.46	Presentase Tenaga Kesehatan yang memenuhi Standar Kompetensi di Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017	II-65
Tabel 2.47	Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah terakreditasi di Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017	II-66
Tabel 2.48	Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017	II-67
Tabel 2.49	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017	II-67
Tabel 2.50	Cakupan Desa UCI (Universal Child Immunization) Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017	II-68
Tabel 2.51	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan (%) Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017	II-59
Tabel 2.52	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017	II-69
Tabel 2.53	Cakupan Kunjungan Bayi Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017	II-70
Tabel 2.54	Cakupan Ibu Hamil K4 Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017	II-70



Tabel 2.55	Cakupan Kunjungan Nifas Kabupaten Temanggung, Tahun 2013 - 2017	II-71
Tabel 2.56	Prevalensi Penyakit Tidak Menular Kabupaten Temanggung, Tahun 2013 dan 2017	II-72
Tabel 2.57	Penemuan Kasus HIV Kabupaten Temanggung, Tahun 2013 dan 2017	II-73
Tabel 2.58	<i>Incident Rate (IR)</i> DBD per 100.000 penduduk di Kabupaten Temanggung, Tahun 2013 dan 2017	II-73
Tabel 2.59	Persentase PHBS Rumah Tangga Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017	II-74
Tabel 2.60	Jalan Kabupaten Berkondisi Mantap Tahun 2013-2017	II-75
Tabel 2.61	Jembatan Kabupaten Berkondisi Baik Tahun 2013-2017	II-75
Tabel 2.62	Daerah Irigasi Kabupaten Berkondisi Baik di Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017	II-76
Tabel 2.63	Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai Rencana Tata Ruang Tahun 2013-2017	II-77
Tabel 2.64	Rumah yang Terlayani Air Bersih Layak Tahun 2013-2017	II-78
Tabel 2.65	Persentase Luasan Kumuh Permukiman Perkotaan Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017	II-78
Tabel 2.66	Backlog Rumah di Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017	II-79
Tabel 2.67	Jumlah Daya Tampung TPS Terhadap Jumlah Penduduk Kabupaten Temanggung, Tahun 2013 – 2017	II-80
Tabel 2.68	Persentase Pelayanan Drainase Skala Kawasan / Kota Sehingga Tidak Terjadi Genangan Kabupaten Temanggung, Tahun 2013 – 2017	II-80
Tabel 2.69	Tingkat Kriminalitas di Kabupaten Temanggung, Tahun 2013 – 2017	II-82
Tabel 2.70	Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017	II-83
Tabel 2.71	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017	II-83
Tabel 2.72	Cakupan Penanganan Bencana Kebakaran Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017	II-84
Tabel 2.73	Cakupan Penegakan Perda dan Perbup Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2018	II-85

Tabel 2.74	Rasio Petugas Satpol PP Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2018	II-86
Tabel 2.75	Prosentase Desa/Kelurahan yang Mendapatkan Pemahaman Wawasan Kebangsaan Tahun 2013-2017	II-87
Tabel 2.76	Persentase Desa/Kelurahan yang telah mendapatkan Pembinaan Pencegahan, Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2013-2017	II-87
Tabel 2.77	Persentase Jumlah SMP, SMA/MA/SMK dan Perguruan Tinggi yang telah Mendapatkan Pembinaan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2013-2017	II-88
Tabel 2.78	Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2015-2017	II-89
Tabel 2.79	Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2015-2017	II-89
Tabel 2.80	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Penyandang Masalah Pencegahan, Kesejahteraan Sosial di Luar Panti Sosial Tahun 2013-2017	II-91
Tabel 2.81	Persentase PMKS yang memperoleh Bantuan sosial Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017	II-92
Tabel 2.82	Persentase Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017	II-93
Tabel 2.83	Jumlah Kejadian Bencana Menurut Jenis Bencana Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017	II-93
Tabel 2.84	Daftar jumlah pendaftar dan peserta pelatihan kerja	II-96
Tabel 2.85	Tenaga Kerja yang Mendapat Upah Sesuai UMK di Kabupaten Temanggung Tahun 2012-2017	II-98
Tabel 2.86	Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017	II-99
Tabel 2.87	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017	II-100
Tabel 2.88	Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017	II-101
Tabel 2.89	Persentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017	II-102
Tabel 2.90	Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2017	II-107
Tabel 2.91	Presentase Keluarga Sejahtera Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017	II-108



Tabel 2.91	Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017	II-121
Tabel 2.94	Jumlah Bidang Lahan Bersertifikat Kabupaten Temanggung, Tahun 2013 – 2017	II-124
Tabel 2.99	Nilai Tingkat Kepatuhan Penyelenggaraan Layanan Publik Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017	II-130
Tabel 2.109	Persentase Desa yang Cepat berkembang berdasarkan Evaluasi Perkembangan Desa (%)	II-137
Tabel 2.112	Angkat TFR Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017	II-139
Tabel 2.116	Presentase Terminal Tipe C Yang Aktif dan Kondisi Baik Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017	II-141
Tabel 2.121	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2013-2017	II-145
Tabel 2.124	Jumlah BPR/LKM Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017	II-148
Tabel 2.127	Laju Investasi Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017	II-150
Tabel 2.129	Jumlah Perolehan Medali Ajang Olahraga Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017	II-151
Tabel 2.132	Cagar Budaya dan Sejarah yang Dilestarikan di Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017	II-154
Tabel 2.135	Presentase Perpustakaan Aktif Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017	II-156
Tabel 3.1	Realisasi Pendapatan Daerah Dalam APBD Kabupaten Temanggung, Tahun 2013 – 2017	III-4
Tabel 3.2	Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017	III-11
Tabel 3.3	Derajat Desentralisasi Fisikal Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017	III-16
Tabel 3.9	Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017	III-22
Tabel 3.12	Difisit Riil Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017	III-26
Tabel 3.15	Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017	III-30
Tabel 3.20	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018	III-38

Tabel 5.1	Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2018-2023	V-1
Tabel 6.1	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah Tahun 2018-2023	VI-1
Tabel 7.1	Proyeksi Pendapatan Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	VII-3
Tabel 7.2	Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	VII-9
Tabel 7.3	Proyeksi Belanja Pembiayaan Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	VII-11
Tabel 7.4	Indikasi Rencana Program Prioritas Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	VII-13
Tabel 8.1	Indikator Kinerja Tujuan Sebagai Indikator Kinerja Utama Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	VIII-1
Tabel 8.2	Indikator Kinerja Sasaran Sebagai Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	VIII-3

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagian Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RPJMD	I-4
Gambar 1.2	Hubungan Antar Dokumen Perencanaan	I-8
Gambar 2.1	Peta Curah Hujan Kabupaten Temanggung	II-5
Gambar 2.2	Luas Penggunaan Lahan Kabupaten Temanggung	II-7
Gambar 2.3	Perbandingan Gini Rasio Kabupaten Temanggung dengan Kab/Kota se-Eks Karesidenan Kedu, Tahun 2011-2015	II-20
Gambar 2.4	Rata-Rata Pertumbuhan IPM per Tahun (Tahun 2013-2017) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah	II-24
Gambar 2.5	Peta Tematik Angka Harapan Hidup (AHH) Menurut Kabupaten/Kota se Eks Karesidenan Kedu, 2017	II-26
Gambar 2.6	Peta Tematik Angka Rata-Rata Lama Sekolah (ARLS) Menurut Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota di Eks Karesidenan Kedu, Tahun 2017	II-27
Gambar 2.7	Peta Tematik Angka Harapan Lama Sekolah (AHLs) Menurut Kabupaten/Kota di Eks Karesidenan Kedu, Tahun 2017	II-29
Gambar 2.8	Peta Tematik Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan Menurut Kabupaten/Kota se Eks Karesidenan Kedu, Tahun 2017	II-30
Gambar 2.9	Perkembangan IPM dan Pertumbuhan Ekonomi (Tahun Dasar 2010) Kabupaten Temanggung dan Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2013-2017	II-31
Gambar 2.10	Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017	II-32
Gambar 2.11	Perkembangan P0, P1 dan P2 di Kab. Temanggung, Tahun 2013-2017	II-34
Gambar 2.12	Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Temanggung Tahun 2012-2017	II-35
Gambar 2.13	Rasio Ketergantungan (dependency ratio) Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017	II-42
Gambar 2.14	Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Temanggung dan Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2013-2017	II-62
Gambar 2.17	Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Temanggung, Tahun 2012-2017	II-105

Gambar 2.18	Jumlah Penduduk Bekerja Kabupaten Temanggung, Tahun 2012-2017	II-106
Gambar 2.19	Persentase pencari kerja yang dilatih berdasarkan basis pelatihan Kabupaten Temanggung, Tahun 2014-2017	II-107
Gambar 2.20	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan di Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017	II-108
Gambar 2.21	Persentase Pekerja/Buruh yang menjadi peserta program BPJS Kabupaten Temanggung, Tahun 2014-2017	II-109
Gambar 2.22	Persentase Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017	II-110
Gambar 2.23	Partisipasi perempuan di lembaga Pemerintah di Kabupaten Temanggung, Tahun 2012-2017	II-111
Gambar 2.24	Partisipasi perempuan di lembaga swasta di Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017	II-112
Gambar 2.25	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017	II-115
Gambar 2.30	Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017	II-118
Gambar 2.31	Ketersediaan Energi dan Protein per Kapita di Kab. Temanggung, Tahun 2013-2017	II-122
Gambar 2.32	Peta Komposit Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung Tahun 2017.....	II-123
Gambar 6.1	Arah Kebijakan Pembangunan Tahunan dalam RPJMD Tahun 2018-2023	VI-1
Gambar 6.2	Peta Posisi Kabupaten Temanggung Sangat Strategis	VI-20
Gambar 6.3	Gambar Peta Pola Ruang Kabupaten Temanggung	VI-22
Gambar 6.4	Peta Struktur Ruang Kabupaten Temanggung.....	VI-23
Gambar 6.5	Peta Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Temanggung	VI-24
Gambar 6.7	Peta Kawasan Agropolitan Kabupaten Temanggung.....	VI-27
Gambar 6.8	Struktur Tata Ruang Kawasan Agropolitan PRINGKRAKAL	VI-31
Gambar 6.9	Peta Rencana Kawasan Agropolitan PRINGKRAKAL.....	VI-32
Gambar 6.10	Struktur Tata Ruang Kawasan Agropolitan PADUNGBANDULU.....	VI-35
Gambar 6.11	Peta Rencana Kawasan Agropolitan PADUNGBANDULU.....	VI-36

Gambar 6.12	Struktur Tata Ruang Kawasan Agropolitan KAGEM CABE TEMOYOREJO.....	VI-38
Gambar 6.13	Peta Rencana Kawasan Agropolitan KAGEM CABE TEMOYOREJO.....	VI-39
Gambar 6.14	Struktur Tata Ruang Kawasan Agropolitan TEMBOGOPANGGUNG	VI-42
Gambar 6.15	Peta Rencana Kawasan Agropolitan TEMBOGOPANGGUNG	VI-43
Gambar 6.16	Gambar Peta Rencana Kawasan Strategis Ekonomi Cepat Tumbuh Kabupaten Temanggung	VI-46



BAB I

PENDAHULUAN

PANEN TEMBAKAU di Lereng Gunung Sindoro



TEMANGGUNG

MAREM GANDEM

TENTREM



A. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah jangka menengah daerah tergambar dalam satu dokumen daerah yaitu dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa RPJMD adalah perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RPJMN dan RPJMD Provinsi.

Periode pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Temanggung tahun 2013-2018 telah berakhir. Periode pembangunan daerah Kabupaten Temanggung berikutnya tahun 2018-2023 dimulai sejak dilantikanya Bupati Temanggung HM. Al Khadziq dan Wakil Bupati Temanggung Drs. R. Heri Ibnu Wibowo pada tanggal 24 September 2018. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Temanggung berkewajiban menyusun dan menetapkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023 paling lambat 6 (enam) bulan setelah Bupati dan Wakil Bupati dilantik. RPJMD Kabupaten Temanggung tahun 2018-2023 merupakan transisi tahap pembangunan jangka menengah ketiga dan keempat pada periode RPJPD Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025.

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, RPJMD disusun dengan menggunakan empat pendekatan perencanaan pembangunan, meliputi pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas.

Untuk memenuhi kaidah-kaidah dan komponen perencanaan, maka penyusunan RPJMD Kabupaten Temanggung tahun 2018-2023 dibuat berdasarkan tahapan-tahapan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 dilakukan melalui tahapan kegiatan berikut:

1. Persiapan penyusunan RPJMD, meliputi :

- a) penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan Tim Penyusun RPJMD,
- b) orientasi mengenai RPJMD,
- c) penyusunan agenda kerja Tim Penyusun RPJMD,
- d) penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD,
- e) penyusunan rancangan teknokratik RPJMD.

2. Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD, mencakup :

- a) analisis gambaran umum kondisi Daerah,
- b) perumusan gambaran keuangan Daerah,
- c) evaluasi kinerja pembangunan daerah,
- d) telaah kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah,
- e) perumusan masalah pembangunan daerah dan isu strategis daerah beserta kebijakan umum, strategi, dan prioritas program pembangunan daerah berdasarkan kinerja tahun 2013-2018,
- f) perumusan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah,
- g) pelaksanaan curah pendapat dan konsultasi publik,
- h) penyelarasan prioritas program pembangunan daerah dengan kebijakan keuangan daerah, dan
- i) perumusan isu strategis Daerah.

3. Penyusunan rancangan awal RPJMD;

Tahap ini merupakan proses penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD dengan berpedoman pada visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih tahun 2018-2023, adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi:

- a) penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD,
- b) penjabaran visi dan misi Kepala Daerah,
- c) perumusan tujuan dan sasaran,
- d) perumusan strategi dan arah kebijakan,
- e) perumusan program pembangunan Daerah,
- f) perumusan program Perangkat Daerah, dan
- g) KLHS.

4. Pelaksanaan Musrenbang RPJMD;

Penyusunan RPJMD Kabupaten Temanggung tahun 2018-2023 juga melalui pembahasan intensif dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi dengan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah untuk tahun 2018-2023 terutama pada saat menentukan dan menetapkan target kinerja RPJMD Kabupaten Temanggung baik yang bersifat agregat maupun sektoral. Hasil pembahasan intensif tersebut selanjutnya disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, yang melibatkan seluruh unsur pemangku kepentingan pembangunan daerah dan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta rencana tata ruang wilayah.

Dalam pelaksanaannya, Musrenbang RPJMD melibatkan semua pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Temanggung mulai dari eksekutif, legislatif, organisasi profesi, perguruan tinggi, ormas, unsur pers dan lain-lain.

Pelaksanaan Musrenbang RPJMD selanjutnya menghasilkan rancangan akhir RPJMD Kabupaten Temanggung tahun 2018-2023.

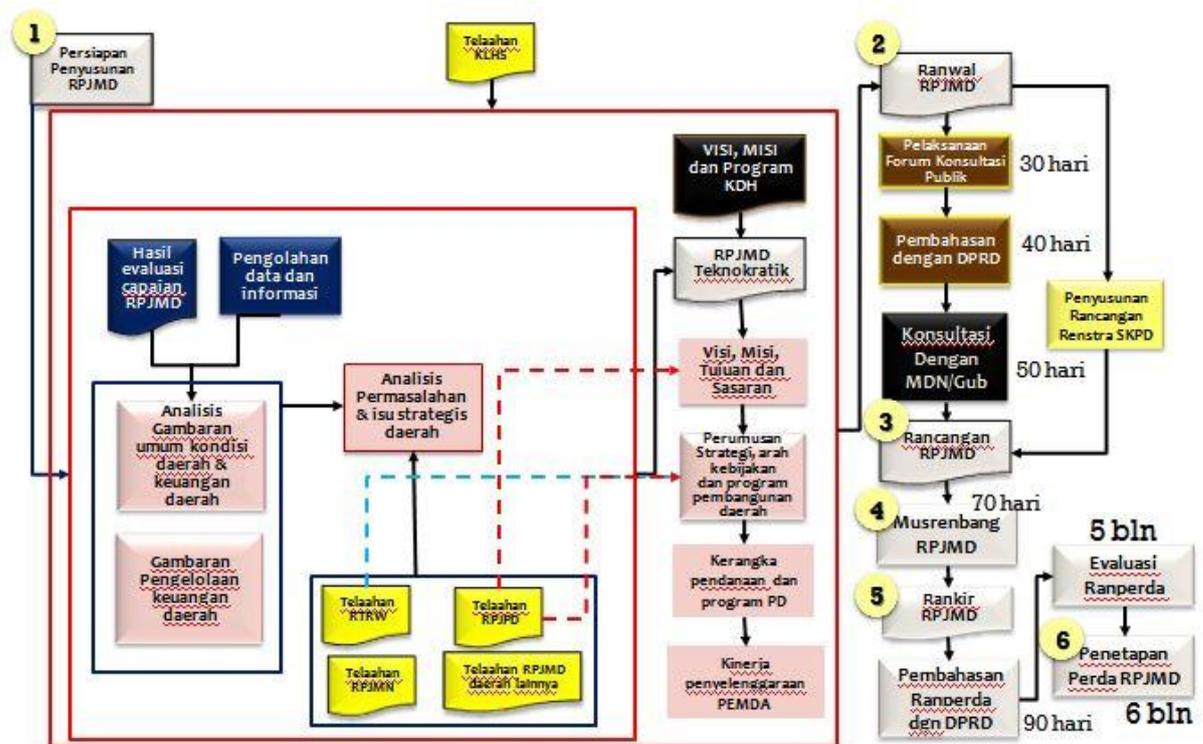
5. Perumusan Rancangan Akhir RPJMD;

Hasil kesepakatan yang dicapai pada pelaksanaan Musrenbang RPJMD digunakan sebagai bahan masukan untuk menyusun Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Temanggung tahun 2018-2023 kemudian akan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung untuk dibahas, dicermati bersama, dan mendapatkan persetujuan.

6. Penetapan RPJMD.

Memperhatikan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 maka setelah mendapatkan persetujuan DPRD, RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung.

RPJMD Tahun 2018-2023 yang disusun selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Secara lebih jelas alur penyusunan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 dijelaskan pada gambar berikut ini:



Gambar 1.1. Bagan Alir Tahapan Dan Tata Cara Penyusunan RPJMD

B. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan sebagai landasan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

C. Hubungan Antar Dokumen

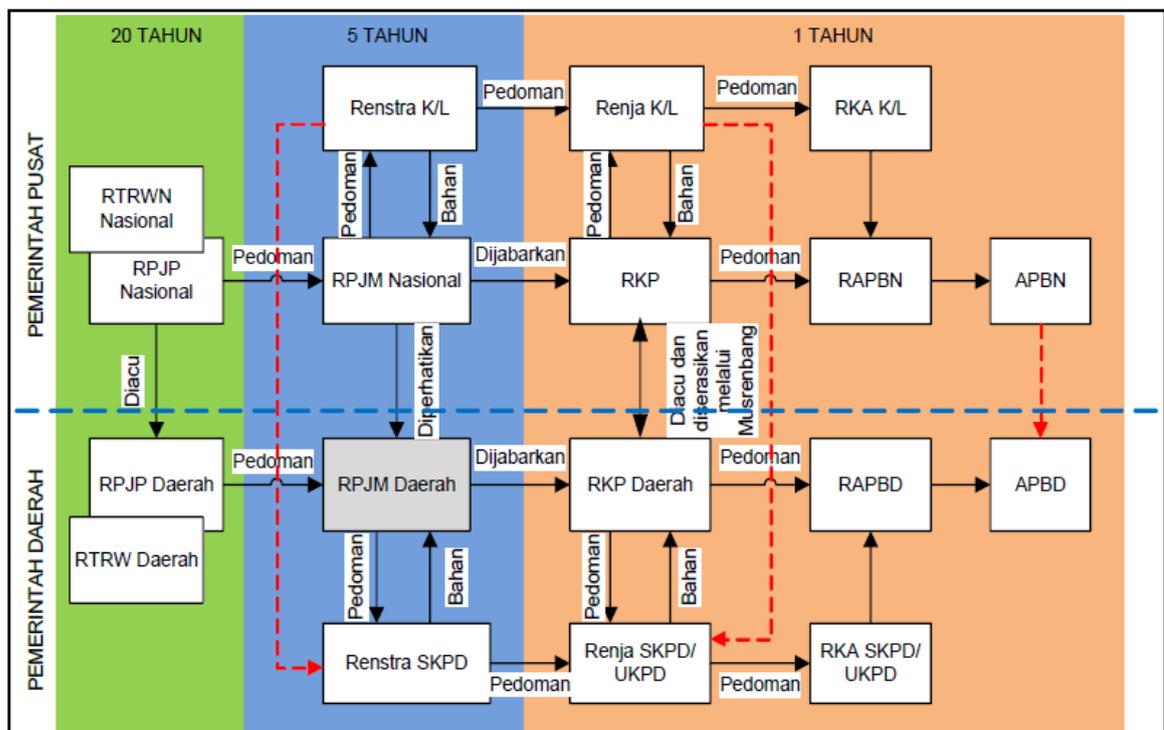
Melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka sebuah perencanaan pembangunan nasional harus menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Guna melaksanakan hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam membuat perencanaan pembangunan mengeluarkan 6

(enam) jenis dokumen perencanaan dan penganggaran yaitu RPJPD, RPJMD, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja PD (Renja-PD).

Dari segi waktu dokumen tersebut dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu dokumen perencanaan jangka panjang (20 tahun) terdiri dari RPJPD dan RTRW, perencanaan jangka menengah (5 tahun) terdiri dari RPJMD dan Renstra-PD, serta jangka pendek (1 tahun) terdiri dari RKPD dan Renja-PD.

RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih, dalam penyusunannya berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 dan RPJMN 2014-2019. RPJMD selanjutnya dijabarkan dalam RKPD dan menjadi pedoman bagi PD dalam menyusun Renstra PD, Renja PD dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Dokumen RKPD dan RKA-PD inilah yang selanjutnya disusun menjadi Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) setiap tahunnya. Dokumen RPJMD Kabupaten Temanggung tahun 2018-2023 juga akan menjadi acuan dalam penyusunan Renstra PD dan berfungsi sebagai pengendalian untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan selama periode 5 (lima) tahun mendatang dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta tata ruang wilayah.

Hubungan antar dokumen perencanaan dijelaskan lebih lanjut sebagaimana gambar berikut:



Gambar 1.2.
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

Dokumen RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 ini juga memperhatikan beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral di tingkat nasional dan provinsi. Beberapa dokumen rencana tersebut antara lain: 1) Agenda pembangunan *Sustainable Development Goals* (SDG's), 2) Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN PG), 3) *Grand Design* Reformasi Birokrasi, 4) Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Temanggung, 5) Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Temanggung (RAD PG), 6) RAD Pengurangan Resiko Bencana, 7) Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten Temanggung, 8) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, 9) Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan 10) Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) serta RTRW tingkat Nasional dan Provinsi Jawa Tengah.

Dokumen RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 ini juga memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta tata ruang wilayah sehingga pelaksanaan program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan sesuai dengan kebijakan dan strategi yang direncanakan. Daya dukung dan daya tampung lingkungan tetap terjaga, semakin baik dan berkelanjutan serta pemanfaatan ruang kawasan sesuai peruntukan ruang yang direncanakan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR).

D. Maksud Dan Tujuan

RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 disusun dengan maksud untuk:

1. Menjabarkan Visi, Misi, dan Program Bupati Temanggung;
2. Memberikan pedoman dan rujukan bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam penyusunan dokumen perencanaan serta melaksanakan perencanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
3. Memberikan pedoman dalam penyusunan instrumen-instrumen pengendalian, pengawasan, dan evaluasi pembangunan.

RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 disusun dengan tujuan untuk dapat digunakan sebagai:

1. Acuan bagi Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam menyusun perencanaan tahunan yaitu RKPD dan Renja PD;
2. Media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*);
3. Sebagai tolok ukur dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap Perangkat Daerah;
4. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan, perencanaan program, dan pelaksanaan pembangunan daerah;
5. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya daerah; dan

6. Menyelaraskan perencanaan program dengan rencana penganggaran.

E. Sistematika Penulisan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 memuat :

Bab I : Pendahuluan;

Bagian ini menguraikan gambaran umum penyusunan RPJMD yang terdiri dari latar belakang, dasar hukum penyusunan RPJMD, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;

Gambaran ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

Bab III : Gambaran Keuangan Daerah;

Bagian ini terdiri dari uraian tentang kinerja keuangan masa lalu meliputi kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Negara Daerah, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, dan proyeksi keuangan daerah 2018-2023.

Bab IV : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah;

Bagian ini menjelaskan tentang permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis pembangunan daerah 5 (lima) tahun kedepan.

Bab V : Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran;

Bagian ini menjelaskan dan menguraikan visi, dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, sebagai landasan perumusan tujuan dan sasaran, yang tertuju pada arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah pada periode berkenaan yang ditetapkan dalam RPJPD

Bab VI : Strategi dan Arah Kebijakan;

Bagian ini menguraikan strategi dan arah kebijakan yang merupakan rumusan perencanaan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Sedangkan rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Rumusan arah kebijakan dan program pembangunan akan menggambarkan keterkaitan antar bidang urusan pemerintah daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang

ditetapkan. Selain itu, rumusan arah kebijakan dibuat pertahun sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD tiap tahunnya.

- BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
Bagian ini menguraikan seluruh program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung selama 5 (lima) tahun, baik yang bersifat program prioritas dalam rangka pencapaian visi, misi, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal serta pemenuhan kebutuhan operasional yang disertai dengan indikator pencapaian target yang disajikan menurut urusan pemerintahan dan kerangka pendanaan yang mencakup analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikut serta prioritas utama.
- BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
Bagian ini menguraikan Gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi, dan misi Bupati dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing melalui indikator kinerja daerah
- BAB IX : Penutup;
Bagian ini menyampaikan dengan singkat harapan dari dokumen RPJMD yang telah ditetapkan.



BAB II

GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH

Kesenian Kuda Lumping (Jaran Kepang)



TEMANGGUNG

MAREM GANDEM

TENTREM



A. Aspek Geografi dan Demografi

1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Temanggung merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah 87.065 Ha dan berbatasan dengan beberapa kabupaten lain di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 2.1.
Batas wilayah administrasi Kabupaten Temanggung

No	Batas Wilayah	Kabupaten Lain	Kecamatan yang berbatasan
1	Sebelah Utara	Kabupaten Kendal dan Kabupaten Semarang	Bejen, Kandangan, Gemawang, Candiroto
2	Sebelah Selatan	Kabupaten Magelang	Kranggan, Selopampang, Tlogomulyo, Pringsurat
3	Sebelah Barat	Kabupaten Wonosobo	Kledung, Ngadirejo, Wonobojo
4	Sebelah Timur	Kabupaten Magelang dan Kabupaten Semarang	Kaloran, Kandangan, Kranggan, Pringsurat

Sumber : SIPD Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Secara administratif Kabupaten Temanggung terdiri dari 20 kecamatan, 266 Desa, 23 Kelurahan, 1.568 Dusun, 1.731 lingkungan, 1.610 RW, dan 5.389 RT dengan pusat pemerintahan berada di Kabupaten Temanggung.

2. Letak dan Kondisi Geografis

a. Posisi Astronomis

Secara astronomis, Kabupaten Temanggung berada pada koordinat $110^{\circ}23'-110^{\circ}46'30''$ Bujur Timur dan $7^{\circ}14'-7^{\circ}32'35''$ Lintang Selatan.

b. Posisi Geografis

Kabupaten Temanggung berada di tengah-tengah tiga pusat kegiatan ekonomi di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yaitu Semarang (77 Km), Yogyakarta (64 Km), dan Purwokerto (134 Km).

3. Topografi

a. Kemiringan Lahan

Topografi Wilayah Kabupaten Temanggung kompleks dan beragam, meliputi: dataran, perbukitan, pegunungan, lembah, dan gunung dengan kemiringan antara 0% - 70%. Pola topografi wilayah mirip sebuah cekungan raksasa yang terbuka di bagian Tenggara, sedangkan di bagian Selatan dan Barat dibatasi oleh Gunung Sumbing (3.340 m dpl) dan Gunung Sindoro (3.115 m dpl) dan di bagian Utara dibatasi oleh Gunung Jurang Grawah (2.450 m dpl) dan pegunungan kecil lainnya yang membujur dari Timur Laut ke arah Tenggara.

Berdasarkan klasifikasi kemiringan lahan di Kabupaten Temanggung meliputi: datar seluas 968 Ha (1,17%), bergelombang seluas 32.492 Ha (39,31%), curam seluas 31.232 Ha (37,88%), dan sangat curam seluas 22.373 Ha (21,64%).

Kondisi kemiringan lahan yang ada di Kabupaten Temanggung akan mempengaruhi perencanaan tata ruang wilayah karena daya dukung dan daya tampung lingkungan disetiap kawasan berbeda-beda, terlebih untuk kemiringan lahan di atas 40 % merupakan kawasan lindung yang harus dijaga, dipelihara dan dipertahankan.

b. Ketinggian Lahan

Wilayah Kabupaten Temanggung berada pada ketinggian 400 - >1.500 m dpl. Wilayah tersebut merupakan daerah lereng Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing yang terhampar dari sisi selatan, barat sampai dengan utara.

Apabila ditinjau berdasarkan klasifikasi ketinggian Kabupaten Temanggung terbagi dalam 5 (lima) wilayah ketinggian sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2.
Pembagian Wilayah Berdasarkan Ketinggian
Kabupaten Temanggung

No	Wilayah Ketinggian (meter) (dpl)	Luas (Ha)	Luas (%)	Kecamatan
1	0 - 500	8.538	9,77	Bejen, Candiroto, Gemawang, Kandangan, Kranggan, Temanggung, Tembarak, Selopampang, Pringsurat, Kaloran
2	500 - 750	38.421	43,99	Bejen, Candiroto, Gemawang, Jumo, Kedu, Kandangan, Parakan, Bulu, Temanggung, Kaloran, Kranggan, Pringsurat, Tembarak, Tlogomulyo, Selopampang, Tretep, Wonoboyo
3	750 - 1.000	20.106	23,02	Bejen, Tretep, Wonoboyo, Ngadirejo, Candiroto, Jumo, Gemawang, Kandangan, Selopampang, Kedu, Parakan, Kledung, Bulu, Kaloran, Pringsurat, Kandangan, Selopampang, Tembarak, Tlogomulyo
4	1.000 - 1.250	7.834	8,97	Tretep, Wonoboyo, Candiroto, Ngadirejo, Bansari, Kledung, Parakan, Bulu, Tlogomulyo, Tembarak, Selopampang, Bejen, Kandangan, Kaloran
5	1.250 - 3550	12.167	14,25	Tretep, Wonoboyo, Candiroto, Ngadirejo, Bansari, Kledung, Parakan, Bulu, Tlogomulyo, Tembarak, Selopampang
Jumlah		87.065	100	

Sumber : Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Dari tabel di atas, luas wilayah di Kabupaten Temanggung yang berada di atas 1.000 mdpl sekitar 20,001 Ha (23,22 %) merupakan kawasan pegunungan yang merupakan hulu DAS berfungsi sebagai penyangga tata air daerah hilir. Oleh karena itu, pengelolaan yang tepat di daerah hulu berdampak positif terhadap kelestarian sumberdaya lahan dan lingkungan di kawasan hilir.

Implementasi pemanfaatan tata ruang yang tepat di kawasan pegunungan memegang peranan penting tanpa mengurangi pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat, keasrian kawasan perdesaan, perluasan lapangan kerja, pelestarian lingkungan hidup.

Sejauh ini, pertanian di lahan pegunungan seringkali dituding sebagai penyebab terjadinya erosi dan longsor, karena pengelolaan yang tidak mengikuti kaidah pertanian yang baik sehingga 5 (lima) tahun ke depan konsep pertanian yang baik (*good agricultural practices*) tetap dilaksanakan di Kabupaten Temanggung.

4. Geologi

a. Struktur dan Karakteristik

Dilihat dari sisi geologi, lahan seluas 87.065 Ha jenis tanah di Kabupaten Temanggung meliputi: latosol coklat 28.952 Ha (33,25%), latosol coklat kemerahan 7.880 Ha (9,05%), latosol merah kekuningan 31.209 Ha (31,06%), regosol 16.874 Ha (19,38%) dan andosol 2.150 Ha (2,47%).

b. Potensi Kandungan

Selanjutnya apabila dilihat dari jenis batuan dan mineral yang ada di wilayah Kabupaten Temanggung dapat dikelompokkan menjadi: 1). Batuan andesit, 2). Batu gamping, 3). Batu kali, 4). Batu tras, 5). Bentonit, 6). Diatomae, 7). Kerikil, dan 8). Pasir.

Erosi dan tanah longsor sering terjadi di wilayah Kabupaten Temanggung yang berbukit dan bergunung, terutama pada tanah berpasir (Regosol atau Psamment) dan Andosol (Andisols). Kawasan rawan longsor direncanakan tetap dijadikan areal konservasi, sehingga bebas dari kegiatan pertanian, pembangunan perumahan dan infrastruktur yang merusak daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta tetap memperhatikan perencanaan dan pemanfaatan tata ruang.

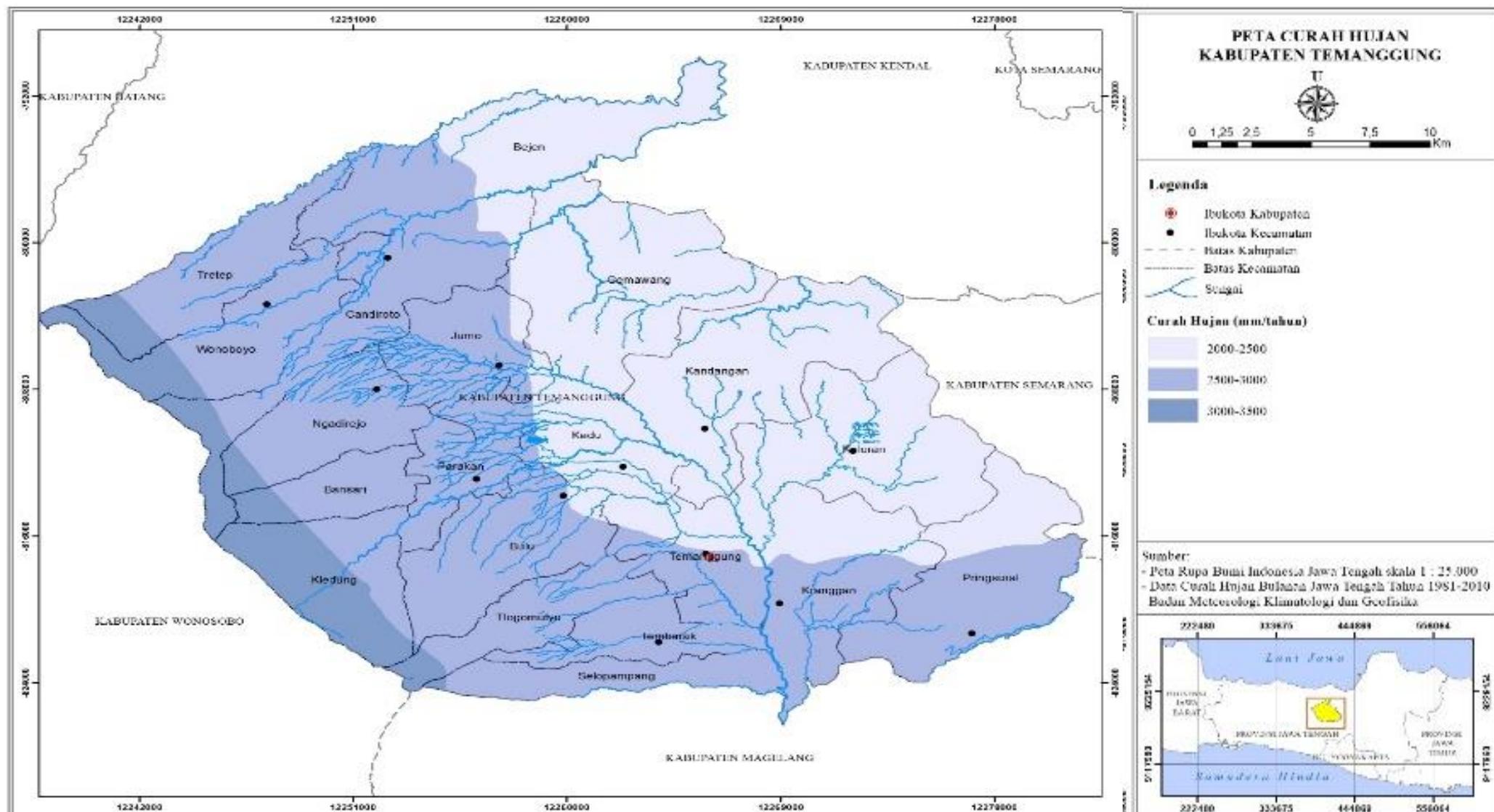
5. Klimatologi

Kabupaten Temanggung memiliki dua musim yaitu : musim kemarau antara bulan April sampai dengan September dan musim penghujan antara bulan Oktober sampai dengan Maret dengan curah hujan tahunan pada umumnya tinggi. Curah hujan di Kabupaten Temanggung berkisar antara 1000 – 3100 mm setahun. Curah hujan di dataran rendah lebih kecil dibandingkan pada dataran tinggi.

Daerah Kabupaten Temanggung pada umumnya berhawa dingin dimana udara pegunungan berkisar antara 20 °C - 30 °C. Daerah berhawa sejuk terutama di daerah Kecamatan Tretep, Kecamatan Bulu (lereng Gunung Sumbing), Kecamatan Tembarak, Kecamatan Ngadirejo serta Kecamatan Candiroto.

Secara spasial, berdasarkan data curah hujan bulanan Jawa Tengah Tahun 2006-2016 Badan Meteorologi dan Geofisika, wilayah Kabupaten Temanggung dengan Curah hujan antara 2500-3500 mm/tahun berada di wilayah dengan morfologi berbukit hingga bergunung. Curah hujan tinggi berada di sekitar Kecamatan Tretep, Wonobojo, Ngadirejo, Bansari, Kledung, Bulu, Tlogomulyo, sebagian Bejen, sebagian Pringsurat, sebagian Kranggan, sebagian Jumo, dan Parakan. Sedangkan curah hujan dengan nilai 2000-2500 mm/tahun berada di area Kecamatan Kaloran, Kandangan, Gemawang, sebagian Kedu dan sebagian Bejen.

Curah hujan yang tinggi di beberapa kawasan berpengaruh pada rencana tata ruang terlebih perencanaan kawasan peruntukan pertanian yang masih menjadi tumpuan sebagian besar masyarakat Kabupaten Temanggung dan curah hujan tahunan >2000 mm/tahun berpeluang besar menimbulkan erosi, apalagi di wilayah pegunungan yang lahannya didominasi oleh berbagai jenis tanah.



Gambar 2.1.
Peta Curah Hujan Kabupaten Temanggung

6. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan menurut kecamatan di Kabupaten Temanggung berdasarkan data Kabupaten Temanggung Dalam Angka Tahun 2018, didominasi oleh lahan pertanian bukan sawah. Penggunaan lahan menurut kecamatan di Kabupaten Temanggung terbagi atas tiga penggunaan lahan yakni lahan sawah, pertanian bukan sawah, dan bukan pertanian. Penggunaan lahan menurut kecamatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2.3.
Luas Lahan Sawah Menurut Kecamatan (Ha)
Kabupaten Temanggung

No.	Kecamatan	Lahan Sawah (Ha)		
		Irigasi	Non Irigasi	Total
1	Parakan	1.222	3	1.225
2	Kledung	247	-	247
3	Bansari	538	81	619
4	Bulu	1.304	60	1.364
5	Temanggung	1.890	-	1.890
6	Tlogomulyo	371	3	374
7	Tembarak	752	-	752
8	Selopampang	769	21	790
9	Kranggan	1.412	10	1.422
10	Pringsurat	459	180	639
11	Kaloran	1.363	73	1.436
12	Kandangan	1.298	218	1.516
13	Kedu	2.178	12	2.190
14	Ngadirejo	1.484	-	1.484
15	Jumo	1.250	28	1.278
16	Gemawang	642	0	642
17	Candiroto	1.187	8	1.195
18	Bejen	563	115	678
19	Trtep	57	-	57
20	Wonobojo	802	-	802
	Kab. Temanggung	19.788	812	20.600

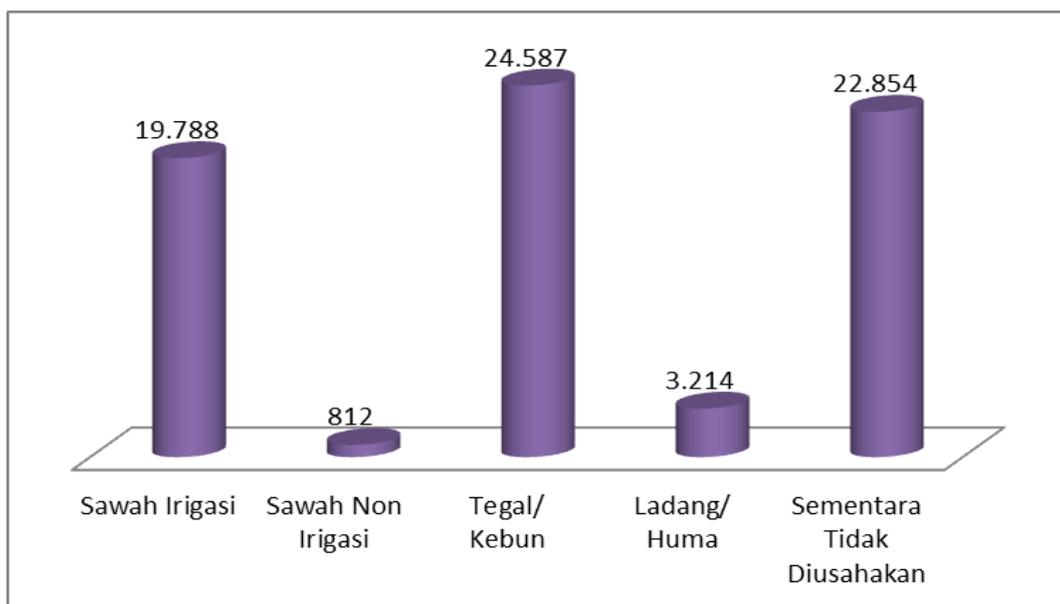
Sumber : Kabupaten Temanggung Dalam Angka Tahun 2018

Berdasarkan tabel tersebut, lahan sawah total di Kabupaten Temanggung adalah 20.600 Ha dengan luasan sawah irigasi 19.788 Ha dan sawah non irigasi 812 Ha.

Tabel 2.4.
Luas Lahan Bukan Sawah Menurut Kecamatan (Ha)
Kabupaten Temanggung

No	Kecamatan	Lahan Kering (Ha)		
		Tegal/ Kebun	Ladang/ Huma	Sementara Tidak Diusahakan
1	Parakan	474	-	130
2	Kledung	2.124	-	3
3	Bansari	826	-	27
4	Bulu	2.060	-	449
5	Temanggung	315	-	30
6	Tlogomulyo	1.617	-	25
7	Tembarak	729	-	881
8	Selopampang	562	-	71
9	Kranggan	1.747	-	1.445
10	Pringsurat	1.526	-	2.200
11	Kaloran	2.526	-	1.591
12	Kandangan	1.528	2.629	727
13	Kedu	685	-	66
14	Ngadirejo	1.270	-	1.290
15	Jumo	125	-	791
16	Gemawang	1.340	-	2.613
17	Candiroto	424	-	3.825
18	Bejen	1.653	-	3.986
19	Tretep	2.304	-	787
20	Wonoboyo	752	585	1.917
	Kab. Temanggung	24.587	3.214	22.854

Sumber : Kabupaten Temanggung Dalam Angka Tahun 2018



Sumber : Dalam Angka Tahun 2018 Kabupaten Temanggung

Gambar 2.2.
Luas Penggunaan Lahan Kabupaten Temanggung

Kondisi lahan di Kabupaten Temanggung sebagian besar dimanfaatkan untuk pertanian lahan kering (tegal/ kebun) sebesar 24.587 Ha dan sawah sebesar 20.600 Ha. Kondisi masyarakat yang secara turun temurun berprofesi sebagai petani menjadikan luasan lahan pertanian lebih banyak dibandingkan luasan lahan bagi peruntukkan yang lain. Sedangkan hutan yang ada di Kabupaten Temanggung dapat dibedakan menjadi 2 (dua) berdasarkan kepemilikannya. Hutan dibedakan menjadi hutan negara dan hutan rakyat.

Dalam RTRW Kabupaten Temanggung, sebagian besar lahan sawah tetap dipertahankan dan masuk dalam kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) yang tidak dapat dialihfungsikan menjadi kegiatan non pertanian kecuali untuk kepentingan umum.

7. Hidrologi

Wilayah Kabupaten Temanggung termasuk dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Progo (Sub DAS Progo Hulu) dan DAS Bodri. Sesuai dengan keadaan wilayahnya Kabupaten Temanggung kaya akan mata air dan sungai, beberapa sungai yang relatif besar antara lain Sungai Legung, Sungai Trocoh, Sungai Lutut, Sungai Dawe dan Sungai Pupu yang semuanya bermuara di Laut Jawa. Sedangkan Sungai Galeh, Sungai Guntur, Sungai Deres, Sungai Datar, Sungai Bulu, Sungai Gintung, Sungai Lungge, Sungai Kuas, Sungai Jambe, Sungai Groboh, Sungai Tingal dan Sungai Murung setelah menyatu dengan Sungai Progo kemudian mengalir kearah selatan dan bermuara di Samudra Hindia. Ekosistem DAS Kabupaten Temanggung memiliki manfaat ekologis, ekonomi, dan juga berfungsi edukasi. Namun beberapa kegiatan mengancam kelangsungan ekosistem DAS diantaranya penebangan pohon, sedimentasi, dan pertambangan galian C.

Untuk mengarahkan aliran air (*run off*) yang masuk ke badan sungai, perlu didukung jaringan drainase untuk mencegah genangan air dengan mengalirkan air aliran permukaan, sehingga kekuatan air mengalir tidak merusak tanah, tanaman, dan/atau bangunan konservasi lainnya. Di areal rawan longsor, pembuatan saluran drainase ditujukan untuk mengurangi laju infiltrasi dan perkolasi, sehingga tanah tidak terlalu jenuh air, sebagai faktor utama pemicu terjadinya longsor.

8. Demografi

a. Jumlah dan Sebaran Penduduk Perkecamatan

Jumlah penduduk pada Tahun 2017 menurut data konsolidasi bersih Kementerian Dalam Negeri adalah 772.289 jiwa, terdiri dari laki-laki 387.812 jiwa (50,22 %) dan perempuan 384.477 jiwa (49,78 %). Sedangkan jumlah rumah tangga sebanyak 196.385 rumah tangga dengan rata-rata penduduk per rumah tangga sebanyak 3,93 jiwa per rumah tangga.

Kepadatan penduduk tahun 2017 rata-rata 887 jiwa/km² dengan persebaran penduduk relatif merata. Sebaran jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan kepadatan penduduk di tiap kecamatan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.5.
Sebaran Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kepadatan Penduduk di Tiap Kecamatan, Tahun 2017

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Total	Sebaran (%)	Rasio jenis kelamin	Kepadatan (jiwa/km ²)
1	Bulu	24.212	23.149	47.361	6,13	105	1.100
2	Tembarak	15.506	14.984	30.490	3,95	103	1.136
3	Temanggung	40.017	41.190	81.207	10,52	97	2.432
4	Pringsurat	25.184	25.156	50.340	6,52	100	879
5	Kaloran	22.293	22.250	44.543	5,77	100	697
6	Kandangan	25.537	25.101	50.638	6,56	102	646
7	Kedu	28.952	28.321	57.273	7,42	102	1.638
8	Parakan	26.353	26.160	52.513	6,80	101	2.362
9	Ngadirejo	27.719	27.129	54.848	7,10	102	1.029
10	Jumo	14.886	14.633	29.519	3,82	102	1.007
11	Tretep	10.666	10.228	20.894	2,71	104	621
12	Candiroto	16.191	16.278	32.469	4,20	99	542
13	Kranggan	23.384	24.083	47.467	6,15	97	824
14	Tlogomulyo	11.373	11.200	22.573	2,92	102	909
15	Selopampang	9.585	10.236	19.821	2,57	94	1.146
16	Bansari	11.813	11.610	23.423	3,03	102	1.039
17	Kledung	13.785	13.264	27.049	3,50	104	840
18	Bejen	10.535	10.469	21.004	2,72	101	305
19	Wonobojo	13.217	12.860	26.077	3,38	103	593
20	Gemawang	16.604	16.176	32.780	4,24	103	488
Jumlah Total		387.812	384.477	772.289	100,00	101	887

Sumber : SIPD Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Temanggung lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan, yaitu sebesar 0,44%.

Dalam RTRW Kabupaten Temanggung arahan pemanfaatan ruang untuk kawasan permukiman tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan sehingga lingkungan perumahan dan kawasan permukiman tetap layak dan aman bagi kehidupan warga masyarakat Temanggung.

b. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan tingkat penambahan penduduk pertahun dalam jangka waktu tertentu. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Temanggung pada tahun 2017 sebesar 0,88%, masih dibawah laju pertumbuhan penduduk Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 0,99%. Perkembangan laju pertumbuhan penduduk selama 5 (lima) tahun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6.
Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Temanggung,
Tahun 2013-2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Laju pertumbuhan penduduk (‰)	0,98	0,96	0,93	0,90	0,88

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2018

c. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Komposisi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan dapat dilihat pada berikut ini :

Tabel 2.7.
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Per Kecamatan
Kabupaten Temanggung Tahun 2017

No	Kecamatan	Tingkat Pendidikan										Total
		Belum/ Tidak sekolah	Belum Tamat SD	SD	SLTP	SLTA	D I / D II	D III	D IV / S1	S2	S3	
1	Bulu	9.669	17.245	9.946	5.416	3.845	177	293	746	24	0	47.361
2	Tembarak	9.485	5.766	6.869	4.488	3.069	148	151	492	15	7	30.490
3	Temanggung	15.827	12.952	17.676	11.062	16.135	702	1.690	4.825	331	7	81.207
4	Pringsurat	17.945	4.848	12.677	8.230	5.462	202	231	717	27	1	50.340
5	Kaloran	16.571	5.616	10.507	6.879	3.979	239	174	560	14	4	44.543
6	Kandangan	20.988	7.444	10.504	6.524	3.948	252	241	705	28	4	50.638
7	Kedu	13.424	16.430	12.895	6.795	5.692	340	444	1.194	58	1	57.273
8	Parakan	16.521	10.436	9.298	6.296	7.302	313	680	1.571	75	21	52.513
9	Ngadirejo	11.597	10.648	16.328	8.824	5.671	304	440	1.010	24	2	54.848
10	Jumo	8.793	6.226	7.144	4.052	2.496	166	168	462	11	1	29.519
11	Tretep	6.151	5.415	6.053	2.568	525	44	42	93	2	1	20.894
12	Candiroto	5.323	10.909	8.533	3.959	2.657	233	272	571	12	0	32.469
13	Kranggan	13.586	9.280	8.806	8.086	6.120	246	307	986	46	4	47.467
14	Tlogomulyo	6.771	5.322	5.602	3.015	1.502	51	93	204	9	4	22.573
15	Selopampang	5.164	4.017	5.647	2.593	1.876	94	108	312	8	2	19.821
16	Bansari	3.193	10.223	4.953	3.074	1.507	70	111	286	6	0	23.423
17	Kledung	10.160	4.945	6.958	3.268	1.451	36	80	144	6	1	27.049
18	Bejen	6.213	3.224	6.367	3.248	1.535	103	96	210	8	0	21.004
19	Wonoboyo	7.360	5.001	8.256	3.655	1.403	106	97	192	4	3	26.077
20	Gemawang	10.676	8.422	8.178	3.699	1.396	102	84	214	7	2	32.780
Jumlah Total		215.417	164.369	183.197	105.731	77.571	3.928	5.802	15.494	715	65	772.289
Persentase		27,89	21,28	23,72	13,69	10,04	0,51	0,75	2,01	0,09	0,01	

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Dari Tabel di atas, tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah Tamat SD sebesar 183,197 jiwa atau 23,72%, disusul Tamat SLTP sebesar 105.731 jiwa atau 13,69%. Hal ini berbanding lurus dengan angka rata-rata lama sekolah yaitu 6,9 tahun. Untuk tamatan jenjang S1/S2/S3 masih relatif kecil yaitu sejumlah 16.274 jiwa atau 2,11%. Faktor yang mempengaruhi untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan S1/S2/S3 antara lain karena mahalnya biaya pendidikan.

B. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah perbandingan pencapaian kinerja perekonomian suatu daerah pada periode waktu tertentu terhadap periode waktu sebelumnya. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung dapat diketahui dari besaran PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) menurut harga konstan. Laju pertumbuhan ekonomi/PDRB Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah dan nasional 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.8.
Pertumbuhan Ekonomi Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2013-2017

PERTUMBUHAN EKONOMI	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017
Nasional	5,74	5,02	4,79	5,02	5,07
Prov. Jawa Tengah	5,14	5,42	5,4	5,27	5,27
Kab. Temanggung	5,20	5,03	5,24	4,98	4,68
Kab. Kebumen	4,57	5,80	6,29	4,97	4,89
Kab. Purworejo	4,94	4,49	5,12	5,12	5,14
Kab. Wonosobo	4,00	4,89	5,12	5,13	3,16
Kab. Magelang	5,91	4,88	5,35	5,37	5,06
Kota Magelang	6,04	4,9	5,07	5,17	5,18

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung 2018

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung pada tahun 2017 lebih rendah bila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Aktivitas perekonomian di Kabupaten Temanggung tetap berjalan namun mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena kontribusi sektor pertanian sebagai sektor yang dominan mengalami penurunan 1,17% sehingga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung. Untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi diperlukan daya ungkit sektor pertanian melalui pengembangan industri pengolahan berbasis produk pertanian lokal.

Jika dibandingkan dengan wilayah Eks Karesidenan Kedu yang meliputi 6 (enam) kabupaten, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung menempati posisi ke 5 (lima), lebih rendah dibandingkan Kota Magelang, Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Magelang dan Kabupaten Kebumen, namun lebih tinggi dari Kabupaten Wonosobo.

2. Struktur Ekonomi

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan memproduksi dari setiap lapangan usaha.

Selama lima tahun terakhir (2013-2017) struktur perekonomian Temanggung didominasi oleh 3 (tiga) kategori lapangan usaha, diantaranya: (a) Industri Pengolahan; (b) Pertanian, Kehutanan, dan (c) Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi terjadi di beberapa lapangan usaha yaitu pada Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Transportasi dan Pergudangan, Jasa Keuangan dan Asuransi dan Jasa Pendidikan. Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang paling menonjol terjadi di lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Informasi dan Komunikasi. Pada era industri 4.0, ini koneksi internet menjadi kebutuhan yang penting sehingga mendorong penjualan paket internet yang menjadi penunjang utama kategori tersebut. Dari 17 lapangan usaha ekonomi yang ada, seluruhnya mengalami pertumbuhan yang positif. Sembilan lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif sebesar lima hingga sepuluh persen. Sedangkan lapangan usaha lainnya tercatat mengalami pertumbuhan yang positif namun lebih rendah, yaitu kurang dari lima persen.

Dalam struktur ruang RTRW Kabupaten Temanggung, koneksitas kawasan dan antar wilayah sangat penting untuk kemudahan aksesibilitas barang dan jasa serta pergerakan penduduk untuk meningkatkan perekonomian kawasan dan masyarakat khususnya penduduk Temanggung.

Tabel 2.9.
 Nilai PDRB Tahun 2013-2017 Atas Dasar Harga Berlaku
 Kabupaten Temanggung

Kategori	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.477.229,66	3.734.880,55	4.191.112,83	4.473.537,13	4.576.312,64
1	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	3.284.990,64	3.526.969,95	3.955.969,84	4.223.379,67	4.309.622,67
	a. Tanaman Pangan	1.054.814,29	980.763,74	1.126.018,27	1.215.970,44	1.212.036,09
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	220.051,35	252.931,51	266.506,08	288.962,24	279.574,82
	c. Perkebunan Semusim	121.077,06	142.322,47	166.188,07	167.206,44	174.044,58
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	844.105,61	997.171,64	1.122.199,08	1.186.946,98	1.189.960,00
	e. Perkebunan Tahunan	420.795,97	492.395,92	537.555,83	581.659,64	607.499,10
	f. Peternakan	555.630,28	591.181,99	661.273,79	702.852,80	762.460,31
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	68.516,08	70.202,68	76.228,72	79.781,13	84.047,77
2	Kehutanan dan Penebangan Kayu	91.874,58	100.903,98	116.011,28	120.015,87	125.409,20
3	Perikanan	100.364,44	107.006,62	119.131,71	130.141,60	141.280,77
B	Pertambangan dan Penggalian	102.661,37	120.932,60	140.869,76	156.457,15	168.895,50
C	Industri Pengolahan	3.338.185,67	3.862.669,12	4.272.806,45	4.701.848,97	5.094.768,39
D	Pengadaan Listrik dan Gas	10.303,83	11.007,07	11.587,27	13.013,55	15.455,95
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10.687,03	11.574,60	12.127,79	12.813,06	13.702,29
F	Konstruksi	572.397,76	653.214,91	746.199,56	809.212,25	907.369,69
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.747.353,08	3.023.320,05	3.272.212,65	3.566.485,32	3.847.197,71
H	Transportasi dan Pergudangan	547.071,87	608.594,08	686.350,23	747.672,70	832.071,84
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	197.017,55	213.504,18	246.607,25	276.550,89	306.656,95
J	Informasi dan Komunikasi	181.440,43	200.781,14	201.264,64	213.859,58	247.563,85
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	402.243,87	457.785,68	512.164,62	569.008,46	621.146,06
L	Real Estate	97.770,15	109.485,78	120.585,15	130.154,37	143.469,16
M,N	Jasa Perusahaan	41.465,65	47.019,69	53.391,10	59.598,38	66.797,86
Kategori	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	398.121,54	428.090,15	467.468,30	505.212,67	533.605,62
P	Jasa Pendidikan	592.610,81	675.857,01	733.057,80	803.891,53	877.849,55
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	133.626,33	156.940,16	174.067,87	190.018,66	213.295,94
R,S,T,U	Jasa lainnya	238.215,65	276.796,63	297.838,41	335.138,34	367.010,00
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	13.088.402,25	14.592.453,38	16.139.711,67	17.564.473,01	18.833.169,01

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Nilai PDRB Kabupaten Temanggung Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2017 mencapai 18,83 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 1,30 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai 17,52 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha dan adanya inflasi, sebagaimana tabel diatas.

Tabel 2.10.
Nilai PDRB Tahun 2013-2017 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kabupaten Temanggung

Kategori	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.871.059,36	2.817.953,21	2.952.682,34	3.047.963,51	3.105.053,83
1	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	2.713.667,55	2.661.558,22	2.792.873,99	2.882.478,75	2.933.379,99
	a Tanaman Pangan	837.490,05	737.954,15	793.957,34	820.532,53	808.527,32
	b Tanaman Hortikultura Semusim	191.604,05	194.369,72	197.890,73	206.183,34	209.295,66
	c Perkebunan Semusim	112.679,49	119.103,14	129.107,10	124.662,84	129.768,07
	d Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	693.609,84	701.228,50	718.651,51	729.786,51	738.660,72
	e Perkebunan Tahunan	352.274,49	367.310,10	385.239,41	403.016,56	410.817,27
	f Peternakan	471.004,90	485.329,39	509.367,86	538.911,06	575.386,94
	g Jasa Pertanian dan Perburuan	55.004,74	56.263,23	58.660,04	59.385,91	60.924,01
Kategori	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

2	Kehutanan dan Penebangan Kayu	74.211,42	74.073,61	74.061,40	75.082,32	77.462,43
3	Perikanan	83.180,39	82.321,38	85.746,94	90.402,43	94.211,42
B	Pertambangan dan Penggalian	92.520,80	95.804,47	98.311,19	103.312,76	107.693,22
C	Industri Pengolahan	2.816.645,10	3.042.972,31	3.213.426,65	3.390.420,60	3.562.767,58
D	Pengadaan Listrik dan Gas	11.059,50	11.551,20	11.498,93	12.142,41	13.268,64
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10.288,14	10.492,18	10.708,90	11.076,26	11.623,42
F	Konstruksi	513.555,74	537.587,76	583.260,43	616.827,10	677.337,84
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.506.858,95	2.699.337,09	2.794.198,91	2.934.591,91	3.084.877,39
H	Transportasi dan Pergudangan	539.878,18	568.600,74	613.424,36	652.232,98	675.719,05
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	179.241,36	188.554,34	201.299,78	212.590,36	228.950,64
J	Informasi dan Komunikasi	177.729,90	201.372,33	217.689,74	228.831,23	253.041,57
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	334.178,70	359.101,23	387.625,77	417.733,22	437.364,84
L	Real Estate	93.685,54	99.757,63	106.710,74	112.914,98	121.778,81
M,N	Jasa Perusahaan	35.783,82	39.261,61	42.446,28	44.735,51	48.390,40
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	341.071,86	341.603,70	358.689,45	368.628,49	377.512,44
P	Jasa Pendidikan	442.804,76	486.466,65	516.481,64	547.866,88	575.205,44
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	110.154,37	123.929,28	130.646,25	140.356,69	154.280,08
R,S,T,U	Jasa lainnya	222.826,88	243.333,84	250.293,19	268.520,73	289.599,61
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	11.299.342,97	11.867.679,59	12.489.394,54	13.110.745,64	13.724.464,81

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Berdasarkan harga konstan 2010 pada tabel diatas, nilai PDRB Temanggung pada tahun 2017 meningkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha, tanpa ada pengaruh dari kenaikan harga (inflasi). Nilai PDRB Temanggung tahun 2017 atas dasar harga konstan 2010, mencapai 13,72 triliun rupiah. Angka tersebut naik dari 13,11 triliun rupiah pada tahun 2016.

Tabel 2.11.
Pertumbuhan Ekonomi per Kategori Kabupaten Temanggung
Tahun 2013-2017 (persen)

Kategori	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,80	-1,85	4,78	3,23	1,87
1	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	1,84	-1,92	4,93	3,21	1,77
	a Tanaman Pangan	-0,11	-11,89	7,59	3,35	-1,46
	b Tanaman Hortikultura Semusim	-0,19	1,44	1,81	4,19	1,51
	c Perkebunan Semusim	6,04	5,70	8,40	-3,44	4,10
	d Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	-0,04	1,10	2,48	1,55	1,22
	e Perkebunan Tahunan	3,92	4,27	4,88	4,61	1,94
	f Peternakan	5,80	3,04	4,95	5,80	6,77
	g Jasa Pertanian dan Perburuan	9,95	2,29	4,26	1,24	2,59
2	Kehutanan dan Penebangan Kayu	-0,01	-0,19	-0,02	1,38	3,17
3	Perikanan	2,18	-1,03	4,16	5,43	4,21
B	Pertambangan dan Penggalian	2,08	3,55	2,62	5,09	4,24
C	Industri Pengolahan	6,44	8,04	5,60	5,51	5,08
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7,08	4,45	-0,45	5,60	9,28
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-2,25	1,98	2,07	3,43	4,94
F	Konstruksi	4,13	4,68	8,50	5,76	9,81
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,84	7,68	3,51	5,02	5,12
H	Transportasi dan Pergudangan	11,41	5,32	7,88	6,33	3,60
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,14	5,20	6,76	5,61	7,70
J	Informasi dan Komunikasi	7,62	13,30	8,10	5,12	10,58
Kategori	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,09	7,46	7,94	7,77	4,70
L	Real Estate	8,52	6,48	6,97	5,81	7,85
M,N	Jasa Perusahaan	13,85	9,72	8,11	5,39	8,17
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,91	0,16	5,00	2,77	2,41
P	Jasa Pendidikan	8,97	9,86	6,17	6,08	4,99
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,79	12,51	5,42	7,43	9,92
R,S,T,U	Jasa lainnya	10,02	9,20	2,86	7,28	7,85
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5,20	5,03	5,24	4,98	4,68

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa selama tahun 2017 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 4,68 persen.

3. PDRB Perkapita

Secara konsepsional PDRB per kapita merupakan hasil bagi antara nilai nominal PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Semakin besar PDRB Perkapita suatu daerah dapat menggambarkan semakin tingginya tingkat kemakmuran penduduk daerah tersebut. PDRB perkapita merupakan nilai rata-rata pendapatan dari hasil seluruh sektor produksi. Perkembangan PDRB perkapita Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.12.
PDRB Perkapita Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017

Tahun	Atas Dasar Harga Berlaku		Atas Dasar Harga Konstan 2010	
	Nilai (Rp.)	Pertumbuhan (%)	Nilai (Rp.)	Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2013	17.882.505,18	9,46	15.438.137,93	4,18
2014	19.748.487,14	10,43	16.060.953,69	4,03
2015	21.641.442,46	9,59	16.746.799,37	4,27
2016	23.341.213,21	7,85	17.422.709,41	4,04
2017	24.810.094,42	6,29	18.080.083,48	3,77

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai PDRB selalu naik yang menunjukkan bahwa secara umum kesejahteraan penduduk Kabupaten

Temanggung dari tahun ke tahun semakin membaik, namun dari persentase pertumbuhan mengalami perlambatan pada tahun terakhir.

PDRB perkapita Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional ditampilkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.13.
PDRB Perkapita ADHB Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013 – 2017 (dalam Juta Rupiah)

Tahun	Temanggung	Jawa Tengah	Nasional (PDB)
(1)	(2)	(3)	(4)
2013	17.882.505,18	24.952.127,15	9.546.134,00
2014	19.748.487,14	27.599.082,11	10.569.705,30
2015	21.641.442,46	30.025.166,49	11.526.332,80
2016	23.341.213,21	31.077.240,10	12.406.774,10
2017	24.810.094,42	34.710.958,06	13.588.797,30

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Namun demikian data tersebut belum dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya, karena produk barang dan jasa yang dihasilkan di Kabupaten Temanggung tidak hanya dimiliki dan dinikmati oleh warga Temanggung saja, akan tetapi ada juga yang dimiliki dan dinikmati oleh penduduk dari luar Kabupaten Temanggung yang melakukan investasi di Kabupaten Temanggung. Disamping itu, angka pendapatan perkapita belum memperlihatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

4. Indeks Gini

Indeks Gini merupakan koefisien yang digunakan untuk mengukur ketimpangan atau ketidakrataan agregat yang dapat bervariasi antara 0 sampai 1. Koefisien Gini sama dengan 0 menunjukkan adanya pemerataan sepenuhnya, sedangkan koefisien Gini sama dengan 1 menunjukkan adanya ketidakmerataan distribusi pendapatan.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum cukup menjadi jaminan bahwa kesejahteraan masyarakat akan meningkat secara merata. Oleh karena itu, laju pertumbuhan ekonomi seyogyanya harus diiringi dengan pemerataan distribusi pendapatan agar hasil-hasil pertumbuhan tersebut dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain, sasaran pembangunan tidak hanya berhenti sampai dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi saja, melainkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan memperhitungkan pemerataan pendapatan serta pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Pertumbuhan ekonomi semakin berkualitas ketika semakin besar masyarakat yang terlibat dan menikmati hasil ekonomi produktif di dalam sistem perekonomian.

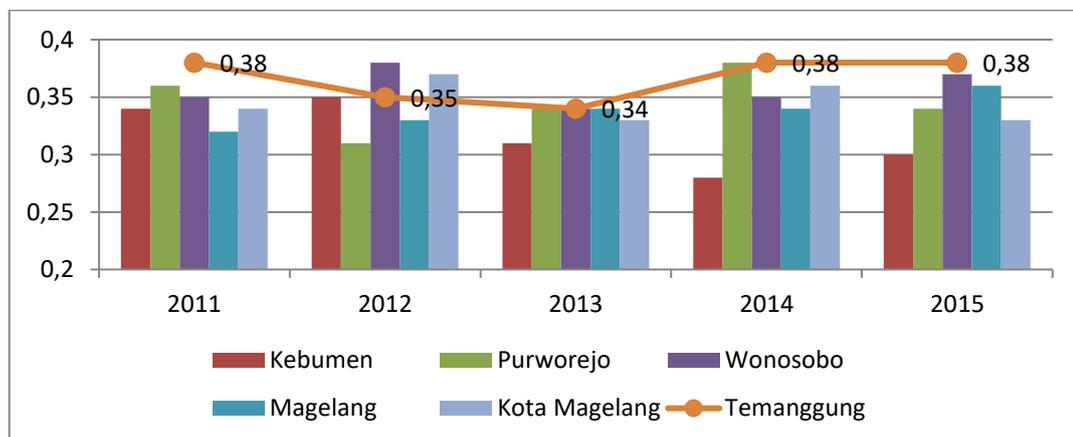
Tabel 2.14.
Indeks Gini Kabupaten Temanggung 2013-2017

Variabel	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Indeks Gini	0,34	0,38	0,38	n.a	n.a

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Temanggung Tahun 2016

Tabel di atas menunjukkan perkembangan Gini rasio sepanjang 2011-2015. Indeks gini mengalami penurunan sepanjang 2011-2013 yang dapat diartikan bahwa ketimpangan pendapatan antara masyarakat semakin kecil. Sebaliknya setelah tahun 2013, ketimpangan pendapatan semakin meningkat dari 0,34 menjadi 0,38 pada tahun 2014 dan 2015.

Adanya ketimpangan yang besar antara si kaya dan si miskin dapat mengindikasikan bahwa pembangunan di daerah tersebut masih belum berhasil karena hanya dinikmati oleh sebagian orang saja, terutama orang kaya. Sedangkan orang yang miskin akan semakin menderita karena adanya ketimpangan tersebut.



Sumber : BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2016

Gambar 2.3.
Perbandingan Gini Rasio Kabupaten Temanggung dengan Kabupaten/Kota Se Eks Karesidenan Kedu, Tahun 2011 – 2015

Berdasarkan gambar diatas dapat kita lihat bahwa perkembangan gini ratio di Kabupaten Temanggung relatif cukup tinggi dibandingkan dengan daerah se eks Karesidenan Kedu. Angka gini ratio yang lebih dari 0,5 mengindikasikan bahwa di wilayah tersebut ketimpangan distribusi pendapatannya tergolong tinggi, sebaliknya jika angka gini ratio kurang dari 0,4 maka dapat mengindikasikan bahwa di wilayah tersebut ketimpangan pendapatannya tergolong rendah. Angka gini ratio dari tahun 2011-2015 di Kabupaten Temanggung konsisten dibawah 0,4, mengandung arti bahwa ketimpangan pendapatan antar golongan masyarakat di Kabupaten Temanggung tergolong rendah. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa angka gini rasio pada tahun 2014 dan 2015 mengalami peningkatan yang menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan antar golongan masyarakat mengalami peningkatan.

5. Laju Inflasi

Inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas dan mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Kestabilan inflasi merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Laju inflasi mencerminkan kestabilan nilai jual mata uang rupiah. Hal ini bisa diamati dari kenaikan harga barang/jasa yang dikonsumsi masyarakat. Apabila terjadi kenaikan harga barang/jasa pada periode tertentu, maka barang/jasa yang diterima secara kuantitas akan berkurang atau jumlah yang diterima sama namun secara kualitas nilainya lebih rendah. Perkembangan inflasi selama 5 tahun terakhir.

Tabel 2.15.
Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Temanggung,
Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2017

No	Tahun	Temanggung	Jawa Tengah	Nasional
1	2013	7,01	7,99	8,33
2	2014	7,81	8,22	8,36
3	2015	2,74	2,73	3,35
4	2016	2,42	2,36	3,02
5	2017	3,12	3,71	3,61

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Jika diamati angka inflasi Kota Temanggung selama kurun waktu 5 tahun terakhir cukup fluktuatif. Tinggi rendahnya angka inflasi salah-satunya dipengaruhi oleh gejolak perubahan harga yang diantaranya disebabkan oleh ketersediaan atau stok barang yang tidak sesuai dengan jumlah permintaan dan juga karena adanya kenaikan biaya produksi misalnya kenaikan bahan baku maupun kenaikan biaya untuk pekerja. Inflasi terendah Kota Temanggung selama 5 tahun terakhir terjadi pada Tahun 2016 yaitu sebesar 2,42%.

6. Indeks Pembangunan Manusia

Salah satu indikator kesejahteraan masyarakat yang dikenal secara universal ditunjukkan dengan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI). IPM merupakan salah satu indikator yang dapat mewakili keterbandingan hasil pembangunan manusia antar daerah. Konsep pembangunan manusia sebagai ukuran pencapaian hasil pembangunan menempatkan manusia pada posisi yang sebenarnya yaitu manusia sebagai penerima akhir dari hasil-hasil pembangunan. Angka IPM mengindikasikan tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan.

IPM Kabupaten Temanggung 68,34 termasuk kategori sedang dan masih berada dibawah IPM Jawa Tengah. Ini menunjukkan bahwa pembangunan di Kabupaten Temanggung masih berada di bawah kemajuan pembangunan Jawa Tengah pada umumnya. Perbandingan IPM Kabupaten Temanggung dengan kabupaten/kota dalam regional eks karisidenan Kedu dan Jawa Tengah ditunjukkan pada tabel berikut ini:

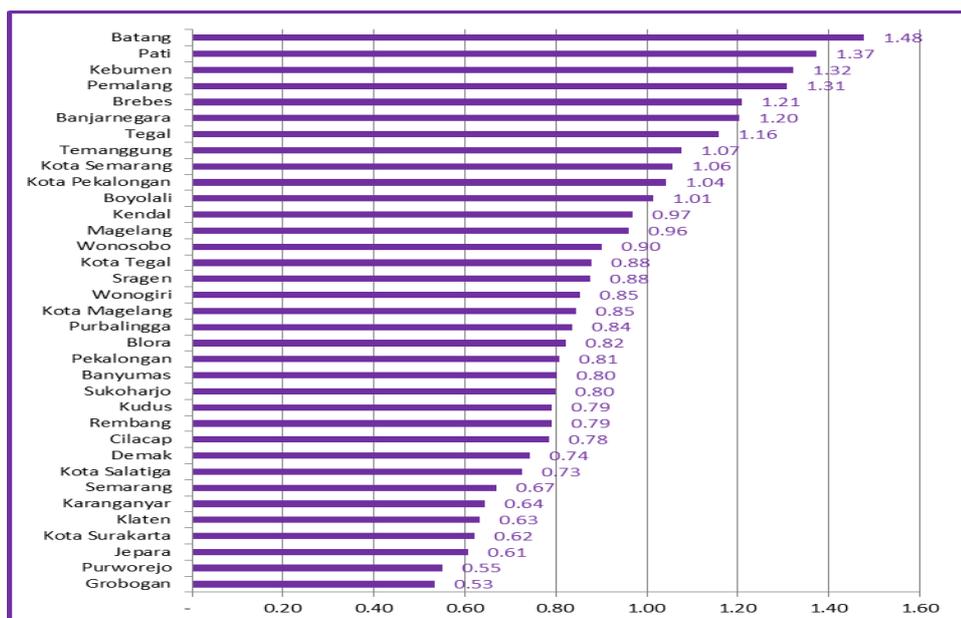
Tabel 2.16.
IPM dan Peringkat IPM Kabupaten/Kota
di Eks Karesidenan Kedu, Tahun 2013-2017

Kab/Kota	IPM					Peringkat IPM				
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
Kab.Kebumen	64.86	65.67	66.87	67.41	68.29	5	5	5	5	5
Kab.Purworejo	69.77	70.12	70.37	70.66	71.31	2	2	2	2	2
Kab.Wonosobo	64.57	65.20	65.70	66.19	66.89	6	6	6	6	6
Kab.Magelang	65.86	66.35	67.13	67.85	68.39	3	3	3	3	3
Kab.Temanggung	65.52	65.97	67.07	67.60	68.34	4	4	4	4	4
Kota Magelang	75.29	75.79	76.39	77.16	77.84	1	1	1	1	1
JAWA TENGAH	68.02	68.78	69.49	69.96	70.52					
NASIONAL	68.31	68.90	69.55	70.18	70.81					

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Jika dibandingkan dalam regional eks Karesidenan Kedu, IPM Kabupaten Temanggung juga terlihat cukup tertinggal, yaitu hanya pada peringkat 4 pada tahun 2017 dibawah Kota Magelang, Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Magelang, lebih tinggi dibanding Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Wonosobo. Artinya dalam regional Karesidenan Kedu, pembangunan di Kabupaten Temanggung juga tertinggal dibanding dengan kabupaten/kota lain dalam regional tersebut.

Untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu digunakan ukuran pertumbuhan IPM per tahun. Pertumbuhan IPM menunjukkan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian sebelumnya. Semakin tinggi nilai pertumbuhan, semakin cepat IPM suatu wilayah untuk mencapai nilai maksimalnya. Pertumbuhan IPM di Kabupaten Temanggung pada Tahun 2017 sebesar 1,07%. Kecepatan pertumbuhan IPM Kabupaten Temanggung pada tahun 2017 tersebut menempati peringkat ke 7 se Provinsi Jawa Tengah. Jika kondisi ini dipertahankan dan selalu ditingkatkan maka pada tahun yang akan datang Temanggung akan mencapai IPM kategori Tinggi.



Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Gambar 2.4.
Rata-Rata Pertumbuhan IPM per Tahun (Tahun 2013–2017)
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah

Di Indonesia IPM dihitung dengan 4 (empat) komponen yaitu : angka harapan hidup (dimensi kesehatan), angka harapan lama sekolah, angka rata-rata lama sekolah (dimensi pendidikan), dan Pengeluaran Riil per Kapita (dimensi ekonomi). Perkembangan angka IPM Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.17.
Perkembangan IPM Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017

No	Variabel	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)	65,52	65,52	65,97	67,07	68,34
1.	Angka Harapan Hidup /AHH (Tahun)	75,31	75,34	75,35	75,39	75,42
2.	Harapan Lama Sekolah (tahun)	11,39	11,69	11,89	12,06	12,07
	Rata-rata lama sekolah (tahun)	6,13	6,18	6,52	6,55	6,90
3.	Pengeluaran riil per kapita per tahun (ribu Rp)	8.042	8.062	8.369	8.593	8.794

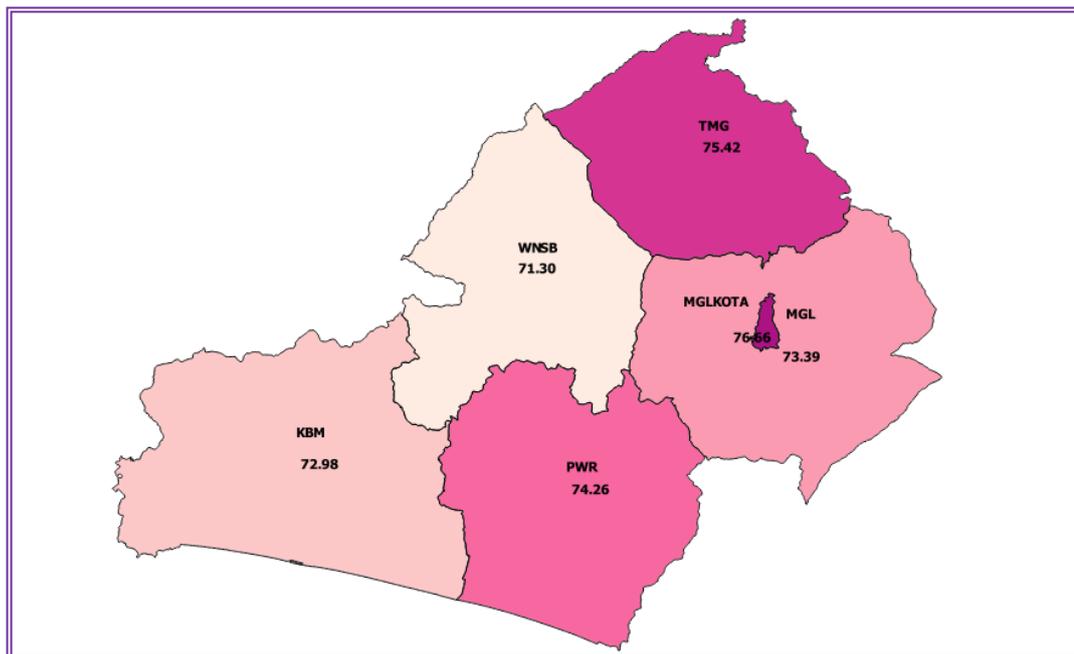
Sumber : BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Dari tabel di atas, terlihat bahwa IPM Kabupaten Temanggung semakin meningkat 4 (empat) tahun terakhir.

a. Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan salah satu indikator derajat kesehatan masyarakat. Angka Harapan Hidup (AHH) yaitu rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Semakin tinggi AHH maka derajat kesehatan masyarakat semakin baik, pada tahun 2017 AHH di Kabupaten Temanggung telah mencapai 75,42 tahun dan apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya selalu terjadi peningkatan. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan derajat kesehatan masyarakat, karena lama hidup seseorang tidak terlepas dari tingkat kesehatan yang bersangkutan. Kesehatan masyarakat antara lain dipengaruhi oleh asupan gizi yang baik, tingkat kepedulian dan perawatan terhadap kesehatan sehingga angka harapan hidup yang tinggi menunjukkan keberhasilan pembangunan.

Berdasarkan indikator angka harapan hidup, maka capaian pembangunan kesehatan di Kabupaten Temanggung berada pada peringkat ke 15 diantara 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Angka harapan hidup Kabupaten Temanggung pada tahun 2017 mencapai 75,42 tahun, lebih tinggi dibanding rata-rata angka harapan hidup Provinsi Jawa Tengah yang baru mencapai 74,08 tahun.



Sumber : BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2018

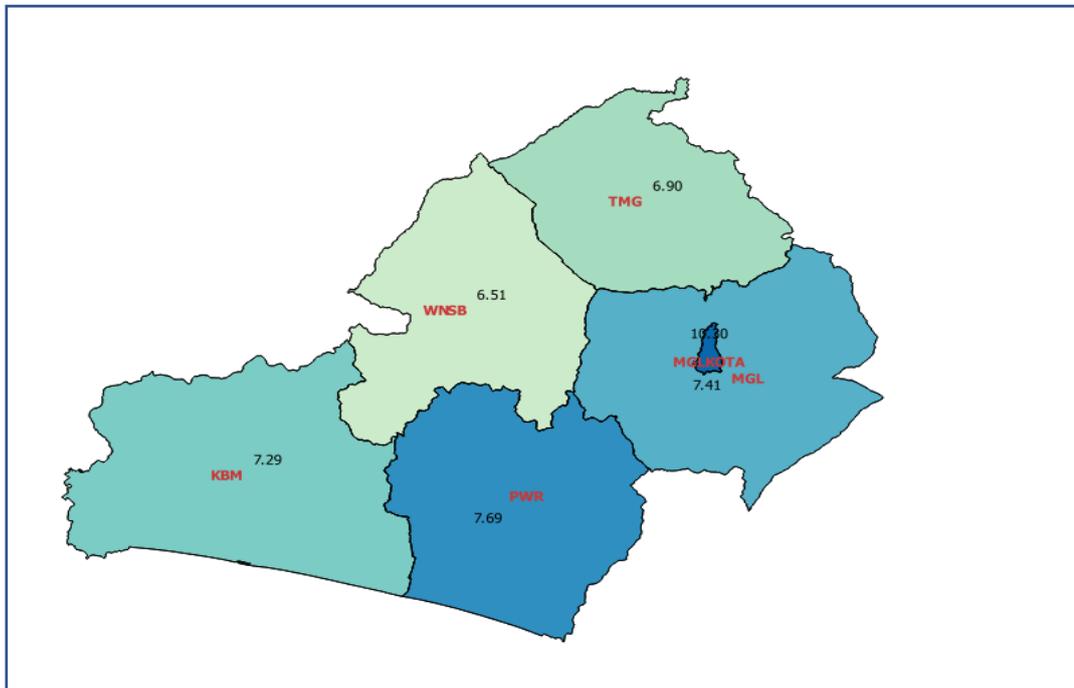
Gambar 2.5.
Peta Tematik Angka Harapan Hidup (AHH) Menurut Kabupaten/Kota se Eks Karesidenan Kedu, Tahun 2017

Angka Harapan Hidup Kabupaten Temanggung berada pada peringkat ke 2 diantara kabupaten/kota se eks Karesidenan Kedu, setelah angka harapan hidup Kota Magelang yang mencapai 76,66 tahun. Secara mikro, individu dengan

harapan hidup yang tinggi secara ekonomis memiliki peluang untuk memperoleh pendapatan yang tinggi. Keluarga dengan usia harapan hidup yang tinggi cenderung untuk menginvestasikan pendapatannya di bidang pendidikan dan menabung. Dengan demikian, tabungan nasional akan meningkat, investasi akan meningkat dan pada gilirannya akan meningkatkan pembangunan.

b. Angka rata-rata lama sekolah

Rata-rata lama sekolah Kabupaten Temanggung pada tahun 2017 baru mencapai 6,90 tahun, lebih rendah dibandingkan rata-rata lama sekolah penduduk Provinsi Jawa Tengah pada umumnya yang mencapai 7,27 tahun. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Temanggung masih memprihatinkan jika dibandingkan dengan target nasional yang mewajibkan pendidikan dasar 9 tahun. Rata-rata penduduk Kabupaten Temanggung bersekolah kelas 1 SMP/MTs. Rata-rata lama sekolah Kabupaten Temanggung berada pada peringkat ke 23 diantara 35 kabupaten/kota se Provinsi Jawa Tengah.



Sumber : BPS Kabupaten Temanggung, Tahun 2018

Gambar 2.6.
Peta Tematik Angka Rata-Rata Lama Sekolah (ARLS) Menurut Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota di Eks Karesidenan Kedu, Tahun 2017

Dengan menggunakan indikator ini, capaian pembangunan pendidikan di Kabupaten Temanggung masih sangat tertinggal di banding kabupaten/kota lain di wilayah eks Karesidenan Kedu. Rata-rata lama sekolah Kabupaten Temanggung menduduki peringkat ke 5, di atas Kabupaten Wonosobo. Jika penduduk Kabupaten Temanggung baru mencapai kelas 1 SMP/MTs, rata-rata

penduduk Kota Magelang sudah mencapai pendidikan hingga kelas 2 SMA/SMK/MA.

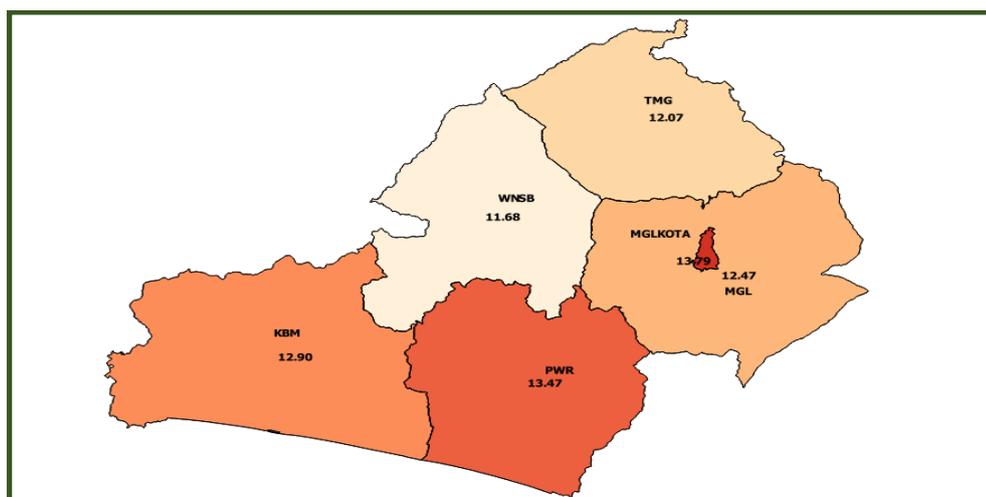
c. Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)

Kebijakan Strategi Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 2005-2025 memiliki misi “*Knowledge Based Society*”. Pengertian “*Knowledge Based Society*” muncul karena adanya kesadaran tentang peran penting ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pertumbuhan ekonomi. *Knowledge* yang menyatu (*embedded*) dengan sumber daya manusia sebagai *human capital* dan teknologi menjadi pusat pembangunan ekonomi. Dalam pengertian tradisional tentang fungsi produksi maka terpusat pada buruh, modal, material dan energi. Sekarang pendekatan analisis ekonomi berkembang sehingga *knowledge* merupakan bagian langsung yang mempengaruhi faktor produksi.

Untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak digunakan indikator Harapan Lama Sekolah (*Expected Years of Schooling-EYS*).

Angka harapan lama sekolah Kabupaten Temanggung pada Tahun 2017 berada pada peringkat ke 27 diantara 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, yaitu sebesar 12,07 tahun dan dibawah harapan sekolah penduduk Provinsi Jawa Tengah pada umumnya yang mencapai 12,57 tahun.

Status pendidikan Kabupaten Temanggung berdasarkan indikator harapan lama sekolah masih sangat tertinggal dibandingkan kabupaten/kota lain di wilayah eks Karesidenan Kedu. Harapan lama sekolah Kabupaten Temanggung menempati peringkat ke 5, lebih tinggi dibanding Kabupaten Wonosobo.

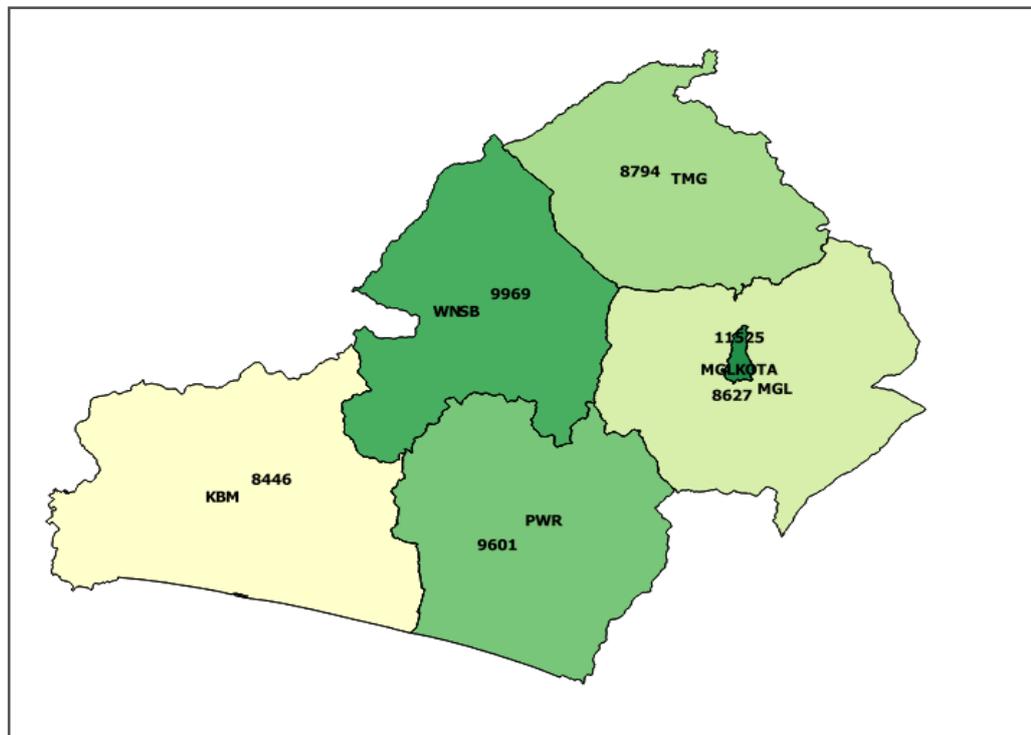


Sumber : BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Gambar 2.7.
Peta Tematik Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) Menurut Kabupaten/Kota di Eks Karesidenan Kedu, 2017

d. Pengeluaran Riil Perkapita yang Disesuaikan

UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) riil per kapita yang disesuaikan untuk keperluan perbandingan antar negara. Sebagai catatan, setidaknya terdapat dua kelemahan penggunaan PDB riil perkapita sebagai ukuran standar hidup, yaitu bahwa PDB hanya merupakan nilai pasar atas barang dan jasa yang diproduksi, bukan ukuran kesejahteraan dan PDB per kapita menyamakan antara yang bekerja dan tidak bekerja serta distribusi pendapatan yang tidak merata. Untuk Indonesia, karena data PDB per kapita tidak tersedia pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, maka digunakan pengeluaran per kapita disesuaikan menggunakan data SUSENAS sebagai proksi pendapatan.



Sumber : BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Gambar 2.8.

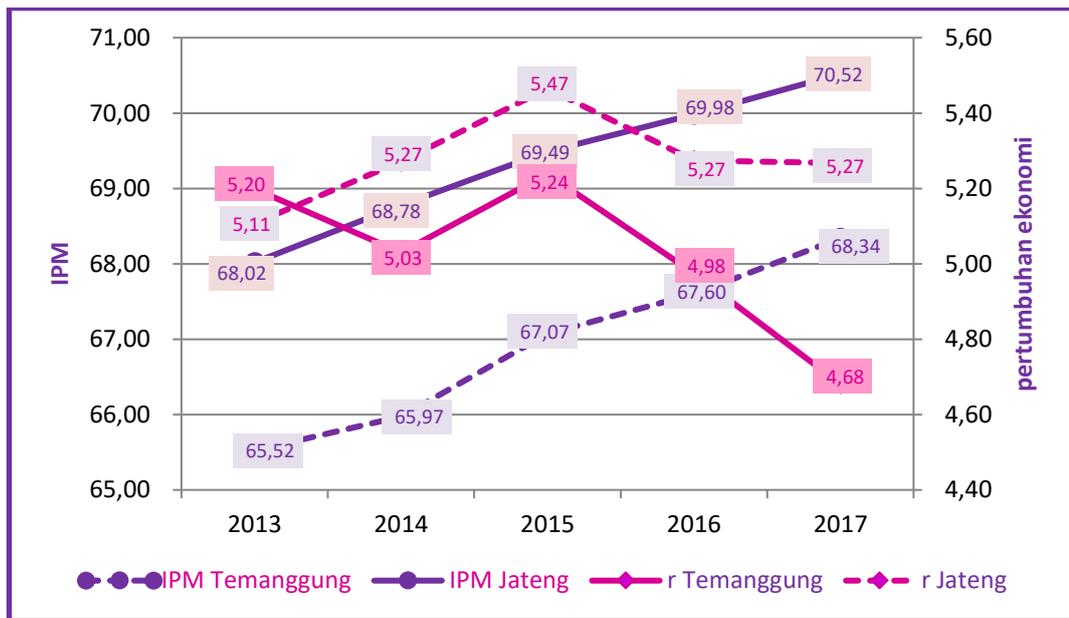
Peta Tematik Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan Menurut Kabupaten/Kota se Eks Karesidenan Kedu, Tahun 2017

UNDP mengungkapkan bahwa pembangunan dapat berkesinambungan apabila didukung oleh pertumbuhan ekonomi. Walaupun keduanya tidak memiliki hubungan yang otomatis, namun apabila keduanya disatukan dalam kebijakan yang searah, akan tercipta kekuatan yang saling mendukung sehingga pertumbuhan ekonomi akan sangat efektif untuk memperbaiki pembangunan manusia.

Paradigma pembangunan konvensional menekankan pertumbuhan ekonomi yang tinggi sebagai capaian dari pembangunan. Pertumbuhan ekonomi

penting untuk mempertahankan kesejahteraan rakyat, namun pertumbuhan ekonomi bukan merupakan akhir pembangunan manusia. Hal yang lebih penting adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi digunakan untuk memperbaiki kapabilitas manusianya dan pada gilirannya rakyat menggunakan kapabilitasnya (Kuncoro, 2013). Sebaliknya, paradigma pembangunan saat ini meletakkan manusia sebagai tujuan akhir pembangunan.

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia selama periode 2013 - 2017 cenderung mengalami peningkatan, sementara pertumbuhan ekonomi mengalami fluktuasi yang tajam. Sepanjang 5 (lima) tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung konsisten tumbuh diatas 4% dengan pertumbuhan yang semakin cepat. Secara umum juga dapat dilihat bahwa sepanjang 2013 - 2017, IPM Kabupaten Temanggung selalu berada di bawah IPM Provinsi Jawa Tengah, sebaliknya pada tahun 2013 mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah.



Sumber : BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2018

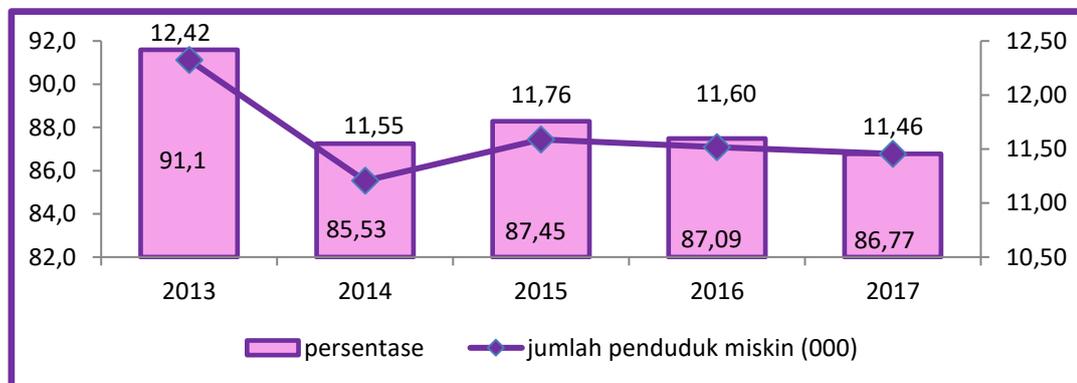
Gambar 2.9.
Perkembangan IPM dan Pertumbuhan Ekonomi
(Tahun Dasar 2010) Kabupaten Temanggung dan
Provinsi Jawa Tengah 2013-2017

Untuk melihat karakteristik IPM Kabupaten Temanggung khususnya dan Provinsi Jawa Tengah pada umumnya, maka diperlukan analisis tipologi dengan mengadopsi klasifikasi *Klassen*, yaitu menggunakan indikator IPM dan pertumbuhan ekonomi. Melalui analisis ini karakteristik IPM kabupaten/kota dibandingkan dengan IPM Provinsi Jawa Tengah, sementara pertumbuhan

ekonomi kabupaten/kota dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah. Disebut tinggi apabila indikator kabupaten/kota lebih tinggi dibanding indikator yang sama di Provinsi Jawa Tengah dan digolongkan rendah apabila lebih rendah dibanding indikator yang sama di Provinsi Jawa Tengah.

7. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan tantangan terbesar dalam pembangunan karena kemiskinan memiliki dampak yang menyebar terhadap aspek aspek yang ada di masyarakat secara menyeluruh. Keberhasilan pembangunan manusia dapat dinilai secara parsial dengan melihat permasalahan mendasar dalam masyarakat dapat teratasi, diantaranya pengentasan kemiskinan. Idealnya pembangunan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan berkurangnya kemiskinan sebagai dampak peningkatan pendapatan per kapita.



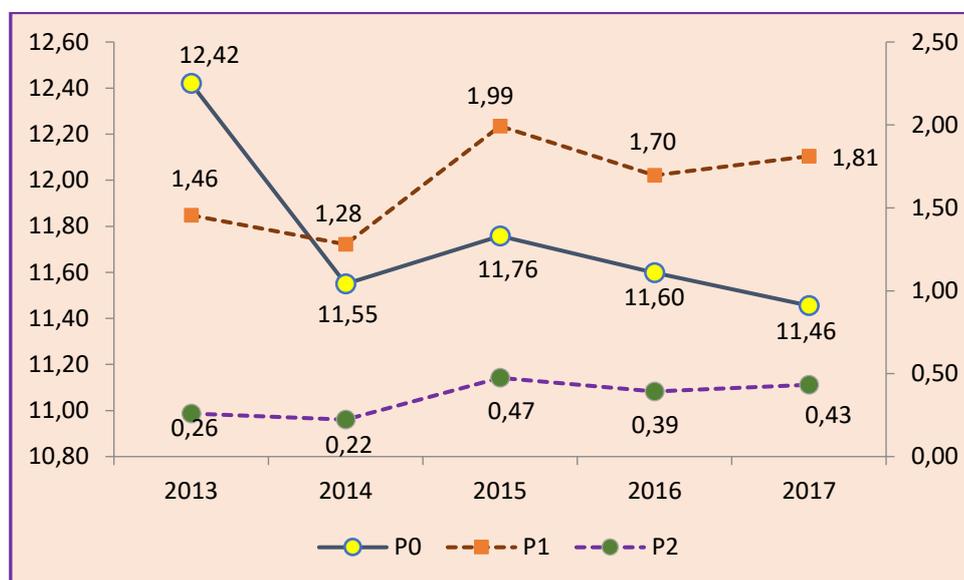
Gambar 2.10.
Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Temanggung, 2013-2017

Tingkat kemiskinan mencakup besaran jumlah dan persentase penduduk miskin. Pada periode 5 tahun tersebut, perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Temanggung relatif berfluktuasi dari tahun ke tahun. Kemiskinan pada tahun 2013 adalah kemiskinan tertinggi sepanjang 5 tahun terakhir yaitu sebesar 12,42%. Pada tahun berikutnya, meskipun masih berfluktuasi, namun cenderung menurun menjadi 11,46% pada tahun 2017.

Meskipun data kemiskinan makro tidak dapat menunjukkan siapa dan dimana si miskin tersebut, namun fluktuasi kemiskinan ini menunjukkan bahwa banyak penduduk Kabupaten Temanggung yang merupakan kelompok rentan miskin, yaitu kelompok yang berada sedikit di atas garis kemiskinan. Penduduk pada kelompok ini sangat rentan terperosok dalam kemiskinan ketika garis kemiskinan meningkat sedikit saja.

Kebijakan pembangunan tidak hanya mengurangi jumlah dan persentase penduduk miskin, namun juga mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Tingkat kedalaman kemiskinan (*poverty gap index* atau P1) menjelaskan

rata rata jarak antara taraf hidup dari penduduk miskin dengan garis kemiskinan, yang dinyatakan sebagai suatu rasio dari kemiskinan. Penurunan pada P1 mengidentifikasi adanya perbaikan secara rata-rata pada kesenjangan antara standar hidup penduduk miskin dibandingkan dengan garis kemiskinan. Hal ini juga berarti bahwa rata-rata pengeluaran dari penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan, yang mengidentifikasi berkurangnya kedalaman insiden kemiskinan. Sedangkan tingkat keparahan kemiskinan (*poverty severity indeks* atau P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.



Sumber : BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2018

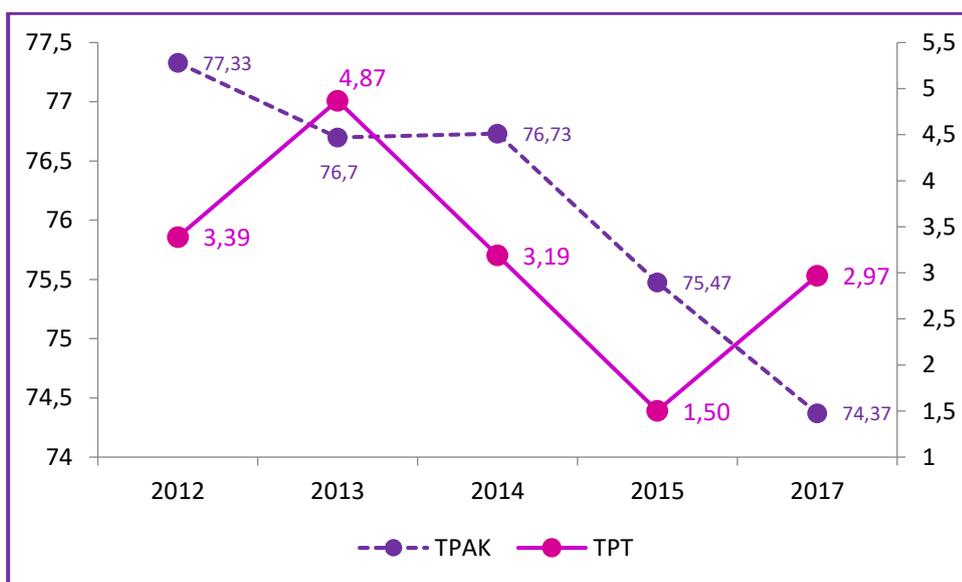
Gambar 2.11.
Perkembangan P0, P1 dan P2 di Kabupaten Temanggung,
Tahun 2013 – 2017

Dari gambar 2.9 diatas dapat dilihat bahwa meskipun sepanjang 3 tahun terakhir persentase penduduk miskin menurun, namun nilai P1 dan P2 terlihat meningkat pada tahun 2017. P1 yang meningkat pada tahun 2017 menunjukkan bahwa rata rata pengeluaran penduduk miskin menurun semakin jauh dari garis kemiskinan. Hal ini mengindikasikan biaya yang dibutuhkan untuk mengangkat orang keluar dari kemiskinan semakin besar. Indeks P2 juga meningkat pada tahun 2017 yang mengindikasikan ketimpangan di antara penduduk miskin semakin melebar, sehingga ketepatan sasaran program-program dalam menjangkau terutama penduduk miskin semakin diperlukan.

8. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

TPT adalah persentase jumlah pengangguran terbuka usia angkatan kerja terhadap jumlah angkatan kerja, digunakan untuk mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. TPT menunjukkan persentase orang yang mencari kerja terhadap penduduk angkatan kerja. Tingginya TPT merupakan indikasi perlunya peningkatan penyerapan tenaga kerja, salah satunya dengan penciptaan lapangan kerja.

TPT sering menjadi topik diskusi karena terkait dengan masalah ekonomi dan sosial seperti kemiskinan dan kerawanan sosial. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja.



Sumber : BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Gambar 2.12.

Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Temanggung Tahun 2012 – 2017

Sepanjang tahun 2012-2017, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) mengalami kecenderungan menurun dari 77,33% pada tahun 2012 menjadi hanya 74,37% pada tahun 2017. Penurunan ini menunjukkan bahwa persentase penduduk yang aktif secara ekonomi menurun. Kondisi ketenagakerjaan akan lebih tergambarkan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka. TPT di Kabupaten Temanggung terlihat berfluktuasi dengan tingkat pengangguran tertinggi pada tahun 2013 yaitu sebesar 4,87% dan mencapai pengangguran terendah pada tahun 2015 yaitu hanya 1,5%.

Banyaknya penduduk yang bekerja di Kabupaten Temanggung menurut lapangan usaha dapat memberikan informasi awal tentang potensi ekonomi penduduk Temanggung. Semakin banyak orang yang bekerja di suatu sektor, maka semakin tinggi pula potensi ekonomi sektor tersebut. Hingga tahun 2017, sebagian

besar penduduk yang bekerja di Kabupaten Temanggung bekerja pada sektor primer yaitu pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan dan perikanan sebesar 47,93%. Tingginya penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian tersebut terkait erat dengan tingginya potensi agraris yang sangat tinggi di Kabupaten Temanggung. Selain itu, sektor pertanian relatif lebih akomodatif, karena tidak membutuhkan SDM tingkat pendidikan yang lebih tinggi, keahlian khusus serta kemampuan modal untuk usaha yang rendah. Oleh karenanya tidak mudah bagi tenaga kerja di sektor pertanian untuk berpindah ke sektor lainnya.

Selain industri pengolahan dan sektor perdagangan juga terlihat menunjukkan peran yang agak dominan dalam penyerapan tenaga kerja. Tenaga kerja yang terserap pada sektor industri pengolahan adalah sebesar 13,78%, sedangkan sektor perdagangan menyerap tenaga kerja sebesar 15,76%. Sektor industri pengolahan di Kabupaten Temanggung khususnya industri mikro dan industri kecil (IMK) tidak bisa dipisahkan dengan sektor pertanian karena sebagian besar IMK di Kabupaten Temanggung merupakan industri perajangan tembakau. Yang waktu produksinya bersifat musiman.

Tabel 2.18.
Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan di Kabupaten Temanggung, 2017

Status Pekerjaan Utama (1)	2017 (2)
Berusaha sendiri	15.02
Berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap	22.47
Berusaha sendiri dengan dibantu buruh tetap	2.47
Pekerja/Buruh/Karyawan	25.79
Pekerja bebas di pertanian	4.56
Pekerja bebas di non pertanian	6.11
Pekerja tak dibayar	23.57
Jumlah	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Penduduk bekerja menurut status pekerjaan utama menggambarkan perkembangan tenaga kerja terhadap tingkat kemandirian dan tingkat kebutuhannya terhadap tenaga orang lain. Status pekerjaan juga dapat digunakan untuk membedakan tenaga kerja formal dan informal. Status pekerjaan berusaha dibantu dengan buruh tetap dan buruh/karyawan dipakai sebagai proksi pekerja sektor formal sedangkan status pekerjaan sebagai berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar, pekerja bebas dan pekerja tidak dibayar digunakan sebagai proksi pekerja sektor informal.

Jika dilihat dari status pekerjaannya, ternyata sebagian besar penduduk yang bekerja di Kabupaten Temanggung merupakan pekerja keluarga yang tidak dibayar

yaitu mencapai lebih dari 23% pada tahun 2017. Jika diperluas lagi, maka sebagian besar penduduk yang bekerja berada pada sektor informal yaitu mencapai 71,73% pada tahun 2017. Sebagian orang menyebut sektor informal sebagai sektor penyelamat. Elastisitas sektor informal dalam menyerap tenaga kerja menjadikan sektor ini selalu bergairah meskipun nilai tambah yang diciptakannya mungkin tidak sebesar nilai tambah sektor formal.

9. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

TPAK yang tinggi merupakan salah satu indikasi tingginya kesempatan kerja yang tersedia sehingga orang terserap dalam lapangan kerja yang ada atau sedang mencari kerja atau bahkan mempersiapkan usaha.

Dari gambar 2.12 sejak tahun 2012 - 2017 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Temanggung selalu di atas 50%, dengan TPAK tertinggi yaitu mencapai 57,69% pada Tahun 2012.

C. Aspek Daya Saing Daerah

1. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) yang diperoleh dari perbandingan antara indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani, merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan atau daya beli petani di pedesaan. NTP juga menggambarkan nilai tukar (*term of trade*) dari produksi pertanian terhadap barang/jasa yang dikonsumsi rumah tangga petani dan biaya produksi serta pembentukan barang modal. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin tinggi kemampuan atau daya beli petani di pedesaan.

Secara umum penghitungan NTP menghasilkan 3 (tiga) pengertian yaitu :

1. $NTP > 100$, berarti petani mengalami surplus. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsi. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya.
2. $NTP = 100$, berarti petani mengalami impas. Kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsi. Pendapatan petani sama dengan pengeluarannya.
3. $NTP < 100$, berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani turun, lebih kecil dari pengeluarannya.

Tabel 2.19.
 Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Temanggung
 Tahun 2013 - 2017

No	BULAN / TAHUN	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Januari	101,71	101,71	101,60	102,31	100,26
2.	Februari	101,27	101,27	102,37	101,62	100,01
3.	Maret	101,16	101,16	100,44	99,70	99,68
4.	April	101,05	101,05	98,72	98,15	100,65
5.	Mei	101,13	101,13	99,47	99,25	101,62
6.	Juni	101,49	101,49	99,59	99,76	101,98
7.	Juli	101,31	101,31	99,99	99,82	102,68
8.	Agustus	101,77	101,77	100,83	100,15	103,36
9.	September	101,99	101,99	102,52	100,11	103,09
10.	Oktober	102,20	102,20	102,74	100,10	103,78
11.	Nopember	102,01	102,01	103,42	99,89	104,16
12.	Desember	101,34	101,34	103,24	99,64	104,74
	Rata - Rata	101,53	101,53	101,24	100,04	102,17

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Berdasarkan pemantauan harga-harga perdesaan di Kabupaten Temanggung secara umum dari bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2017 terlihat cukup fluktuatif pada kisaran 99,68% -104,74%, dengan rata-rata indeks sebesar 102,17 yang berarti bahwa rata-rata petani di Kabupaten Temanggung mengalami surplus atau memiliki daya beli untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga dan biaya produksi serta untuk penambahan barang modalnya.

Fluktuasi NTP akan menunjukkan kemampuan pembayaran ataupun tingkat pendapatan riil petani. Berbagai fenomena perubahan situasi yang terjadi baik yang bersifat alami (gejolak produksi pertanian) maupun gejolak yang terjadi akibat distorsi pasar (seperti penerapan kebijakan yang disengaja, baik di sektor pertanian maupun non pertanian, di tingkat mikro maupun makro), akan mempengaruhi harga-harga yang pada akhirnya mempengaruhi NTP, akan menjadi masukan penting bagi penyusunan program kebijakan ke arah pembentukan NTP yang diinginkan. Keadaan ini dapat mengindikasikan bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah dari awal yang terkait dengan input produksi usaha tani sampai pada pemasaran hasil produk pertanian akan mempengaruhi besaran NTP baik secara langsung maupun tidak langsung.

NTP Kabupaten Temanggung mencapai nilai tertinggi pada bulan Desember 2017, yakni sebesar 104,74 sedangkan Bulan Maret merupakan bulan dengan NTP terendah sebesar 99,68. Selama tahun 2017 secara umum NTP mengalami kenaikan dibanding tahun 2016 sebesar 2,13%. Kenaikan NTP tertinggi terjadi pada bulan Januari 2017 sebesar 2,98% yaitu dari NTP bulan Desember 2016 sebesar 95,06 menjadi 97,90 dibulan Januari 2017. Kenaikan NTP ini disebabkan oleh kenaikan harga gabah mencapai 3,17% yang menyebabkan Indeks yang diterima petani (It) mengalami kenaikan sebesar 4,22%, sedangkan Indeks yang dibayar petani (Ib) hanya naik sebesar 1,20%.

2. Klasifikasi Tingkat Perkembangan Desa

Tingkat perkembangan desa diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- Desa Swadaya; adalah desa yang kekurangan sumber daya manusia atau tenaga kerja dan juga kekurangan dana sehingga tidak mampu memanfaatkan potensi yang ada di desanya. Biasanya desa swadaya berada di wilayah yang terpencil jauh dari kota, taraf berkehidupan miskin dan tradisional serta tidak memiliki sarana dan prasarana penunjang yang mencukupi.
- Desa Swakarya; adalah desa yang mulai menggunakan dan memanfaatkan potensi fisik dan nonfisik yang dimilikinya tetapi masih kekurangan sumber keuangan atau dana. Desa swakarsa belum banyak memiliki sarana dan prasarana desa yang biasanya terletak di daerah peralihan desa terpencil dan kota. Masyarakat desa swakarsa masih sedikit yang berpendidikan tinggi dan tidak bermata pencaharian utama sebagai petani di pertanian saja serta banyak mengerjakan sesuatu secara gotong royong.
- Desa Swasembada; adalah desa yang berkecukupan dalam hal sumber daya manusia dan keuangan sehingga dapat memanfaatkan dan menggunakan segala potensi fisik dan non fisik desa secara maksimal. Kehidupan desa swasembada sudah mirip kota yang modern dengan pekerjaan mata pencarian yang beraneka ragam serta sarana dan prasarana yang cukup lengkap untuk menunjang kehidupan masyarakat pedesaan maju.

Dalam kaitannya dengan upaya peningkatan daya saing daerah maka salah satu potensi yang perlu dikembangkan adalah melalui peningkatan dan percepatan pertumbuhan status desa menjadi desa swasembada.

Tabel 2.20.
Klasifikasi Tingkat Perkembangan Desa di Kabupaten Temanggung
Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Desa Swadaya	275	275	215	215	2
2.	Jumlah Desa Swakarya	14	14	40	40	218
3.	Jumlah Desa Swasembada	0	0	6	6	46
4.	Jumlah Desa	266	266	266	266	266

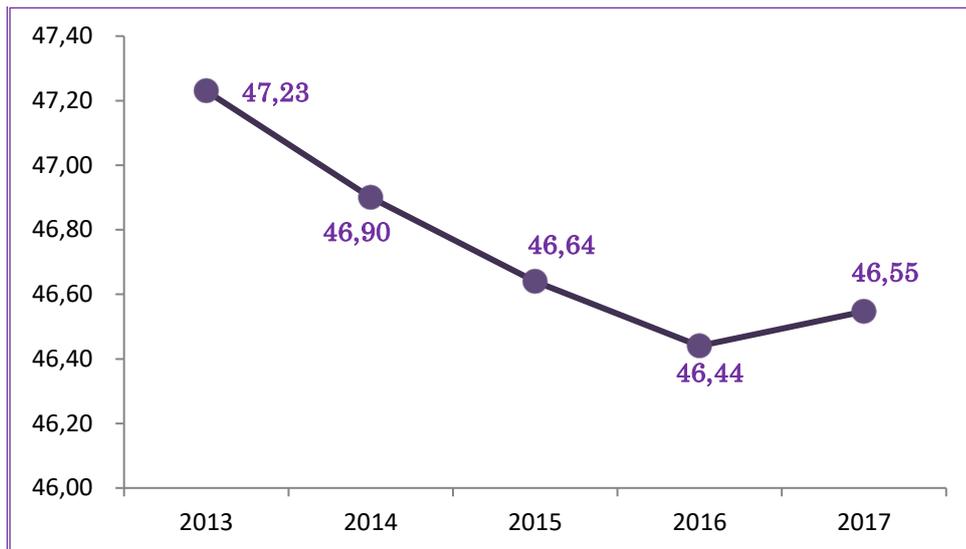
Sumber : SIPD Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Dari tabel di atas, terlihat bahwa tingkat perkembangan desa bergerak menuju Desa Swasembada semakin meningkat namun sebagian besar masih ditingkat Desa Swakarya (80,83%).

3. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk produktif adalah penduduk usia 15-64 tahun, sedangkan Penduduk tidak produktif adalah penduduk berusia dibawah 15 tahun dan diatas 65 tahun.

Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.



Sumber : BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Gambar 2.13.
Rasio Ketergantungan (*dependency ratio*)
Kabupaten Temanggung Tahun 2013 - 2017

Pergeseran distribusi umur penduduk dan penurunan rasio ketergantungan membentuk keadaan ideal yang berpotensi terjadinya bonus demografi. Kesempatan ini harus dipahami oleh pengambil kebijakan sampai tingkat daerah agar dapat memanfaatkan bonus demografi untuk kesejahteraan rakyat. Harus disadari juga bahwa pada masa yang akan datang, angka ketergantungan akan kembali meningkat yang disebabkan karena fertilitas rendah dan angka harapan hidup yang tinggi.

Rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Temanggung sepanjang 2013-2017 konsisten mengalami penurunan yaitu sebanyak 47,23% pada 2013 menjadi 46,44% pada 2016. Peningkatan angka ketergantungan menjadi 46,55% pada tahun 2017 tentu menarik perhatian tersendiri apakah angka ketergantungan sudah mencapai titik terendah dan akan kembali meningkat pada tahun selanjutnya. Peningkatan angka ketergantungan ini setidaknya menjadi bahan evaluasi awal apakah bonus demografi di Kabupaten Temanggung benar-benar sudah dimanfaatkan atau sebaliknya akan berlalu begitu saja.

D. Aspek Pelayanan Umum

1. Layanan Umum Urusan Wajib Dasar

a. Bidang Pendidikan

1) Angka Harapan Lama Sekolah

Angka harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia

7 tahun ke atas. Indikator ini dapat

digunakan untuk

mengetahui kondisi

pembangunan

sistem pendidikan di

berbagai jenjang

yang ditunjukkan

dalam bentuk

lamanya pendidikan

(dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Batas maksimum untuk harapan lama sekolah adalah 18 tahun, sedangkan batas minimumnya 0 (nol).



Tabel 2.21.

Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Temanggung,
Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2017

No.	Tahun	Harapan Lama Sekolah (Tahun)		
		Temanggung	Jawa Tengah	Nasional
1	2013	11.39	11.89	12.10
2	2014	11.69	12.17	12.39
3	2015	11.89	12.38	12.55
4	2016	12.06	12.46	12.72
5	2017	12.07	12.57	12.85

Sumber : Dindikpora Kabupaten Temanggung Tahun 2018
BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas, AHLS di Kabupaten Temanggung Tahun 2013 sampai 2017 cenderung meningkat dan masih di bawah Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Pada tahun 2013 AHLS Kabupaten Temanggung sebesar 11,39 mengalami kenaikan menjadi 12,07 pada tahun 2017. Peningkatan setiap tahun rata-rata 0,14 sama dengan rata-rata peningkatan AHLS Provinsi Jawa Tengah tetapi lebih rendah daripada rata-rata peningkatan AHLS Nasional. Hal ini disebabkan karena di Kabupaten

Temanggung masih ada siswa putus sekolah, angka partisipasi murni yang belum optimal, dan belum ada perguruan tinggi negeri.

2) Angka Rata-rata lama sekolah

Angka rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas, dengan asumsi usia penduduk 25 tahun sudah menyelesaikan semua pendidikan formal. Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Temanggung Tahun 2013 sampai 2017 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.22.
Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Temanggung,
Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2017

No.	Tahun	Angka Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)		
		Temanggung	Jawa Tengah	Nasional
1	2013	6.13	6.80	7.61
2	2014	6.18	6.93	7.73
3	2015	6.52	7.03	7.84
4	2016	6.55	7.15	7.95
5	2017	6.90	7.27	8.10

Sumber: Dindikpora Kabupaten Temanggung Tahun 2018
BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas, Angka Rata-rata Lama Sekolah selama 5 (lima) tahun terakhir di Kabupaten Temanggung menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2013 Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Temanggung sebesar 6,13 meningkat menjadi 6,90 pada tahun 2017. Peningkatan setiap tahun rata-rata sebesar 0,15; lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata peningkatan ARLS Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,10 maupun rata-rata peningkatan ARLS Nasional sebesar 0,09.

3) Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka Partisipasi Sekolah (APS) menunjukkan perbandingan jumlah siswa usia tertentu yang bersekolah pada beberapa jenjang pendidikan terhadap jumlah penduduk usia sekolah tertentu dikali 1.000 atau bisa juga dinyatakan dalam persen.

Dalam hal ini APS 4-6 tahun dihitung dari perbandingan jumlah peserta didik usia 4-6 tahun pada berbagai jenjang terhadap jumlah penduduk

usia 4-6 tahun dikali 1.000, APS 7-12 tahun diperoleh dari perbandingan jumlah siswa usia 7-12 tahun pada berbagai jenjang pendidikan dibagi jumlah penduduk usia 7-12 tahun dikali 1.000, dan APS 13-15 tahun diperoleh dari perbandingan jumlah siswa usia 13-15 tahun pada berbagai jenjang pendidikan terhadap penduduk usia 13-15 tahun dikali 1.000.

Makin tinggi APS berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah. Nilai ideal APS adalah sama dengan 1.000 atau jika dinyatakan dalam persen sama dengan 100% dan tidak akan terjadi lebih besar dari 1.000 atau 100% karena siswa usia sekolah dan penduduk usia sekolah dihitung dari siswa yang ada di semua jenjang pendidikan. Bila lebih besar dari 1.000 atau 100%, perlu diketahui berapa jumlah siswa yang berasal dari daerah lain.

APS digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang telah bersekolah di semua jenjang pendidikan dan merupakan alat ukur pemerataan pendidikan yang paling mendekati dan paling baik jika dibandingkan dengan APK atau APM.

Tabel 2.23.
Angka Partisipasi Sekolah
Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017

No	Kriteria	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
	PAUD					
	APS 4-6 Tahun	76,15	76,15	76,18	76,38	74,00
	Pendidikan Dasar					
1.	APS 7 - 12 Tahun	98,79	99,43	99,93	99,60	99,63
2.	APS 13 - 15 tahun	87,36	99,33	99,33	99,80	99,80

Sumber : Dindikpora Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa dari ketiga kelompok usia, APS usia 13-15 tahun menunjukkan peningkatan yang paling tertinggi, yaitu 87,36 pada tahun 2013, menjadi 99,80 pada tahun 2017. Berdasarkan data tabel di atas juga dapat dijelaskan bahwa dari 100 anak usia 13-15 tahun yang sekolah pada berbagai jenjang pendidikan pada tahun 2017 sebanyak 99,80 anak, sedangkan pada kelompok usia 7-12 tahun sebanyak 99,6 anak, dan pada kelompok usia 4-6 tahun sebanyak 74,0 anak.

Rendahnya APS kelompok usia 4-6 tahun disebabkan karena belum adanya regulasi yang mewajibkan menempuh pendidikan anak usia dini sebelum mengikuti pendidikan dasar jenjang sekolah dasar. Disamping itu

masih adanya anggapan sebagian masyarakat bahwa pendidikan anak usia dini tidak penting dan berbiaya mahal.

4) Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan antara jumlah penduduk kelompok usia sekolah pada jenjang Pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi APM berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah dijenjang Pendidikan tertentu.

Nilai ideal APM adalah 100%, bila lebih besar dari 100% disebabkan karena adanya siswa usia sekolah dari luar daerah, dan adanya siswa yang mengulang atau tidak naik kelas. APM digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang yang sesuai.

Tabel 2.24.
Angka Partisipasi Murni Kabupaten Temanggung
Tahun 2013-2017

No	Jenis Sekolah	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	SD Sederajat	95,42	95,45	95,49	96,59	96,65
2.	SMP Sederajat	83,64	83,69	83,74	84,01	84,20

Sumber : Dindikpora Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas selama kurun waktu 5 (lima) tahun APM SD Sederajat dan APM SMP Sederajat menunjukkan kecenderungan meningkat. Peningkatan setiap tahun bervariasi dengan rata-rata peningkatan pada jenjang SMP Sederajat sebesar 0,47%, dan pada jenjang SD Sederajat sebesar 0,58%.

Baik APM SD Sederajat maupun APM SMP Sederajat belum mencapai angka ideal karena terdapat anak uisa sekolah yang tidak sekolah dan anak usia sekolah yang sekolah tidak pada jenjang kelompok usianya.

5) Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan antara jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase.

Kriteria: makin tinggi APK berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan, atau makin banyak anak usia di luar kelompok usia sekolah tertentu bersekolah di tingkat pendidikan tertentu. Nilai APK bisa lebih besar dari 100% karena terdapat siswa yang berusia di luar kelompok usia sekolah, wilayah kota atau wilayah perbatasan.

APK digunakan untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan.

Tabel 2.25.
Angka Partisipasi Kasar (APK)
Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
	APK PAUD 4-6 TH	66,13	66,40	67,66	73,25	73,85
2.	APK SD Sederajat	106,06	103,59	109,43	111,06	112,13
3.	APK SMP Sederajat	96,00	94,75	97,17	98,13	98,17

Sumber : Dindikpora Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Tabel diatas menunjukkan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Temanggung pada jenjang PAUD 4-6 tahun, SD Sederajat, dan jenjang SMP Sederajat tahun 2013-2017, yang cenderung meningkat secara fluktuatif. APK tertinggi pada jenjang SD Sederajat yaitu 112,13% pada tahun 2017, kemudian jenjang SMP Sederajat, dan yang paling rendah jenjang PAUD. Peningkatan rata-rata setiap tahun juga fluktuatif dengan peningkatan rata-rata paling tinggi pada jenjang PAUD yaitu sebesar 1,50%; kemudian jenjang SD Sederajat meningkat sebesar 1,21%; dan jenjang SMP Sederajat meningkat 0,43% setiap tahun.

Pada tahun 2013 APK PAUD 4-6 tahun sebesar 66,13% meningkat menjadi 74,62% pada tahun 2017. Pada tahun 2013 APK SD Sederajat sebesar 106,06% meningkat menjadi 112,13% pada tahun 2017. APK SMP Sederajat pada tahun 2013 sebesar 96,00% meningkat menjadi 98,17% pada tahun 2017.

Khusus pada APK SD Sederajat dari tahun 2013-2017 mencapai lebih dari 100%, hal ini disebabkan karena terdapat anak berusia kurang dari 7 tahun dan anak berusia lebih dari 12 tahun yang sekolah di jenjang SD Sederajat.

Rendahnya APK PAUD 4-6 tahun disebabkan karena belum adanya regulasi yang mewajibkan menempuh pendidikan anak usia dini sebelum mengikuti pendidikan dasar jenjang sekolah dasar. Disamping itu masih adanya anggapan sebagian masyarakat bahwa pendidikan anak usia dini tidak penting dan berbiaya mahal.

6) Angka Putus Sekolah (APtS)

Angka Putus Sekolah (APtS) adalah perbandingan antara jumlah siswa yang putus sekolah pada tingkat dan jenjang tertentu dengan jumlah siswa

pada tingkat dan jenjang yang sesuai pada tahun ajaran sebelumnya dan dinyatakan dalam persentase.

Siswa putus sekolah yaitu siswa yang tidak melanjutkan pembelajaran tanpa membawa surat keterangan pindah atau ijazah. Kriteria: makin rendah APtS, berarti makin baik, idealnya 0% berarti tidak ada siswa yang putus sekolah. APtS digunakan untuk mengetahui banyaknya siswa yang putus sekolah di suatu daerah sehingga dapat dilakukan penanggulangannya pada tahun-tahun mendatang.

Tabel 2.26.
Angka Putus Sekolah (APtS)
Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	APtS SD/MI	0,16	0,17	0,16	0,07	0,08
2.	APtS SMP/MTs	0,82	0,55	0,51	0,33	0,30

Sumber : Dindikpora Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Dari tabel di atas, angka putus sekolah jenjang SD/MI dan SMP/MTs fluktuatif menurun dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir. APtS SD/MI rata-rata menurun 0,01% setiap tahun sedang APtS SMP/MTs rata-rata menurun 0,06% setiap tahun. Pada tahun 2013 APtS SD/MI sebesar 0,16% turun menjadi 0,08% pada tahun 2017. Sedangkan APtS SMP/MTs pada tahun 2013 sebesar 0,82% turun menjadi 0,30% pada tahun 2017.

Beberapa faktor yang menyebabkan tingginya APtS SD/MI dan SMP/MTs antara lain yaitu siswa berkebutuhan khusus, siswa yang motivasi belajarnya rendah, dan karena alasan sosial budaya lainnya.

7) Angka Kelulusan (AL)

Angka Lulusan (AL) adalah perbandingan antara jumlah siswa yang lulus pada jenjang tertentu dengan jumlah peserta ujian pada jenjang pendidikan tertentu yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase.

Kriteria: makin tinggi nilainya, berarti makin baik. Idealnya AL adalah sama dengan 100%, yang berarti semua siswa peserta ujian lulus seluruhnya. AL digunakan untuk mengetahui banyaknya siswa yang lulus, dari jenjang pendidikan tertentu.

AL jenjang SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Temanggung pada tahun 2013-2017 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.27.
 Angka Kelulusan SD/MI, SMP/MTs dan Pendidikan Kesetaraan
 Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	SD/MI	11,799	11,911	12,058	11,764	11,542
	Peserta Ujian	11,799	11,922	12,060	11,766	11,542
	%	100.00	99.91	99.98	99.98	100.00
2	SMP/MTs	9,480	9,389	9,911	10,296	10,536
	Peserta Ujian	9,528	9,389	9,931	10,297	10,536
	%	99.50	100.00	99.80	99.99	100.00
3	Pendidikan Kesetaraan	74,41	83,30	90,98	89,71	89,26

Sumber : Dindikpora Kab. Temanggung Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa AL SD/MI dan AL SMP/MTs tahun 2013-2017 menunjukkan peningkatan. Bahkan pada tahun terakhir baik AL SD/MI maupun AL SMP/MTs telah mencapai angka ideal 100%. Hal ini disebabkan karena kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan sepenuhnya menjadi kewenangan satuan pendidikan. Oleh karena itu nampaknya aspek mutu lulusan kurang mendapatkan perhatian.

8) Angka Melanjutkan (AM)

Angka Melanjutkan (AM) adalah perbandingan antara jumlah siswa baru tingkat satu pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan jumlah lulusan pada jenjang yang lebih rendah dan dinyatakan dalam persentase.

Kriteria: makin tinggi angkanya makin baik. Idealnya AM adalah sama dengan 100% yang berarti semua lulusan dapat ditampung di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Bila angkanya lebih dari 100% hal itu disebabkan karena ada siswa baru yang berasal dari daerah lain.

AM digunakan untuk mengetahui banyaknya lulusan yang dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau daya tampung dari sekolah yang lebih tinggi. Angka melanjutkan adalah persentase lulusan sekolah yang melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

Tabel 2.28.
 Persentase Angka Melanjutkan SD/MI dan SMP/MTs
 Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017

No.	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	SD/MI ke SMP/MTS	93,37	94,82	94,38	96,37	97,29
2.	SMP/MTs ke SMA/MA/SMK	66,73	72,97	74,24	78,01	84,47

Sumber : Dindikpora Kab. Temanggung Tahun 2018

Dari tabel di atas, selama tahun 2013-2017 AM SD/MI ke SMP/MTs maupun AM SMP/MTs ke SMA/MA/SMK selalu menunjukkan peningkatan. Peningkatan setiap tahun masing-masing jenjang berbeda. Rata-rata peningkatan AM SMP/MTs ke SMA/SMK/MA sebesar 3,75% sedangkan pada AM SD/MI ke SMP/MTs rata-rata peningkatannya sebesar 0,78% tiap tahun. Belum optimalnya AM SD/MI ke SMP/MTs disebabkan karena ada lulusan SD/MI yang melanjutkan ke luar daerah, dan ada lulusan SD/MI yang tidak melanjutkan baik ke jalur formal maupun ke jalur nonformal. Rendahnya AM SMP/MTs ke SMA/MA/SMK disamping disebabkan karena ada lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke luar daerah, dan ada lulusan SMP/MTs yang tidak melanjutkan baik ke jalur formal maupun ke jalur nonformal juga disebabkan oleh rendahnya daya tampung SMA/MA/SMK dan persebaran SMA/MA/SMK yang tidak merata.

9) Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan tertentu per 10.000 jumlah penduduk usia jenjang pendidikan tersebut. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia jenjang pendidikan tersebut. Kondisi rasio ketersediaan sekolah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.29.
 Rasio Ketersediaan Sekolah
 Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017

No	JENJANG PENDIDIKAN	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	TK/RA/BA					
1.1	Jumlah TK/RA/BA	495	503	504	516	514
1.2	Jumlah Penduduk usia 4-6 Tahun	35.249	34.944	36.118	36.113	36.102
1.3	Rasio per 10.000	140,43	143,94	139,54	142,88	142,37

No	JENJANG PENDIDIKAN	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
2	SD/MI					
2.1.	Jumlah sekolah negeri	411	411	411	411	411
2.1. 1	Jumlah SD negeri	409	409	409	409	409
2.1. 2	Jumlah MI negeri	2	2	2	2	2
2.2.	Jumlah sekolah swasta	163	164	165	166	166
2.2. 1	Jumlah SD swasta	23	23	23	23	23
2.2. 2	Jumlah MI swasta	140	141	142	143	143
2.3.	Jumlah sekolah SD/MI	574	575	576	577	577
2.4.	Jumlah penduduk usia 7-12 th	71,530	72,848	69,970	69,459	69,670
2.5.	Rasio per 10.000	80.25	78.93	82.32	83.07	82.82
3	SMP/MTs					
3.1.	Jumlah sekolah negeri	44	44	44	44	44
3.1. 1	Jumlah SMP negeri	42	42	42	42	42
3.1. 2	Jumlah MTs negeri	2	2	2	2	2
3.2.	Jumlah sekolah swasta	61	61	62	63	64
3.2. 1	Jumlah SMP swasta	30	30	31	32	33
3.2. 2	Jumlah MTs swasta	31	31	31	31	31
3.3.	Jumlah sekolah SMP/MTs	105	105	106	107	108
3.4.	Jumlah penduduk usia 13-15 th	36.005	34.381	34.394	34.318	34.233
3.5.	Rasio per 10.000	29.38	29.16	30.83	31.18	31.40
4	Pendidikan Dasar (SD/MI - SMP/MTs)					
4.1.	Jumlah Sekolah	679	680	682	684	685
4.2.	Jumlah penduduk usia 7-15 th	107.53 5	107.22 9	104.064	103.77 7	104.67 0
3.3.	Rasio per 10.000	63,14	63,41	65,53	65,91	65,44

Sumber : Dindikpora Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Dari data di atas, Rasio Ketersediaan Sekolah Pendidikan Dasar per 10.000 penduduk usia sekolah di Kabupaten Temanggung dalam periode Tahun 2013-2017 walau berfluktuatif namun menunjukkan peningkatan, pada Tahun 2013 dari 63,14 per 10.000 penduduk menjadi 65,44 per 10.000 penduduk pada Tahun 2017. Hal ini mencerminkan perhatian Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan dasar melalui penyediaan sarana belajar bagi anak usia sekolah.

10) Rasio Siswa per Guru

Rasio siswa per guru adalah perbandingan antara jumlah siswa dengan jumlah guru pada jenjang pendidikan tertentu. Kriteria: makin tinggi rasio berarti makin banyak siswa yang harus dilayani oleh seorang guru atau makin kurang jumlah guru di suatu daerah. Khusus pendidikan nonformal berarti makin banyak peserta didik yang harus dilayani oleh tutor.

Rasio Siswa/Guru digunakan untuk mengetahui rata-rata guru yang dapat melayani siswa di suatu sekolah dan daerah sehingga dapat ditentukan daerah mana yang memerlukan tambahan guru. Khusus nonformal untuk mengetahui beban kerja tutor apakah cukup atau sudah melebihi ketentuan.

Rasio guru/murid sekolah PAUD dan Pendidikan Dasar di Kabupaten Temanggung 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.30.
Rasio Guru dan Murid
Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	TK/RA/BA					
1.1	Jumlah Guru TK/RA/BA	1.436	1.683	1.639	1.671	1.656
1.2	Jumlah Siswa TK/RA/BA	23.310	23.204	24.437	23.465	23.261
1.3	Rasio per 1.000	61,60	72,53	67,07	71,21	71,19
2	SD/MI					
1.1.	Jumlah guru	5,728	5,527	5,488	5,550	5.442
1.1.1	Jumlah guru SD PNS	2,806	2,616	2,689	2,568	2.446
1.1.2	Jumlah guru SD Non PNS	1,576	1,634	1,558	1,722	1.707
1.1.3	Jumlah guru MI PNS	164	162	153	156	238
1.1.4	Jumlah guru MI Non PNS	1,182	1,115	1,088	1,104	1.051

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.2.	Jumlah murid sekolah negeri	56,305	55,245	54,599	54,920	54.722
1.2.1	Jumlah murid SD negeri	55,598	54,492	53,773	54,032	53.781
1.2.2	Jumlah murid MI negeri	707	753	826	888	941
1.3.	Jumlah murid sekolah swasta	19,461	20,107	20,978	22,108	22.974
1.3.1	Jumlah murid SD swasta	4,860	5,174	5,233	5,316	5.433
1.3.2	Jumlah murid MI swasta	14,601	14,933	15,745	16,792	17.531
1.4.	Jumlah murid	75,766	75,352	75,577	77,028	77.696
1.5.	Rasio per 1.000	75.60	73.35	72.61	72.05	70,04
3	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah guru	2,136	2,201	2,167	2,159	2.170
2.1.1	Jumlah guru SMP PNS	975	950	933	936	907
2.1.2	Jumlah guru SMP Non PNS	557	581	612	610	641
2.1.3	Jumlah guru MTs PNS	94	102	95	84	80
2.1.4	Jumlah guru MTs Non PNS	510	568	527	529	542
2.2.	Jumlah murid sekolah negeri	21,944	20,032	20,498	21,111	20.925
2.2.1	Jumlah murid SMP negeri	20,310	18,431	18,788	19,352	19.114
2.2.2	Jumlah murid MTs negeri	1,634	1,601	1,710	1,759	1.811
2.3.	Jumlah murid sekolah swasta	11,292	10,588	11,521	11,943	11.973
2.3.1	Jumlah murid SMP swasta	5,531	5,067	5,633	5,900	5.771
2.3.2	Jumlah murid MTs swasta	5,761	5,521	5,888	6,043	6.202
2.4.	Jumlah murid	33,236	30,620	32,019	33,054	32.898
2.5.	Rasio per 1.000	64.27	71.88	67.68	65.32	65,96
4	Pendidikan Dasar (SD/MI - SMP/MTs)					
3.1.	Jumlah Guru	7,864	7,728	7,655	7,709	7.612
3.2.	Jumlah Murid	109,002	105,972	107,596	110,082	110.594
3.3.	Rasio per 1.000	72.15	72.92	71.15	70.03	68,83

Sumber : Dindikpora Kab. Temanggung Tahun 2018

Perkembangan Rasio guru/murid selama kurun waktu 2013-2017 mengalami peningkatan tiap tahunnya, untuk sekolah SD sederajat pada tahun 2013 sebesar 75,60 per 1.000. Ini memberikan gambaran setiap guru mengajar anak sekitar 13,22 murid, dan pada tahun 2017 sebesar 70,04 per 1.000 atau setiap guru mengajar 14,28 murid.

Pada jenjang pendidikan SMP/MTs pada tahun 2013 rasio guru/murid sebesar 64,27 per 1.000, yang berarti bahwa setiap guru mengajar anak sekitar 15,56 murid, dan pada tahun 2017 sebesar 65,96 yang berarti bahwa setiap guru mengajar sekitar 15,16 murid. Secara umum pada jenjang pendidikan dasar rasio guru/murid pada tahun 2013 sebesar 72,15 per 1.000 atau setiap guru mengajar sekitar 13,86 murid, dan pada tahun 2017 sebesar 68,83 atau setiap guru mengajar sekitar 14,53 murid.

11) Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)

Angka Melek Huruf (AMH) merupakan proporsi penduduk berusia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. AMH adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia >15 tahun yang melek huruf dengan penduduk usia >15 tahun dan dinyatakan dalam persentase.

Kriteria: makin tinggi AMH berarti makin baik mutu penduduk di suatu daerah. AMH digunakan untuk mengetahui banyaknya penduduk yang buta huruf di suatu daerah sehingga dapat ditentukan cara penanggulangannya melalui berbagai kebijakan di bidang pendidikan.

Tabel 2.31.
Angka Melek Huruf
Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Penduduk Usia >15 Tahun bisa Membaca dan Menulis	519.94 4	528.94 9	540.21 0	547.80 1	555.78 2
Jumlah Penduduk Usia >15	541.66 5	551.04 6	549.32 9	556.87 8	564.36 0
Angka Melek Huruf	95,99	95,99	98,34	98,37	98,48

Sumber : BPS dan Dindikpora Kab. Temanggung Tahun 2018

Dari tabel di atas terlihat bahwa angka melek huruf di Kabupaten Temanggung selama 5 tahun terakhir semakin meningkat. Pada tahun 2013 AMH sebesar 95,99% dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 98,48%. Perkembangan AMH nampak kurang signifikan yaitu sekitar 0,50% setiap

tahun. Untuk mencapai AMH 100% sangat sulit karena sebagian besar penduduk buta huruf telah berusia lanjut > 65 tahun yang tersebar di hampir seluruh wilayah.

12) Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D4

Berdasarkan Pasal 29 Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pendidik pada satuan pendidikan dasar memiliki kualifikasi akademik S1/D4. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 28 Ayat 2). Pendidik yang memenuhi kualifikasi akademik S1/D4 diharapkan dapat menggali dan mengembangkan potensi peserta didik, sehingga peserta didik memiliki kompetensi yang tinggi.

Tabel 2.32.
Jumlah Guru Memiliki Kualifikasi S1/D4, S2 atau lebih
Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Kualifikasi S1/D4					
TK/RA/BA					
a. Guru Memenuhi kualifikasi	582	844	976	1.100	1.106
b. Jumlah Guru	1.436	1.683	1.639	1.671	1.656
c. Persentase	40,55	50,14	59,56	65,80	66,78
SD/MI					
a. Guru Memenuhi kualifikasi	3.896	4.477	4.643	4.850	4.790
d. Jumlah Guru	5.728	5.527	5.488	5.550	5.442
e. Persentase	68,01	81,00	84,60	87,39	88,02
SMP/MTs					
a. Guru Memenuhi kualifikasi	1.886	1.970	1.958	1.972	2.052
f. Jumlah Guru	2.136	2.201	2.167	2.159	2.170
g. Persentase	88,29	89,50	90,35	91,34	94,56
Persentase Guru ≥ S1/D4					
a. Guru SD/MI	70,58	82,12	85,44	87,89	87,82
b. Guru SMP/MTs	72,00	85,64	88,19	88,19	85,99

Sumber : Dindikpora Kab. Temanggung Tahun 2018

Perkembangan jumlah pendidik yang memenuhi kualifikasi S1/D4 jenjang pendidikan dasar dapat dilihat pada Tabel di atas. Selama kurun waktu tahun 2013-2017 jumlah pendidik yang memenuhi kualifikasi akademik mengalami peningkatan fluktuatif.

Pada tahun 2013 jumlah pendidik yang memenuhi kualifikasi akademik \geq S1/D4 jenjang SD/MI sebanyak 70,58% meningkat menjadi 87,82% pada tahun 2017. Sedangkan jenjang SMP/MTs pendidik yang memenuhi kualifikasi akademik \geq S1/D4 sebanyak 72,00% pada tahun 2013 meningkat menjadi 85,99% pada tahun 2017.

Rata-rata perkembangan persentase pendidik yang memenuhi kualifikasi akademik \geq S1/D4 jenjang SD/MI sebesar 3,25% setiap tahun. Sedangkan pada jenjang SMP/MTs rata-rata perkembangannya sebesar 2,58% setiap tahun. Perkembangan yang cukup signifikan ini disebabkan kualifikasi akademik S1/D4 merupakan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.

13) Presentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik

Definisi: Perbandingan antara jumlah ruang kelas menurut kondisi pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah ruang kelas seluruhnya pada jenjang yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Kriteria: makin besar nilainya berarti makin baik dipandang dari prasarana sekolah. Idealnya = 100 persen berarti semua ruang kelas dalam kondisi baik.

Batasan ruang kelas dalam kondisi baik adalah ketika tingkat kerusakannya 0 sampai 20%, ruang kelas rusak ringan ketika tingkat kerusakannya maksimum 35%, ruang kelas rusak sedang ketika tingkat kerusakannya maksimum 45%, dan dikatakan rusak berat adalah ketika kerusakannya maksimum 65%.

Rumus penghitungan persentase ruang kelas dalam kondisi baik adalah jumlah ruang kelas dalam kondisi baik pada jenjang pendidikan tertentu dibagi jumlah ruang kelas pada jenjang pendidikan tertentu yang sesuai dikali 100%.

Tabel 2.33.
 Persentase Ruang Kelas Kondisi Baik
 Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	TK/RA/BA	71,29	72,40	73,48	74,55	75,60
2	SD/MI	82,66	83,37	84,08	84,78	85,48
3	SMP/MTs	87,52	87,71	87,90	88,08	88,25

Sumber: Dindikpora Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Tabel 2.34.
 Persentase Sekolah Terakreditasi Minimal B
 Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	TK/RA/BA	48,69	50,50	51,59	51,74	52,72
2	SD/MI	67,48	75,00	75,00	91,16	94,98
3	SMP/MTs	52,38	86,79	88,68	87,85	92,52
4	Satuan PNF	6,12	5,88	7,69	15,09	20,37

Sumber: Dindikpora Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Selama kurun waktu 2013-2017 Persentase Sekolah Terakreditasi Minimal B pada semua jenjang/jenis pendidikan mengalami kenaikan yang cukup baik. Pada tahun 2013 Persentase Sekolah Terakreditasi Minimal B TK/RA/BA mencapai 48,99% meningkat menjadi 52,72% pada tahun 2017. Jenjang SD/MI meningkat dari 67,48% pada tahun 2013 menjadi 94,98% pada tahun 2017, jenjang SMP/MTs meningkat dari 52,38% pada tahun 2013 menjadi 92,52% pada tahun 2017, sedangkan pada Satuan PNF meningkat dari 6,12% pada tahun 2013 menjadi 20,37% pada tahun 2017.

Untuk Bidang Pendidikan, dalam struktur ruang RTRW Kabupaten Temanggung, koneksitas antar kawasan telah terhubung baik sehingga memudahkan aksesibilitas siswa maupun guru. Namun disisi lain, sarana prasarana pendukung lainnya seperti moda transportasi umum masih terbatas sehingga dapat mempengaruhi siswa maupun guru ke lokasi sarana prasarana pendidikan.

b. Bidang Kesehatan

1) Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan salah satu indikator derajat kesehatan masyarakat. Angka Harapan Hidup (AHH) yaitu rata-rata jumlah



tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Semakin tinggi AHH maka derajat kesehatan masyarakat semakin baik, begitu pula sebaliknya.

Keberhasilan program kesehatan dan

program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup penduduk dari suatu daerah. AHH penduduk di Kabupaten Temanggung Tahun 2013 sampai 2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.35.
Angka Harapan Hidup Kabupaten Temanggung,
Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2017

No	Angka Harapan Hidup/AHH	2013	2014	2015	2016	2017
1	Kabupaten Temanggung	75.31	75.34	75.35	75.39	75.42
2	Jawa Tengah	73.28	73.88	73.96	74.02	74.08
3	Nasional	70.40	70.59	70.78	70.90	71.06

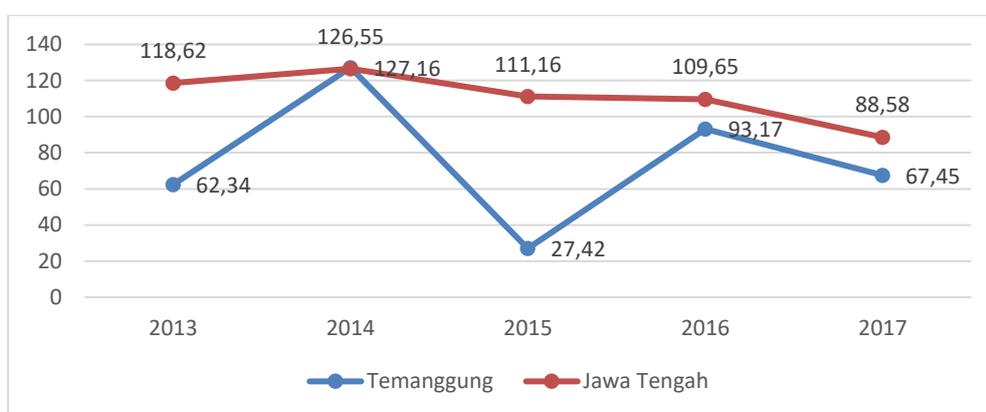
Sumber: BPS Kab. Temanggung Tahun 2018

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 AHH di Kabupaten Temanggung telah mencapai 75,42 tahun dan apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya selalu terjadi peningkatan. Demikian juga bila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, AHH di Kabupaten Temanggung lebih tinggi. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan derajat kesehatan masyarakat, karena lama hidup seseorang tidak terlepas dari tingkat kesehatan yang bersangkutan. Kesehatan masyarakat antara lain dipengaruhi oleh asupan gizi yang baik, tingkat kepedulian dan perawatan terhadap kesehatan sehingga angka harapan hidup yang tinggi menunjukkan keberhasilan pembangunan.

2) Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan dan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.

Masih adanya kasus kematian ibu menunjukkan bahwa masih diperlukan adanya program-program yang berkaitan dengan kesehatan ibu hamil seperti gerakan sayang ibu, pemberian makanan tambahan ibu hamil, pelayanan kesehatan setelah melahirkan, desa siaga, dan deteksi dini ibu hamil resiko tinggi.



Gambar 2.14.
Angka Kematian Ibu (AKI)
Kabupaten Temanggung dan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2013 – 2017

Tabel di atas memperlihatkan bahwa angka kematian ibu selama lima tahun terakhir cenderung fluktuatif, kadang jumlahnya menurun dan bertambah secara drastis, dan Tahun 2014 mencapai AKI tertinggi yaitu sebesar 127,16 per 100.000 Kelahiran Hidup. AKI Kabupaten Temanggung tahun 2014 juga lebih tinggi dibandingkan AKI Provinsi Jawa Tengah (126,55 per 100.000 kelahiran hidup). Target global SDGs (*Sustainable Development Goals*) yaitu menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi 70 per 100.000 KH telah tercapai pada tahun 2017 (67,45 per 100.000 kelahiran hidup).

3) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup

Angka Kematian Bayi (AKB) dihitung dengan jumlah kematian bayi usia kurang dari satu tahun di suatu wilayah dalam kurun waktu satu tahun per jumlah kelahiran hidup di suatu wilayah dalam kurun waktu satu tahun dikali 1.000.

Faktor-faktor yang berhubungan dengan kelangsungan hidup bayi meliputi berat badan lahir, waktu pemberian ASI, penolong persalinan, frekuensi pemeriksaan antenatal, nomor urut lahir, dan tempat persalinan.

Tabel 2.36.
Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)
Kabupaten Temanggung
Tahun 2013-2017

NO	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah kematian bayi (kasus)	173	167	183	136	137
2	Jumlah kelahiran hidup (jiwa)	11.228	11.010	10.935	10.733	10.378
3	Angka Kematian Bayi (AKB)/ 1000 KH	15,41	15,17	16,82	12,67	13,20
4	Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)	984,59	984,83	983,20	987,30	986,80

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2018

AKB dan AKHB pada tahun 2013-2017 cenderung fluktuatif. Hal ini menunjukkan bahwa program-program untuk mengurangi AKB dan AKHB harus tetap dikedepankan, misalnya program pelayanan kesehatan ibu hamil, program imunisasi, pencegahan penyakit menular pada anak-anak, program ASI Eksklusif, program tentang gizi serta pemberian makanan sehat untuk ibu hamil dan balita.

4) Persentase Balita Gizi Buruk dan Stunting



Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita. Keadaan tubuh anak dilihat dari berat badan menurut umur maupun menurut panjang badannya. Gizi buruk adalah bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi menahun.

Gizi buruk pada balita dapat dilihat melalui kegiatan pemantauan status gizi (PSG). Setiap tahun dilakukan kegiatan Pemantauan Status Gizi (PSG) dengan mengambil sejumlah sampel balita di tiap-tiap wilayah Puskesmas untuk mengetahui proporsi status gizi balita di Kabupaten Temanggung mulai dari gizi lebih sampai gizi buruk sebagai salah satu upaya untuk memantau tumbuh kembang balita. Hasil kegiatan PSG yang

ditampilkan dari tahun 2013 sampai tahun 2017 terlihat proporsi status gizi buruk berdasarkan BB/U tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 0,35% dari tahun 2016 yang sebesar 0,85%. Persentase gizi balita dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.37.
Kondisi Status Gizi Balita Kabupaten Temanggung
Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Persentase balita gizi buruk	0,93	2,00	0,75	0,85	0,35
2.	Persentase balita gizi kurang	13,47	14,00	6,56	5,81	5,29
3.	Persentase balita gizi baik	83,75	82,20	89,9	92,21	92,22
4.	Persentase balita gizi lebih	1,85	1,80	2,79	1,98	1,98

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Dari tabel diatas terlihat bahwa persentase balita gizi buruk cenderung fluktuatif, angka ini selalu ada di bawah 10%, termasuk kategori rendah menurut WHO dan masih berada di bawah target nasional yaitu kurang dari 5%. Status gizi balita bersifat labil, karena sangat dipengaruhi pola asupan makanan bergizi dan penyakit penyerta, misalnya diare, cacangan, demam berdarah, thypus dan lain-lain. Masih diperlukan adanya upaya peningkatan status gizi bayi dan balita melalui program yang terkait dengan kesehatan bayi dan balita.

Kesehatan seorang balita sangat dipengaruhi oleh asupan gizi yang terserap dalam tubuh. Kurangnya gizi yang diserap oleh tubuh mengakibatkan seorang balita mudah terserang penyakit, karena gizi memberikan pengaruh yang besar terhadap kekebalan tubuh. Peningkatan gizi pada balita ini dipengaruhi oleh peningkatan pengetahuan ibu tentang gizi, melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan, perbaikan ekonomi keluarga, perbaikan perilaku pengasuhan, konsumsi makanan yang mengikuti kaidah gizi dan kesehatan dan peningkatan kesehatan ibu dan anak. Salah satu akibat kurang gizi balita dapat menyebabkan *stunting*. *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. *Stunting* pada balita dan baduta di Kabupaten Temanggung sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 2.38.
Prevalensi Stunting Kabupaten Temanggung
Tahun 2013-2017

NO	TAHUN	Capaian Stunting	
		Status Gizi Balita 0-59 bulan	Status Gizi Baduta 0-23 bulan
1	2013	n.a	n.a
2	2014	36,8	n.a
3	2015	33,3	18,8
4	2016	33,6	22,8
5	2017	30,0	20,1

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Prevalensi *stunting* balita di Kabupaten Temanggung pada tahun 2014 (36,8%) berada pada angka tertinggi artinya lebih buruk dari tahun-tahun berikutnya, sedangkan pada baduta terjadi penurunan di tahun 2017. Target RPJMN tahun 2014-2019 adalah menurunkan *stunting* menjadi 28%, dengan demikian prevalensi *stunting* balita di Kabupaten Temanggung tahun 2017 (30%) belum memenuhi target. *Stunting* berdampak pada tingkat kecerdasan, kerentanan terhadap penyakit, menurunkan produktifitas dan kemudian menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan dan ketimpangan. Oleh sebab itu pada perbaikan gizi pada 1.000 hari pertama kehidupan anak menjadi hal yang penting melalui praktek pengasuhan yang baik, perbaikan layanan kesehatan dan peningkatan akses ke makanan bergizi serta air minum dan sanitasi yang memenuhi syarat.

5) Persentase Rumah Tangga yang memiliki jamban

Sanitasi adalah perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih dengan maksud mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya. Sanitasi yang baik merupakan elemen penting yang menunjang kesehatan manusia. Menurut WHO definisi sanitasi merujuk kepada penyediaan sarana dan pelayanan pembuangan limbah kotoran manusia seperti urine dan faeces. Sanitasi berhubungan dengan kesehatan lingkungan yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat.

Definisi rumah tangga yang memiliki jamban sehat adalah rumah tangga yang memiliki fasilitas jamban sehat (memenuhi syarat kesehatan), antara lain dilengkapi dengan jenis kloset leher angsa atau plengsengan dengan tutup dan memiliki tempat pembuangan akhir tinja tangki (*septic tank*) atau Sistem pengolahan Air limbah (SPAL), dan merupakan fasilitas buang air besar yang digunakan sendiri atau bersama.

Realisasi persentase rumah tangga yang memiliki jamban di Kabupaten Temanggung dari tahun 2013 s.d 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.39.
Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Jamban
Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah RT yang memiliki akses terhadap jamban	98.398	100.615	102.993	110.978	137.085
2	Jumlah Rumah Tangga	193.096	194.116	195.368	196.385	198.785
3	Persentase	50,96	51,83	52,72	56,51	68,96

Sumber: Dinas kesehatan Kabupaten Temanggung 2018

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase rumah tangga yang memiliki jamban cenderung meningkat. Pemerintah Kabupaten Temanggung berupaya melakukan percepatan, salah satunya dengan pembuatan jamban bagi keluarga miskin.

6) Angka Kematian Balita per 1.000 kelahiran hidup

Angka Kematian Balita adalah jumlah anak yang dilahirkan pada tahun tertentu dan meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun, dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup.

Angka kematian balita selama lima tahun masih fluktuatif, dari 16,74 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2013 menjadi 15,23 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2017. Angka Kematian Balita menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan balita, tingkat pelayanan KIA/Posyandu, tingkat keberhasilan program KIA/Posyandu dan kondisi sanitasi lingkungan.

Tabel 2.40.
Angka Kematian Balita Per 1.000 Kelahiran Hidup
Kabupaten Temanggung dan Provinsi Jawa Tengah,
Tahun 2013-2017

No	Angka Kematian Balita Per 1.000 KH	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Temanggung	16.8	16,35	19.01	14.26	15.23
2	Jawa Tengah	11.80	11.54	11.64	11.80	10.47

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Dari tabel di atas, Angka Kematian Balita di Kabupaten Temanggung fluktuatif dan masih tinggi bila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah.

7) Angka Kematian Neonatal per 1.000 kelahiran hidup

Angka kematian neonatal (bayi usia 0-28 hari) menjadi penting karena kematian neonatal memberi kontribusi terhadap kematian bayi di Kabupaten Temanggung.

Tabel 2.41.
Angka Kematian Neonatus
Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Kematian Neonatus (kasus)	131	121	122	95	99
Jumlah Kelahiran Hidup (jiwa)	11.228	11.010	10.935	10.733	10.378
Angka kematian neonatal per 1.000 KH	11,66	10,99	11,16	8,85	9,54

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Temanggung Tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas, angka kematian neonatal cenderung fluktuatif. Jika dilihat kontribusinya terhadap kematian bayi, pada Tahun 2017 kematian neonatus berkontribusi terhadap 72,26% kasus kematian neonatus, dimana dari 147 kasus kematian bayi di Kabupaten Temanggung, 99 kasus diantaranya adalah kematian neonatal. Upaya menurunkan kasus kematian neonatal ini terlihat dari penanganan komplikasi neonatal atau bawaan lahir dengan penyakit yang dapat menyebabkan kecacatan atau kematian seperti asfiksia, ikterus, hipotermia, tetanus neonatorum, sepsis, trauma lahir, BBLR, sindroma gangguan pernafasan dan kelainan kongenital maupun yang termasuk klasifikasi kuning dan merah pada pemeriksaan dengan manajemen terpadu bayi muda.

8) Rasio posyandu per satuan balita

Rasio posyandu terhadap jumlah balita diperlukan dalam upaya peningkatan fasilitasi pelayanan pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang anak sejak dalam kandungan, agar status gizi/derajat kesehatan ibu dan anak dapat dipertahankan/ ditingkatkan.

Tabel 2.42.
Rasio Posyandu dan Balita
Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah posyandu	1.497	1.505	1.506	1.505	1.507
2.	Jumlah balita	58.221	45.428	53.645	55.019	55.832

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
3.	Rasio	1 : 39	1 : 31	1 : 36	1 : 37	1:37
	Rasio Ideal	1 : 50				

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Dari tabel di atas, jumlah posyandu yang ada di Kabupaten Temanggung telah mampu mendukung pelayanan kesehatan ibu dan anak karena telah melampaui rasio ideal 1 posyandu untuk 50 balita.

9) Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk

Rasio sarana kesehatan seperti Puskesmas, Puskesmas pembantu dan Poliklinik kesehatan desa terhadap jumlah penduduk dan sebarannya di masing-masing kecamatan memberikan data tentang tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Secara jelas perkembangannya tersebut pada tabel berikut.

Tabel 2.43.
Jumlah dan Rasio Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Pos Kesehatan Desa (PKD) Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Penduduk	731.911	738.915	760,297	768,290	772,289
2	Jumlah Puskesmas	24	24	24	24	25
	Puskesmas Rawat Inap	4	4	4	4	5
	Puskesmas Non Rawat Inap	20	20	20	20	20
3	Rasio Puskesmas per satuan penduduk	1:30.496	1:30.788	1 : 31.679	1 : 32.012	1 : 28.891
4	Jumlah Puskesmas Pembantu	40	41	40	40	38
5	Rasio Pustu per satuan penduduk	1 : 18.298	1 : 18.023	1 : 19.007	1 : 19.207	1 : 20.323
6	Jumlah Pos Kesehatan Desa	158	162	162	215	212
7	Rasio PKD per satuan penduduk	1 : 4.633	1 : 4.562	1 : 4.693	1 : 3.573	1 : 3.643

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Pelayanan kesehatan dasar dapat digambarkan melalui indikator rasio puskesmas terhadap 30.000 penduduk. Pada tahun 2017 dengan jumlah penduduk sebesar 722.289 jiwa maka jumlah puskesmas ideal adalah 24,08 atau jika dibulatkan sebanyak 24 puskesmas. Jumlah puskesmas di Kabupaten Temanggung tahun 2017 sebanyak 25 puskesmas telah memenuhi kebutuhan pelayanan dasar secara ideal bagi masyarakat Temanggung.

Dari data di atas, bahwa sebaran Puskesmas telah ada di setiap Kecamatan dan dalam kondisi tertentu bisa lebih dari 1 (satu) Puskesmas dalam 1 (satu) kecamatan dengan pertimbangan kebutuhan pelayanan, jumlah penduduk dan aksesibilitas.

10) Rasio rumah sakit per satuan penduduk

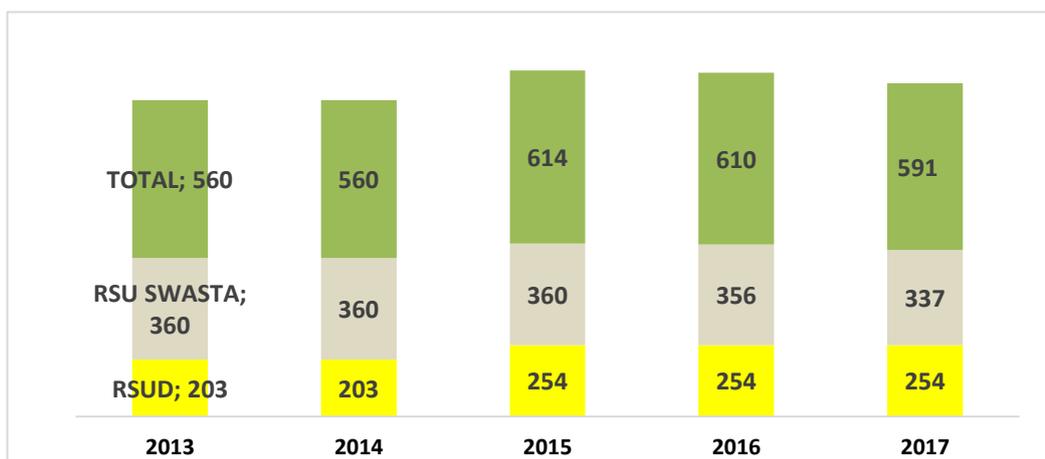
Rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan yang memiliki tenaga medis profesional serta sarana kedokteran yang permanen, dan asuhan keperawatan yang berkesinambungan. Rumah sakit memiliki peranan penting dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Data rasio rumah sakit per satuan penduduk tercantum pada tabel berikut.

Tabel 2.44.
Rasio Rumah Sakit Per jumlah Penduduk
Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017

NO	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Penduduk	731.911	738.915	760.297	768.290	772.289
2.	Jumlah Rumah Sakit	4	4	4	4	4
	Rumah Sakit Pemerintah	1	1	1	1	1
	Rumah Sakit Swasta	3	3	3	3	3
3.	Rasio Rumah Sakit	1:182.978	1:184.729	1:190.074	1:192.072	1:193.072
	Rasio ideal	1:100.000				

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Angka rasio rumah sakit pada tahun 2017 adalah 1 : 193.072 artinya satu rumah sakit melayani 193.072 jiwa, idealnya 1 rumah sakit melayani 100.000 penduduk, sehingga Kabupaten Temanggung dengan penduduk sebesar 772.289 jiwa membutuhkan 8 rumah sakit atau membutuhkan 4 rumah sakit baru. Di sisi lain sebaran rumah sakit yang ada masih terbatas di 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Temanggung dan Parakan.



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Gambar 2.15.
Perkembangan Jumlah Tempat Tidur Rumah Sakit di
Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017

11) Rasio dokter per satuan penduduk

Indikator rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan secara langsung oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk. Rasio dokter per satuan penduduk selama 3 (tiga) tahun terakhir tersebut dalam tabel berikut.

Tabel 2.45.
Jumlah dan Rasio Dokter per Satuan Penduduk
Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah penduduk	731.911	738.915	760,297	768,290	772,289
2	Jumlah dokter umum	109	66	71	61	55
3	Rasio dokter umum	1:6.715	1:11.196	1:10.708	1:12.595	1:14.042
4	Jumlah dokter gigi	41	27	28	27	27
5	Rasio dokter gigi	1:17.851	1:27.367	1:27.153	1:28.455	1:28.603
6	Jumlah dokter spesialis	79	63	49	53	56
7	Rasio dokter spesialis	1:9.265	1:11.729	1:15.516	1:14.496	1:13.791
8	Jumlah Dokter (Umum, Gigi, Spesialis)	229	156	148	141	136

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Rasio dokter umum 1 banding 14.525 menunjukkan satu orang dokter umum melayani 14.525 penduduk. Angka rasio tersebut masih jauh dari ideal karena idealnya apabila dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, satu orang dokter melayani sebanyak-banyaknya 2.500 penduduk sehingga masih memerlukan penambahan jumlah dokter. Jumlah dokter (umum, gigi dan spesialis) pada Tahun 2015 sebanyak 148 dan pada Tahun 2017 sebanyak 136 dokter sehingga ada penurunan jumlah dokter yang cukup signifikan di Kabupaten Temanggung.

12) Persentase Tenaga Kesehatan yang Memenuhi Standar Kompetensi

Tenaga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi di Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.46.

Persentase Tenaga Kesehatan yang memenuhi Standar Kompetensi di Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Tenaga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi	n.a	660	677	667	696
2	Jumlah Tenaga kesehatan	n.a	745	764	749	772
3	Persentase Tenaga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi	n.a	88,59	88,61	89,05	90,16

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase tenaga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 mengalami peningkatan dari 88,59% menjadi 90,16%. Peningkatan tersebut didorong karena meningkatnya kesadaran tenaga kesehatan dalam meningkatkan kompetensi minimal pendidikannya sesuai dengan amanat Undang-Undang tentang Tenaga Kesehatan. Peningkatan kompetensi pendidikan tersebut ditempuh melalui program ijin belajar jalur biasa dan ijin belajar RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau).

13) Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah terakreditasi utama

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dapat diartikan sebagai fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, promorif, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.

Akreditasi puskesmas adalah suatu pengakuan terhadap hasil dari proses penilaian eksternal oleh Komisioner Akreditasi terhadap puskesmas, apakah sesuai dengan standar akreditasi yang ditetapkan. Realisasi Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah terakreditasi utama di Kabupaten Temanggung dari tahun 2013 s.d 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.47.
Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah terakreditasi di Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah FKTP terakreditasi utama	n.a	n.a	n.a	1	2
2	Jumlah FKTP terakreditasi madya	n.a	n.a	n.a	8	15
3	Jumlah FKTP terakreditasi dasar	n.a	n.a	n.a	5	7
4	Jumlah FKTP	24	24	24	24	25
	Persentase akreditasi utama	n.a	n.a	n.a	4,17%	8%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa penilaian akreditasi puskesmas baru dimulai pada tahun 2016 dengan jumlah puskesmas yang dinilai sebanyak 14 puskesmas, dan tahun 2017 sebanyak 10 puskesmas. Puskesmas yang sudah terakreditasi utama adalah puskesmas Tlogomulyo dan puskesmas Tembarak.

14) Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani adalah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang mendapat penanganan definitif sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan (Polindes, Puskesmas, Puskesmas pembantu, Rumah Bersalin, RSIA/RSB, dan RSUD).

Cakupan komplikasi kebidanan yang tertangani di Kabupaten Temanggung pada periode tahun 2017 mencapai 100 %, artinya bahwa semua ibu hamil dengan komplikasi yang datang ke sarana kesehatan atau ditemukan oleh tenaga kesehatan telah ditangani seluruhnya dan bahkan termasuk melayani ibu hamil yang berasal dari luar wilayah kerjanya. Secara rinci terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.48.
Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani
Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017

NO	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan	2.652	3.619	3.863	3.796	3.151
2	Jumlah penanganan komplikasi kebidanan	2.972	3.619	3.863	3.796	3.151
3	Cakupan komplikasi kebidanan	112,07	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2018

15) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan adalah jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Tabel 2.49.
Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan
Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan
Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017

NO	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah ibu yang ditolong oleh tenaga kesehatan	9.495	11.031	10.970	10.616	10.316
2	Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin	12.628	11.033	11.561	10.616	10.316
3	Cakupan pertolongan persalinan	75,19	99,98	94,9	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan sejak 2013 sampai dengan 2017 cenderung meningkat, hal ini menunjukkan meningkatnya kemampuan manajemen program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dalam pertolongan persalinan sesuai standar.

16) Cakupan desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)

UCI (*Universal Child Immunization*) ialah tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada $\geq 80\%$ sasaran bayi (0-11 bulan) dalam satu tahun. Imunisasi dasar lengkap pada bayi meliputi: 1 (satu) dosis BCG, 3 (tiga) dosis DPT, 4 (empat) dosis Polio, 4 (empat) dosis Hepatitis B, 1 (satu) dosis Campak.

Ibu hamil dan WUS meliputi 2 (dua) dosis TT. Anak sekolah tingkat dasar meliputi, 1 (satu) dosis DT, 1 (satu) dosis campak, 2 (dua) dosis TT.

Desa UCI adalah desa/kelurahan dimana $\geq 80\%$ dari jumlah bayi yang ada di desa/kelurahan tersebut sudah mendapatkan imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun.

Cakupan desa UCI tiap tahun sama dari tahun 2013 sampai tahun 2017 mendekati 100%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar bayi telah mendapatkan imunisasi. Rincian data selengkapnya seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.50.
Cakupan Desa UCI (*Universal Child Immunization*)
Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Desa/Kelurahan	289	289	289	289	289
2	Jumlah Desa/Kelurahan UCI	288	288	288	288	288
3	Persentase	99,65	99,65	99,65	99,65	99,65

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Selama 5 (lima) tahun terakhir capaian yang sama tersebut dikarenakan ada 1 (satu) desa yang masyarakatnya menolak untuk dilakukan imunisasi pada balita mereka, yaitu desa Bonjor Kecamatan Tretep.

17) Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan adalah jumlah balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan medis dibagi jumlah balita gizi buruk yang ada di satu wilayah pada kurun waktu tertentu.

Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan sejak 2013 sampai dengan 2017 selalu tercapai 100%. Hal ini menunjukkan adanya perhatian Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta masyarakat di lingkungan sekitar.

Tabel 2.51.
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan (%)
Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Balita Gizi Buruk	16	28	25	19	21
2	Balita Gizi buruk mendapatkan perawatan	16	28	25	19	21
3	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2018

18) Cakupan pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin adalah jumlah rujukan pasien masyarakat miskin dibagi dengan jumlah pasien masyarakat miskin kali 100 di suatu wilayah dalam kurun waktu yang sama. Cakupan ini tergantung pada kondisi kesehatan masyarakat miskin sehingga cakupannya tidak 100%. Namun pasien masyarakat miskin yang datang ke sarana kesehatan 100% semuanya tertangani.

Tabel 2.52.
Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin
Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan strategis (orang)	154.771	158.834	51.530	47.146	64.123
2.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)	53,01	34,42	76,29	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2018

19) Cakupan kunjungan bayi

Cakupan kunjungan bayi adalah jumlah kunjungan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu tertentu dibagi dengan jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama.

Cakupan bayi yang mendapatkan pelayanan paripurna minimal 4 (empat) kali, pada kurun waktu 2013-2017 cenderung fluktuatif, seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.53.
Cakupan Kunjungan Bayi
Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Kunjungan Bayi	10.960	10.876	10.531	10.481	10.060
2	Jumlah Bayi Lahir Hidup	11.228	11.010	10.939	10.733	10.627
3	Persentase Kunjungan Bayi	97,61	98,78	96,27	97,64	94,68

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2018

20) Cakupan kunjungan ibu hamil K4

Cakupan ibu hamil dengan K4 menggambarkan besaran ibu hamil yang melakukan kontak dengan tenaga kesehatan untuk mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar yang ditetapkan, yaitu paling sedikit empat kali dengan distribusi waktu 1 (satu) kali pada trimester pertama, 1 (satu) kali pada trimester kedua dan 2 (dua) kali pada trimester ketiga.

Cakupan ibu hamil dengan K4 di Kabupaten Temanggung selama kurun waktu tahun 2013-2017 masih fluktuatif. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.54.
Cakupan Ibu Hamil K4
Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Ibu Hamil	12.654	11.765	12.081	11.634	11.305
2	Jumlah Kunjungan Ibu Hamil K4	11.694	11.094	10.991	10.794	10.576
3	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	92,41	94,30	90,98	92,78	93,56

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Dari data di atas, menunjukkan belum semua ibu hamil melakukan kontak dengan tenaga kesehatan minimal 4 kali dalam mendapatkan pelayanan antenatal selama kehamilannya, pada tahun 2017 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2015 dan 2016.

21) Cakupan pelayanan nifas

Pada saat masa nifas (paska persalinan) masih terjadi kemungkinan kematian ibu maternal, sehingga perlu mendapatkan pelayanan kesehatan paska persalinan minimal 3 (tiga) kali.

Cakupan pelayanan kepada ibu paska persalinan yang sesuai standar pada kurun waktu tahun 2013 - 2017 cenderung fluktuatif. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa jangkauan dan kualitas pelayanan terhadap ibu pasca melahirkan telah merata dan sesuai standar. Data cakupan kunjungan nifas dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 2.55.
Cakupan Kunjungan Nifas
Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017

NO	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Kunjungan Nifas	10.828	11.031	10.677	10.378	10.316
2	Jumlah Ibu Nifas	10.842	11.031	11.561	10.616	10.316
3	Cakupan Kunjungan Nifas	96,25	100.00	92,35	97,76	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Dari data di atas, ibu nifas di Kabupaten Temanggung pada tahun 2017 telah melakukan kunjungan nifas.

22) Prevalensi Penyakit Tidak Menular (PTM)

Pertumbuhan jumlah penduduk dunia yang meningkat secara tajam terutama di negara berkembang menimbulkan berbagai masalah. Seiring dengan kemajuan jaman yang ditandai dengan modernisasi dan globalisasi menimbulkan dampak pada perubahan gaya hidup manusia. Hal ini menyebabkan pergeseran kecenderungan meningkatnya penyakit tidak menular (PTM) dari penyakit menular dan infeksi. Data PTM Kabupaten Temanggung yang diperoleh dari hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2017 oleh Kementerian Kesehatan RI menunjukkan peningkatan yang bermakna pada tahun 2017 sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.56.
Prevalensi Penyakit Tidak Menular
Kabupaten Temanggung, Tahun 2013 dan 2017

NO	Uraian	Tahun	
		2013	2017
1	Kanker	1,4%	1,8%
2	Stroke	7%	10,9%
3	Gagal Ginjal Kronis (GGK)	2%	3,8%
4	Diabetes Melitus (DM)	6,9%	8,5%
5	Hypertensi	25,8%	34,1%
6	Gangguan Jiwa	1,7%	7%
7	Obesitas	14,8%	21,8%
8	TB Paru	0,4%	0,4%

Sumber : Riset Kesehatan Dasar Tahun 2013 dan Tahun 2017

PTM yang mengalami peningkatan prevalensi tertinggi adalah hipertensi (8,3%), obesitas (7%) dan stroke (3,9%). Kasus PTM sangat terkait dengan gaya hidup yang tidak sehat seperti kebiasaan merokok, kurang olahraga, pola makan yang salah, stres dan gaya hidup tidak sehat lainnya. Namun faktor risiko ini termasuk yang dapat diubah sehingga upaya menciptakan gaya hidup yang sehat dilakukan melalui intervensi pada perilaku yang membahayakan kesehatan. Sedangkan faktor risiko yang tidak diubah yaitu faktor genetika hanya dapat dilakukan tindakan untuk mengurangi kegawatan penyakit.

23) Penemuan Penderita HIV

HIV merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus *Human Immunodeficiency Virus* yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Infeksi tersebut menyebabkan penderita mengalami penurunan ketahanan tubuh sehingga sangat mudah untuk terinfeksi berbagai macam penyakit lain. Sebelum memasuki fase AIDS penderita lebih dulu dinyatakan sebagai HIV positif. Jumlah HIV positif di masyarakat dapat diketahui melalui 3 metode, yaitu pada pelayanan *Voluntary, Counselling and Testing (VCT)*, Sero Survey dan Survey Terpadu Biologis dan Perilaku (STBP). Penemuan kasus HIV di Kabupaten Temanggung tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.57.
Penemuan Kasus HIV Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah penemuan kasus HIV	34	43	45	30	37
2	Jumlah HIV meninggal	13	22	15	9	8
3	Jumlah kasus HIV/AIDS	34	77	122	152	189

Sumber : Dinas Kesehatan kabupaten Temanggung tahun 2018

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penemuan kasus HIV di Kabupaten temanggung cenderung fluktuatif, tahun 2017 mengalami peningkatan penemuan kasus dari 30 kasus HIV di tahun 2016 menjadi 37 kasus yang ditemukan di tahun 2017, hal ini disebabkan semakin intensifnya pelaksanaan KTIP maupun KTS yang dilaksanakan baik di seluruh puskesmas maupun Rumah Sakit di Kabupaten Temanggung.

24) Penemuan Penderita Demam Berdarah Dengue per 100.000 penduduk

Penyakit demam Berdarah Dengue (DBD) adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang tergolong *Arthropod-Borne Virus*, genus *Flavivirus*, dan famili *Flaviviridae*. DBD ditularkan melalui gigitan nyamuk *Aedes Aegypti* atau *Aedes Albopictus*. Penyakit DBD dapat muncul sepanjang tahun dan dapat menyerang seluruh kelompok umur. Penyakit ini berkaitan dengan kondisi lingkungan dan perilaku masyarakat. Distribusi penemuan penderita DBD di Kabupaten Temanggung tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.58.
Incident Rate (IR) DBD per 100.000 penduduk di Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah kasus DBD	320	405	493	821	189
2	Jumlah penduduk	731.911	738.915	760.297	768.290	772.289
3	IR DBD per 100.000 penduduk	43,72	54,81	64,84	106,86	24,47

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Penyakit DBD masih merupakan permasalahan serius di Kabupaten Temanggung, Angka Kesakitan (*Incident rate/IR*) DBD di Kabupaten Temanggung tahun 2017 sebesar 24,47 per 100.000 penduduk, masih diatas

target nasional yang ditetapkan (<20 per 100.000 penduduk). Setiap penderita DBD yang dilaporkan dilakukan tindakan perawatan penderita, Penyelidikan Epidemiologi, pemantauan jentik di lapangan serta upaya pengendalian.

25) Persentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Rumah Tangga (RT) Strata Utama dan Paripurna

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat mampu menolong dirinya sendiri (mandiri) di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat.

Strata PHBS di Rumah Tangga di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.59.
Persentase PHBS Rumah Tangga
Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017

NO	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Rumah Tangga ber PHBS strata Utama dan Paripurna	156.897	195.991	161.779	176.577	185.268
2	Jumlah Rumah Tangga yang dipantau	205.988	207.806	204.180	220.668	224.062
3	Persentase Rumah Tangga ber PHBS strata Utama dan Paripurna	76,17%	94,31%	79,23%	80,02%	82,69%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tahun 2017 berdasarkan rumah tangga yang disurvei/dipantau rumah tangga di Kabupaten Temanggung sudah diatas target Provinsi Jawa Tengah 70% yaitu sebesar 82,69%.

Untuk Bidang Kesehatan, dalam struktur ruang RTRW Kabupaten Temanggung, koneksitas antar kawasan telah terhubung baik sehingga memudahkan aksesibilitas masyarakat Temanggung ke sarana dan prasarana kesehatan yang ada. Namun disisi lain, sarana prasarana pendukung lainnya seperti moda transportasi umum masih terbatas sehingga dapat mempengaruhi kecepatan warga masyarakat menuju ke lokasi sarana prasarana kesehatan khususnya Puskesmas dan rumah sakit.

c. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1) Jalan Kondisi Mantap (Baik dan Sedang)

Panjang jalan kabupaten dengan kondisi mantap (baik dan sedang) selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun melalui program peningkatan dan pemeliharaan jalan kabupaten serta adanya dukungan program dari provinsi maupun pusat. Total panjang jalan kabupaten adalah 739,127 km. Jalan kabupaten dengan kondisi mantap ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.60.
Jalan Kabupaten Berkondisi Mantap Tahun 2013-2017

Tahun	Jalan Kabupaten (km)		
	Panjang Jalan (km)	Kondisi Mantap (km)	%
2013	739,127	502,606	68,00
2014	739,127	504,313	68,23
2015	739,127	552,818	74,79
2016	739,127	566,488	76,64
2017	739,127	607,250	82,16

Sumber: DPUPKP Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Dari tabel di atas, jalan kabupaten kondisi mantap dari Tahun 2013 sampai 2017 cenderung meningkat. Kondisi jalan pada Tahun 2017, dari total 739,127 km panjang jalan yang ada terdapat 607,25 km jalan berkondisi mantap atau setara dengan 82,16%.

2) Jembatan Kondisi Baik

Jembatan kabupaten kondisi baik dari Tahun 2013 sampai 2017 cenderung meningkat. Kondisi jembatan pada Tahun 2017, dari total 335 unit jembatan yang ada terdapat 302 unit jembatan berkondisi baik atau setara dengan 90,15%.

Tabel 2.61.
Jembatan Kabupaten Berkondisi Baik Tahun 2013-2017

Tahun	Jembatan Kabupaten		
	Jumlah (unit)	Kondisi Baik (unit)	%
2013	335	276	82,39
2014	335	282	84,18
2015	335	283	84,48
2016	335	285	85,07
2017	335	302	90,15

Sumber: DPUPKP Kabupaten Temanggung Tahun 2018

3) Jaringan irigasi kondisi baik

Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi, sedangkan jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi. Daerah irigasi yang terletak utuh pada satu kabupaten berupa daerah irigasi yang mendapatkan air irigasi dari jaringan irigasi yang seluruh bangunan dan saluran serta luasannya berada dalam satu wilayah kabupaten.

Pemerintah kabupaten mempunyai wewenang dan tanggung jawab melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 Ha dalam 1 (satu) daerah kabupaten. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap. Jumlah Daerah Irigasi Kabupaten berkondisi baik ditampilkan pada tabel berikut. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Daerah Irigasi berjumlah 577 unit.

Tabel 2.62.
Daerah Irigasi Kabupaten Berkondisi Baik
di Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017

Tahun	Daerah Irigasi (DI)		
	Jumlah DI	Kondisi Baik (unit)	Persentase (%)
2013	577	215	37,26
2014	577	222	38,47
2015	577	254	44,02
2016	577	288	49,91
2017	577	298	51,65

Sumber: DPUPKP Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Dari tabel di atas, Daerah Irigasi kabupaten kondisi baik dari Tahun 2013 sampai 2017 cenderung meningkat. Kondisi Daerah Irigasi pada Tahun 2017, dari total 577 Daerah Irigasi yang ada, terdapat 298 (51,65 %).

Untuk Bidang Pekerjaan Umum, dalam struktur ruang RTRW Kabupaten Temanggung, koneksitas antar kawasan telah terhubung sehingga memudahkan aksesibilitas barang dan jasa serta warga masyarakat.

4) Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai Rencana Tata Ruang

Pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang merupakan persentase pemanfaatan tata ruang sesuai rencana tata ruang yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Temanggung. Realisasi persentase pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang di Kabupaten Temanggung dari tahun 2013 s.d 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.63.
Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai Rencana Tata Ruang
Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Pemanfaatan ruang sesuai RTRW	n.a	180	216	475	76.996,74
2	Pemanfaatan ruang	n.a	180	216	475	87.854,04
3	Persentase	n.a	100%	100%	100%	87,6%

Sumber: DPUPKP Kabupaten Temanggung, Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Pemanfaatan Ruang telah Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan. Namun dengan perkembangan kebutuhan ruang yang semakin meningkat sementara kondisi ruang yang ada tidak bertambah, maka muncul potensi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai atau pelanggaran tata ruang. Perubahan cara perhitungan juga didasari oleh kondisi di atas, diharapkan angka yang ada akan lebih menggambarkan kondisi Persentase pemanfaatan tata ruang sesuai rencana tata ruang yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung.

Dalam pola ruang RTRW Kabupaten Temanggung telah direncanakan seideal mungkin dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian dikendalikan ketat dan simpangan pemanfaatan ruang terjadi karena status lahan dalam administrasi pertanahannya masing berupa sawah/ tegalan namun perencanaan tata ruang telah sesuai dengan peruntukan pemanfaatan tata ruang kawasan.

d. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

1) Rumah tinggal yang terlayani air bersih layak

Ketersediaan air bersih layak dilihat dari tersedianya air bersih sampai sambungan rumah bagi yang menggunakan sistem perpipaan dan ketersediaan air bersih dari sumur gali bagi yang menggunakan sistem non perpipaan. Persentase rumah tinggal yang terlayani air bersih layak di Kabupaten Temanggung Tahun 2013 sampai 2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.64.
Rumah yang Terlayani Air Bersih Layak
Tahun 2013-2017

No.	Uraian	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah rumah	193.098	194.116	195.368	196.385	198.785
2	Jumlah rumah yang terlayani air bersih layak	n.a	139.472	145.861	163.254	164.335
	Persentase (%)	n.a	71,85	74,66	83,13	82,67

Sumber: DPUPKP Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa persentase rumah tinggal yang terlayani air bersih layak selama 5 (lima) tahun terakhir cenderung fluktuatif. Ketika menurun dikarenakan pertumbuhan jumlah rumah tinggal lebih tinggi daripada pertumbuhan jumlah rumah yang terlayani.

2) Persentase areal kawasan kumuh

Kawasan perumahan dan permukiman kumuh di Kabupaten Temanggung berada di kawasan perkotaan Temanggung, Parakan, Ngadirejo dan Kranggan. Dari total luas permukiman perkotaan seluas 1.507,17 Ha, terdapat lokasi perumahan dan kawasan permukiman kumuh seluas 297,81 Ha.

Tabel 2.65.
Persentase Luasan Kumuh Permukiman Perkotaan
Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Luas Kawasan Kumuh	376,11	368,51	358,41	333,21	297,81
2	Luasan Perukiman Perkotaan	1.507,17	1.507,17	1.507,17	1.507,17	1.507,17
	Persentase	24,95	24,45	23,78	22,11	19,75

Sumber : DLH Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa persentase luasan kumuh permukiman perkotaan selama 5 (lima) tahun terakhir cenderung menurun dari 24,95 % pada tahun 2013 menurun menjadi 19,75 % pada tahun 2017.

3) **Backlog Rumah**

Backlog dapat di artikan sebagai kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat. *Backlog* rumah dari perspektif kehunian dapat dihitung dengan mengacu konsep perhitungan ideal, 1 keluarga menghuni 1 rumah.

Konsep penghuni dalam perhitungan *backlog* merepresentasikan bahwa dalam setiap keluarga tidak diwajibkan untuk memiliki rumah, tetapi pemerintah memfasilitasi atau mendorong agar setiap keluarga, terutama yang tergolong masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR) bisa menghuni rumah yang layak, baik dengan cara sewa/ kontrak, beli atau menghuni rumah sendiri, maupun tinggal dirumah kerabat atau keluarga. Meskipun sudah ada pembangunan 5 (lima) rusunawa di Kabupaten Temanggung yaitu di Kelurahan Kranggan, Kelurahan Kertosari, Kelurahan Parakan Wetan, Kelurahan Parakan Kauman, dan Kelurahan Manggong tetapi belum bisa menyelesaikan permasalahan *backlog*. Data *backlog* di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.66.
Backlog Rumah Di Kabupaten Temanggung
Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah KK	n.a	n.a	253.878	252.922	256.127
2.	Jumlah Rumah Tinggal	193.098	194.116	195.368	196.385	198.785
3.	Jumlah KK yang tidak memiliki Rumah	n.a	n.a	58.510	56.537	57.342

Sumber: DPUPKP Kabupaten Temanggung Tahun 2018

4) **Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan**

Salah satu indikator untuk melihat kinerja di bidang persampahan adalah dengan melihat jumlah daya tampung Tempat Penampungan Sementara (TPS) per 1.000 penduduk sebagaimana tercantum pada tabel berikut.

Tabel 2.67.
Jumlah Daya Tampung TPS terhadap Jumlah Penduduk
Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah TPS (unit)	139	164	430	437	437
2.	Jumlah Volume TPS (m ³)	15,42	15,31	14,97	15,99	16,03
3.	Jumlah Penduduk (jiwa)	731.911	738.915	760.297	768.290	772.289
4.	Jumlah daya tampung TPS terhadap jumlah penduduk	47,45	48,26	50,78	48,05	48,17
5.	Rasio jumlah TPS terhadap jumlah penduduk	0,189	0,221	0,565	0,568	0,565

Sumber : DLH Kabupaten Temanggung Tahun 2018

5) Pelayanan Drainase Skala Kawasan / Kota Sehingga Tidak Terjadi Genangan

Pengertian dari indikator Persentase Pelayanan Drainase Skala Kawasan / Kota Sehingga Tidak Terjadi Genangan. Tersedianya sistem jaringan drainase adalah ukuran pencapaian kegiatan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan penyediaan sistem drainase diwilayahnya, baik bersifat struktural yaitu pencapaian pembangunan fisik yang mengikuti pengembangan perkotaannya, maupun bersifat non-struktural yaitu terselenggaranya pengelolaan dan pelayanan drainase oleh Pemerintah Kabupaten yang berupa fungsionalisasi institusi pengelola drainase dan penyediaan peraturan yang mendukung penyediaan dan pengelolaannya.

Tabel 2.68.
Persentase Pelayanan Drainase Skala Kawasan / Kota Sehingga Tidak Terjadi Genangan
Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017

No.	Uraian	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Panjang Jaringan drainase pada skala kawasan/kota	n.a	6.046	29.639	29.787	30.009
2	Panjang jalan kabupaten skala kawasan/kota umlah rumah berakses air minum layak	n.a	739.127	739.127	739.127	739.127
3	Persentase (%)		8.18	40,1	40,3	40,6

Sumber : DPUPKP Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Walaupun jumlah saluran drainase yang terbangun masih belum maksimal namun Pada dasarnya kondisi drainase di Kabupaten Temanggung sangat terbantu dari kondisi kemiringan wilayah yang ada, sehingga sangat jarang terjadi adanya genangan air atau terendahnya suatu kawasan permukiman lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam.

e. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

1) Tingkat Kriminalitas



Angka Kriminalitas adalah jumlah tindak kriminal yang terjadi dalam satu tahun dibagi jumlah penduduk kali 10.000. Berbagai kategori tindak kriminal adalah seperti curanmor, pembunuhan, pemerkosaan, dan sebagainya. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat dimana semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat. Adapun angka kriminalitas dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 2.69.
Tingkat Kriminalitas di Kabupaten Temanggung
Tahun 2013–2017

No	Jenis Kriminal	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah kasus Narkoba	3	14	13	17	21
2.	Jumlah kasus Pembunuhan	1	1	0	0	1
3.	Jumlah Kejahatan Seksual	3	6	11	19	19
4.	Jumlah kasus Penganiayaan	13	35	24	20	9
5.	Jumlah kasus Pencurian	64	97	134	105	87
6.	Jumlah kasus Penipuan	20	29	60	21	20
7.	Jumlah kasus Pemalsuan uang	1	2	3	0	0
8.	Total Jumlah Tindak Kriminal	105	184	245	182	157
9.	Jumlah Penduduk	731.911	738.915	760.297	768.290	772.289
10	Angka Kriminalitas	1,43	2,49	3,22	2,37	2,03

Sumber : SIPD Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Selama Tahun 2013-2017 jumlah tindak kriminal meningkat dari 105 kasus di Tahun 2013 menjadi 157 kasus di Tahun 2017. Dari data terakhir, jumlah tindak kriminal terbanyak terjadi pada Tahun 2015 yaitu sebanyak 245 kasus dan jumlah kasus terbanyak adalah pencurian. Angka kejahatan yang harus mendapatkan perhatian lebih adalah kasus, narkoba dan kejahatan seksual yang cenderung naik setiap tahun.

2) Cakupan Petugas Linmas

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat secara luas. Rasio jumlah Linmas menggambarkan kapasitas partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat guna terciptanya kondisi lingkungan yang kondusif.

Tabel 2.70.
Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk
Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017

NO	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Linmas	8.789	8.789	8,797	9.158	8.172
2	Jumlah penduduk	731,911	738,915	760,297	768,290	772,289
	Rasio	120,08	118,94	115,70	119,19	105,82

Sumber : SIPD Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Dari data di atas, jumlah Petugas Linmas minimal berada di 5.389 RT sehingga bila jumlah Linmas di Kabupaten Temanggung sebanyak 8.112 petugas berarti ada 1 (satu) RT yang memiliki Petugas Linmas lebih dari 1 (satu) petugas. Jika dilihat secara keseluruhan wilayah kabupaten, maka rasio linmas terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Temanggung telah terpenuhi, namun jika dilihat dari penyebarannya, masih terdapat daerah-daerah dengan rasio jumlah linmas yang belum memadai.

3) Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan)

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 adalah jumlah pelanggaran K3 yang dapat diselesaikan dalam waktu 24 jam. Perkembangan selama 5 (lima) tahun terakhir tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 2.71.
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3
Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah pelanggaran K3 (kasus)	1.200	965	263	638	797
2.	Jumlah pelanggaran K3 yang diselesaikan (kasus)	1.200	965	263	638	797
3.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (%)	100	100	100	100	100

Sumber : SIPD Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Dari data di atas, kasus pelanggaran K3 yang terjadi telah diselesaikan semuanya. Kasus pelanggaran K3 setiap tahunnya fluktuatif dan kasus yang terbanyak terjadi pada Tahun 2013 sebanyak 1.200 kasus.

4) Cakupan Penanganan Bencana Kebakaran Kabupaten

Dengan penambahan pos layanan pemadam dapat memangkas waktu tanggap darurat (Response time rate). Suatu lingkungan dan/atau kawasan yang tidak membentuk WMK dikategorikan sebagai daerah tidak terlindungi (unprotected area). Pemerintah kabupaten/ kota dalam membentuk suatu kawasan WMK harus menyediakan:

1. Pos Pelayanan Pemadam Kebakaran beserta garasi untuk mobil pemadam dan letak Pos Pemadam berada di tengah suatu kawasan WMK;
2. Mobil Pemadam meliputi 1 unit truk pemadam kebakaran, 1 unit truk tanki air/ water supply dan 1 unit mobil rescue;
3. Menyediakan personel pemadam kebakaran yang terlatih, minimal 6 personil dalam 1 unit kendaraan termasuk Alat Perlindungan Diri (APD) bagi personil Damkar;
4. Sarana dan prasarana pada tanggap darurat serta sarana pendukung penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran maupun non kebakaran.

Rumus cara perhitungan cakupan penanganan bencana kebakaran adalah: Jumlah luas WMK kabupaten/ kota dibagi Jumlah luas potensi ancaman kebakaran kabupaten/ kota dikali 100%. Dalam Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) Kabupaten Temanggung terdapat 6 (enam) pos pelayanan WMK, sampai saat ini baru berdiri 3 (tiga) pos pelayanan Pemadam Kebakaran (Pos Temanggung, Pos Pringsurat dan Pos Candiroto). Cakupan penanganan bencana kebakaran tahun 2013-2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.72.
Cakupan Penanganan Bencana Kebakaran
Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017

No	Uraian	satuan	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Pos Damkar	unit	1	1	1	3	3
2	Jumlah Mobil Damkar	unit	4	6	6	12	13
3	Jangkauan WMK Kabupaten	%	20%	20%	20%	50%	50%
4	Luas Kabupaten Temanggung	km ²	870,65	870,65	870,65	870,65	870,65
5	Cakupan Penanganan Bencana Kebakaran Kabupaten	%	20,21	20,21	60,64	60,64	60,64

Sumber : SIPD Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Dari data di atas, cakupan penanganan bencana kebakaran kabupaten tidak mengalami peningkatan dikarenakan sampai dengan tahun 2018 tidak dapat terlaksana pembangunan pos pemadam kebakaran sehingga tidak terdapat penambahan pos, sehingga apabila melihat jangkauan luas layanan Kabupaten Temanggung cakupan penanganan bencana kebakaran kabupaten masih terbatas sejumlah 60% dari seluruh wilayah Kabupaten Temanggung

5) Cakupan Penegakan Perda dan Perbup

Pada prinsipnya penegakan perda dan peraturan kepala daerah merupakan upaya yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja untuk menjamin dan memastikan perda dan peraturan kepala daerah tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Apabila terjadi pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah, satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk menyelesaikannya.

Cakupan penegakan perda dan peraturan kepala daerah adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja untuk menyelesaikan setiap terjadi pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah yang dilakukan oleh warga masyarakat, badan hukum maupun aparat pemerintah baik pelanggaran perda yang dilaporkan oleh masyarakat maupun yang dipantau oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja.

Tabel 2.73.
Cakupan Penegakan Perda dan Perbup
Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2018

No	Uraian	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
1	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati	%	100	100	100	100	100
2	Pelanggaran Perda/Perbup yang ditangani	kasus	1.200	965	263	638	797
3	Pelanggaran Perda/Perbup yang dilaporkan atau dipantau	kasus	1.200	965	263	638	797

Sumber : SIPD Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Dari tabel yang disajikan di atas dapat dilihat bahwa persentase cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati pada tahun 2013-2017 selalu 100% dikarenakan penanganan terhadap pelanggaran perda dan perbup tahun 2013-2017 penyelesaiannya hanya sebatas sosialisasi dan pembenahan sesuai prosedur tahapan awal.

6) Rasio Petugas Satpol PP

Menurut ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan beberapa indikator penghitungan jumlah Polisi Pamong Praja. Kriteria umum meliputi : jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah APBD dan rasio belanja aparatur. Sedangkan kriteria teknis meliputi: klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah, jumlah peraturan daerah, jumlah peraturan kepala daerah, jumlah desa/kelurahan, tingkat potensi konflik sosial kemasyarakatan, jumlah kecamatan, aspek karakteristik dan kondisi geografis.

Tabel 2.74.
Rasio Petugas Satpol PP
Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2018

No	Uraian	satuan	2013	2014	2015	2016	2017
1	Rasio Petugas Satpol PP	-	1 : 3.267	1 : 3.344	1 : 4.553	1 : 6.196	1 : 8.394
2	Jumlah anggota Satpol PP	orang	137	46	122	121	92
3	Jumlah Penduduk	orang	731.911	738.915	760.297	768.290	772.289

Sumber : SIPD Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Menurut analisa penghitungan dan penetapan jumlah Pol PP dari kriteria tersebut, jumlah Satpol PP di Kabupaten Temanggung seharusnya sebanyak 150 sampai dengan 250 pegawai, sedangkan jumlah Pol PP yang ada di Kabupaten Temanggung di Tahun 2017 baru tersedia sejumlah 92 personil sehingga terdapat kekurangan personil sejumlah 58 personil sehingga diperlukan penambahan personil Polisi Pamong Praja agar dapat mendukung kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

7) Persentase Desa/Kelurahan yang Mendapatkan Pemahaman Wawasan Kebangsaan

Persentase Desa/Kelurahan yang telah mendapatkan sosialisasi wawasan kebangsaan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.75.
 Prosentase Desa/Kelurahan yang Mendapatkan Pemahaman Wawasan Kebangsaan Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Desa/Kel yang telah mendapatkan pemahaman wawasan kebangsaan	6	4	5	3	3
2	Jumlah keseluruhan Desa/Kel yang ada	289	289	289	289	289
3	Prosentase Desa/Kel yang telah mendapatkan pemahaman wawasan kebangsaan	2,07	1,38	1,73	1,03	1,03

Sumber : Kesbangpol Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Pemahaman terkait wawasan kebangsaan pada tahun 2013 dengan sasaran sebanyak 6 Desa atau 2,07%, tahun 2014 sebanyak 4 Desa atau 1,38%, tahun 2015 sebanyak 1,73%, di tahun 2016 dan tahun 2017 masing-masing sebanyak 3 Desa atau 1,03% dari total 289 Desa di Kabupaten Temanggung.

8) Persentase Desa/Kelurahan yang Mendapatkan Pembinaan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

Persentase Desa/Kelurahan yang telah mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.76.
 Persentase Desa/Kelurahan yang telah mendapatkan Pembinaan Pencegahan, Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Desa/Kel yang telah mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba	4	0	0	2	3
2	Jumlah keseluruhan Desa/Kel yang ada	289	289	289	289	289
3	Prosentase Desa/Kel yang telah mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba	1,38	0	0	0,69	1,03

Sumber : Kesbangpol Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Desa/Kelurahan yang mendapatkan pembinaan pencegahan, penyalahgunaan narkoba tahun 2013 sebanyak 4 Desa atau 1,38%, ditahun 2014-2015 kegiatan tersebut dilaksanakan oleh BNNK Temanggung, sehingga persentasenya 0%, kemudian tahun 2016 sebanyak 2 Desa atau 0,69%, dan tahun 2017 sebanyak 3 Desa atau 1,03%.

9) Cakupan Sekolah yang Mendapatkan Pembinaan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

Persentase jumlah SMP, SMA/MA/SMK dan Perguruan Tinggi yang telah mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.77.
Persentase Jumlah SMP, SMA/MA/SMK dan Perguruan Tinggi yang telah Mendapatkan Pembinaan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah SMP, SMA/MA/SMK dan Perguruan Tinggi yang telah mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba	1	20	20	20	20
2	Jumlah keseluruhan SMP, SMA/MA/SMK dan Perguruan Tinggi yang ada	113	113	113	113	113
3	Prosentase SMP, SMA/MA/SMK dan Perguruan Tinggi yang telah mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba	0,88	17,85	17,85	17,85	17,85

Sumber : Kesbangpol Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas jumlah SMP, SMA/MA/SMK dan Perguruan Tinggi yang telah mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba tahun 2013 sebanyak 1 SMK atau 0,88% dan Tahun 2014-2017 sebanyak 20 SMP, SMA/MA/SMK dan Perguruan Tinggi atau 17,85% dari jumlah 113 SMP, SMA/MA/SMK dan Perguruan Tinggi yang ada di Kabupaten Temanggung.

f. Bidang Sosial

1) Rumah Tidak Layak Huni



Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) didefinisikan sebagai rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.

Untuk memperoleh persentase rumah tidak layak huni maka digunakan rumus jumlah rumah tidak layak huni dibagi jumlah rumah dikali 100%. Realisasi persentase rumah tidak layak huni tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.78.
Persentase Rumah Tidak Layak Huni
Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah rumah tidak layak huni	n.a	36.853	28.762		
2.	Jumlah rumah tinggal	193.096	194.116	198.785		
3.	Persentase	n.a	18,99	14,47		

Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Rincian jumlah penanganan RTLH di Kabupaten Temanggung tahun 2015 s.d 2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.79.
Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2015-2017

NO	KECAMATAN	JUMLAH RTLH 2015 (BASIS DATA TERPADU)	RTLH YANG DITANGANI TAHUN 2015-2017	JUMLAH RTLH 2017
1	PARAKAN	1.492	238	1.254
2	KLEDUNG	1.376	398	978
3	BANSARI	1.452	576	876
4	BULU	2.483	827	1.656
5	TEMANGGUNG	804	214	590
6	TLOGOMULYO	1.086	368	718
7	TEMBARAK	1.401	245	1.156
8	SELOPAMPANG	933	521	412
9	KRANGGAN	1.171	363	808
10	PRINGSURAT	1.723	612	1.111
11	KALORAN	2.979	192	2.787

NO	KECAMATAN	JUMLAH RTLH 2015 (BASIS DATA TERPADU)	RTLH YANG DITANGANI TAHUN 2015-2017	JUMLAH RTLH 2017
12	KANDANGAN	2.821	198	2.623
13	KEDU	1.115	464	651
14	NGADIREJO	4.104	791	3.313
15	JUMO	1.816	398	1.418
16	GEMAWANG	2.411	380	2.031
17	CANDIROTO	2.177	420	1.757
18	BEJEN	1.420	142	1.278
19	TRETEP	2.149	195	1.954
20	WONOBOYO	1.940	549	1.391
JUMLAH		36.853	8.091	28.762

Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Derajat kelayakan rumah tinggal diukur dari 2 (dua) aspek, yaitu: kualitas fisik rumah dan kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah diukur dengan 3 (tiga) variabel, yaitu: jenis atap, dinding dan lantai terluas. Sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan 3 (varabel) yaitu: luas lantai perkapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar. Jumlah RTLH di Kabupaten Temanggung pada Tahun 2014 sampai akhir 2017 menurun dari 36.853 unit menjadi 28.762 unit. Hal ini karena ada penanganan RTLH sebanyak 8.091 unit menjadi rumah layak huni dalam tiga tahun terakhir.

2) Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Luar Panti Sosial

Rehabilitasi sosial dasar bagi PMKS adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan PMKS mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Rehabilitasi sosial dasar yang di lakukan adalah rehabilitasi yang bersifat sementara sampai dengan adanya penanganan lanjut melalui balai rehabilitasi sosial yang sesuai (pengelolaan yang di lakukan masih dasar bersifat rujukan). Upaya rehabilitasi sosial merupakan satu bentuk layanan yang harus di laksanakan untuk semua kasus karena jika tidak ditangani dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan sosial dan bahkan mengakibatkan kehilangan nyawa.

Realisasi persentase persentase rehabilitasi sosial dasar bagi PMKS di luar panti sosial di Kabupaten Temanggung dari tahun 2013 s.d 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.80.
 Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Penyandang Masalah
 Kesejahteraan Sosial di Luar Panti Sosial
 Tahun 2013-2017

No	Kriteria	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial	231	256	214	265	404
	- disabilitas terlantar	22	30	40	44	40
	- anak terlantar	53	65	72	117	167
	- lanjut usia terlantar	0	0	0	5	14
	- tuna sosial diluar panti sosial	156	161	102	99	183
2	Jumlah disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial diluar panti sosial yang membutuhkan rehabilitasi sosial	18.406	20.855	20.685	20.463	29.395
	- disabilitas terlantar	7.275	6.814	6.822	6.715	6.275
	- anak terlantar	3.821	3.458	2.797	2.524	1.632
	- lanjut usia terlantar	6.784	10.001	10.479	10.652	21.030
	- tuna sosial diluar panti sosial	526	582	587	572	458
3	Persentase rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial diluar panti sosial	1,26	1,23	1,03	1,30	1,37

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial dari tahun 2013-2017 cenderung fluktuatif. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan sumber daya dan PMKS yang direhab tahun sebelumnya masih memerlukan penanganan kembali.

3) Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial

Jumlah PMKS di Kabupaten Temanggung yang memperoleh bantuan sosial selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2015 menurun menjadi 19,97%. Pada tahun 2016 jumlah tersebut mengalami kenaikan secara drastis sebanyak 22,17% menjadi 42,14%. Hal ini membuktikan bahwa kepedulian pemerintah terhadap para PMKS semakin nyata dengan harapan agar mereka dapat meningkatkan kesejahteraannya. Secara jelas tercantum pada tabel berikut ini.

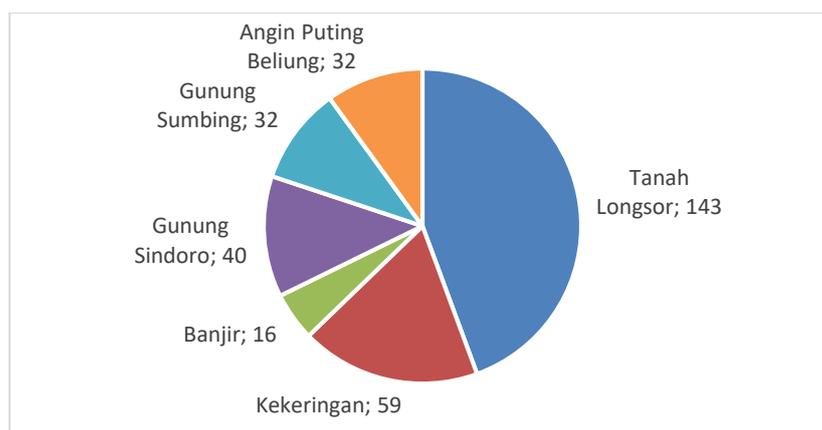
Tabel 2.81.
Persentase PMKS yang memperoleh Bantuan sosial
Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017

No	Kriteria	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah PMKS yang menerima bantuan	9.834	9.204	8.963	20.210	20.468
2	Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan	45.898	45.003	44.877	47.955	48.470
3	Persentase PMKS yang menerima bantuan	21,43	20,45	19,97	42,14	42,22

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2018

4) Persentase Desa/Kelurahan Tangguh Bencana

Berdasarkan Peraturan Kepala BNPB Nomor 01 Tahun 2012 termuat definisi Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan. Desa/kelurahan tangguh memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana. Kemampuan ini diwujudkan dalam perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan pascabencana. Desa Tangguh Bencana yang selanjutnya disingkat dengan DESTANA merupakan program bersifat partisipasi masyarakat yang mengutamakan peran aktif masyarakat dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko-risiko bencana yang ada di wilayah mereka, terutama dengan memanfaatkan sumber daya lokal demi menjamin keberkelanjutan.



Gambar 2.16.

Jumlah Desa Rawan Bencana Menurut Jenis Bencana Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Cakupan Desa Tangguh Bencana adalah jumlah Desa/Kelurahan tangguh bencana dibagi jumlah desa/ kelurahan rawan bencana dikali 100%.

Tabel 2.82.

Persentase Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017

No	Kriteria	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	n.a	1	4	8	12
2	Jumlah Desa/Kelurahan Rawan Bencana	n.a	184	184	184	184
3	Persentase Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	n.a	0,5	2,7	4,35	6,52

Sumber: BPBD Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Berdasarkan Tabel di atas cakupan desa tangguh bencana sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 terdapat peningkatan karena adanya program pembentukan DESTANA dengan jumlah desa rawan bencana hasil pemetaan yang tetap.

Sedangkan kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten Temanggung selama 5(lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.83.

Jumlah Kejadian Bencana Menurut Jenis Bencana Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017

No	Jenis Bencana	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Tanah Longsor	28	45	43	60	155
2	Puting Beliung	26	15	13	26	73
3	Kebakaran	22	56	20	29	51

No	Jenis Bencana	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
4	Banjir	2	5	7	2	17
5	Kekeringan	43	56	76	0	106

Sumber: BPBD Kabupaten Temanggung Tahun 2018

2. Layanan Umum Urusan Wajib Non Dasar

a. Bidang Tenaga Kerja

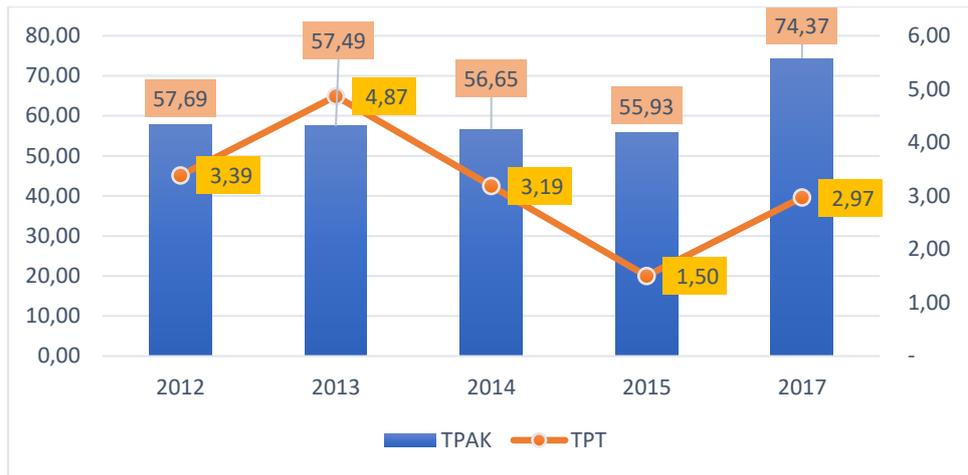
1) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

TPAK memberikan gambaran proporsi penduduk usia kerja yang terlibat aktif di pasar tenaga kerja baik dengan bekerja maupun mencari pekerjaan yang memberikan indikasi ukuran relatif dari pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk terlibat dalam produksi barang dan jasa.



TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja selama periode tertentu. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan menganggur. Sedangkan penduduk usia kerja dengan kegiatan selain kegiatan tersebut dikategorikan sebagai bukan angkatan kerja. Sepanjang lima tahun terakhir, kondisi ketenagakerjaan penduduk Kabupaten Temanggung mengalami fluktuasi.

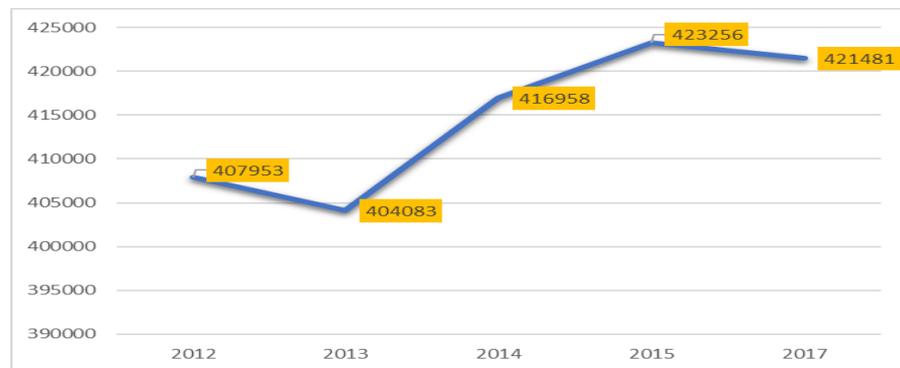
TPAK yang tinggi merupakan salah satu indikasi tingginya kesempatan kerja yang tersedia sehingga orang terserap dalam lapangan kerja yang ada atau sedang mencari kerja atau bahkan mempersiapkan usaha.



Gambar 2.17.
Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Temanggung Tahun 2012-2017

2) Rasio Penduduk yang Bekerja

Rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dengan angkatan kerja. Rasio ini menggambarkan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja atau bisa disebut sebagai gambaran permintaan tenaga kerja.



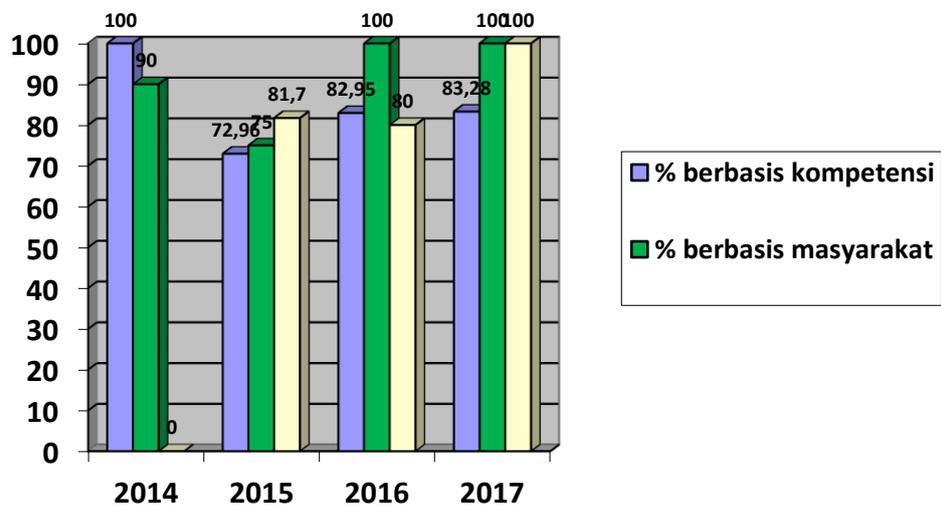
Sumber : BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Gambar 2.18.
Jumlah Penduduk Bekerja
Kabupaten Temanggung, Tahun 2012-2017

Persentase penduduk yang bekerja cenderung fluktuatif, hal ini dikarenakan banyak penduduk yang bekerja sebagai karyawan tidak tetap, pekerja musiman dan faktor migrasi penduduk.

3) Pencari Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Keterampilan Berbasis Kompetensi

Pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi di titikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja. Kemampuan kerja tersebut mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai standar yang ditetapkan di tempat kerja. Pelatihan tenaga kerja berdasarkan basis kompetensi terdiri dari pelatihan tenaga kerja di lembaga pelatihan/*off the job training*, penilaian/*assesment* di lembaga pelatihan, *on the job training*, penilaian/*asesment* di tempat kerja, penerbitan sertifikat pelatihan, dan atau sertifikat kompetensi. Indikator ini untuk mengukur seberapa banyak kita bisa memberikan pelatihan kerja dibandingkan dengan animo masyarakat yang menginginkan pelatihan kerja.



Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Gambar 2.19.
Persentase pencari kerja yang dilatih berdasarkan basis pelatihan Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2017

Tabel 2.84.
Daftar jumlah pendaftar dan peserta pelatihan kerja

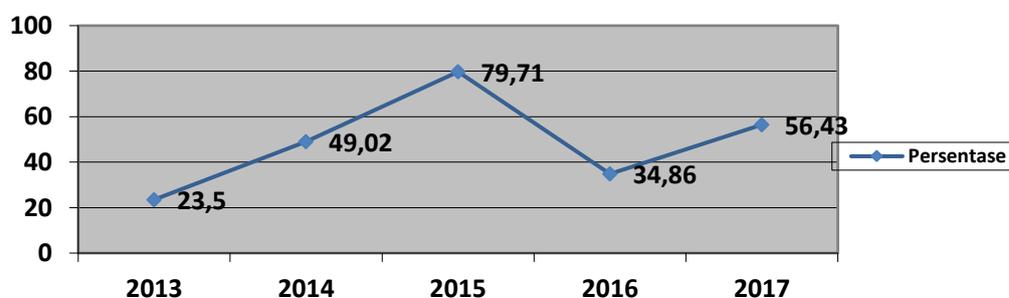
No	Uraian	TAHUN		
		2015	2016	2017
1	Jumlah pencari yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	464	480	832
2	Jumlah pendaftar pelatihan	636	565	999
3	Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan keterampilan berbasis kompetensi	72,96	82,95	83,28

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Dari tabel di atas terlihat alokasi pelatihan yang disediakan relatif hanya bertambah berkurang sedikit, tetapi animo masyarakat yang sebelumnya juga relatif stabil, pada tahun 2018 ini mengalami peningkatan yang signifikan.

4) Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan

Persentase pencari kerja yang ditempatkan di Kabupaten Temanggung tahun 2012-2017 terlihat fluktuatif, hal ini karena menyesuaikan dengan permintaan tenaga kerja yang ada dengan ketrampilan dan latar belakang pendidikan pencari kerja yang mendaftar. Persentasenya juga relatif kecil, karena pencaker terdaftar tidak dapat maksimal termonitoring, hanya pencaker terdaftar yang ditempatkan difasilitasi oleh Disnaker saja yang dapat termonitoring, baik bekerja di luar negeri maupun dalam negeri. Secara jelas terlihat pada gambar berikut.



Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Gambar 2.20.

Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan di Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017

5) Tenaga kerja yang telah mendapatkan upah sesuai Upah Minimum Kabupaten (UMK)

UMK Kabupaten Temanggung tahun 2017 adalah sebesar Rp.1.557.000,-. Diharapkan tenaga kerja di Kabupaten Temanggung mendapatkan upah minimal sesuai UMK. Jumlah tenaga kerja yang dihitung adalah tenaga kerja yang bekerja di perusahaan-perusahaan yang berkewajiban lapor di Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) dan melapor kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung.

Adapun tenaga kerja yang diperhitungkan dalam pencatatan penerima upah sesuai UMK adalah pekerja yang tergabung ke dalam asosiasi: APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia), asosiasi perbankan, BUMN dan BUMD yang ada di wilayah Kabupaten Temanggung.

Tabel 2.85.
Tenaga Kerja yang Mendapat Upah Sesuai UMK di Kabupaten Temanggung
Tahun 2012-2017

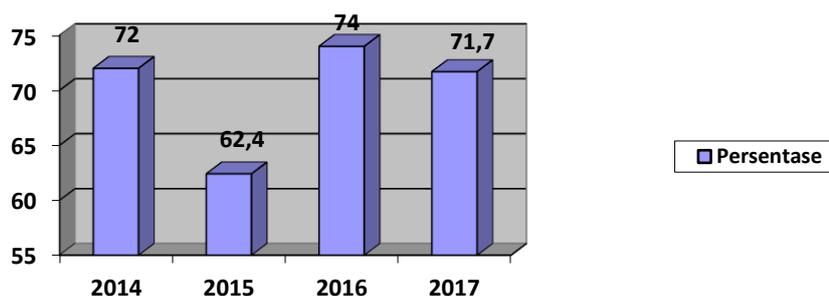
No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah tenaga kerja di perusahaan yang menerima upah sesuai UMK	n.a	n.a	14.613	20.548	20.548
2	Jumlah tenaga kerja di perusahaan	n.a	n.a	23.431	27.751	27.751
3	Persentase tenaga kerja di perusahaan mendapat upah sesuai UMK	n.a	n.a	62,37	74,04	74,04

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas, persentase tenaga kerja yang menerima upah sesuai UMK di Kabupaten Temanggung pada tahun 2015 berjumlah 62,37 % dan selama dua tahun terakhir relatif tetap yaitu 74,04 %. Masih ada 7.203 pekerja yang menerima upah di bawah standar UMK Kabupaten Temanggung meskipun sudah tergabung ke dalam asosiasi pekerja.

6) Persentase Pekerja/Buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan

Persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS di Kabupaten Temanggung tahun 2014-2017 terlihat fluktuatif. Secara jelas terlihat pada gambar berikut.

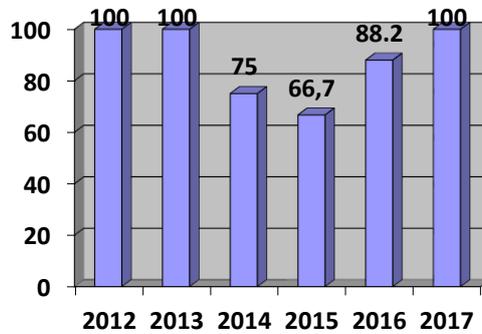


Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Gambar 2.21.
Persentase Pekerja/Buruh yang menjadi peserta program BPJS
Kabupaten Temanggung, Tahun 2014-2017

7) Persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)

Persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) di Kabupaten Temanggung antara tahun 2013 sampai dengan 2017 tidak semuanya terselesaikan yaitu pada tahun 2014, 2015 dan 2016. Secara rinci perkembangan tahun 2013-2017 dapat dilihat pada gambar.



Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2017

Gambar 2.22.

Persentase Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017

8) Rasio lulusan S1/S2/S3

Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah salah satunya ditentukan oleh tingkat pendidikan, artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3, secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.86.

Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah lulusan S1/S2/S3	12,006	13,804	14,902	15,964	16,274
2	Jumlah penduduk	731,911	738,915	760,297	768,290	772,289
3	Rasio lulusan S1/S2/S3	1 : 61	1 : 54	1 : 51	1 : 48	1 : 47
4	Persentase	1.64	1.87	1.96	2.08	2.11

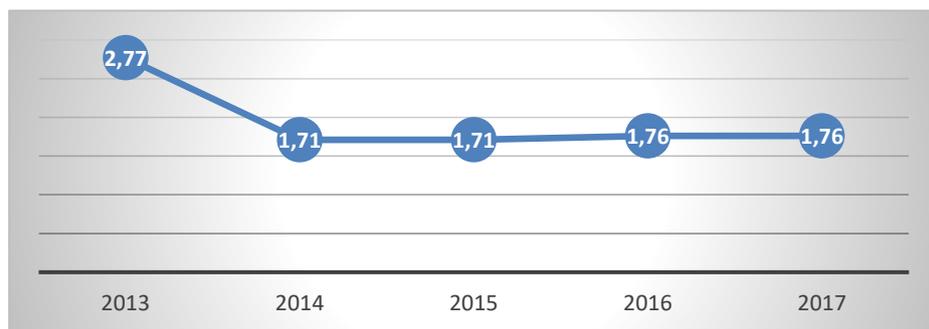
Sumber : BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2018

b. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1) Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah



Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. Secara jelas tercantum pada gambar berikut.



Sumber : DPPKBPPPA Kab.Temanggung Tahun 2018

Gambar 2.23.
Partisipasi perempuan di lembaga Pemerintah di
Kabupaten Temanggung Tahun 2012-2017

2) Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD

Partisipasi perempuan yang berkecimpung di dunia politik, terutama yang menjadi anggota DPRD di Kabupaten Temanggung pada tahun 2013 sebanyak 8 orang dari total anggota DPRD 45 orang atau sebesar 17,78% dan sejak tahun 2014 bertambah menjadi 14 orang dari total anggota DPRD 45 orang atau sebesar 31,11%. Hal ini sudah sesuai ketentuan bahwa unsur perempuan dalam partai politik minimal 25%. Kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.87.
Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD
Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017

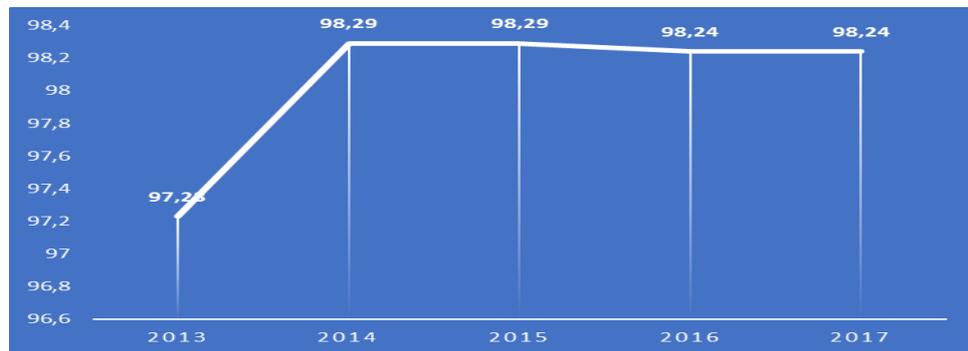
No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan	8	14	14	14	14
2	Jumlah kursi di keanggotaan DPRD	45	45	45	45	45

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
3	Persentase perempuan yang menjadi menduduki kursi DPRD (%)	17,78	31,11	31,11	31,11	31,11

Sumber : DPPKBPPPA Kab.Temanggung Tahun 2018

3) Partisipasi perempuan di lembaga swasta

Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga swasta terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. Adapun partisipasi perempuan di lembaga swasta dapat dilihat dengan gambar berikut.



Sumber : DPPKBPPPA Kab.Temanggung Tahun 2018

Gambar 2.24.
Partisipasi perempuan di lembaga swasta di
Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017

4) Rasio Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Rasio KDRT adalah jumlah KDRT yang dilaporkan dalam periode 1 (satu) tahun per 1.000 rumah tangga.

Tabel 2.88.
Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1		89	63	35	39	43
2	Jumlah Rumah Tangga	193.096	194.116	195.368	196.385	198.785
3	Rasio KDRT	1:2.169	1:3.081	1:5.582	1:5.036	1:4.623

Sumber : DPPKBPPPA Kab.Temanggung Tahun 2018

Meskipun rasio kekerasan dalam rumah tangga 3 tahun terakhir lebih dari 1:4.000 penduduk, namun hal ini cukup memprihatinkan mengingat sudah banyak upaya untuk membangun kepedulian terhadap KDRT, baik melalui *Women Crisis Center* (WCC), Unit Pelayanan Terpadu (UPT) di setiap kecamatan, Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Polres, pendampingan dari Dinas Sosial, koordinasi lintas sektoral melalui Pos Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan optimalisasi peran masyarakat dalam pencatatan dan pelaporan kasus KDRT. Selain itu sudah dilakukan upaya-upaya preventif berupa sosialisasi kepada anak sekolah dan organisasi kemasyarakatan.

5) Persentase Perempuan dan anak korban kekerasan

Perempuan dan anak korban kekerasan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman tindakan tertentu pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang wenang, dan perlakuan buruk lainnya yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi. Persentase perempuan dan anak korban kekerasan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.89.
Persentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017

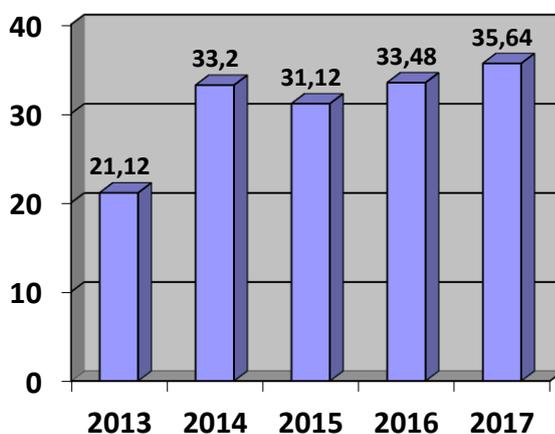
No	Uraian	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Kasus	89	63	37	39	45
	- KDRT	89	2	16	1	4
	- Kekerasan terhadap anak	-	-	-	-	1
	- Perkosaan	-	-	7	2	2
	- Pembuangan Bayi	-	-	-	-	2
	- Penelantaran	-	1	4	5	5
	- Kekerasan dalam pacaran	-	-	2	3	
	- Pencurian (ABH)	-	-	-	6	7
	- Pelecehan Seksual	-	52	8	2	20
	- Kekerasan Fisik	-	8	-	4	-
	- Persetubuhan Anak	-	-	-	14	-
	- Penganiayaan	-	-	-	2	4
2	Jumlah Rumah Tangga	193.096	194.116	195.368	196.385	198.785
3	Persentase	0,046	0,032	0,019	0,019	0,023

Sumber : DPPKBPPPA Kab.Temanggung Tahun 2018

Dari tabel diatas, persentase perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Temanggung tahun 2013-2016 cenderung menurun, namun pada tahun 2017 mengalami kenaikan. Kenaikan dan penurunan angka yang fluktuasi berdasarkan pelaporan dari korban. Banyak yang beranggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan aib atau tidak mau untuk melaporkan anggota keluarga sendiri.

6) Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Salah satu ukuran kontribusi perempuan dalam perekonomian adalah besarnya jumlah perempuan yang bekerja pada angkatan kerja. Partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Temanggung terlihat fluktuatif. Partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Temanggung tahun 2013-2017 disajikan pada gambar berikut.



Sumber : DPPKBPPPA Kab.Temanggung Tahun 2018

Gambar 2.25.

Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017

7) Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu

Perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan selama tahun 2013-2017 di Kabupaten Temanggung seluruhnya telah mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu.

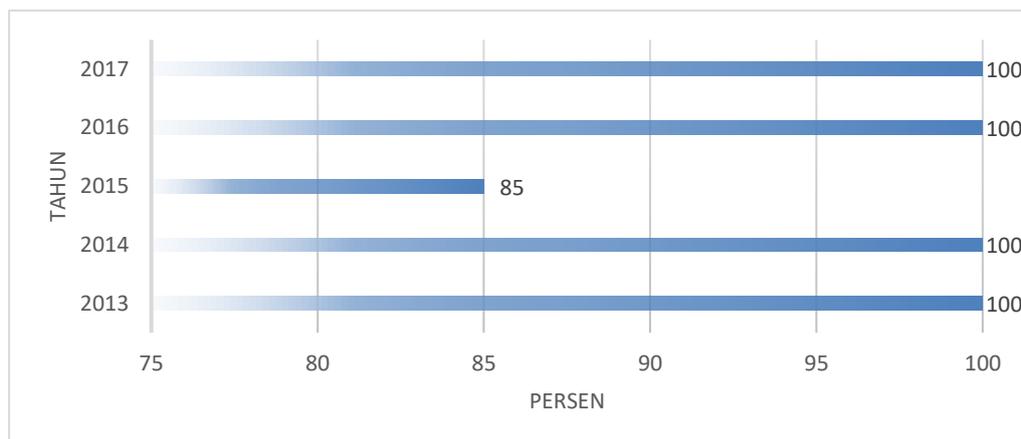
8) Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit

Semua perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan selama tahun 2013-2017 di Kabupaten Temanggung telah mendapatkan layanan

kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit.

9) Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu

Jumlah korban kekerasan yang memperoleh pelayanan rehabilitasi di dalam unit pelayanan terpadu di Kabupaten Temanggung, selama tahun 2013-2017 cenderung fluktuatif, sebagaimana gambar berikut ini.



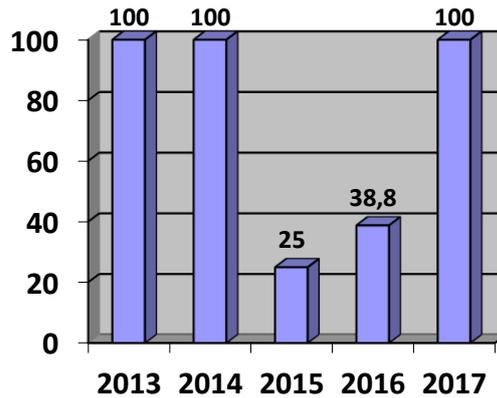
Sumber : DPPKBPPPA Kab.Temanggung Tahun 2018

Gambar 2.26.

Layanan Rehabilitasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017

10) Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

Banyaknya perkara yang diputuskan pengadilan dengan dasar perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Temanggung sepanjang tahun 2013-2017 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2015 dan 2016 tidak semua perkara diputuskan pengadilan terkait kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.



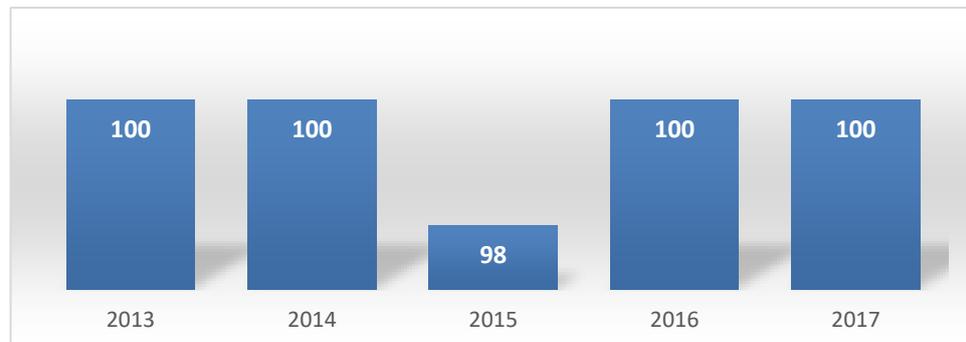
Sumber : DPPKBPPPA Kab.Temanggung Tahun 2018

Gambar 2.27.

Penegakan Hukum Dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Kabupaten Temanggung, 2013-2017

11) Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum

Pemerintah Kabupaten Temanggung berupaya memberikan layanan bantuan hukum bagi semua korban kekerasan terutama bagi perempuan dan anak. Pada tahun 2015 ada 1 korban yang tidak tuntas mendapatkan layanan bantuan hukum dari 35 korban karena dalam proses tersebut yang bersangkutan sudah membuat keputusan untuk bercerai dengan pasangan sehingga tidak dapat diintervensi. Secara singkat dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber : DPPKBPPPA Kab.Temanggung Tahun 2018

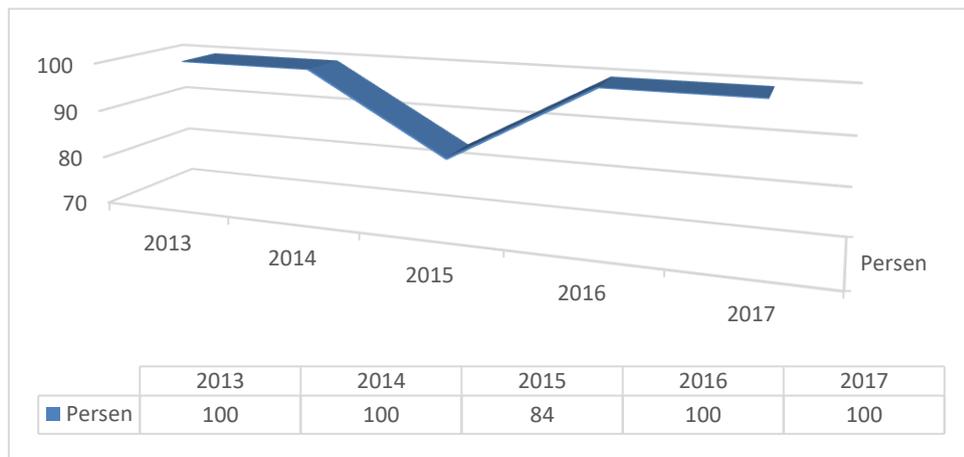
Gambar 2.28.

Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum di Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017

12) Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Banyaknya perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dan yang mendapatkan layanan pemulangan di Kabupaten Temanggung

sepanjang tahun 2013-2017 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2015 tidak semua korban kekerasan mendapatkan layanan pemulangan. Secara singkat dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



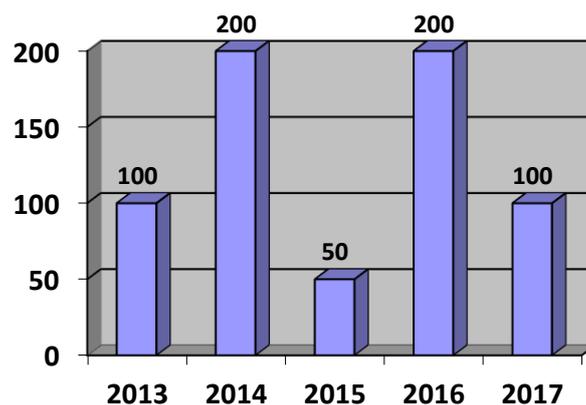
Sumber : DPPKBPPPA Kab.Temanggung Tahun 2018

Gambar 2.29.

Layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017

13) Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Banyaknya perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dan yang mendapatkan layanan reintegrasi sosial di Kabupaten Temanggung sepanjang tahun 2013-2017 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2015 tidak semua korban mendapatkan layanan reintegrasi sosial. Secara singkat dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Sumber : DPPKBPPPA Kab.Temanggung Tahun 2018

Gambar 2.30.

Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017

14) Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Pembangunan dalam segala bidang hendaknya meminimalisir kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Indikator untuk mengukur kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan melalui IPG dan IDG. IPG merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkap ketimpangan antara laki-laki dan perempuan.

IDG adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.

Tabel 2.90.
Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2013-2017

Uraian		2013	2014	2015	2016	2017
Temanggung	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94,81	94,97	94,75	n.a	96
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	72,96	81,65	82,20	n.a	82,49
Jawa Tengah	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,50	91,89	92,21	92,22	91,94
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	71,22	74,46	74,80	n.a	75,10
Nasional	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	90,19	90,34	91,03	90,82	90,96
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	70,46	70,68	70,83	71,39	71,74

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2018

IPD dan IDG Kabupaten Temanggung selama 5 tahun terakhir cenderung meningkat, pada tahun 2017 IPG dan IDG Kabupaten

Temanggung lebih tinggi dibandingkan capaian IPG dan IDG Jawa Tengah dan Nasional.

15) Persentase Keluarga Sejahtera

Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, sosial psikologis dan perkembangan keluarga, tetapi belum dapat memberikan sumbangan secara teratur bagi masyarakat.

Tabel 2.91.
Presentase Keluarga Sejahtera
Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Keluarga Sejahtera III	101.512	417.25	44.901	42.750	42.816
2	Jumlah Keluarga	218.898	219.598	224.509	212.995	213.995
3	Persentase	46.37	19,01	19,10	20,07	20,01

Sumber: DPPKBPPA Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Analisa dari tabel tersebut terlihat bahwa jumlah KS III pada tahun 2013 mencapai angka tertinggi tapi pada tahun 2014 mengalami kemerosotan karena adanya permasalahan hasil tembakau, tapi dapat dilihat juga secara perlahan tapi pasti ada kenaikan jumlah keluarga sejahtera dari tahun 2014 sampai tahun 2017.

c. Bidang Pangan

1) Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Pola pangan harapan merupakan suatu metode yang digunakan untuk, menilai jumlah dan komposisi atau ketersediaan pangan. Pola pangan harapan biasanya digunakan untuk perencanaan konsumsi, kebutuhan dan penyediaan pangan wilayah. Dalam menentukan PPH ada beberapa komponen yang harus diketahui diantaranya yaitu konsumsi energi dan zat gizi total, persentase energi dan gizi aktual, dan skor kecukupan energi dan zat gizi. Komoditas yang dihitung dalam pengukuran skor pola pangan harapan adalah: padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji dan lemak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah.

Skor pola pangan harapan berguna untuk menilai situasi konsumsi atau ketersediaan pangan, baik jumlah dan komposisi/keragaman pangan serta perencanaan konsumsi atau ketersediaan pangan. Skor Pola Pangan Harapan didapat dari energi masing-masing komoditas dibagi angka kecukupan gizi dikali 100%.

Tabel 2.92.
Skor Pola Pangan Harapan
Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017

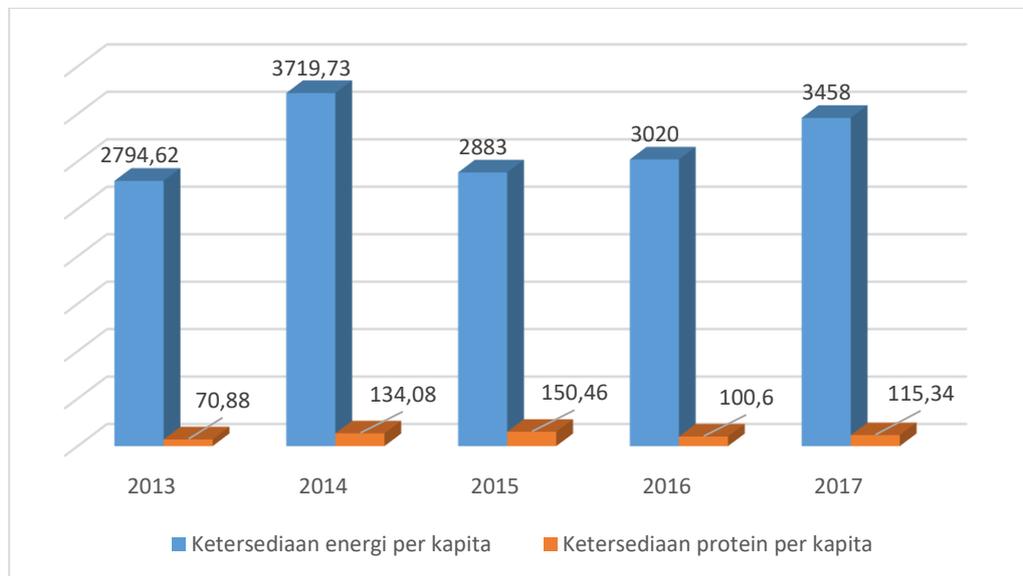
Tahun	2013	2014	2015	2016	2017
Skor Pola Pangan Harapan	n.a	89,2	82,5	85,50	87,5

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas, skor pola pangan harapan Kabupaten Temanggung pada Tahun 2013-2017 cenderung meningkat. Skor pola pangan harapan tahun 2017 lebih tinggi dibandingkan rata-rata skor pola pangan harapan Provinsi Jawa Tengah yaitu 86,41, namun masih di bawah skor ideal yaitu 100. Skor pola pangan harapan Kabupaten Temanggung menunjukkan ketersediaan pangan untuk konsumsi di Kabupaten Temanggung cukup memadai untuk pemenuhan konsumsi dan penyediaan pangan di wilayah Kabupaten Temanggung.

2) Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita

Ketersediaan energi perkapita yaitu ketersediaan energi dibagi ketersediaan pangan dikali kandungan kalori kali Berat Dapat Dimakan (BDD) dibagi 100. Ketersediaan protein perkapita yaitu ketersediaan protein dibagi ketersediaan pangan dikali kandungan protein kali Berat Dapat Dimakan (BDD) dibagi 100.



Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Gambar 2.31.
Ketersediaan Energi dan Protein per kapita
Di Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2016

3) Data Konsumsi dan Ketersediaan Energi

Tabel 2.93.
Tingkat Konsumsi Energi di Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017

Kelompok pangan	2013		2014		2015		2016		2017	
	Ketersediaan	Konsumsi								
Padi-padian	n.a	n.a	2244	1034,2	2218	1080,1	2453	1121,6	2471	1035,3
TOTAL AKE	n.a	n.a	2716	2320,4	2691	1828,1	3020	2011	3458	1943,2

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Berdasarkan perbandingan antara tingkat konsumsi dan ketersediaan pangan dari kelompok pangan padi-padian selama tahun 2013-2017 pada Tabel diatas, dapat diketahui bahwa di tahun 2017 angka konsumsi padi-padian terhadap tingkat ketersediaanya mengalami penurunan yaitu mencapai angka 41.89%, dibandingkan 3 (tiga) tahun sebelumnya yaitu 46.09% di tahun 2014, 48,70% di tahun 2015, dan 45,72% di tahun 2016. Secara umum wilayah Kabupaten Temanggung tergolong aman dari ancaman kerawanan pangan sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.26.



Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Gambar 2.32.
Peta Komposit Ketahanan Pangan
Kabupaten Temanggung Tahun 2017

4) Produktivitas Ternak

Pada dasarnya produk utama dari usaha ternak potong adalah daging. Disamping itu, hasil sampingannya berupa kulit, tulang dan juga kotoran yang masih dapat dimanfaatkan. Produksi daging dari ternak potong untuk setiap ekor ternak atau unitnya agaknya ditentukan oleh kadar komposisi daging dari daging-daging ternaknya. Ternak potong yang baik haruslah mempunyai komposisi daging atau persentase komposisi daging yang tinggi. Produksi daging ternak potong untuk setiap ekornya ditentukan oleh “berat hidupnya”. Secara umum, bila semakin tinggi berat hidupnya, maka akan makin besar pula tingkat produksi dagingnya. Perkembangan produktivitas ternak sapi, kambing dan domba selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.94.
Produktivitas Ternak Tahun 2013-2017

No	TERNAK	PRODUKTIVITAS (KG/EKOR)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Sapi	165	165	167	169	173
2.	Kambing	13,00	13,13	13,50	13,50	13,53
3.	Domba	13,30	13,13	13,50	13,50	13,53

Sumber: Dinas Perikanan dan Peternakan Kab. Temanggung Tahun 2018

Produktivitas ternak di Kabupaten Temanggung tahun 2013-2017 terus meningkat. Peningkatan terbesar terjadi pada ternak sapi yang mencapai 173 kg/ekor pada Tahun 2017, sedangkan pada ternak kambing dan domba produktivitasnya relatif sama yakni sebesar 13,53 kg/ekor.

d. Bidang Pertanian

1) Persentase luas lahan bersertifikat

Jumlah lahan bersertifikat adalah jumlah lahan yang sudah bersertifikat (Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Milik, dan Hak Pakai). Jumlah bidang lahan bersertifikat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.95.
Jumlah Bidang Lahan Bersertifikat
Kabupaten Temanggung, Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah tanah bersertifikat HGB (BPN)	4.189	6.923	6.029	6.193	6.917
2.	Jumlah tanah bersertifikat HGU (BPN)	11	17	11	11	11
3.	Jumlah tanah bersertifikat HM (BPN)	200.870	202.862	202.862	207.986	213.727
4.	Jumlah tanah bersertifikat Hak Pakai (BPN)	7.098	1.899	1.095	1.197	1.246
5.	Jumlah tanah bersertifikat Wakaf (BPPKAD)	271	-	-	429	-
6.	Jumlah total bidang tanah sesuai SPPT (BPPKAD)	547.985	550.924	554.152	555.415	580.973
7.	Jumlah tanah yang bersertifikat (BPN)	212.168	211.701	209.997	215.387	221.901
8.	Jumlah tanah milik Pemda (BPPKAD)	1.288	1.913	2.596	2.590	2.611
9.	Jumlah tanah milik Pemda yang bersertifikat (BPPKAD)	977	1.148	1.210	1.218	1.239
10.	Jumlah tanah milik Pemda yang belum bersertifikat (BPKAD)	311	765	1.386	1.372	1.372

Sumber : Badan Pertanahan Nasional dan Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Tanah milik Pemda di tahun 2017 sejumlah 2.611 bidang, yang bersertifikat ada 1.239 bidang atau 47,45 % dan yang belum bersertifikat sejumlah 1.372 bidang memerlukan perhatian dan penanganan lebih lanjut.

e. Bidang Lingkungan Hidup

1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

IKLH merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Tujuan disusunnya IKLH adalah memberikan informasi kepada para pengambil keputusan ditingkat pusat dan daerah tentang kondisi lingkungan tingkat nasional dan daerah sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target program-program pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Perhitungan IKLH telah mengalami beberapa kali penyesuaian, perbedaan terletak pada cara perhitungan dan parameter yang digunakan. IKLH dihitung dari rata-rata nilai Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Tutupan Lahan (IKTL), dengan rumus:

$$\text{IKLH} = (30 \% \times \text{IKA}) + (30 \% \times \text{IKU}) + (40 \% \times \text{IKTL})$$

Klasifikasi dan rentang nilai IKLH menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah:

Unggul	X>90
Sangat Baik	82<X≤90
Baik	74<X≤82
Cukup	66≤X≤74
Kurang	58≤X<66
Sangat Kurang	50≤X<58
Waspada	X<50

Tabel 2.96.
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Kabupaten Temanggung, Tahun 2013 – 2017

No.	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	50,00	34,00	34,00	30,00	30,00
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	71,89	62,47	72,10	54,46	83,22
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	74,29	74,28	74,28	74,29	74,29
4	Indeks Kualitas Lingkungan (IKL)	66,28	58,65	61,54	55,05	63,68

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas, IKLH Kabupaten Temanggung tahun 2017 termasuk kategori sangat kurang. Jika dilihat komponen pembentuknya, indeks kualitas tutupan lahan termasuk kategori baik, namun indeks kualitas air termasuk kategori sangat kurang dan waspada.

2) Ketersediaan Dokumen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dokumen Lingkungan Hidup adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Mempunyai Dokumen Lingkungan Hidup). Dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup terdiri atas:

1. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal),
2. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL),
3. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL),
4. Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL),
5. Studi Evaluasi Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (SEMDAL),
6. Studi Evaluasi Lingkungan Hidup (SEL),
7. Penyajian Informasi Lingkungan (PIL),
8. Penyajian Evaluasi Lingkungan (PEL),
9. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPL),
10. Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL),
11. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH),
12. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH), dan
13. Audit Lingkungan.

Ketersediaan dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Temanggung dilihat dari jumlah kegiatan dan/atau usaha yang berpotensi mencemari lingkungan yang sudah memiliki dokumen lingkungan dibagi total kegiatan dan/atau usaha yang berpotensi mencemari lingkungan di Kabupaten Temanggung sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 2.97.
Ketersediaan Dokumen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Kabupaten Temanggung Tahun 2017

Tahun	Kegiatan dan/atau usaha yang memiliki dokumen lingkungan	Kegiatan dan/atau usaha di Kabupaten Temanggung	Persentase (%)
2017	740	1662	44,52

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas, terdapat 44,52 % usaha atau kegiatan yang telah memiliki dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Masih ada 922 usaha atau kegiatan yang belum memiliki dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan di Kabupaten Temanggung.

3) Sekolah Berwawasan Lingkungan

Sekolah Berwawasan Lingkungan adalah sekolah yang mengikuti program dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Program Adiwiyata/sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan) yang menitikberatkan adanya perubahan perilaku warga sekolah untuk ikut dalam mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran (warga sekolah) dalam pelestarian lingkungan hidup melalui kegiatan-kegiatan dan aktifitas kegiatan belajar mengajar (KBM) sehingga diharapkan keterlibatan warga sekolah meningkat (mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi) serta ikut bertanggung jawab dalam upaya-upaya penyelamatan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Tabel 2.98.
Sekolah Berwawasan Lingkungan
Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Sekolah Adiwiyata	n.a	23	53	104	134
2	Jumlah Sekolah di Kabupaten Temanggung	n.a	744	744	744	744
3	Persentase Sekolah Adiwiyata di Kab. Temanggung (%)	n.a	3,09	7,12	13,97	18,01

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas, sekolah adiwiyata di Kabupaten Temanggung selama Tahun 2013 sampai 2017 terus meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa program tersebut sangat bermanfaat dan diminati oleh

sekolah-sekolah untuk mewujudkan peningkatan perbaikan lingkungan dan pemahaman tentang upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan secara berkesinambungan (sekolah menjadi tempat yang nyaman untuk belajar dan berkegiatan).

4) Sampah yang Tertangani

Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah didefinisikan oleh manusia menurut derajat keterpakaianya, dalam proses-proses alam sebenarnya tidak ada konsep sampah, yang ada hanya produk-produk yang dihasilkan setelah dan selama proses alam tersebut berlangsung.

Secara umum timbulan sampah dapat dihasilkan dari berbagai kegiatan seperti pemukiman, perindustrian, perkantoran, perdagangan dan pasar, pertokoan serta kawasan umum lainnya. Pengelolaan sampah dilakukan oleh penghasil sampah atau sumber sampah yaitu masyarakat melalui bank sampah dan TPS atau TPS 3R. Pada sumber sampah, sampah terpilah menjadi organik dan non organik. Sampah organik dikompos menjadi pupuk organik atau kompos, sampah non organik dapat dikelola menjadi kerajinan, souvenir, maupun wadah. Sisa pemilahan atau residu dari sumber sampah diwadahi pada transfer depo atau kontainer sampah untuk diangkut atau dikelola di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Tabel 2.99.
Persentase Sampah yang Ditangani di Kabupaten Temanggung
Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	% Jumlah sampah terkelola di TPS 3R	n.a	45,36	44,73	41,20	41,47
2	% Jumlah sampah terkelola di Bank Sampah	n.a	8,72	10,53	11,76	13,26
3	% Jumlah sampah terkelola di TPA	n.a	10,48	10,57	11,23	9,80

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Tahun 2018

f. Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1) Nilai Tingkat Kepatuhan Penyelenggara Layanan Publik

Penilaian tingkat kepatuhan penyelenggara layanan publik bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan penyelenggara dan pelaksana dalam memenuhi komponen standar pelayanan sebagaimana diatur UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dari hasil penilaian tersebut, diperoleh hasil dengan nilai sebagai berikut:

Tabel 2.100.
 Nilai Tingkat Kepatuhan Penyelenggaraan Layanan Publik Kabupaten
 Temanggung Tahun 2013-2017

No	Tahun	Hasil	Zona
1	2013	n.a	n.a
2	2014	n.a	n.a
3	2015	34,46	Merah
4	2016	59,76	Kuning
5	2017	55	Kuning

Sumber : Bagian Ortala Setda Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Tabel 2.101.
 Kategorisasi Penilaian Nilai Tingkat Kepatuhan Penyelenggaraan
 Layanan Publik

Nilai	Tingkat Kepatuhan	Zona
0 - 50	Rendah	Merah
51 - 80	Sedang	Kuning
81 - 100	Tinggi	Hijau

Sumber : Bagian Ortala Setda Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Dari data tabel di atas dapat diketahui bahwa survey tingkat kepatuhan terhadap Undang-Undang Pelayanan Publik di Kabupaten Temanggung semakin baik namun masih perlu ditingkatkan.

2) Kepemilikan KTP

Tidak semua penduduk Kabupaten Temanggung dalam kurun waktu 2013-2017, yang telah berusia lebih dari 17 tahun atau telah menikah (Wajib KTP) sudah memiliki KTP, hal tersebut dapat dilihat secara jelas pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.102.
 Persentase penduduk ber-KTP per satuan penduduk
 Kabupaten Temanggung, tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah penduduk usia > 17 yang ber-KTP (jiwa)	554.890	567.046	576.722	585.997	592.650
2	Jumlah penduduk usia > 17 atau telah menikah (jiwa)	563.578	577.583	590.213	602.266	611.847
3	Persentase (%)	98,46	98,18	97,72	97,30	96,87

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2018

3) Kepemilikan Kartu Keluarga

Di Kabupaten Temanggung pada rentang tahun 2013-2017, persentase kepemilikan kartu keluarga (KK) cenderung fluktuatif, seperti tertuang pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.103.
Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga
Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	41.906	24.742	245.174	241.177	246.575
2	Jumlah KK	n.a	n.a	253.878	252.922	256.127
3	Persentase (%)	n.a	n.a	96,57	95,36	96,98

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2018

4) Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)

Kartu Identitas Anak (KIA) adalah identitas resmi sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah. Presentase Kepemilikan KIA dihitung dengan rumus: jumlah anak yang memiliki KIA dibagi dengan jumlah wajib KIA (anak usia <17 tahun). Presentase Kepemilikan KIA bisa dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.104.
Presentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Kabupaten Temanggung
Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	na	na	na	43.310	65.321
2	Jumlah wajib KIA	na	na	na	189.93 3	185.01 5
3	Presentase Kepemilikan KIA	na	na	na	22.80	35.30

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Dari tabel di atas dapat diperoleh gambaran bahwa kepemilikan KIA selama 3 tahun terdapat kenaikan yang signifikan karena adanya jempit bola pelayanan KIA di sekolah dan di keramaian. Dasar dari Kegiatan Penerbitan KIA adalah Permendagri No. 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak sehingga data Kepemilikan KIA bisa disajikan dari tahun 2016 karena penerbitan KIA di Kabupaten Temanggung baru dilaksanakan pada tahun 2016.

5) Kepemilikan Akta Kelahiran

Persentase kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Temanggung pada rentang tahun 2013-2017 cenderung meningkat, seperti tertuang pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.105.
Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran
Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Kepemilikan akta kelahiran	393.450	421.767	442.188	472.459	489.614
2	Jumlah penduduk	746.313	768.322	760.297	768.339	772.289
3	Persentase	52,72	54,89	58,16	61,49	63,40

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2018

6) Presentase Penerbitan Akta Kematian

Akta kematian adalah Akta autentik yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang dalam pencatatan peristiwa kematian yang dialami oleh penduduk yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang sehingga memiliki kepastian hukum. Persentase penerbitan akta kematian dihitung dengan rumus: jumlah penerbitan akta kematian dibagi jumlah pemohon akta kematian. Persentase Penerbitan Akta Kematian Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.106.
Persentase Penerbitan Akta Kematian Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah penerbitan akta kematian	na	47	3.720	11.018	12.245
2	Jumlah pemohon akta kematian	na	47	3.720	11.018	12.245
3	Presentase penerbitan akta kematian	na	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Penerbitan akta kematian dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang signifikan karena adanya jempit bola akta kematian. Diharapkan di tahun-tahun mendatang kesadaran masyarakat meningkat untuk melaporkan setiap peristiwa kematian keluarganya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menunjang pemenuhan

database yang valid serta mendukung program Bupati Temanggung dalam rangka pemberian santunan kematian bagi penduduk miskin.

g. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1) Rata-rata Nilai Indeks Desa Membangun

Indeks Desa Membangun (IDM) disusun dengan landasan bahwa pembangunan merupakan proses akumulasi dari dimensi sosial, dimensi ekonomi dan dimensi ekologi. Ketiganya menjadi mata rantai yang saling memperkuat yang mampu menjamin keberlanjutan pembangunan. Indikator Indeks Desa Membangun (IDM) antara lain :

1. Ketahanan Sosial : Modal Sosial, Kesehatan, Pendidikan, Permukiman;
2. Ketahanan Ekologi : Kualitas lingkungan, Potensi rawan bencana, Tanggap bencana;
3. Ketahanan Ekonomi : Keberagaman produksi masyarakat desa, Tersedian pusat pelayanan perdagangan, Akses distribusi/logistik, Akses ke lembaga keuangan dan perkreditan, Lembaga Ekonomi, Keterbukaan wilayah.

Sedangkan untuk Klasifikasi Status Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) yaitu :

STATUS DESA	RENTANG NILAI
MANDIRI	IDM > 0,8155
MAJU	0,7072 < IDM ≤ 0,8155
BERKEMBANG	0,5989 < IDM ≤ 0,7072
TERTINGGAL	0,4907 < IDM ≤ 0,5989
SANGAT TERTINGGAL	IDM < 0,4907

Rumus Rata-rata nilai IDM adalah akumulasi nilai IDM seluruh desa dibagi jumlah desa. Adapun Rata-rata nilai IDM di Kabupaten Temanggung selama 2 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.107.
Rata-rata Nilai Indeks Desa Membangun
Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017

No	Kondisi Desa	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Rata-rata nilai IDM	n.a	n.a	n.a	0,63	0,65

Sumber : Dinpermades, Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai rata-rata IDM di Kabupaten Temanggung menunjukkan bahwa angka rata-rata pada kisaran

0,64 yang menunjukkan bahwa sebagian besar desa di kabupaten Temanggung tergolong desa berkembang.

2) Persentase desa yang berpredikat Mandiri/Maju

Definisi Desa Mandiri atau bisa disebut sebagai Desa Sembada adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

Desa Maju, atau bisa disebut sebagai Desa Pra Sembada adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.

Rumus Persentase desa yang berpredikat Mandiri/Maju adalah jumlah desa mandiri/maju dibagi jumlah desa dikali 100%. Sedangkan Persentase desa yang berpredikat Mandiri/Maju di kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.108.
Persentase Desa yang berpredikat Mandiri/Maju (%)
Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017

No	Kondisi Desa	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Desa Mandiri dan Maju	0	0	0	6	9
2	Jumlah Desa	266	266	266	266	266
3	Persentase	0	0	0	2,26	3,38

Sumber : Dinpermades, Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase desa yang berpredikat Mandiri di kabupaten Temanggung cenderung meningkat.

3) Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/LPMK) adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah Desa atau Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

LPMD/LPMK mempunyai peran khusus dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa atau kelurahan. Di setiap desa dan kelurahan telah dibentuk LPMD/ LPMK dengan ruang lingkup peran dalam satu wilayah desa atau kelurahan. Adapun jumlah LPMD di Kabupaten Temanggung 266 dan LPMK 23 buah.

Pada setiap tahunnya LPMD/K dibina oleh kecamatan dan kabupaten baik melalui program desa/kelurahan binaan yang dilaksanakan secara terpadu dengan Perangkat Daerah terkait maupun program lainnya. Adapun jumlah LPM berprestasi dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.109.
LPM Berprestasi Kabupaten Temanggung, tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah LPM berprestasi	30	35	40	46	50
2	Jumlah LPM	289	289	289	289	289
3	Persentase (%)	10,38	12,11	13,84	15,91	17,30

Sumber : Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2018

4) Desa Yang Cepat Berkembang

Evaluasi Perkembangan Desa adalah suatu upaya penilaian tingkat penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan yang didasarkan pada Instrumen Evaluasi Perkembangan Desa guna mengetahui efektivitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan desa.

Berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi diri terhadap tingkat perkembangan desa dan kelurahan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.110.
Persentase Desa yang Cepat berkembang
berdasarkan Evaluasi Perkembangan Desa (%)

No	Kondisi Desa	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Desa Cepat Berkembang	0	0	0	14	15
2	Jumlah Desa dan kelurahan	266	266	266	266	266
3	Persentase	0	0	0	5,26	5,63

Sumber : DINPERMADES Kabupaten Temanggung Tahun 2018

5) Persentase LSM aktif

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah Organisasi/Lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat WNI secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak dibidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitik beratkan kepada pengabdian secara swadaya. Adapun jumlah LSM aktif dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.111.
Jumlah LSM Aktif Kabupaten Temanggung
Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah LSM aktif	25	28	28	22	22
2	Jumlah LSM	25	42	42	45	45
3	Persentase	100	66,67	66,67	48,89	48,89

Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa Kabupaten Temanggung Tahun 2018

6) Cakupan Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa yang Aktif (BUMDes, Pasar Desa, UED-SP, UP2K-PKK)

Di kabupaten Temanggung lembaga ekonomi masyarakat desa yang ada antara lain BUMDes, Pasar Desa, UED-SP, dan UP2K-PKK.

Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Pasar desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan dan berlokasi di desa, menempati lahan milik pemerintah desa (lahan kas desa) maupun masyarakat (wakaf), dikelola dan dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam pembiayaannya (Pedoman Pelaksanaan Permendagri No. 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa).

Usaha Ekonomi Desa Simpan-Pinjam (UED-SP) menurut Permendagri No.06 Tahun 1998 adalah suatu lembaga yang bergerak di bidang simpan pinjam dan merupakan milik masyarakat desa/kelurahan yang diusahakan serta dikelola oleh masyarakat desa/kelurahan.

UP2K-PKK merupakan segala kegiatan ekonomi yang diusahakan oleh keluarga, baik, secara perorangan maupun kelompok, yang modalnya bersumber dari swadaya masyarakat, bantuan pemerintah, bantuan luar negeri, swasta, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Tabel 2.112.
Cakupan Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa yang aktif,
Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Bumdes	13	17	19	102	121
2	Pasar Desa	24	24	24	24	24
3	UED-SP	35	35	35	35	35
4	UP2K-PKK	21	21	21	21	21

Sumber: Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2018

h. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1) Total Fertility Rate (TFR)



Total Fertility Rate (TFR) adalah jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya apabila perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung. TFR Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.113.
Angkat TFR Kabupaten Temanggung, tahun 2013-2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Total Fertility Rate	n.a	n.a	n.a	2,1	2,1

Sumber : DPPKBPPPA Kabupaten Temanggung Tahun 2018

2) Rasio Akseptor KB

Rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per 1.000 pasangan usia subur pada tahun yang sama. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Data rasio akseptor KB sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 2.114.
Rasio Akseptor KB Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Akseptor KB	16.158	22.541	12.866	11.705	4.008
2	Jumlah Pasangan Usia subur	144.146	147.947	138.891	144.210	143.639
3	Rasio Akseptor KB	11,21	15,24	9,26	8,12	2,79

Sumber : DPPKBPPPA Kabupaten Temanggung Tahun 2018

3) Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49



Adalah angka yang menunjukkan jumlah PUS usia 15-49 tahun yang menggunakan alat kontrasepsi KB. Rumusnya adalah seluruh jumlah PUS yang menggunakan alat kontrasepsi dibandingkan sejumlah PUS yang ada kali 100%.

Tabel 2.115.
Pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49
Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Peserta KB Aktif	113.432	111.498	115.282	119.019	118.402
2	Jumlah Pasangan Usia subur	144.146	147.947	138.891	144.210	143.639
3	Persentase	78,69	75,37	83,00	82,53	82,43

Sumber : DPPKBPPPA Kabupaten Temanggung Tahun 2018

4) Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber-KB tapi tidak terlayani (*unmet need*)

Unmet need merupakan jumlah PUS yang tidak menggunakan alat kontrasepsi yang terdiri dari PUS Ingin Anak Tunda (IAT) dan Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL). Semakin kecil persentasenya maka nilainya semakin baik.

Tabel 2.116.
PUS yang ingin ber-KB tapi tidak terlayani (*Unmet Need*)
Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Pasangan usia subur	144.146	147.947	138.891	144.210	143.639
2	Persentase PUS yang ingin ber-KB tapi tidak terlayani (<i>unmet need</i>)	8,29	10,04	5,66	7,12	7,13

Sumber : DPPKBPPPA Kabupaten Temanggung Tahun 2018

i. Bidang Perhubungan

1) Persentase Terminal Tipe C Yang Aktif dan Dalam Kondisi Baik



Terminal tipe C merupakan Terminal yang peran utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan perdesaan atau perkotaan (Peraturan Menteri Perhubungan nomor 132 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan).

Tabel 2.117.
Persentase Terminal Tipe C Yang Aktif dan Kondisi Baik
Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Terminal tipe C	9	9	8	8	7
2	Jumlah Terminal tipe C Aktif	7	7	6	6	6
3	Jumlah Terminal tipe C Kondisi Baik	5	5	4	4	4
4	Persentase Terminal tipe C Aktif	77,78	77,78	75,00	75,00	85,71
5	Persentase Terminal tipe C Kondisi Baik	55,56	55,56	50,00	50,00	57,14

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Jumlah terminal type C semakin berkurang 1 (satu) unit dikarenakan terminal mudal dialihfungsikan menjadi ruang terbuka hijau (RTH) di tahun 2017 dan 1 (satu) unit terminal parakan dialihfungsikan menjadi pasar legi parakan di tahun 2015.

Dalam struktur ruang RTRW Kabupaten Temanggung direncanakan 1 (satu) terminal di wilayah Kecamatan Parakan, namun lokasi terminal masih menunggu perencanaan DED Jalan Lingkar Parakan dan tindak lanjut pelaksanaan pembebasan lahan serta pembangunannya. Dari hasil kajian, rencana jalan lingkar Parakan sangat dibutuhkan untuk mengurangi kemacetan yang ada di Kota Parakan yang merupakan salah satu pusat perekonomian dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sesuai RTRW.

2) Perlengkapan Jalan di Kabupaten Temanggung

Perlengkapan jalan di Kabupaten Temanggung terdiri atas rambu lalu lintas, cermin tikungan, *deliniator*, halte, *traficlight*, *warning light*, paku marka, *Guard drill* dan *Water Barrier*.

Belum semua jalan kabupaten sudah terpasang perlengkapan jalan, terutama marka jalan. Pengadaan perlengkapan jalan yang ada di Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.118.
Perlengkapan Jalan Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Rambu lalu lintas	45	200	103	46	23
2	Cermin Tikungan	0	10	12	0	0
3	<i>Deliniator</i>	0	0	85	0	0
4	Halte	0	0	7	11	3
5	<i>Trafic light</i>	0	0	0	0	1
6	<i>Warning light</i>	5	5	3	3	1
7	Paku Marka	0	0	200	0	0
8	<i>Guard drill (Beam)</i>	0	55,5	29	0	0
9	<i>Water Barrier</i>	0	0	50	0	0

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Tabel 2.119.
Persentase Perlengkapan Jalan Terpasang
Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018

No	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah perlengkapan jalan	Unit	4.173	4.615	5.352	5.733	6.090
2	Jumlah perlengkapan jalan yang seharusnya terpasang	Unit	14.381	14.381	14.381	14.381	14.381
3	Persentase	%	29,05	32,09	37,22	39,87	42,35

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Dari tahun ke tahun persentase perlengkapan jalan terpasang meningkat. Namun perlengkapan jalan yang seharusnya terpasang masih perlu ditingkatkan kuantitasnya.

Tabel 2.120.
 Persentase Ruas Jalan yang Didukung Sarana Prasarana Lalu Lintas dan
 Angkutan Jalan yang Memadai
 di Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018

No	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah ruas jalan yang didukung perlengkapan jalan yang memadai	Buah	94	97	100	103	106
2	Jumlah Ruas Jalan Kabupaten di Temanggung	Buah	288	288	288	288	288
3	Persentase	%	32,64	33,68	34,72	35,76	36,81

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Dari tabel dapat dilihat bahwa selama periode 2013 s/d 2018 terjadi peningkatan jumlah ruas jalan yang didukung perlengkapan jalan memadai. Kenaikan ini karena tersedianya dukungan anggaran yang memadai sehingga pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan yang ditargetkan dapat tercapai. Dari total 288 ruas jalan kabupaten yang didukung perlengkapan jalan memadai sampai dengan 2017 baru 36,81%, hal ini karena adanya skala prioritas dalam pemasangan perlengkapan jalan yaitu :

- a. Jalan Kabupaten yang rawan kecelakaan;
- b. Jalan Kabupaten yang rawan kemacetan;
- c. Jalan Kabupaten yang Dilalui Angkutan Umum;
- d. Jalan Kabupaten yang menuju lokasi wisata.

3) Persentase potensi titik parkir yang tertangani

Ruang lingkup lokasi parkir tertangani dalam hal ini adalah Parkir Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir yang di kelola retribusinya oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung. Tempat Parkir di Tepi Jalan umum adalah lokasi tempat parkir di tepi jalan umum di wilayah Kabupaten Temanggung yang diperuntukkan sebagai tempat parkir kendaraan yaitu di tepi jalan yang tidak ada rambu larangan parkir sedangkan Tempat Khusus Parkir adalah tempat parkir kendaraan beserta fasilitas penunjangnya yang dimiliki Pemerintah Daerah yang dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah atau orang pribadi/badan yang meliputi gedung parkir, taman parkir dan pelataran atau lingkungan parkir. Berikut adalah Persentase potensi titik parkir yang tertangani realisasi Tahun 2013-2017.

Tabel 2.121.
 Persentase Potensi Titik Parkir Yang Tertangani
 di Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017

No	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah titik parkir tertangani	Lokasi	150	150	151	151	101
2	Jumlah potensi titik parkir	Lokasi	160	160	160	160	110
3	Persentase potensi titik parkir yang tertangani	%	93,75	93,75	94,38	94,38	91,82

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Dari tahun ke tahun jumlah titik parkir tertangani semakin meningkat. Hal ini disebabkan adanya peningkatan lokasi potensi parkir yang dapat tertangani dalam hal ini dapat dikelola oleh Dinas Perhubungan melalui petugas parkir dan retribusinya masuk ke kas Daerah. Namun pada tahun 2017 terdapat penurunan jumlah potensi titik parkir yang disebabkan adanya lokasi parkir khusus yang diambil alih pengelolaannya oleh Dinperindagkop khususnya lokasi parkir yang berada di wilayah pasar, sehingga terjadi penurunan 50 titik parkir di lokasi pasar.

4) Persentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan

Kendaraan bermotor wajib uji adalah setiap kendaraan bermotor yang wajib dilakukan uji berkala yaitu mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan sebagaimana ketentuan peraturan perundangan. Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi, sebagai upaya terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu kendaraan dioperasikan di jalan. Berikut adalah Persentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan Tahun 2013-2017.

Tabel 2.122.
 Persentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan
 di Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017

No	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Kendaraan Bermotor Laik Jalan	Unit	8.455	8.200	8.518	8.265	7.727
2	Jumlah Kendaraan	Unit	8.759	8.561	8.526	8.265	8.016

No	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2013	2014	2015	2016	2017
	Bermotor Wajib Uji						
3	Persentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan	%	96,53	95,78	99,91	100	96,39

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah kendaraan bermotor wajib uji di Kabupaten Temanggung setiap tahun berubah, dimana hal ini disebabkan adanya kendaraan uji baru, kendaraan mutasi masuk, dan kendaraan mutasi keluar.

5) Jumlah Kecelakaan Lalu lintas

Kecelakaan lalu lintas adalah segala bentuk tabrakan, slip maupun kehilangan pengendalian yang terjadi pada ruas jalan yang mengakibatkan cedera atau kematian pada manusia maupun kerusakan pada benda-benda yang melibatkan minimal satu kendaraan bermotor. Di Kabupaten Temanggung pada kurun waktu dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mengalami penurunan pada jumlah kasus kecelakaan, seperti dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.123.
Data Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah kasus kecelakaan lalu lintas	414	342	416	415	337
2	Persentase penurunan kasus kecelakaan	0	17,39	-21,64	0,24	18,80

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Tabel 2.124.
Persentase *Blackspot* Tertangani
Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah <i>blackspot</i> tertangani	24	34	38	41	43
2	Jumlah <i>blackspot</i>	67	67	67	67	67
3	Persentase	35,82	50,75	56,72	61,19	64,18

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Blackspot adalah suatu titik atau area yang menunjukkan bahwa daerah tersebut merupakan daerah rawan kecelakaan yang dapat dilihat dari data kecelakaan dalam satu tahun. Persentase *blackspot* dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Namun masih ada 24 *blackspot* yang masih perlu ditangani.

Untuk Bidang Perhubungan, dalam struktur ruang RTRW Kabupaten Temanggung, koneksitas antar kawasan telah terhubung baik sehingga memudahkan aksesibilitas barang, jasa dan manusia. Namun disisi lain, sarana prasarana bidang perhubungan perlu ditingkatkan seperti moda transportasi umum dan rambu-rambu perlengkapan jalan sehingga kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jalan dapat ditingkatkan.

j. Bidang Komunikasi dan Informatika

1) Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam mewujudkan pelayanan publik pada masyarakat salah satunya dapat dilihat dari nilai keterbukaan informasi publik. Selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.125.
Nilai Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Nilai keterbukaan Informasi Publik	72	52,9	63,23	70,09	70,80

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung Tahun 2018

2) Desa Terhubung Internet

Jaringan internet desa merupakan fasilitas untuk mempermudah layanan informasi dari pemerintah desa ke pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat. Dengan adanya jaringan ini akan mempermudah dan memperlancar layanan administrasi kependudukan di tingkat desa. Infrastruktur jaringan sebagian didanai dana desa, sedangkan akses bandwidh nya didukung oleh pembiayaan dari APBD Kabupaten Temanggung.

Guna mewujudkan pelayanan internet pada OPD dan masyarakat secara optimal maka pemerintah Kabupaten Temanggung membangun *fiber optic*. Kabel *fiber optic* (FO) merupakan suatu media transmisi yang memiliki bahan utama yang terbuat dari serat kaca yang sangat halus dan telah di campurkan dengan bahan plastik yang menggunakan pembiasan cahaya dalam melakukan transmisinya. Sementara itu sumber cahaya yang

digunakan kabel *fiber optic* ini adalah berupa laser karena mempunyai spektrum yang sangat sempit. Fungsi pada kabel *fiber optic* pada dasarnya sama dengan jenis kabel yang lainnya yaitu untuk menghubungkan antara komputer atau perangkat jaringan satu ke perangkat jaringan lainnya namun kabel *fiber optic* memiliki kecepatan akses yang tinggi sehingga kecepatan transfer pada data pun juga lebih cepat.

Fiber Optic (FO) mulai dipasang di Kabupaten Temanggung pada tahun 2018 sepanjang 27.096 meter untuk melayani semua OPD, sedangkan untuk kecamatan direncanakan DEDnya pada tahun 2019 dan pembangunannya pada tahun 2020. Desa terhubung internet di Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.126.
Desa Terhubung Internet Kabupaten Temanggung
Tahun 2013-2017

Tahun	Desa Terhubung Internet			%
	Jumlah Desa	Desa Terhubung Internet	Total Desa Terhubung Internet Sampai Tahun N	
2013	266	0	0	0
2014	266	0	0	0
2015	266	13	13	4,88
2016	266	20	33	12,40
2017	266	36	69	25,94

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung Tahun 2018

3) Indek SPBE (Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien, dan berkesinambungan, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik. SPBE meliputi 3 domain yaitu: Kebijakan Internal SPBE, Tata Kelola SPBE, dan Layanan SPBE.

Nilai Indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE dikelompokkan berdasarkan predikat seperti tertera pada tabel berikut:

Tabel 2.127.
Predikat Indeks SPBE

No	Nilai indeks	Predikat
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 – < 4,2	Sangat baik
3	2,6 – < 3,5	Baik
4	1,8 – < 2,6	Cukup

No	Nilai indeks	Predikat
5	< 1,8	Kurang

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung Tahun 2018

Pemerintah Kabupaten Temanggung telah melakukan tahapan penilaian evaluasi SPBE ini dan mendapatkan nilai Kematangan 2.04 dengan predikat baik. Nilai kematangan penyelenggaraan SPBE yang di peroleh Kabupaten Temanggung tentunya menjadikan evaluasi penyelenggaraan SPBE masih perlu di tingkatkan dengan upaya perbaikan baik di domain kebijakan SPBE, pelaksanaan tatakelola SPBE maupun Layanan SPBE.

k. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1) Jumlah BPR/LKM

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR, sedangkan yang masuk kategori Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan/tabungan, kredit, dan atau jasa konsultasi pengembangan usaha bagi pengusaha kecil. Adapun jumlah BPR/LKM dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.128.
Jumlah BPR/LKM
Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah BPR	21	21	21	23	23
2	Jumlah BMT dan KJKS	9	9	9	16	16
3	LKM					
	a. UKM	12	12	12	38	38
	b. KUBE	101	101	101	286	286
	c. PUAP	281	281	281	281	281

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung Tahun 2018

2) Persentase Koperasi Sehat

Penilaian kesehatan koperasi adalah hasil penilaian kuantitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi koperasi. Penilaian meliputi aspek kemandirian, permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, pertumbuhan, jatidiri dan likuiditas koperasi. Persentase koperasi sehat di Kabupaten Temanggung selama lima tahun terakhir cenderung meningkat meskipun capaiannya masih di bawah 10% sebagaimana ditunjukkan tabel berikut ini:

Tabel 2.129.
 Persentase Koperasi Sehat
 Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Koperasi Sehat	10	15	20	30	40
2	Jumlah Koperasi	471	490	507	602	604
3	Persentase (%)	2,21	3,06	3,94	4,98	6,62

Sumber : Disperindagkop dan UKM Kabupaten Temanggung Tahun 2018

3) Persentase UKM Aktif

Jumlah UKM di Kabupaten Temanggung dari Tahun 2013-2017 tidak mengalami perubahan, yaitu sejumlah 25.000 UKM. Jumlah UKM Aktif cenderung meningkat dari tahun ke tahun sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.130.
 Persentase UKM Aktif di Kabupaten Temanggung
 Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah UKM Aktif	2.750	3.350	4.850	5.750	6.500
2	Jumlah UKM	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3	Persentase (%)	11	13,4	19,4	19,6	26

Sumber : Disperindagkop dan UKM Kabupaten Temanggung Tahun 2018

1. Bidang Penanaman Modal

1) Laju Investasi

Investasi dipandang sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Makin cepat perkembangan investasi ketimbang laju pertumbuhan penduduk, makin cepat



perkembangan volume stok kapital rata-rata per tenaga kerja. Makin tinggi rasio kapital per tenaga kerja cenderung makin tinggi kapasitas produksi per tenaga kerja.

Berdasarkan jenisnya investasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu: Pertama investasi pemerintah, adalah investasi yang dilakukan oleh

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pada umumnya investasi yang dilakukan oleh pemerintah tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; Kedua investasi swasta, adalah investasi yang dilakukan oleh sektor swasta nasional yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) ataupun investasi yang dilakukan oleh swasta asing atau disebut Penanaman Modal Asing (PMA).

Investasi yang dilakukan swasta bertujuan untuk mencari keuntungan dan memperoleh pendapatan serta didorong oleh adanya pertambahan pendapatan. Jika pendapatan bertambah maka konsumsi dan *effective demand* juga bertambah. Investasi timbul diakibatkan oleh bertambahnya permintaan yang sumbernya terletak pada penambahan pendapatan disebut *induced investment*. Dana investasi swasta menurut asalnya terdiri dari dua 2 macam, yaitu: PMA (Penanaman Modal Asing) jenis investasi yang sumber modalnya berasal dari luar negeri, sedangkan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) jenis investasi yang sumber modalnya berasal dari dalam negeri.

Laju investasi menunjukkan perkembangan investasi tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laju investasi di Kabupaten Temanggung Tahun 2013 sampai 2017 ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2.131.
Laju Investasi Kabupaten Temanggung
Tahun 2013-2017

Tahun	Nilai Investasi Akumulatif (Rp. milyar.)	Laju Investasi (%)
2013	99,810	-19,15
2014	69,429	-30,44
2015	99,550	43,38
2016	117,674	18,21
2017	164,655	39,92

Sumber: DPMPTSP Kab. Temanggung Tahun 2018

Pada tahun 2013 dan 2014 mengalami penurunan karena pertumbuhan penanaman modal cukup minim yang ditandai sedikitnya penanaman modal atau kegiatan usaha baru di Kabupaten Temanggung. Sedangkan pada tahun 2017 laju investasi mengalami kenaikan sebesar 39,92% hal ini disebabkan adanya semangat dan implementasi kebijakan kemudahan perizinan yang ditetapkan pemerintah pusat melalui regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kemudahan perizinan tersebut secara nyata cukup

berimbang di daerah, kemudahan pengurusan perizinan dan fasilitasi penanaman modal oleh pemerintah menjadikan sektor investasi terus mengalami pertumbuhan.

Pada tahun 2018 laju investasi mengalami kenaikan sebesar 362%, yang disebabkan diantaranya adalah semangat dari pemerintah pusat terkait kemudahan dan penyederhanaan pelayanan perizinan. Termasuk dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*), menjadikan trust dan kesadaran publik pelaku usaha untuk melegalkan usaha dan semangat berinvestasi di masyarakat semakin tinggi. Kemudahan pelayanan perizinan melalui OSS berdampak pada tumbuhnya investasi secara signifikan.

2) Penyelesaian izin lokasi

Permohonan izin lokasi di Kabupaten Temanggung, dalam rentang waktu tahun 2013-2016, dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan mulai tahun 2017 kewenangannya dilimpahkan kepada DPMPTSP. Secara jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.132.
Penyelesaian Ijin Lokasi
Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah ijin lokasi	16	5	3	2	9
2	Jumlah permohonan ijin lokasi	16	5	3	2	9
3	Persentase (%)	100	100	100	100	100

Sumber : SIPD Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Jumlah ijin lokasi masih rendah dikarenakan kewenangan pemberian ijin masih diperuntukkan untuk luas lahan diatas 1 hektar sehingga yang mengajukan ijin lokasi hanya pemohon yang memiliki luas lahan diatas 1 hektar.

m. Bidang Kepemudaan dan Olahraga

1) Besaran Prestasi Olahraga

Besaran prestasi olahraga dapat dilihat berdasarkan jumlah perolehan medali pada tabel berikut.

Tabel 2.133.
Jumlah Perolehan Medali Ajang Olahraga
Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah medali yang diperoleh	65	117	245	208	157

Sumber : Dindikpora Kabupaten Temanggung Tahun 2018



Jumlah Medali yang diperoleh dalam jangka waktu 1 Tahun (Juara I, II, III) di tingkat Provinsi dan Nasional dari tahun 2013 sampai dengan 2016 menunjukkan peningkatan, namun pada tahun 2017 menurun menjadi 157 medali.

2) Besaran Prestasi Kegiatan Kepemudaan

Kegiatan kepemudaan yang dilombakan setiap tahunnya sebanyak 9 (sembilan) kejuaraan. Apabila dilihat pada tabel berikut ini, maka terlihat bahwa prestasi kegiatan kepemudaan Kabupaten Temanggung cenderung menurun. Tahun 2015 terbanyak dengan 5 prestasi kemudian menurun menjadi 1 prestasi pada tahun 2016 dan 2017.

Tabel 2.134.
Jumlah Prestasi Kegiatan Kepemudaan
Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah kegiatan kepemudaan yang diikuti	4	4	5	1	1

Sumber : Dindikpora Kabupaten Temanggung Tahun 2018

3) Persentase Organisasi Kepemudaan yang Aktif

Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.135.
 Persentase Organisasi Kepemudaan yang Aktif
 Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang Aktif	16	16	16	16	17
2	Jumlah Organisasi Kepemudaan	24	24	26	26	27
3	Persentase (%)	66,67	66,67	61,54	61,54	62,96

Sumber : Dindikpora Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Capaian organisasi pemuda yang aktif di Kabupaten Temanggung pada tahun 2017 sebesar 62,96 %.

n. Bidang Statistik

Tersedianya data statistik yang menggambarkan kondisi makro daerah sangat penting untuk kemajuan daerah karena sebagai bahan perencanaan dan kebijakan pembangunan daerah. Ketersediaan data-data tersebut didukung oleh adanya data statistik sektoral yang menjadi kewenangan pemerintah daerah serta data statistik dasar yang menjadi kewenangan Badan Pusat Statistik. Produk data statistik dasar adalah nilai tukar petani, laju inflasi, produk domestik regional bruto, indek pembangunan manusia dan lain sebagainya. Produk data statistik sektoral adalah statistik kabupaten Temanggung, sistem informasi pembangunan daerah, bank data pembangunan dan lain sebagainya.

o. Bidang Persandian

Persandian merupakan salah satu media komunikasi yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam kondisi tertentu atau khusus. Data persandian hanya boleh diakses oleh petugas yang memiliki hak akses khusus untuk menangani urusan persandian karena menyangkut rahasia negara maupun keadaan darurat. Pada saat ini dimana teknologi dan informasi komunikasi sudah berkembang pesat (era digital) maka bidang persandian juga menangani sistem keamanan informasi agar data dan informasi pemerintah daerah terjaga keamanannya.

p. Bidang Kebudayaan

1) Persentase Pelestarian Cagar Budaya dan Sejarah

Cagar Budaya dan sejarah Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Bangunan cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.

Pelestarian benda cagar budaya merupakan hal yang penting berdasarkan sifat-sifat yang dimiliki oleh benda cagar budaya dan sesuai dengan amanat dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 yang menyebutkan bahwa benda cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, sehingga perlu dilindungi dan dilestarikan demi pemupukan kesadaran jatidiri bangsa dan kepentingan nasional.



Perkembangan pelestarian cagar budaya di Kabupaten Temanggung selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.136.
Cagar Budaya dan Sejarah yang Dilestarikan
di Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah cagar budaya dan sejarah yang dilestarikan	3	3	3	6	10
2.	Jumlah cagar budaya dan sejarah yang ada	67	160	213	213	213
	% Pelestarian Cagar Budaya dan Sejarah	4,47	1,87	1,40	2,81	4,69

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 jumlah Cagar Budaya dan Sejarah yang dilestarikan tertuang angka 4,69% karena ada 10 Cagar Budaya yang dilestarikan dari 213 Cagar Budaya yang ada.

2) Persentase Kelompok Seni Budaya yang Aktif

Kelompok seni budaya yang aktif adalah kelompok seni budaya yang ikut secara konsisten melestarikan, mengembangkan seni budaya baik mentradisi maupun melalui berbagai macam event sesuai dengan jenis/kebutuhannya yang terdiri dari organisasi kesenian/sanggar kesenian/kelompok penghayat kepercayaan. Kelompok seni budaya aktif di Kabupaten Temanggung dibuktikan dengan kepemilikan register kesenian yang dikeluarkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung sebagai PD pengampu.

Untuk menghitung persentase Kelompok seni budaya yang aktif rumusnya adalah Jumlah Kelompok Seni Budaya yang aktif dibagi Jumlah Kelompok Seni Budaya yang ada dikali 100%. Dalam kelompok seni budaya didalamnya juga termasuk 12 kelompok kepercayaan.

Berikut tabel persentase kelompok seni budaya yang aktif di Kabupaten Temanggung mulai tahun 2013 sampai dengan 2017.

Tabel 2.137.
Persentase Kelompok Seni Budaya yang Aktif
Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah kelompok seni budaya yang aktif	418	560	786	866	1.055
2	Jumlah kelompok seni budaya	2.987	2.987	2.987	2.987	2.987
3	Persentase (%)	13.99	18.74	26.31	28.99	32,34

Sumber : Dinbudpar Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase kelompok seni dan budaya yang aktif tahun 2013-2017 cenderung meningkat, namun capaiannya baru mencapai 32,34% dikarenakan masih kurangnya kesadaran kelompok seni untuk mendaftar/registrasi ulang.

3) Persentase Kelompok Pelestari dan Pecinta Bahasa/Sastra yang aktif

Kelompok Pelestari dan Pecinta Bahasa/Sastra yang aktif merupakan kumpulan orang yang beraktifitas melestarikan, mengembangkan dan memanfaatkan Bahasa dan Sastra Jawa, Indonesia yang berbentuk Lembaga/kelompok. Jenis Kelompok pencinta bahasa/ sastra dikelompokkan menjadi 4, antara lain : Sastra Jawa, Sastra Indonesia, Teater Modern dan Teater Tradisional.

Untuk menghitung persentase Kelompok Pelestari dan Pecinta Bahasa/Sastra yang aktif rumusnya adalah Jumlah Kelompok Pelestari dan Pecinta Bahasa/Sastra aktif dibagi Jumlah Kelompok Pelestari dan Pecinta Bahasa/Sastra dikali 100%.

Realisasi persentase kelompok Pelestari dan Pecinta Bahasa/Sastra yang aktif tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.138.

Persentase kelompok Pelestari dan Pecinta Bahasa/Sastra yang aktif di Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017

No	Uraian	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah kelompok pelestari dan pecinta bahasa/sastra yang aktif	25	25	25	25	25
2	Jumlah kelompok pelestari dan pecinta bahasa/sastra	62	62	62	62	62
3	Persentase (%)	40.32	40.32	40.32	40.32	40.32

Sumber : Dinbudpar Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase kelompok Pelestari dan Pecinta Bahasa/Sastra yang aktif tahun 2013-2018 stagnan karena belum optimalnya sentuhan penanganan kelompok pelestari dan Pecinta Bahasa/Sastra di Kabupaten Temanggung.

q. Bidang Perpustakaan

1) Persentase Perpustakaan yang aktif



Definisi Perpustakaan aktif adalah Perpustakaan yang secara aktif melakukan kegiatan layanan sirkulasi (peminjaman dan pengembalian buku). Berikut tabel persentase Perpustakaan Aktif di Kabupaten Temanggung mulai tahun 2013 sampai dengan 2017.

Tabel 2.139.
Persentase Perpustakaan Aktif
Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017

No	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah perpustakaan aktif	197	197	197	197	169
2	Jumlah perpustakaan	590	590	590	590	497
3	Persentase	33,4	33,4	33,4	33,4	34

Sumber : *Dinarpus Kabupaten Temanggung Tahun 2018*

Penyebab perpustakaan aktif menjadi pasif, bahkan mati dikarenakan beberapa faktor antara lain: 1) Kurangnya dukungan dana dari pemangku kebijakan untuk pembelian buku, sapsras dan melakukan kegiatan, bahkan tidak dianggarkan; 2) Kurangnya Tenaga Perpustakaan, dan sering berganti-ganti; 3) Kurangnya minat baca masyarakat dan siswa; dan 4) Kurangnya promosi.

2) Peningkatan Peminjam di Perpustakaan

Yang dimaksud peminjam adalah masyarakat yang memanfaatkan fasilitas perpustakaan untuk meminjam buku, pada perpustakaan daerah, perpustakaan sekolah, dan perpustakaan desa.

Realisasi persentase peminjam perpustakaan di Kabupaten Temanggung dari tahun 2013 s.d 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini. Berikut tabel persentase peminjam perpustakaan di Kabupaten Temanggung mulai tahun 2013 s.d 2017.

Tabel 2.140.
 Persentase Peminjam Perpustakaan
 Di Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun (%)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah peminjam	274.302	313.073	323.168	338.153	335.130
2	Jumlah pengunjung	398.001	433.499	447.974	479.038	488.101
3	Persentase	68,92	72,22	72,14	70,59	68,66

Sumber: Dinarpus Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase peminjam perpustakaan di Kabupaten Temanggung cenderung fluktuatif terutama di Perpustakaan Daerah dan Perpustakaan desa, disebabkan karena: 1) Pengunjung yang datang di Perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Temanggung hanya memanfaatkan wifi saja dan tidak meminjam buku; 2) Kurangnya Tenaga Perpustakaan, dan sering berganti-ganti/petugasnya berhenti; 3) Kurangnya minat baca masyarakat dan siswa; 4) Kurangnya promosi.

3) Persentase Pertumbuhan Jumlah Pengunjung Perpustakaan

Persentase pertumbuhan jumlah pengunjung perpustakaan di Kabupaten Temanggung ditampilkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.141.
 Pertumbuhan Jumlah Pengunjung Perpustakaan
 Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun (Orang)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Perpustakaan Daerah	76.598	63.487	71.959	65.841	82.051
2	Perpustakaan Sekolah	232.250	273.872	288.575	342.357	345.330
3	Perpustakaan Desa	89.153	96.140	87.440	70.840	60.720
4	Jumlah	398.001	433.499	447.974	479.038	488.101
5	Persentase	n.a	0,08	3,34	0,06	0,01

Sumber : Dinarpus Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Persentase Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Temanggung cenderung fluktuatif dan meningkat tajam di tahun 2015 yaitu 3,34%.

r. Bidang Kearsipan

1) Cakupan Penerapan Arsip Secara Baku

Arsip secara baku meliputi pengelolaan arsip dinamis aktif dengan beberapa indikator: pencatatan, pendistribusian, penyimpanan di filling kabinet. Unit kerja meliputi: perangkat daerah, kecamatan, kelurahan, dan desa.

Tabel 2.142.
Persentase Cakupan Penerapan Arsip Secara Baku Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Cakupan penerapan arsip secara baku (%)	n.a	n.a	n.a	n.a	15,12
2	Jumlah unit kerja yang melaksanakan arsip secara baku	n.a	n.a	n.a	n.a	52
3	Jumlah unit kerja	344	344	344	344	344

Sumber : Dinarpus Kabupaten Temanggung Tahun 2018

3. Layanan Umum Urusan Pilihan

a. Bidang Kelautan dan Perikanan

1) Tingkat Konsumsi Ikan

Tingkat konsumsi ikan merupakan tingkat konsumsi masyarakat terhadap komoditas ikan yang dikonversi dalam satuan kg/kap/tahun. Dalam melakukan analisis tingkat konsumsi ikan selalu disandingkan dengan data penyediaan ikan konsumsi pada periode waktu tertentu. Secara ideal, penyediaan konsumsi ikan harus selalu lebih besar dibandingkan dengan capaian tingkat konsumsi ikan dengan selisih yang tidak terlalu lebar serta mempunyai *trend* yang selalu naik dari tahun ke tahun.

Tabel 2.143.
Tingkat Konsumsi Ikan di Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017

Tahun	Tingkat Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)	
	Kabupaten Temanggung	Provinsi Jawa Tengah
2013	15,25	18,191
2014	16	20,92
2015	16,2	25,60
2016	19,5	26,28
2017	19,73	29,17

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Capaian konsumsi ikan pada tahun 2013 adalah sebesar 15,25 kg/kapita/tahun meningkat menjadi 19,73 kg/kapita/tahun pada tahun 2017 atau sebesar 29,38%. Meskipun menunjukkan *trend* yang meningkat, namun tingkat konsumsi ikan Kabupaten Temanggung selalu lebih rendah daripada tingkat konsumsi ikan Provinsi Jawa Tengah.

2) Produktivitas Perikanan

Perkembangan sektor perikanan dapat dilihat dari perkembangan empat hal, yaitu kolam air tenang, sawah/mina padi, perairan umum, dan unit pembenihan rakyat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.144.
Tingkat Produktivitas Ikan di Kabupaten Temanggung,
Tahun 2013-2017

No	JENIS DATA	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Ikan Nila					
a.	Kolam air tenang (ton/ha)	7,89	9,60	11,29	15,15	20,17
	Produksi (ton)	423,772	519,59	619,06	837,35	1.136,58
	Luas lahan budi daya (ha)	53,6805	54,1125	54,8325	55,2825	56,3450
b.	Mina padi	0,12	0,20	0,34	0,51	0,63
	Produksi (ton)	270,96	445,09	788,65	1.185,124	1.507,92
	Luas lahan budi daya (ha)	2.188,50	2.243,13	2.287,70	2.333,64	2.391,99
c.	Karamba Jaring Apung			149,333	150	156
	Produksi (ton)	-	-	3,36	4,50	4,68
	Luas lahan budi daya (ha)	-	-	0,0225	0,03	0,03
2.	Ikan Lele					
a.	Kolam air tenang (ton/ha)					
	Produksi (ton)	1.513,49	1.946,59	2.426,86	2.955,85	3.570,31
	Luas lahan budi daya (ha)	41,7515	42,0875	42,6475	42,9975	43,6415
3.	Ikan Mas					

No	JENIS DATA	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
a.	Kolam air tenang (ton/ha)	19,13	20,19	25,19	31,95	44,05
	Produksi (ton)	342,26	364,15	460,40	588,71	813,620
	Luas lahan budi daya (ha)	17,8935	18,0375	18,2775	18,4275	18,469
b.	Mina padi	1,23	1,40	1,45	1,80	1,86
	Produksi (ton)	1.152,26	1.323,42	1.402,85	1.777,696	1.875,460
	Luas lahan budi daya (ha)	939,3300	947,67	966,50	985,91	1.010,55
c.	Karamba Jaring Apung			112	112	117
	Produksi (ton)	-	-	0,84	1,12	1,17
	Luas lahan budi daya (ha)	-	-	0,0075	0,01	0,01
4.	Ikan Grasscarp					
a.	Kolam air tenang	6,28	5,00	7,00	12,00	16,10
	Produksi (ton)	23,221	18,65	26,43	45,701	62,233
	Luasan kolam (ha)	3,698	3,7278	3,7774	3,8084	3,8654
5.	Ikan Bawal Air Tawar					
a.	Kolam air tenang (ton)	2,61	2,72	3,81	7,00	12,00
	Produksi (ton)	5,9195	6,22	8,81	16,339	28,429
	Luasan kolam (ha)	2,2665	2,2847	2,3151	2,3341	2,3691

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Temanggung Tahun 2018

b. Bidang Pertanian

1) Produktifitas Tanaman Pangan

Komoditas tanaman pangan Kabupaten Temanggung dihitung terdiri dari 3 (tiga) komoditi utama, yaitu tanaman padi, jagung, dan ubi kayu.

Tabel 2.145.
Perkembangan Komoditas Tanaman Pangan
Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017

No	JENIS DATA	Satuan	TAHUN				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Tanaman Padi						
	Luas Panen	ha	26.350,00	27.156,00	27.792,00	30.677,20	31.552,10
	Produksi	ton	150.287,94	162.121,32	186.206,40	212.900,00	191.174,17
	Produktivitas	ton/ha	5,70	5,97	6,70	6,94	6,06
2.	Tanaman Jagung						
	Luas Panen	ha	22.331,00	22.865,00	19.257,00	20.803,40	20.825,30
	Produksi	ton	111.327	104.493	82.420	103.393,12	92.755,89
	Produktivitas	ton/ha	4,99	4,57	4,28	4,97	4,45
3.	Tanaman Ubi Kayu						
	Luas Panen	ha	2.461,00	1.739,00	2.162,00	1.352,60	1.042,70
	Produksi	ton	61.554	51.640	53.185	43.513,20	40178,36
	Produktivitas	ton/ha	25,01	29,69	24,60	32,17	38,53

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung Tahun 2018

2) Produktifitas Tanaman Hortikultura

Komoditas Tanaman Hortikultura Kabupaten Temanggung dihitung terdiri dari 6 (enam) komoditi utama, yaitu: bawang putih, bawang merah, cabai, kentang, durian, dan jambu biji.

Tabel 2.146.
Perkembangan Komoditas Tanaman Hortikultura
Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Bawang Putih					
	Luas panen (ha)	388	298	846	530	640
	Jumlah produksi(ton)	2.506,40	1.973,10	5.784,80	3.621,97	4.709,41
	Produktivitas (ton/ha)	6,46	6,62	6,84	6,83	7,36
2	Bawang Merah					
	Luas panen (ha)	769,00	808,00	1.461,00	1.675,00	1.439,50
	Jumlah produksi (ton)	6660,00	6.311,90	11931	13698,34	11028,4
	Produktivitas (ton/ha)	8,66	7,81	8,17	8,18	7,66

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
3	Cabai					
	Luas panen (ha)	6.004,00	6.564,00	5.314,00	5.168,00	7.841,00
	Jumlah Produksi (ton)	43.381,70	46.678,60	33.683,00	32.689,00	46.813,60
	Produktivitas (ton/ha)	7,23	7,11	6,34	6,33	5,97
4	Kentang					
	Luas panen (ha)	305	374	465	493	387
	Jumlah produksi (ton)	6.206,70	7.551,20	9.805,63	12.325,00	8.831,50
	Produktivitas (ton/ha)	20,35	20,19	21,09	25,00	22,82
5	Durian					
	Luas panen (ha)	44.809	52.377	52.577	30.276	50.144
	Jumlah produksi (ton)	3.875,00	4.610,00	4.889,40	3.738,10	4.137,01
	Produktivitas (ton/ha)	0,086	0,088	0,093	0,123	0,083
6	Jambu Biji					
	Luas panen (ha)	228.258	184.860	79.022	74.022	74.505
	Jumlah produksi (ton)	6.118,90	4.413,50	5.269,30	4.916,30	6.666,82
	Produktivitas (ton/ha)	0,027	0,024	0,067	0,066	0,089

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung Tahun 2018

3) Produktivitas Tanaman Perkebunan

Komoditas Tanaman Perkebunan Kabupaten Temanggung dihitung dari terdiri dari 5 (lima) komoditi utama, yaitu: tembakau, kopi robusta, kopi arabika, cengkeh dan vanila.



Tabel 2.147.
Perkembangan Komoditas Tanaman Perkebunan
Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Tembakau					
	Luas panen (ha)	14.517,00	12.587,00	18.248,00	16.821,00	15.865,00
	Jumlah produksi (ton)	7.146,12	6.922,00	10.581,00	6.041,00	9.785,00
	Produktivitas (ton/ha)	0,49	0,55	0,58	0,36	0,62
2	Kopi Robusta					
	Luas panen (ha)	8.158,55	8.158,55	8.158,55	8.158,55	8.158,55
	Jumlah produksi (ton)	4.807,9	2.514,20	8.519	7.388,8	3.912,5
	Produktivitas (ton/ha)	0,59	0,31	1,04	0,91	0,48
3	Kopi Arabika					
	Luas panen (ha)	1.377,82	1.377,82	1.377,82	1.377,82	1.377,82
	Jumlah Produksi (ton)	1.027,11	1.305,95	1.109,42	800,01	741,41
	Produktivitas (ton/ha)	0,75	0,95	0,81	0,58	0,54
4	Cengkeh					
	Luas panen (ha)	1.308,06	1.391,31	1.347,04	1.740,42	869,96
	Jumlah produksi (ton)	163,11	224,6	185,53	333,6	145,91
	Produktivitas (ton/ha)	0,12	0,16	0,14	0,19	0,17
5	Aren					
	Luas panen (ha)	296,67	378,65	378,65	378,65	378,65
	Jumlah produksi (ton)	877,62	1.054,39	1.195,45	660,3	666,92
	Produktivitas (ton/ha)	2,96	2,78	3,16	1,74	1,76

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung Tahun 2018

4) Kelembagaan Pelaku Utama Pelaku Usaha Kelompok Tani

Kelompok tani sebagai bentuk kelembagaan petani belum sepenuhnya tergolong dalam kelompok yang mapan secara organisasi. Kemampuan



kelompok ditinjau dari kelasnya juga masih bervariasi, mulai dari non kelas, pemula, lanjut, madya dan utama, namun sebagian besar belum berbadan hukum. Untuk mengetahui sejauhmana perkembangan kemajuan kelompok tani dalam melaksanakan fungsinya dapat

dilakukan melalui pemetaan kelompok tani.

Hal ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan dari masing-masing kelompok tani baik dari aspek manajemen teknis maupun administrasi, mencakup kemampuan merencanakan, mengorganisasi, melaksanakan, mengevaluasi usaha tani dan mengembangkan kelompok tani itu sendiri. Hasil dari pemetaan ini berguna dalam penyusunan program pembinaan dan pendampingan sehingga penyuluhan lebih tepat sasaran dalam meningkatkan usaha tani yang efektif dan efisien. Berikut ini tabel kelembagaan pelaku utama pelaku usaha kelompok tani di Kabupaten Temanggung.

Tabel 2.148.
REKAPITULASI KELEMBAGAAN PELAKU UTAMA PELAKU USAHA
KELOMPOK TANI (POKTAN DAN GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN))
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2017

NO	KECAMATAN	JUMLAH		TOTAL	KELAS KELOMPOK				TOTAL	Posluhdes	KEP	
		KT	KWT	KT+KWT	P	L	M	U			Jumlah	POKTAN/ GAPOKTAN
1	Gemawang	166	17	183	143	23	0	0	532	10	11	159
2	Pringsurat	109	17	126	73	29	6	1	361	14	0	0
3	Ngadirejo	113	20	133	58	48	5	2	379	20	4	20
4	Kledung	66	17	83	57	9	0	0	232	13	1	6
5	Tlogomulyo	59	6	65	33	19	2	0	184	12	1	3
6	Parakan	87	27	114	49	38	0	0	315	16	21	26
7	Tretep	122	15	137	92	26	31	0	423	11	0	0
8	Bansari	100	12	112	78	19	3	0	324	13	12	90
9	Jumo	66	10	76	5	58	3	0	218	13	2	16
10	Tembarak	85	4	89	67	14	1	0	260	13	13	78
11	Candiroto	92	19	111	50	39	21	0	332	14	14	85
12	Temanggung	93	25	118	44	45	4	0	329	11	14	114
13	Wonoboyo	112	16	128	58	52	2	0	368	3	6	34
14	Kandangan	133	13	146	94	38	1	0	425	5	13	82
15	Bejen	98	19	117	82	16	0	0	332	14	2	2
16	Kranggan	119	28	147	88	28	2	1	119	13	0	0
17	Bulu	119	16	135	97	20	2	0	119	2	9	102
18	Kedu	91	5	96	33	57	1	0	91	14	0	0
19	Selopampang	81	8	89	21	2	0	0	23	12	16	104
20	Kaloran	130	14	144	72	15	7	0	94	4	0	0
TOTAL		2041	308	2349	1294	595	91	4	5460	227	139	921

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung Tahun 2018

5) Produktivitas Ternak

Pada dasarnya produk utama dari usaha ternak potong adalah daging, hasil sampingannya berupa kulit, tulang dan juga kotoran yang masih dapat dimanfaatkan. Produksi daging dari ternak potong untuk setiap ekor ternak ditentukan oleh kadar komposisi daging dari daging ternaknya. Ternak potong yang baik haruslah mempunyai persentase komposisi daging yang tinggi. Produksi daging ternak potong untuk setiap ekornya ditentukan oleh berat hidupnya. Secara umum, bila semakin tinggi berat hidupnya, maka akan makin besar pula tingkat produksi dagingnya.

Perkembangan produktivitas ternak sapi, kambing dan domba selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.149.
Produktivitas Ternak
Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017

No	TERNAK	PRODUKTIVITAS (KG/EKOR)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Sapi	165	165	167	169	173
2.	Kambing	13	13,13	13,50	13,50	13,53
3.	Domba	13,30	13,13	13,50	13,50	13,53

Sumber: Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Produktivitas ternak di Kabupaten Temanggung tahun 2013-2017 terus meningkat. Peningkatan terbesar terjadi pada ternak sapi yang mencapai 173 kg/ekor pada Tahun 2017, sedangkan pada ternak kambing dan domba produktivitasnya relatif sama yakni sebesar 13,53 kg/ekor.

Sedangkan populasi ternak unggas di Kabupaten Temanggung tahun 2013-2017 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya pada masing-masing jenis unggas, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.150.
Populasi Ternak Unggas Di Kabupaten Temanggung
Tahun 2013-2017

Tahun	Ayam Buras (ekor)	Ayam Ras Petelur (ekor)	Itik (ekor)	Entok (ekor)	Burung Puyuh (ekor)	Angsa (ekor)
2013	1.659.835	680.025	101.942	24.900	51.255	18.652
2014	1.862.390	681.506	102.147	24.950	51.357	18.743
2015	1.881.012	682.689	102.190	24.981	51.501	18.743
2016	1.884.774	684.233	102.404	25.033	51.603	18.781
2017	1.891.843	686.801	102.789	n.a	51.798	18.852

Sumber : Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Temanggung Tahun 2018

6) Prevalensi Penyakit Hewan Ternak

Untuk melihat data prevalensi penyakit sapi, kambing, domba dan unggas di Kabupaten Temanggung dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 2.151.
Prevalensi Penyakit Hewan di Kabupaten Temanggung
Tahun 2013-2017

Tahun	Prevalensi Penyakit (%)			
	Sapi	Kambing	Domba	Unggas
2013	6,00	5,00	3,00	0,17
2014	5,70	4,80	2,60	0,17
2015	5,60	4,70	2,50	0,16
2016	5,50	4,50	2,40	0,15
2017	5,20	4,25	2,30	0,11

Sumber : Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Temanggung 2018

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa prevalensi penyakit hewan ternak di Kabupaten Temanggung cenderung turun, disebabkan oleh karena peningkatan kesadaran masyarakat akan pencegahan penyakit strategis zoonosis (misalnya *Avian Influenza/AI*) sebagai bagian dari keberhasilan edukasi dan komunikasi yang aktif disampaikan lewat radio dan sosialisasi. Selain itu, hal tersebut juga disebabkan karena adanya peningkatan deteksi dini atas kasus penyakit yang endemis oleh petugas karena peningkatan kapasitas petugas serta efektifitas terapi yang diberikan telah sesuai dengan prediksi penyakit sebagai hasil *surveillance* tahun sebelumnya dan tergambar dalam ketersediaan obat/vaksin yang ada. Penyakit yang dihitung adalah penyakit endemis yang ditangani secara aktif maupun *pasif service* yang terjadi di semua kecamatan di Kabupaten Temanggung yang meliputi penyakit cacingan (*Helminthiasis*) pada ternak sapi, domba dan kambing serta penyakit flu burung (*AI*) dan penyakit tetelo (*New Castle Disease*) pada unggas.

7) Produksi Daging, Telur, dan Susu

Produksi daging, telur, dan susu di Kabupaten Temanggung tahun 2013-2017 cenderung fluktuatif setiap tahunnya, terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.152.
Jumlah Produksi Daging, Telur, dan Susu

Tahun	Daging (Kg)				Telur (butir)			Susu (liter)
	Ternak Besar	Ternak Kecil	Unggas	Ayam ras	Ayam kampung	Itik	Puyuh	
2013	648.650	314.705	8.500.000	75.482.775	23.237.690	8.563.129	6.458.130	737.688
2014	651.504	314.106	9.027.975	76.165.312	26.073.460	8.573.124	6.470.982	231.000
2015	589.176	298.359	5.748.110	76.966.165	24.829.374	8.584.171	7.947.942	234.156
2016	633.934	351.228	4.418.160	124.578.666	24.879.030	8.601.311	7.695.544	223.200
2017	615.498	280.598	7.028.828	125.201.528	25.003.425	8.644.310	7.724.325	226.575

Sumber: Statistik Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Untuk Bidang Pertanian, dalam pola ruang RTRW Kabupaten Temanggung, telah ditetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B).

c. Bidang Pariwisata

1) Objek Wisata



Potensi wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, keindahan, dan nilai buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisata. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

Kabupaten Temanggung memiliki potensi wisata yang beraneka ragam berupa obyek wisata budaya/sejarah, wisata buatan dan wisata alam. Akan tetapi pada tahun-tahun terakhir ini obyek wisata alam sangat pesat perkembangannya dibanding dengan obyek wisata lainnya, dengan menyimpan keindahan yang cukup menarik bagi wisatawan, baik berupa gunung, air terjun maupun kondisi alam yang bisa menawarkan keindahan untuk dijadikan tempat rekreasi. Dari sisi karakteristik alam, Kabupaten Temanggung mempunyai 2 (dua) gunung yaitu gunung Sumbing dan gunung Sindoro yang disukai oleh para pendaki dan wisatawan dalam menikmati sejuknya udara dan keindahan alamnya.

Tabel 2.153.
Jumlah Objek Wisata Berkembang di
Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah OW	23	27	34	34	34
2	Jumlah OW berkembang	4	10	11	13	13
3	% OW berkembang	17,39	30,03	32,35	38,23	38,23

Sumber: Dinbudpar Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Berikut potensi wisata alam, budaya/sejarah dan wisata buatan yang berada di Kabupaten Temanggung.

Tabel 2.154.
Daftar Nama Objek Wisata di
Kabupaten Temanggung Tahun 2018

NO	NAMA OBYEK WISATA	LOKASI
OBYEK WISATA ALAM		
1	Curug Surodipo/Trocoh	Kec. Wonoboyo
2	Curug Lawe	Kec. Gemawang
3	Gowa Lawa	Kec. Bejen
4	Curug Onje	Kec. Bejen
5	Perkebunan Bojong Rejo	Kec. Bejen
6	Bukit Kembang Arum	Kec. Bejen
7	Hutan Walitis	Kec. Selopampang
8	Mata Air Jumprit	Kec. Ngadirejo
9	Wana Wisata Jumprit	Kec. Ngadirejo

NO	NAMA OBYEK WISATA	LOKASI
10	Pesona Alam Sewu	Kec. Ngadirejo
11	Bukit Sindumoyo	Kec. Ngadirejo
12	Wisata Alam Posong	Kec. Kledung
13	Sedadap	Kec. Kledung
14	Sedengkeng Pass	Kec. Kledung
15	Pendakian Gunung Sindoro	Kec. Kledung
16	Curug Thithang	Kec. Temanggung
17	Pesona Wagir Bawang	Kec. Tretep
18	Curug Guwung	Kec. Candiroto
19	Watu Layah	Kec. Kandangan
20	Watu Angkrik	Kec. Kandangan
21	Perkebunan Rowo Seneng	Kec. Kandangan
22	Sigrowong	Kec. Kandangan
23	Perkebunan Gesing	Kec. Kandangan
24	Watu Mlongso	Kec. Kandangan
25	Curug Kreo	Kec. Kranggan
26	Curug Gowa Lawa	Kec. Kranggan
27	Curug Watu Wayang	Kec. Kranggan
28	Curug Dadap	Kec. Kranggan
29	Curug Grenjeng	Kec. Kranggan
30	Sendang Sidhukun	Kec. Parakan
31	Gowa Wonotirto	Kec. Bulu
32	Watu Wayang	Kec. Bulu
33	Wisata Gunung Sumbing	Kec. Tlogomulyo
OBYEK WISATA BUATAN		
1	Pikatan Water Park/Tirto Asri	Kec. Temanggung
2	Taman Kartini	Kec. Temanggung
3	Monumen Bambang Soegeng	Kec. Temanggung
4	Taman Kali Progo	Kec. Temanggung
5	Monumen Meteorit	Wonotirto Kec. Bulu
6	Pemandian Liyangan	Kec. Ngadirejo
7	Embung Kledung	Kec. Kledung

NO	NAMA OBYEK WISATA	LOKASI
8	Rest Area Kledung	Kec. Kledung
9	Embung Abimanyu	Kec. Kranggan
10	Embung Tlogopucang	Kec. Kandangan
11	Embung Tuk	Kec. Kandangan
12	Pasar Papringan	Kec. Kedu
13	Pusat Ayam Cemani	Kec. Kedu
14	Pasar Buah Pringsurat	Kec. Pringsurat
15	Rest Area dan Pasar Buah	Kec. Pringsurat
OBYEK WISATA BUDAYA/SEJARAH		
1	Candi Pringapus	Kec. Ngadirejo
2	Situs Liyangan	Kec. Ngadirejo
3	Wisata Banyu Suci	Kec. Ngadirejo
4	Endong Sewu	Kec. Ngadirejo
5	Prasasti Gondosuli	Kec. Bulu
6	Makam Ki Ageng Makukuhan	Kec. Kedu
7	Makam R. Trenggono Kusumo	Kec. Candiroto
8	Wisata Tirto Aji	Kec. Parakan
9	Makam Kyai Pahing	Kec. Tembarak
OBYEK DESA WISATA		
1	Desa Wisata Gunungpayung	Kec. Candiroto
2	Desa Wisata Tawang Sari	Kec. Wonobojo
3	Desa Wisata Tegalrejo	Kec. Ngadirejo
4	Desa Wisata Liyangan	Kec. Ngadirejo
5	Desa Wisata Traji	Kec. Parakan
6	Desa Wisata Tlahap	Kec. Kledung
7	Desa Wisata Cepit	Kec. Bulu
8	Desa Wisata Kedu	Kec. Kedu
9	Desa Wisata Makukuhan	Kec. Kedu
10	Desa Wisata Purwosari	Kec. Kranggan
11	Desa Wisata Ngropoh	Kec. Kranggan
12	Desa Wisata Seropadan	Kec. Pringsurat
13	Desa Wisata Menggoro	Kec. Tembarak

Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2018

2) Jumlah dan Lama Tinggal Wisatawan

Sektor pariwisata merupakan salah satu indikator penting dalam kerangka pembangunan kepariwisataan daerah. Kunjungan wisatawan nusantara juga memiliki peran penting dalam memberikan kontribusi tumbuhnya perekonomian daerah melalui PAD sektor pariwisata meskipun saat ini PAD sektor pariwisata baru bisa terserap dari obyek wisata yang dikelola langsung oleh BUMD (Bhumi Phala Wisata) sedangkan obyek-obyek lain masih belum ada kontribusi ke PAD. Akan tetapi PAD bukan satu-satunya ukuran perkembangan kepariwisataan, karena Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui kepariwisataan yang terkelola dengan baik juga memiliki kontribusi besar sebagai penyelamatan perekonomian daerah terutama masyarakat di sekitar destinasi wisata.

Jumlah wisatawan di Kabupaten Temanggung selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan, hal ini karena adanya beberapa tempat wisata yang ramai dikunjungi wisatawan, antara lain Pikatan Water Park dan Posong. Tempat wisata yang baru berkembang dan mampu menarik wisatawan berkunjung adalah tempat wisata berbasis alam, antara lain Jumprit, Sedengkeng, Sedhadap, Watu Layah, Watu Angkrik, beraneka Curug, dan beraneka Embung. Salah satu cagar budaya yang menarik wisatawan adalah Situs Liyangan.

Tabel 2.155.
Perkembangan Jumlah dan Lama Kunjungan Wisatawan
Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017

No.	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Pertumbuhan kunjungan wisatawan (%)	12,46	3,52	16,88	8,22	14,55
a.	Jumlah wisatawan manca negara (jiwa)	25	155	435	364	107
b.	Jumlah wisatawan domestik (jiwa)	326.657	338.781	395.717	428.381	491.037
c.	Jumlah wisatawan (a+b) (Th. 2012 = 291.087)	327.382	338.936	396.152	428.745	491.144
2.	Peningkatan kunjungan wisata(jiwa)	36.295	11.554	57.216	32.593	62.399
3.	Jumlah hotel	6	12	13	13	14
4.	Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan (hari)	1	1	1	1	1

Sumber: Dinbudpar Kab. Temanggung Tahun 2018

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan tahun 2013-2017 peningkatannya sedikit dan cenderung fluktuatif, hal ini dikarenakan kurangnya inovasi dari pengelola obyek wisata serta keterbatasan kemampuan SDM pengelola OW, sedangkan *Lenght of Stay* (Lama Tinggal Wisatawan) tahun 2013-2017 *stagnan* setiap tahunnya rata-rata 1 hari, hal ini disebabkan Temanggung belum menjadi tujuan wisata tetapi hanya sebagai persinggahan.

d. Bidang Perdagangan

1) Jumlah Sarana dan Prasarana Perdagangan

Perdagangan di Kabupaten Temanggung didukung dengan sarana prasarana pasar daerah, pasar desa dan pasar modern. Kondisi sarana prasarana perdagangan di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.156.
Jumlah Sarana dan Prasarana Perdagangan
Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2017

No	Tahun	Pasar Umum		Pasar Hewan		Pasar Buah		Pasar Ikan		Jumlah
		Daerah	Desa	Daerah	Desa	Daerah	Desa	Daerah	Desa	
1	2013	15	24	5	-	-	-	-	-	44
2	2014	15	24	5	-	-	-	-	-	44
3	2015	15	24	5	-	1	-	-	-	45
4	2016	15	24	5	-	1	-	-	-	45
5	2017	15	24	5	-	1	-	-	-	45

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
Kab.Temanggung Tahun 2018

2) Persentase Realisasi Pendapatan Pasar

Pendapatan pasar adalah seluruh penerimaan yang berupa uang dari pungutan retribusi atas pelayanan pasar yang telah diatur berdasarkan Peraturan Bupati. Realisasi Penerimaan Pendapatan Pasar adalah pendapatan retribusi pasar yang merupakan gabungan dari beberapa retribusi pelayanan pasar (retribusi murni, bongkar muat, Ijin, MCK), tempat khusus parker, pemakaian kekayaan daerah (PKL) dan retribusi penempatan awal (RPA).Rumus penghitungan didapat dari realisasi pendapatan dibagi target pendapatan dikali 100%. Persentase realisasi penerimaan pendapatan pasar dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.157.
 Persentase Realisasi Pendapatan Pasar Daerah
 Kabupaten Temanggung, Tahun 2015-2017

NO	TAHUN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2015	34.334.166.722	14.387.243.436	41,90
2	2016	51.978.791.895	52.211.593.300	100,45
3	2017	12.691.803.500	4.740.971.250	37,35

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi pendapatan pasar daerah dari tahun 2015 sampai dengan 2017 cenderung fluktuatif. Tahun 2015 realisasi pendapatan mengalami penurunan karena penarikan retribusi Pasar Legi Parakan terhambat sebab persiapan perpindahan dari pasar lama ke pasar darurat sehingga pendapatan pedagang tidak maksimal. Sedangkan pada tahun 2016 pendapatan daerah mencapai 100 % lebih dikarenakan terdapat pencapaian pendapatan dari komponen pemakaian dan pendayagunaan kekayaan daerah lainnya (perpanjangan HGB diatas HPL) atas ruko/toko yang berada di pasar kliwon Temanggung.

3) Cakupan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera ulang

Alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah UTTP yang wajib ditera dan tera ulang. Sedangkan tera ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera. Pada tahun 2017 ada 201 alat UTTP yang ditandai dari 9.584 alat yang ada (2.09%). realisasi alat yang ditera / tera ulang masih sedikit karena belum mempunyai SDM yang berhak untuk melakukan tera / tera ulang, belum memiliki alat sarana prasarana yang sesuai standar dan belum bisa melakukan tera ulang secara mandiri.

e. Bidang Perindustrian

1) Kondisi Industri Mikro/Kecil, Menengah dan Besar

Perkembangan sektor perindustrian di Kabupaten Temanggung dapat dilihat dari 3 (tiga) jenis industri yaitu mikro dan kecil, menengah, dan besar sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.158.
Perkembangan Sektor Perindustrian
Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017

Kriteria	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Industri Mikro dan Kecil					
- Unit kerja (unit)	15.731	15.725	15.848	15.848	15.848
- Tenaga Kerja (orang)	64.940	56.480	58.230	58.230	58.230
- Nilai produksi (juta rupiah)	862.585	862.965	880.224	880.235	880.235
Industri Menengah					
- Unit kerja (unit)	47	50	53	54	54
- Tenaga Kerja (orang)	1.995	4.415	4.675	4.774	4.774
- Nilai Produksi (juta rupiah)	-	-	-	-	-
Industri Besar					
- Unit kerja (unit)	30	38	38	38	38
- Tenaga Kerja (orang)	12.993	23.902	24.405	24.405	24.405
- Nilai produksi (juta rupiah)	2.815.257	2.138.079	2.180.841	2.180.855	2.180.855

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung Tahun 2018

2) Jumlah Unit Usaha dan Jumlah Tenaga Kerja

Jumlah unit usaha dan jumlah tenaga kerja di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.159.
Banyaknya Perusahaan dan Tenaga Kerja Industri
Kabupaten Temanggung Tahun 2016

No	Kriteria	Uraian			
		Perusahaan	Tenaga kerja (orang)	Jumlah produksi	Nilai produksi (Rp)
INDUSTRI PANGAN					
1	Pemotongan hewan	24	133	180	4.186
2	Pengolahan buah (dalam botol)	31	99	47,84	910
3	Pisang aroma	16	159	709,28	3.021,20
4	Jahe instan	4	15	20,80	314,08
5	Susu segar	1	23	2.789	1.716
6	Susu kedelai	5	15	728	52
7	Pembersihan kopi	954	3080	1.200	6.500
8	Tepung jagung	5	21	244,40	832

No	Kriteria	Uraian			
		Perusahaan	Tenaga kerja (orang)	Jumlah produksi	Nilai produksi (Rp)
9	Tepung tapioca	16	76	294,32	780
10	Ransum pakan ternak	4	36	1.433,12	3.432
11	Roti dan sejenisnya	71	328	561,6	6.136
12	Gula aren	1.224	2.524	676	8.065
13	Glukosa	1	13	140,40	364
14	Sirup	1	5	21.994	187,2
15	Mie	1	8	280,80	660,40
16	Pembungkus teh	2	6	0	31,2
17	Kopi bubuk	145	335	62,40	4.686
18	Es	23	57	72,8	312
19	Kecap	7	37	497,12	1.248
20	Tempe	492	909	4.420	16.432
21	Tahu	109	468	4.971,2	13.728
22	Kedele goreng	4	16	24,96	119,60
23	Kacang telur	12	32	36,40	260
24	Kerupuk dan sejenisnya	1.709	5.995	9.271,6	30.992
25	Tape ketela	31	52	62,40	72,80
26	Kue basah	473	1.891	988	9.152
27	Makanan lain (jamur dan madu)	7	24	36,4	676
28	Air minum dalam kemasan	3	160	780.000	6.832,8
29	Rokok cerutu	1	48	5,72	1.768
30	Cengkeh rajangan	3	11	8,32	130
31	Pengeringan dan pengolahan tembakau	3.360	24.939	13.520	2.792,4
	INDUSTRI SANDANG				
1	Rajutan	173	237	15.700	260
2	Kasur dan bantal	19	42	832	81,12
3	Pakaian jadi	138	367	6.032	1.508
4	Batik	6	22	2.132	728
5	Pakaian kesenian	5	16	12.480	590,72
6	Training pack	10	35	12.480	296,40
7	Masker, kain pel, dan lain-lain	7	22	34.320	31,20
8	Pengawetan kulit	1	3	624	83,20
9	Barang dari kulit	2	6	644	78
10	Alas kaki/sepatu	2	7	700	20,80

No	Kriteria	Uraian			
		Perusahaan	Tenaga kerja (orang)	Jumlah produksi	Nilai produksi (Rp)
	INDUSTRI KIMIA DAN BAHAN BANGUNAN				
1	Ubin kayu	1	2.816	65.832	520.312
2	Panel kayu/Balken/papan	28	6.641	86.840	660.400
3	Moulding dan bahan bangunan	423	2.750	639.600	18.720
4	Percetakan	18	85	520.000	2.184
5	Foto copy	20	46	4.120	312
6	Cetak film	7	15	156	624
7	Pupuk alam	6	458	239,20	67.600
8	Sabun	3	9	35,36	7,28
9	Vulkanisir ban	5	13	884	104
10	Minyak atsiri	3	9	5,20	98,8
11	Kemasan plastik	1	60	728.000	894,40
12	Tas plastik	46	130	35.360	88,40
13	Daur ulang plastik	3	37	239,2	260
14	Batu bata	328	1.073	18.720.000	4.420
15	Genteng	575	1.820	15.600.000	7.540
16	Gips	9	40	6.670	218,4
17	Barang dari semen	9	33	28.080	728
18	Furnitur kayu	135	344	52.000	6.032
19	Furnitur cat duco	8	98	5.200	5.824
20	Furnitur bambu	4	16	124,8	93,60
	INDUSTRI LOGAM DAN ELEKTRONIKA				
1	Teralis besi	12	46	915,2	1.060,8
2	Las	77	124	244,4	436,8
3	Pande besi	2	4	1.300	39,52
4	Mesin perajang tembakau	16	70	780	2.131,6
5	Alat perajang tembakau	18	48	811,2	52
6	Penetas telur	3	26	291,20	395,2
7	Furnitur logam	2	6	572	15,6
8	Daur ulang timah bekas aki	1	7	603,2	208
9	Pemeliharaan dan reparasi mobil	41	244	3.016	3.276
10	Pemeliharaan dan reparasi sepeda motor	47	72	91.520	3.224
11	Reparasi elektronika	15	29	10.920	83,20

No	Kriteria	Uraian			
		Perusahaan	Tenaga kerja (orang)	Jumlah produksi	Nilai produksi (Rp)
12	Perakitan antenna	1	2	93,60	156
	KERAJINAN				
1	Bordir	4	12	8.008	85,28
2	Anyaman bambu/ keranjang tembakau	3.595	10.264	1.940.120	15.600
3	Kerajinan bambu	4	9	7.800	218,40
4	Kuda lumping	6	26	2.288	223,60
5	Anyaman lidi	153	458	9.464	332,80
6	Anyaman pelepah pisang	260	541	7.072	296,40
7	Anyaman mending	4	26	13.104	67,60
8	Kerajinan kayu/ patung	18	30	59.072	135,2
9	Alat dapur dari bambu	362	1.016	1.623.232	644,80
10	Bedug	2	10	93,60	395,20
11	Tangkai cangkul	6	15	3.120	31,20
12	Terompah kayu	38	98	17.000	81,12
13	Alat jemur bambu	15	41	10.244	104
14	Gerabah tanah	168	308	63.232	114,40
15	Relief tembaga	7	99	8.008	5.200
16	Gamelan tradisional	1	2	-	-
17	Alat musik	2	14	22.880	72,80
18	Alat olahraga	1	2	7.124	58,24
19	Mainan anak	3	38	31.720	2.028
20	Radio kayu dan alat fungsional	1	31	5.928	2.288
21	Sapu ijuk	279	640	47.923,2	780
	INDUSTRI KAYU PRIMER HASIL HUTAN				
1	Laminating, bare core, veneer, dll	27	14.158	844.578,8	3.759.533,6

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung Tahun 2018

3) Persentase IKM agro industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah

IKM agro industri adalah Kegiatan Industri Kecil Menengah yang memanfaatkan hasil pertanian / kehutanan sebagai bahan baku, merancang dan menyediakan peralatan serta jasa untuk kegiatan tersebut. Proses yang digunakan mencakup perubahan dan pengawetan melalui perlakuan fisik

atau kimiawi, penyimpanan, pengemasan dan distribusi. Komoditas unggulan daerah adalah komoditas potensial yang dipandang dapat dipersandingkan dengan produk sejenis di daerah lain, karena disamping memiliki keunggulan komparatif juga memiliki efisiensi usaha yang tinggi. Efisiensi usaha itu tercermin dari efisiensi produksi, produktivitas pekerja, profitabilitas dan lain-lain.

Persentase IKM agro industri yang berbasis komoditas unggulan daerah pada tahun 2017 sebesar 41,75%, atau 4.792 umlah IKM agro industri yang berbasis komoditas unggulan daerah dari 11.477 dari Jumlah IKM agro industri .Hal tersebut dikarenakan adanya fasilitasi bantuan peralatan, fasilitasi sertifikasi usaha dan pelatihan.

4) Persentase IKM Aneka Industri yang Berbasis Pada Komoditas Unggulan Daerah

Industri Kecil Menengah (IKM) aneka industri adalah Kegiatan Industri Kecil Menengah Bidang Logam, mesin elektronika, kimia, sandang, dan aneka kerajinan. Jumlah IKM aneka industri di Kabupaten Temanggung 2017 sebesar 5.335 IKM dengan sebaran di kecamatan sebagai berikut:

Tabel 2.160.
IKM aneka industri Menurut Kecamatan
Kabupaten Temanggung Tahun 2017

No	Kecamatan	Jumlah IKM Aneka Industri Tahun 2017
1	Pringsurat	633
2	Kaloran	755
3	Kandangan	861
4	Parakan	188
5	Ngadirejo	160
6	Jumo	241
7	Tretep	12
8	Kranggan	408
9	Tlogomulyo	34
10	Selopampang	41
11	Bansari	38
12	Kledung	69
13	Temanggung	391
14	Tembarak	112
15	Bulu	65
16	Kedu	929

17	Candiroto	147
18	Bejen	93
19	Wonobojo	38
20	Gemawang	120
Jumlah		5335

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung Tahun 2018

f. Bidang Transmigrasi

1) Jumlah Transmigran yang Diberangkatkan terhadap Animo Transmigrasi

Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang melaksanakan transmigrasi di Kabupaten Temanggung selama lima tahun terakhir cenderung mengalami penurunan, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.161.
Jumlah Transmigran Kabupaten Temanggung
Tahun 2013-2017

No.	Tahun	Kuota Transmigran (KK)	Pemberangkatan Transmigran (KK)	Animo (KK)	% Transmigran yang diberangkatkan terhadap animo transmigrasi
1	2017	5	5	36	13,88
2	2016	15	15	46	32,60
3	2015	0	0	29	0
4	2014	4	4	20	20,00
5	2013	12	12	12	100

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Persentase pemberangkatan transmigran terhadap animo transmigrasi di Kabupaten Temanggung selama 5 (lima) tahun cenderung meningkat. Namun, jumlah kuota transmigrasi yang bisa diberangkatkan cenderung menurun, faktor ini disebabkan karena jumlah kuota transmigrasi ditentukan oleh Kementerian Transmigrasi dan kuota KK Transmigrasi untuk Kabupaten Temanggung yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah semakin berkurang dari tahun ke tahun.

4. Penunjang Urusan Pemerintahan

a. Fungsi Penunjang Perencanaan

1) Tingkat Konsistensi Program Pembangunan

Konsistensi Program Pembangunan adalah program dalam RKPd terhadap program yang direncanakan dalam RPJMD. Selama tahun 2013-2017, semua program yang ada dalam RKPd telah selaras dengan program dalam RPJMD (100%). Hal ini dikarenakan dalam proses perencanaan pembangunan daerah

telah menggunakan aplikasi sistem perencanaan pembangunan daerah (SIMPEDA).

2) **Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tepat Waktu**

Dokumen perencanaan pembangunan meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra PD, RKPD, perubahan RKPD, Renja dan perubahan Renja. Di Kabupaten Temanggung, dokumen perencanaan telah disusun tepat pada waktunya sesuai dengan peraturan yang berlaku (100%). Dengan disusunnya perencanaan tepat waktu akan mempengaruhi kelancaran proses penganggaran dan pelaksanaan pembangunan.

b. Fungsi Penunjang Keuangan

1) **Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)**

Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal. Opini BPK atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.162.
Opini BPK Terhadap Kinerja Keuangan
Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017

TAHUN	2013	2014	2015	2016	2017
Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: BPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas, selama tahun 2013-2017, Pemerintah Kabupaten Temanggung mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), hal ini menyatakan bahwa laporan keuangan yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia menurut ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

2) **Peningkatan Jumlah dan Pemutakhiran Obyek Pajak**

Obyek Pajak adalah semua hal atau sebuah transaksi yang menurut peraturan ataupun perundang-undangan tentang perpajakan dikenakan

pajak. Persentase Peningkatan data jumlah obyek pajak di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.163.
Persentase Peningkatan Data Jumlah Obyek Pajak
Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017

Uraian	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah OP	488.471	490.664	493.494	525.243	579.607
Persentase Peningkatan OP (%)	0,055	0,45	0,576	6,43	10,35

Sumber : BPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah obyek pajak dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, kenaikan cukup signifikan terjadi mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Hal ini terjadi karena mulai tahun 2015 di laksanakan program pendataan massal obyek PBB-P2 dengan sistem SISMIOP.

Tabel 2.164.
Persentase Pemutakhiran Obyek Pajak
Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017

Uraian	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017
SPPT	488.418	490.616	493.441	525.229	579.594
Pemutakhiran	9.951	10.482	10.965	12.120	22.430
Persentase Pemutakhiran OP (%)	2,0	2,1	2,2	2,3	3,9

Sumber : BPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Semakin besar prosentase pemutakhiran data PBB berakibat semakin kecil perbedaan data SPPT dengan kondisi lapangan yang bermakna semakin terwujudnya keadilan pemungutan PBB di masyarakat.

3) Penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu

Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) merupakan dokumen penetapan pajak yang diterbitkan oleh BPPKAD sebagai dasar pemungutan pajak daerah. Terhadap pajak yang bersifat official assesment maka BPPKAD wajib menerbitkan SKPD berdasarkan dokumen permohonan dan dokumen pemeriksaan lapangan. SKPD yang diterbitkan meliputi SKPD, SKPDKB,

SKPDKBT, SKPDN, STP, dan SKPDLB atas pajak reklame, pajak air tanah, BPHTB.

Tabel 2.165.
Persentase Penerbitan SKPD Tepat Waktu
Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017

Uraian	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017
SKPD Terbit	1.583	1.664	1.737	2.151	2.140
Permohonan	1.583	1.664	1.737	2.151	2.140
Persentase Penerbitan (%)	100	100	100	100	100

Sumber : BPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Persentase 100 % secara konstan menunjukkan bahwa seluruh dokumen permohonan/pengajuan (SPOPD) telah melalui proses pengelolaan data dan telah ditetapkan menjadi SKPD untuk kemudian ditagih dan dibayarkan.

4) **Konsistensi penganggaran terhadap perencanaan**

Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran penting diperhatikan karena merupakan indikator dalam menilai kinerja pemerintah daerah, agar seluruh program dan kegiatan pemerintah berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini sangat berpengaruh terhadap capaian dari visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan serta memiliki peran yang penting dalam pelaksanaan pembangunan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat melalui program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Konsistensi penganggaran terhadap perencanaan dalam penyusunan APBD di Kabupaten Temanggung selama 5 tahun sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.166.
Persentase Konsistensi Penganggaran terhadap Perencanaan
Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017

Uraian	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase konsistensi penganggaran terhadap perencanaan	n.a	n.a	80,86	84,41	81,73

Sumber : BPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Konsistensi penganggaran terhadap perencanaan dari tabel di atas dapat dilihat bahwa selama 3 tahun yaitu dari tahun 2015 sampai dengan 2017 cenderung fluktuatif. Hanya pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 2,68% yaitu dari 84,41% turun menjadi 81,73%. Secara rata-rata konsistensi penganggaran terhadap perencanaan di Kabupaten Temanggung menunjukkan bahwa konsistensi penganggaran terhadap perencanaan masih perlu diperhatikan dan dibutuhkan komitmen dari semua pihak yang berkepentingan.

c. Fungsi Penunjang Pengawasan

1) Indeks Persepsi Anti Korupsi

Indeks Persepsi Anti Korupsi dapat diperoleh dari hasil survey persepsi korupsi yang dilaksanakan oleh entitas Kabupaten terhadap SKPD, yang hasil penilaiannya dikeluarkan oleh Kementerian PAN dan RB.

Tabel 2.167.
Rumus Penghitungan Dari Indeks Persepsi Korupsi

No	Indikator Kinerja	Rumus Indikator Kinerja	Penjelasan Indikator	Penanggungjawab
1	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Nilai IPAK diperoleh dengan mensurvey atas aspek-aspek yang ditentukan oleh Kementerian PAN dan RB	Yang berkompeten mengeluarkan nilai IPAK adalah Kementerian PAN dan RB yang diperoleh dari hasil survey yang dilakukan oleh Tim survey Kabupaten	Inspektorat

Sumber : Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2018

2) Penanganan hasil temuan pemeriksaan pada IRBAN I, II, III, IV

Penanganan hasil temuan dilaksanakan melalui pemantauan tindak lanjut. Pemantauan tindak lanjut yaitu proses penilaian kemajuan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan, baik hasil Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat Provinsi, maupun Inspektorat Kabupaten Temanggung.

Dalam pelaksanaannya, tindak lanjut dilaksanakan oleh Tim Pemantauan Tindak Lanjut pada Inspektorat Kabupaten Temanggung yang melaksanakan pemantauan ke Obyek Pemeriksaan dalam menindaklanjuti rekomendasi sesuai dengan hasil pemeriksaan.

Berikut data temuan hasil pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Temanggung beserta proses penyelesaian tindaklanjutnya dari tahun 2013 s.d. 2018 sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.168.
 Persentase Penanganan hasil temuan pemeriksaan pada
 IRBAN I, II, III, IV

Tahun	Jumlah Temuan	Selesai Tindak Lanjut	Dalam Proses	Belum Tindak Lanjut
2013	1036	842	199	4
2014	852	727	102	23
2015	959	824	36	99
2016	1132	797	51	281
2017	1366	830	95	442
Jumlah	5345	4020	483	849

Sumber : Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Selama kurun waktu 5 tahun dari 2013 sampai dengan 2017, Inspektorat telah melaksanakan pemeriksaan dengan jumlah temuan sebanyak 6.106 dan telah dilakukan tindak lanjut oleh auditee sebanyak 4.429, yang masih dalam proses penyelesaian tindak lanjut sebanyak 1.684.

3) Perangkat daerah yang SAKIP-nya dievaluasi pada IRBAN I, II, III, IV

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)-nya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka perlu dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah di pusat dan daerah untuk secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMN/RPJMD. Secara umum, tujuan evaluasi atas implementasi SAKIP adalah untuk:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;
4. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Dalam penerapannya, lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP mencakup:

1. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja, dan sistem pengukuran kinerja;
2. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja;
3. Evaluasi terhadap program dan kegiatan; dan
4. Evaluasi terhadap kebijakan instansi/unit kerja yang bersangkutan.

Tabel 2.169.
Kategori Penilaian Evaluasi SAKIP

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
2	A	>80 – 90	Memuaskan , Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3	BB	>70 – 80	Sangat Baik , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki system manajemen kinerja yang andal.
4	B	>60 – 70	Baik , Akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan
5	CC	>50 – 60	Cukup (Memadai) , Akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki system yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar
6	C	>30 – 50	Kurang , Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki system untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar
7	D	0 – 30	Sangat Kurang , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar

Sumber : Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 pasal 5 bahwa setiap pimpinan instansi pemerintah melakukan evaluasi atas

implementasi SAKIP di lingkungannya setiap tahun. Dalam pelaksanaan evaluasi tersebut dilakukan oleh aparat pengawasan internal masing-masing.

Dalam pelaksanaan Evaluasi SAKIP Inspektorat Kabupaten Temanggung sebagai APIP dibagi dalam 4 Tim di bawah Inspektur Pembantu I, II, III dan IV dengan target mulai tahun 2019 semua Perangkat Daerah dapat dievaluasi SAKIP nya setiap tahun. Adapun hasil evaluasi SAKIP tahun 2017 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.170.
Persentase Perangkat Daerah yang SAKIP-nya Dievaluasi Pada IRBAN I, II, III, IV

Tahun	Jumlah PD yang dievaluasi	Nilai rata-rata SAKIP PD
2013	n.a	-
2014	n.a	-
2015	n.a	-
2016	n.a	-
2017	20	Baik

Sumber : Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2018

4) APIP yang memiliki sertifikasi profesi

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal/Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kementerian/Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Unit Pengawasan Intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas kegiatan pengawasan oleh Inspektorat, APIP disyaratkan memiliki kompetensi yang mencukupi baik teknis maupun non teknis. Sertifikasi profesi salah satu upaya yang dilakukan oleh APIP untuk memenuhi kebutuhan tersebut, antara lain sertifikat dalam bidang akuntansi, internal audit, manajemen risiko, investigasi, pencegahan fraud/kecurangan. Pada tahun 2017 Inspektorat telah mengirimkan personilnya untuk mengikuti diklat sertifikasi profesi, dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.171.
 Persentase APIP yang Memiliki Sertifikasi Profesi

Tahun	Nama Diklat Profesi	Jumlah yang dikirim	Keterangan
2017	CFE (Certified Fraud Examiner)	1	Lulus bersertifikasi
	CFrA (Certified Forensic Audit)	1	Lulus bersertifikasi
Jumlah		2	

Sumber : Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2018

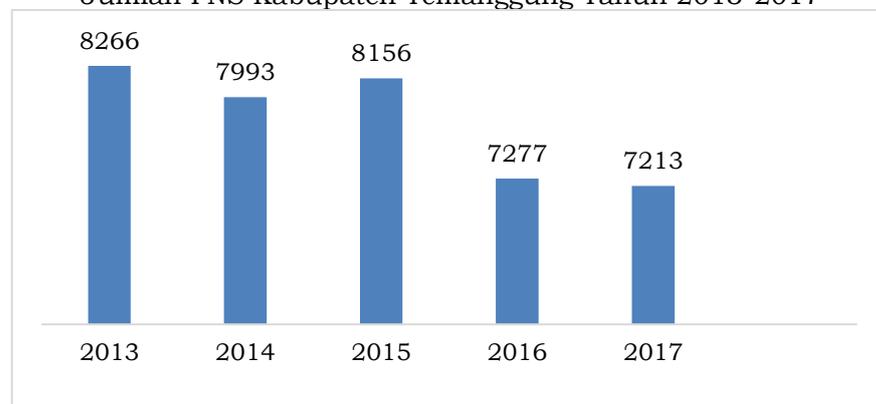
d. Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

1) Jumlah Aparatur Sipil Negara Kabupaten Temanggung

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat menjadi ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan ASN yang bekerja pada instansi pemerintah, yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pegawai ASN terdiri dari PNS, diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Berdasarkan Pasal 94 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 disebutkan bahwa PPPK akan diatur dengan Peraturan Presiden, namun sampai dengan saat ini Peraturan Presiden yang mengatur tentang PPPK belum diterbitkan, sehingga sampai dengan saat ini pegawai ASN hanya dari PNS. Jumlah PNS Kabupaten Temanggung tahun 2013-2017 dapat dilihat pada gambar berikut:

Tabel 2.172.
 Jumlah PNS Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017



Sumber: BKPSDM Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Berdasarkan gambar di atas, jumlah PNS Kabupaten Temanggung selama 5 (lima) tahun cenderung menurun, akibat dari banyaknya PNS yang

memasuki usia pensiun setiap tahunnya tanpa diimbangi dengan perekrutan CPNS karena aturan moratorium CPNS Umum (Perintah tidak membuka lowongan CPNS sampai dengan waktu tertentu untuk formasi umum). Disamping itu, pada tahun 2016 terdapat beberapa kewenangan kepegawaian yang ditangani oleh Provinsi seperti Guru/Tenaga Kependidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan SLB serta Tenaga Kehutanan.

2) Kompetensi ASN

a. ASN yang Memiliki Kompetensi

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Kompetensi ASN adalah kombinasi ketrampilan, pengetahuan dan sikap yang dibutuhkan ASN untuk menyelesaikan suatu tugas sebagaimana yang disyaratkan, dan merupakan salah satu syarat pengembangan karier PNS. Kebijakan Nasional Pengembangan Kompetensi dalam UU ASN:

- 1) Jenis kompetensi yang harus dikuasai ASN adalah kompetensi manajerial, teknis, dan sosial kultural serta (UU 23/2014 menambahkan kompetensi Pemerintahan)
- 2) Jaminan bahwa setiap ASN mendapatkan hak pengembangan kompetensi setiap tahun dalam rangka pengembangan kariernya
- 3) Variasi jenis kegiatan pengembangan kompetensi yang dapat dilakukan adalah Pendidikan dan Pelatihan Klasikal yang meliputi: pelatihan, seminar, kursus, penataran dan pelatihan non klasikal: meliputi e-learning, pelatihan jarak jauh, *coaching/mentoring*, pertukaran pegawai, magang, dan lain-lain.

Jumlah PNS yang telah mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.173.

Jumlah ASN yang Telah Mengikuti Kegiatan Pengembangan Kompetensi Melalui Pendidikan (Tugas Belajar, Diklat Kepemimpinan dan Diklat Teknis Fungsional, Secara Klasikal) Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017

Uraian	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah ASN	8.266	7.993	8.156	7.277	7.213
ASN yang memiliki kompetensi	321	382	497	290	737
Persentase ASN yang memiliki kompetensi (%)	3,88	4,78	6,09	3,99	10,22

Sumber: BKPSDM Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Dari tabel di atas, terlihat bahwa dari jumlah ASN Kabupaten Temanggung pada 2017 yaitu 7.213 orang, terdapat 737 orang yang mendapatkan pengembangan kompetensi atau sekitar 10,22% dari jumlah PNS. Dapat disimpulkan bahwa dengan jumlah anggaran yang relatif terbatas untuk pengembangan kompetensi di Kabupaten Temanggung. Namun demikian, angka tersebut belum memperhitungkan pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh masing-masing PD yang tidak melaporkan datanya ke BKPSDM Kabupaten Temanggung serta pengembangan kompetensi melalui jalur mandiri dan non klasikal, seperti seminar, magang, pelatihan jarak jauh, *workshop*, *coaching* dan *mentoring*, dan lain-lain.

b. ASN yang mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional

Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis dan fungsional pada tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.174.

Jumlah ASN yang Telah Mengikuti Kegiatan Pengembangan Kompetensi Melalui Diklat Teknis dan Fungsional Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017

No	Uraian	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah ASN	8.266	7.993	8.156	7.277	7.213
2	Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis dan fungsional	n.a	161	146	189	446
3	Persentase ASN yang mengikuti diklat teknis dan fungsional	n.a	2,01	1,79	2,59	6,18

Sumber: BKPSDM Kabupaten Temanggung Tahun 2018

c. Pejabat Tinggi yang Mengikuti Diklat Kepemimpinan

Diklat Kepemimpinan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural (Perka LAN Nomor 25 Tahun 2015 Pasal 1 Ayat 5). Diklat Kepemimpinan bertujuan untuk memberikan wawasan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku dalam bidang kepemimpinan aparatur sehingga mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan dalam jenjang jabatan struktural tertentu. Jumlah pejabat yang mengikuti diklat kepemimpinan pada tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.175.
Jumlah Pejabat yang Telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017

No	Uraian	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah pejabat	805	779	847	800	784
2	Jumlah pejabat yang ikut diklat PIM	319	345	411	471	380
3	Persentase pejabat yang mengikuti diklat kepemimpinan (%)	39,63	44,29	48,52	58,88	48,47

Sumber: BKPSDM Kabupaten Temanggung Tahun 2018

3) Keterisian Jabatan

Jumlah keterisian jabatan pada tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.176.
Keterisian Jabatan
di Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017

No.	Uraian	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah jabatan	995	996	990	800	882
2	Jumlah jabatan yang terisi	805	779	847	739	784
3	Persentase keterisian jabatan (%)	80,90	78,21	85,56	92,38	88,89

Sumber: BKPSDM Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Berdasarkan data pada tabel di atas diketahui bahwa pada setiap tahunnya tidak semua jabatan bisa terisi. Adanya kekosongan jabatan disebabkan beberapa hal diantaranya pejabat memasuki masa usia pensiun, meninggal dunia, promosi jabatan, dan mutasi ke luar daerah. Proses pengisian jabatan telah diatur melalui peraturan pemerintah yaitu untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama diisi melalui proses seleksi terbuka, dan untuk jabatan Administrator dan Pengawas dapat diisi oleh PNS yang memenuhi syarat dan disetujui oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) setelah mendapat pertimbangan dari tim penilai kinerja atau BAPERJAKAT.

4) Persentase Pelanggaran Disiplin ASN/PNS

Pelanggaran Disiplin ASN adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan ASN yang tidak mentaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin ASN, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam

kerja. Persentase pelanggaran disiplin ASN adalah pengukuran tingkat pelanggaran disiplin ASN/PNS (yang menerima hukuman disiplin) dibandingkan dengan Jumlah ASN/PNS.

Persentase pelanggaran disiplin ASN/PNS cenderung fluktuatif, dengan pelanggaran terbanyak pada tahun 2014, yaitu 35 pelanggaran (0,43%) dan paling sedikit pada tahun 2017 sebanyak 7 pelanggaran (0,09%).

Tabel 2.177.
Persentase Pelanggaran Disiplin ASN di Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017

No.	Tahun	Jumlah PNS	Jumlah ASN Yang Melakukan Pelanggaran	Persentase Pelanggaran Disiplin ASN
1	2013	8.266	23	0,27 %
2	2014	7.993	35	0,43%
3	2015	8.156	17	0,21%
4	2016	7.305	28	0,38%
5	2017	7.213	7	0,09%

Sumber: BKPSDM Kabupaten Temanggung Tahun 2018

e. Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan

1) Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan

Permendagri No. 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian Dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah pada Pasal 35 menyebutkan bahwa Badan Litbang Daerah Kabupaten/Kota atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan berwenang dan bertanggung jawab atas kelitbangan pemerintahan dalam negeri di kabupaten/kota. Selanjutnya, pada pasal 15 ayat 5 dan 6 juga mengamanatkan bahwa ada evaluasi dan pembinaan oleh Menteri atau Kepala Daerah kepada perumus kebijakan atau regulasi tentang pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan dalam penyusunan kebijakan dan regulasi di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu berdasarkan Perda Kabupaten Temanggung Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung maka Bappeda Kabupaten Temanggung merupakan Lembaga Kelitbangan Kabupaten yang bertanggung jawab atas kelitbangan dan pelaksanaan fungsinya, sehingga Bappeda juga harus memastikan bahwa setiap perumusan kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung harus memanfaatkan hasil-hasil kelitbangan.

Dalam hubungannya dengan perencanaan kebijakan pemerintah Kabupaten Temanggung yang berbasis kelitbangan sesuai Perbub yang telah

disebutkan sebelumnya, maka beberapa fungsi utama Bidang Litbang antara lain pelaksanaan pengkajian, pemberian rekomendasi regulasi dan kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa di kabupaten serta penyusunan kebijakan dan atau regulasi berbasis hasil kelitbangan di kabupaten. Oleh sebab itu salah satu indikator kinerja sasaran yang dibebankan kepada bidang litbang adalah prosentase pemanfaatan hasil kelitbangan.

Prosentase pemanfaatan hasil kelitbangan dihitung dengan rumus: Jumlah Hasil Kelitbangan yang Dimanfaatkan dibagi jumlah hasil kelitbangan secara keseluruhan dikali 100%.

Tabel 2.178.
Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan
di Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017

No.	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Hasil Kelitbangan Keseluruhan	n.a	n.a	n.a	n.a	10
2.	Jumlah Hasil Kelitbangan yang dimanfaatkan	n.a	n.a	n.a	n.a	10
3.	% Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	n.a	n.a	n.a	n.a	100

Sumber: Bidang Litbang Bappeda Kabupaten Temanggung, Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa persentase pemanfaatan hasil kelitbangan tahun 2017 sebesar 100%. Hal ini berarti Bappeda sebagai unsur penunjang perencanaan dan kelitbangan daerah dapat memaksa berbagai pihak agar untuk berkomitmen merencanakan kegiatan dan pembangunan dengan berdasar pada kegiatan penelitian dan pengembangan yang telah ada.

2) Persentase hasil Krenova yang dikembangkan

Berdasarkan UU No 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk menumbuhkembangkan inovasi, memberikan stimulasi dan fasilitasi, menciptakan iklim kondusif di wilayahnya serta pembinaan dan pengawasan pelaksanaan inovasi daerah oleh Kabupaten/Kota. Upaya menumbuhkembangkan kreativitas dan inovasi telah dilakukan melalui penyelenggaraan Lomba Kreativitas dan Inovasi (KRENOVA) Tingkat Kabupaten Temanggung yang diselenggarakan secara rutin sejak tahun 2012. Selanjutnya upaya dan langkah-langkah

pengembangan dan stimulasi kepada para inventor/inovator dilaksanakan melalui :

- Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual;
- Diseminasi dan pengenalan hasil-hasil invensi/inovasi kepada masyarakat luas agar bermanfaat dalam bentuk penyertaan Pameran;
- Pelatihan hilirisasi teknologi / inkubator bisnis;
- Mendorong inventor/inovator menjadi wirausaha-wirausaha baru berbasis teknologi dalam wadah Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) dari Kemenristekdikti.

Persentase hasil Krenova yg dikembangkan dirumuskan dengan hasil Krenova yang dikembangkan dibagi jumlah hasil Krenova terjaring dikali 100 persen.

Tabel 2.179.
Persentase Hasil Krenova Yang Dikembangkan
di Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Hasil Krenova yang dikembangkan	1	0	1	1	7
2	Hasil Krenova terjaring	6	5	7	6	17
3	Persentase	16,6	0	14,28	16,6	41,17

Sumber : Bidang Litbang Bappeda Kabupaten Temanggung, Tahun 2018

Ajang Kreatifitas dan Inovasi (Krenova) Masyarakat di Kabupaten Temanggung merupakan kegiatan rutin yang telah dilaksanakan sejak tahun 2011 sebagai bentuk apresiasi kepada para mitra dan inovator yang secara nyata mendukung dalam memajukan produk inovasi untuk masyarakat luas. Jumlah peserta cenderung naik setiap tahun, berkat berbagai upaya Sosialisasi dan Publikasi ke berbagai sekolah, media elektronik, sosial media maupun lewat koordinasi dengan para P3MD (pendamping desa) sebagai pihak yang diharapkan dapat menjaring karya-karya inovasi di tingkat desa. Selanjutnya para pemenang KRENOVA dikirim ke lomba Krenova tingkat provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Temanggung beberapa kali meraih penghargaan sebagai pemenang. Diantaranya tahun 2012 Mesin Rajang Two In One, Tahun 2016 Guava Leaf Antiseptic dan Tahun 2018 Mesin Sangan Kopi. Dari tingkat Propinsi inovasi Antiseptic Guava Leaf dan Mesin Sangan Kopi diikutsertakan dalam program PPBT untuk mendapatkan pendanaan dari Kemenristekdikti.

f. Fungsi Penunjang Pelayanan Urusan Pemerintahan

1) Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah Model Penilaian yang digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dan kinerja instansi pemerintah. Kegiatan ini bertujuan untuk menilai kemajuan dan memberi saran perbaikan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan pelaksanaan kegiatan ini diharapkan terdapat perubahan pada 8 (delapan) area perubahan yaitu:

a) Mental Aparatur dan Manajemen

Terdapat peningkatan penerapan/internalisasi asas, prinsip, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku, termasuk penguatan budaya kinerja dan budaya pelayanan, meningkatnya penerapan budaya kerja positif di setiap instansi pemerintah, meningkatnya citra positif aparatur sebagai pelayan masyarakat, perubahan ke arah perbaikan dapat diukur, diikuti dan ditingkatkan.

b) Pengawasan

Meningkatnya kapasitas APIP, meningkatnya integritas aparatur, dan meningkatnya efisiensi penyelenggaraan birokrasi.

c) Akuntabilitas

Meningkatnya kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi, meningkatnya penerapan sistem manajemen kinerja, dan meningkatnya akuntabilitas aparatur.

d) Kelembagaan

Meningkatnya ketepatan ukuran, ketepatan fungsi dan sinergisme/kesinergisan kelembagaan, meningkatnya ketepatan ukuran, ketepatan fungsi dan sinergisme kelembagaan, menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi.

e) Tatalaksana

Meningkatnya penerapan sistem proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis *e-Government*, meningkatnya penerapan keterbukaan informasi publik, meningkatnya penerapan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik, dan meningkatnya penerapan manajemen kearsipan yang handal.

f) Sumberdaya Manusia ASN

Meningkatnya kemampuan unit yang mengelola SDM ASN untuk mewujudkan SDM aparatur yang kompeten dan kompetitif, meningkatnya kepatuhan instansi untuk penerapan manajemen SDM aparatur yang berbasis *merit*, meningkatnya penerapan manajemen kinerja individu untuk meningkatkan kompetensi SDM aparatur serta meningkatnya profesionalisme aparatur.

g) Peraturan Perundang-Undangan

Meningkatnya keterlibatan publik dalam proses perumusan kebijakan, meningkatnya kualitas regulasi yang melindungi, berpihak pada publik, harmonis, tidak tumpang tindih dan mendorong iklim kondusif bagi publik.

h) Pelayanan publik

Meningkatnya sistem monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik, meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

Berdasarkan penilaian indeks reformasi birokrasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), nilai indeks penilaian Reformasi Birokrasi Kabupaten Temanggung Tahun 2017 sebesar 58,45. Dari hasil di atas masih ada beberapa perbaikan diantaranya:

1. Membentuk secara formal *agent of change/ role model* dan memberikan pelatihan intensif untuk menggerakkan organisasi dalam melakukan perubahan,
2. Melakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan perundang – undangan untuk mengetahui adanya kemungkinan yang tidak harmonis atau tumpang tindih,
3. Meningkatkan kapasitas pegawai berdasarkan pada kesenjangan kompetensi serta menyusun rencana pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkelanjutan,
4. Meningkatkan keterlibatan seluruh pimpinan organisasi secara langsung dan berkelanjutan sejak penyusunan perencanaan kinerja sampai pemantauan pencapaian kinerja secara berkala.

Sehingga ke depan Pemerintah Kabupaten Temanggung dapat:

1. Meningkatkan kualitas implemementasi pengendalian gratifikasi, penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), penanganan benturan kepentingan, pengaduan masyarakat dan Whistle Blowing System (WBS) serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya,
2. Melaksanakan pembangunan zona integritas secara intensif terhadap unit kerja di perangkat daerah sehingga dapat ditetapkan menjadi unit kerja menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM),
3. Menindaklanjuti hasil survei Indeks Kepuasan Pelayanan dan menyempurnakan kualitas pelaksanaan kegiatan pada area pelayanan publik dan pengawasan,
4. Melakukan inovasi terus menerus secara berkesinambungan dalam pelayanan kepada masyarakat.

2) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan penilaian atas capaian kinerja instansi pemerintah yang akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya dan sarana perbaikan kinerja instansi pemerintah pada tahun berikutnya. AKIP diimplementasikan secara *Self Assesment* oleh masing-masing instansi pemerintah daerah. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa Kabupaten Temanggung melakukan tahapan dalam sistem tersebut secara mandiri, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pemantauan dan pengendalian hingga menyampaikan pelaporan akuntabilitas kinerjanya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Nilai AKIP Kabupaten Temanggung Tahun 2013 sampai 2017 ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2.180.
Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017

No.	TAHUN	NILAI	KATEGORI
1	2013	46,47	C
2	2014	47,50	C
3	2015	51,77	CC
4	2016	58,32	CC
5	2017	59,05	CC

Sumber : Bagian Ortala Setda Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas, Nilai Akuntabilitas Kinerja Kabupaten Temanggung tahun 2013 sampai tahun 2017 cenderung meningkat dari 45,69 menjadi 59,05, dengan kategori meningkat dari C menjadi CC. Nilai tersebut menggambarkan bahwa akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung termasuk kategori memadai dalam arti cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem internal yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja bagi pertanggungjawaban, tapi masih diperlukan banyak perbaikan, termasuk perbaikan yang mendasar agar bisa meningkat menjadi Kategori B (baik) bahkan A (sangat baik) dan AA (memuaskan).

3) Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) merupakan penilaian atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, responsif, dan akuntabel, sekaligus sebagai bagian dari sistem manajemen pemerintahan daerah, yaitu mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, pengendalian dan monitoring, serta evaluasi, dan diakhiri dengan pelaporan.

Penilaian EKPPD dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri atas Laporan Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disusun selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Peningkatan indeks EKPPD Pemerintah Kabupaten dan Kota se-wilayah Provinsi dan Nasional, serta Pemerintah Provinsi secara Nasional dilakukan dengan membuat *range* terdiri dari 4 kategori prestasi yaitu; Sangat Tinggi (ST), Tinggi (T), Sedang (S) dan Rendah (R).

Nilai EKPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2013 sampai 2016 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.181.
Nilai EKPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017

No	Tahun LPPD	Peringkat	Nilai	Kategori	Kepmendagri	Tingkat
1	2013	26	3.10	ST	No. 120-4761 Tahun 2014	NASIONAL
2	2014	89	3.07	ST	No. 800-35 Tahun 2016	NASIONAL
3	2015	22	3.34	ST	No. 120-10421 Tahun 2016	NASIONAL
4	2016	58	3.15	ST	No. 100-53 tahun 2018	NASIONAL
5	2017	24	3.05	ST	-	PROVINSI

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Temanggung Tahun 2017

Berdasarkan tabel di atas, Nilai EKPPD Kabupaten Temanggung berdasarkan penilaian Kemendagri Tahun 2013 sampai Tahun 2016 cenderung meningkat dari 3,10 menjadi 3,15 dengan kategori Sangat Tinggi (ST), hal ini mengandung arti bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Temanggung berkinerja sangat tinggi berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

4) Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik semakin meningkat dimana masyarakat menuntut adanya akuntabilitas, transparansi, supremasi hukum, serta menjawab pengguna layanan. Karena mutu pelayanan publik oleh aparatur pemerintah Kabupaten Temanggung dirasa masih sangat kurang sehingga belum memenuhi harapan masyarakat sebagai pengguna layanan.

Untuk menjawab tantangan dari masyarakat dan untuk meningkatkan pelayanan publik tersebut, pemerintah Kabupaten Temanggung telah melaksanakan kegiatan survei IKM yang dilaksanakan setiap tahun baik secara mandiri maupun dilakukan oleh pihak ke 3 (tiga) dengan tujuan sebagai bahan evaluasi terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan, serta menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan utk meningkatkan kualitas pelayanannya.

Berikut kami sampaikan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Temanggung selama 5 tahun terakhir.

Tabel 2.182.
Nilai IKM Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017

No	Tahun	Nilai	Predikat
1	2013	n.a	n.a
2	2014	76	B
3	2015	73	B
4	2016	75	B
5	2017	82	B

Sumber : *Bagian Ortaga Setda Kab. Temanggung Tahun 2018*

Berdasarkan tabel di atas, nilai indeks kepuasan masyarakat Kabupaten Temanggung dari Tahun 2014 sampai dengan 2017 relatif mengalami kenaikan dari 76 menjadi 82 dengan kategori nilai B (baik).

Dengan dilaksanakannya kegiatan survei ini diharapkan ke depan dapat diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan, diketahui tingkat kinerja unit penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan secara periodik, sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang perlu dilakukan, memacu persaingan positif antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup pemerintah daerah dalam peningkatan kinerja pelayanan, dan bagi masyarakat, dapat diketahuinya gambaran kinerja unit pelayanan.

Selain survei IKM tersebut, dalam 2 tahun terakhir juga telah dilakukan survei kepatuhan terhadap Undang-Undang pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung yang dilakukan oleh Komisi Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Jawa Tengah. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan penyelenggara dan pelaksana dalam memenuhi komponen standar pelayanan sebagaimana diatur Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan menjadi target pencapaian RPJMN tahun 2015 – 2019, mengetahui kompetensi pelaksana layanan dan persepsi pengguna layanan, untuk mendorong kepatuhan penyelenggara dan pelaksana terhadap standar pelayanan publik dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, dan mendorong pemenuhan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.

Dari hasil survei tersebut, diperoleh hasil dengan nilai sebagai berikut:

Tabel 2.183.
Nilai Survei Kepatuhan
Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017

No	Tahun	Hasil	Zona
1	2013	n.a	n.a
2	2014	n.a	n.a
3	2015	34,46	Merah
4	2016	59,76	Kuning
5	2017	55	Kuning

Sumber : Bagian Ortala Setda Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Dari data tabel di atas dapat diketahui bahwa survei tingkat kepatuhan terhadap Undang-Undang Pelayanan Publik di Kabupaten Temanggung semakin baik namun masih perlu ditingkatkan. Dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- Memberikan apresiasi (*award*) kepada pimpinan Perangkat Daerah yang produk layanannya telah mendapatkan Zona Hijau dengan Predikat Kepatuhan Tinggi.

- Menyelenggarakan program sistematis implementasi standar pelayanan publik secara mandiri sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009.
- Memberikan teguran dan mendorong para pimpinan Perangkat Daerah yang produk layanannya mendapatkan Zona Kuning dengan Predikat Kepatuhan Sedang dan Zona Merah dengan Predikat Kepatuhan Rendah untuk mengimplementasikan standar pelayanan publik di instansi pelayanan publik masing-masing.

5) Indeks SPBE (Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien, dan berkesinambungan, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan SPBE. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 5 tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Agar pelaksanaan SPBE dapat berjalan untuk mencapai tujuannya, maka perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Evaluasi SPBE merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam Permenpan tersebut telah di atur penilaian SPBE meliputi 3 domain yaitu:

- a) Kebijakan Internal SPBE
- b) Tata Kelola SPBE
- c) Layanan SPBE

Nilai Indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE dikelompokkan berdasarkan predikat seperti tertera pada tabel berikut:

Tabel 2.184.
Predikat Indeks SPBE

No	Nilai indeks	Predikat
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 – < 4,2	Sangat baik
3	2,6 – < 3,5	Baik
4	1,8 – < 2,6	Cukup

No	Nilai indeks	Predikat
5	< 1,8	Kurang

Pemerintah Kabupaten Temanggung melakukan tahapan penilaian evaluasi SPBE baru pada tahun 2018 dan hasilnya mendapatkan nilai kematangan 2,04 dengan predikat cukup. Nilai kematangan penyelenggaraan SPBE yang di peroleh Kabupaten Temanggung tentunya menjadikan evaluasi penyelenggaraan SPBE masih perlu ditingkatkan dengan upaya perbaikan baik di domain kebijakan SPBE, pelaksanaan tata kelola SPBE maupun Layanan SPBE.

6) **Indek Kematangan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)**

Pengertian Sistem Pengendalian Intern menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP adalah Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Keempat tujuan tersebut di atas tidak perlu dicapai secara khusus atau terpisah-pisah. Dengan kata lain, instansi pemerintah tidak harus merancang secara khusus pengendalian untuk mencapai satu tujuan. Suatu kebijakan atau prosedur dapat saja dikembangkan untuk dapat mencapai lebih dari satu tujuan pengendalian.

Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008, SPIP terdiri dari lima unsur, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian *intern*. Penilaian kematangan penyelenggaraan SPIP merupakan kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar yang menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan. Tingkat kematangan ini dapat di gunakan sebagai instrumen evaluatif penyelenggaraan SPIP dan peningkatan kematangan Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah.

BPKP dalam pengaturan penilaian kematangan SPIP telah mengeluarkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia nomor 4 tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian *Intern* dan merinci level kematangan SPIP dalam 5 tingkatan yaitu:

Tabel 2.185.
Level Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

No	Kategori fokus maturitas	Level	Keterangan
1	Belum ada	0	Sama sekali belum ada kebijakan dan pengendalian <i>intern</i>
2	Rintisan	1	Praktik pengendalian <i>intern</i> bersifat ad hoc dan tidak terorganisasi serta tanpa komunikasi dan pemantauan
3	Berkembang	2	Praktik pengendalian tidak terdokumentasi dengan baik dan belum ada evaluasi efektifitasnya
4	Terdefinisi	3	Praktik pengendalian telah terdokumentasi namun evaluasinya tanpa dokumentasi yang memadai
5	Terkelola dan terukur	4	Pengendalian <i>intern</i> di tetapkan dengan efektif dan evaluasi formal yang terdokumentasi
6	Optimum	5	Pengendalian <i>intern</i> di tetapkan dengan berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan di dukung pemantauan otomatis

Setelah dilakukan penilaian oleh BPKP, SPIP Pemerintah Kabupaten Temanggung di nyatakan memperoleh kematangan level 3 dengan predikat terdefinisi. Selanjutnya perlu perbaikan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengawasan menuju tingkat Kematangan SPIP yang Optimum.

7) Indeks profesionalisme ASN

Dalam rangka mewujudkan profesionalitas PNS, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 telah menetapkan beberapa perubahan dalam manajemen ASN. Perubahan tersebut membawa konsekuensi bahwa setiap instansi pemerintah dituntut untuk memiliki sumber daya manusia (PNS) yang berintegritas dan profesional.

Indeks Profesionalitas ASN merupakan fungsi dari kompetensi, kinerja, pegawai yang bersih, dan organisasi yang modern. Indikator profesionalitas ASN adalah (individu) pegawai akan semakin profesional apabila kompetensinya semakin tinggi, kinerjanya semakin baik, organisasinya semakin modern, dan pegawai yang semakin bersih. Untuk mendukung program pemerintah dalam menata Sumber Daya Manusia pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung ke depan perlu dilakukan penilaian indeks profesioanalisme ASN dengan indikator kinerja yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

a) PRODUKTIVITAS

Digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas sebuah layanan yang dilaksanakan ASN.

b) KUALITAS

Konsistensi terhadap kualitas pelayanan yang baik.

c) RESPONSIVITAS

Mengenai kebutuhan masyarakat sehingga dapat menyusun agenda berdasarkan skala prioritas.

d) RESPONSIBILITAS

Tanggung jawab terhadap pelaksanaan tupoksi ASN.

e) AKUNTABILITAS

Kebijakan dan kegiatan birokrasi tunduk kepada para pejabat publik yang telah dipilih oleh rakyat.

8) Indeks Manajemen Kearsipan

Menurut Peraturan Kepala ANRI No. 38 Tahun 2015, tentang Pedoman Kearsipan disebutkan bahwa Indeks Manajemen Kearsipan adalah nilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung. Untuk mengukur capaian indeks manajemen kearsipan digunakan sarana berupa audit kearsipan, yaitu sebuah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional, berdasarkan standar kearsipan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi dan keandalan penyelenggaraan kearsipan. Audit Kearsipan diklasifikasikan menjadi dua yaitu:

1. Audit Kearsipan Eksternal

Dilaksanakan oleh tim pengawas kearsipan eksternal atas penyelenggaraan kearsipan pada pencipta arsip dan lembaga kearsipan.

2. Audit Kearsipan Internal

Dilaksanakan oleh tim pengawas kearsipan internal atas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip.

Dari hasil penilaian indeks manajemen kearsipan yang dilakukan oleh Tim Pengawas Kearsipan Pusat dari Arsip Nasional Pemerintah Kabupaten Temanggung mendapatkan predikat kurang dengan nilai antara 51-60. Kondisi demikian tentunya membutuhkan langkah-langkah perbaikan guna terciptanya manajemen kearsipan yang optimal, sehingga penataan kearsipan dapat terlaksana sesuai dengan prinsip, kaidah dan standar kearsipan yang berlaku.

9) Persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu

Peraturan Daerah merupakan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Rancangan Peraturan

Daerah (Raperda) dapat berasal dari DPRD atau kepala daerah (gubernur, bupati, atau walikota). Raperda yang disiapkan oleh Kepala Daerah disampaikan kepada DPRD. RAPERDA yang disahkan tepat waktu adalah jumlah RAPERDA yang dibahas dan disahkan tepat waktu di DPRD dibandingkan/dibagi dengan RAPERDA yang disiapkan dan disampaikan oleh eksekutif kepada DPRD. Persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu dihitung dengan rumus: jumlah RAPERDA yang disahkan tepat waktu dibagi jumlah RAPERDA yang masuk program pembentukan peraturan daerah dikali 100%. Realisasi persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu di Kabupaten Temanggung dari tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.186.
Persentase RAPERDA yang Disahkan Tepat Waktu
Tahun 2013-2017

No.	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah RAPERDA yang disahkan tepat waktu	n.a	5	19	17	18
2.	Jumlah RAPERDA yang masuk propemperda	n.a	11	24	24	18
3.	Persentase	n.a	45,45	79,17	70,83	100

Sumber: Sekretariat DPRD, Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu pada tahun 2017 sebesar 100%, ini artinya semua RAPERDA yang masuk propemperda bisa disahkan tepat waktu.





BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH



TEMANGGUNG

MAREM GANDEM

TENTREM



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi pedoman dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang berimplikasi pada kebijakan daerah dan desentralisasi fiskal sebagai akibat adanya pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan disertai pemberian sumber-sumber keuangan untuk mendanai urusan yang diserahkan kepada daerah. Tujuannya adalah untuk semakin meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat, pelaksanaan pembangunan daerah yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal, menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Desentralisasi fiskal harus memperhatikan dan merupakan bagian pengaturan yang tidak terpisahkan dari sistem keuangan negara. Hal ini merupakan konsekuensi dari pembagian kewenangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
2. Pemberian sumber keuangan negara kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi adalah dengan memperhatikan stabilitas perekonomian nasional dan keseimbangan fiskal antara pusat dengan daerah dan antar daerah;
3. Perimbangan keuangan negara antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan atas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut, maka pengelolaan keuangan daerah merupakan hal yang sangat penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah secara keseluruhan. Tahapan-tahapan dalam pengelolaan keuangan daerah yang meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan, serta pengendalian keuangan daerah merupakan satu rangkaian proses yang harus saling mendukung satu dan yang lainnya.

A. Kinerja Keuangan Daerah Tahun 2013-2017

Tingkat kemandirian daerah dari sisi keuangan daerah dapat dilihat dari tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki oleh daerah itu sendiri, yang salah satu aspeknya adalah sumber daya keuangan daerah.

Namun demikian apabila melihat kondisi kemampuan keuangan daerah Kabupaten Temanggung selama 5 (lima) tahun terakhir ini maka dapat dikatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung masih merupakan daerah yang dapat dikatakan belum mandiri, terutama dari sisi keuangan karena masih tingginya ketergantungan pada keuangan Pemerintah.

Sampai dengan tahun 2017, pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten Temanggung masih bertumpu pada sumber daya keuangan yang bersumber dari dana perimbangan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi. Ketergantungan fiskal daerah tersebut sangat mempengaruhi proses perencanaan pembangunan daerah sampai dengan pelaksanaannya.

Kinerja keuangan daerah tahun 2013-2017 meliputi pencapaian kinerja pendapatan daerah, perkembangan belanja daerah dan pembiayaan daerah dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kinerja Pelaksanaan APBD

a. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. Pendapatan Daerah meliputi:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- 2) Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, dan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya, dan Dana Desa.

Pendapatan daerah di APBD Kabupaten Temanggung cenderung mengalami peningkatan dan berfluktuasi, seiring dengan peningkatan yang terjadi di masing-masing pos pendapatan/ komponen pendapatan daerah. Secara rinci kinerja pendapatan daerah pada APBD Kabupaten Temanggung selama periode tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Realisasi Pendapatan Daerah dalam APBD Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-Rata Pertumbuhan
PENDAPATAN DAERAH	1.053.845.571.760	1.226.139.568.046	1.469.482.958.105	1.678.688.079.170	1.779.850.394.321	13,07
PENDAPATAN ASLI DAERAH	102.080.197.094	160.726.943.432	212.498.139.929	281.328.148.970	308.466.748.340	25,91
Pajak Daerah	25.583.570.757	29.622.602.704	31.523.819.462	32.480.985.449	38.291.278.094	10,78
Retribusi Daerah	15.480.551.151	20.299.495.547	13.410.490.650	63.764.882.916	16.687.218.837	5,15
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.287.250.631	11.246.688.910	13.060.829.257	13.013.670.038	13.762.738.261	5,29
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	49.728.824.555	99.558.156.271	154.503.000.560	172.068.610.567	239.725.513.148	42,45
DANA PERIMBANGAN	743.027.752.791	808.979.527.761	849.969.443.934	1.062.555.838.091	1.077.448.076.741	10,09
Dana Bagi Hasil	50.228.458.791	43.511.964.761	45.507.112.934	55.551.255.813	56.049.200.647	3,55
Dana Alokasi Umum	651.171.674.000	708.764.753.000	731.733.741.000	807.995.010.000	793.801.136.000	5,19
Dana Alokasi Khusus	41.627.620.000	56.702.810.000	72.728.590.000	199.009.572.278	227.597.740.094	63,12
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	208.737.621.875	256.433.096.853	407.015.374.242	334.804.092.109	393.935.569.240	20,38
Pendapatan Hibah	428.077.240	725.668.600	9.296.687.923	2.060.684.299	1.485.396.240	286,22
Bagi Hasil Pajak/Retribusi dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	43.787.719.599	58.804.804.253	83.195.805.819	79.853.949.810	92.719.259.000	21,97
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	136.253.400.000	163.166.074.000	183.164.016.500	40.789.358.000	50.197.943.000	-5,48
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah daerah Lainnya	28.268.425.036	33.736.550.000	58.935.212.000	49.604.500.000	42.081.248.000	15,76
Dana Desa	0	0	72.423.652.000	162.495.600.000	207.451.723.000	38,01

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kab. Temanggung (data diolah) Tahun 2018

Dari tabel tersebut diketahui bahwa rata-rata peningkatan pendapatan daerah adalah sebesar 13,07%. Angka tersebut merupakan angka rata-rata pertumbuhan dari semua komponen pendapatan daerah baik Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, maupun Lain-lain Pendapatan yang Sah.

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari:

- a) Pajak daerah, yaitu dari hasil pajak daerah yang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Temanggung yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
- b) Retribusi Daerah, yaitu hasil retribusi daerah dari sumber retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perijinan tertentu.
- c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu dari setoran deviden BUMD yang terdiri dari PT BPD Jateng, PD Air Minum Tirto agung, PD BPR Bank Pasar Kabupaten Temanggung, PD Apotik Waringin Mulyo, PD BPR BKK Temanggung, PD Aneka Usaha, PD Bhumi Phala Wisata, PD BKK Pringsurat, dan PT Jamkrida Jateng.
- d) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yaitu pendapatan dari berbagai sumber terdapat dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga deposito, tuntutan ganti kerugian daerah, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan dari pengembalian, pendapatan BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas, serta hasil pengelolaan aset daerah yang tidak dipisahkan yaitu dari LPP Radio Temanggung dan LPP Temanggung TV.

Rata-rata pertumbuhan PAD selama 5 (lima) tahun terakhir adalah sebesar 25,91%. Kontribusi masing-masing komponen adalah untuk pajak daerah sebesar 10,78%, retribusi daerah sebesar 5,15%. Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tumbuh sebesar 5,29%, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah tumbuh sebesar 42,45%.

Pertumbuhan rata-rata PAD yang besar mencapai 25,91% tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kinerja pendapatan asli daerah yang sesungguhnya karena pada tahun 2017 terdapat kebijakan Pusat yang mengamanatkan dana transfer BOS SD dan SMP ke satuan pendidikan dicatatkan/ dimasukkan sebagai komponen Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Demikian juga terjadinya kenaikan yang sangat besar pada komponen retribusi daerah pada tahun 2016 sehingga dalam 5 (lima)

tahun terakhir pendapatan asli daerah sangat fluktuatif, hal ini disebabkan adanya PAD yang bersumber dari retribusi penempatan pertama kali los/kios pasar daerah yang ditarik sekali sebagai pendapatan daerah pada tahun berkenaan. Jumlahnya cukup besar sehingga mengakibatkan fluktuasi dan penurunan pada tahun berikutnya karena pemungutan retribusi berikutnya merupakan retribusi pelayanan pasar secara rutin dan jumlahnya tidak sebesar pada saat pemungutan retribusi penempatan awal.

2) Dana Perimbangan

Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat yang diterima Pemerintah Kabupaten Temanggung terdiri dari:

- a) Dana Bagi Hasil, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan, Bagi Hasil Pajak Penghasilan, Bagi Hasil Cukai Tembakau, dan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumberdaya Alam.
- b) Dana Alokasi Umum, yang merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dan untuk membiayai pelaksanaan desentralisasi.
- c) Dana Alokasi Khusus, yang merupakan dana berasal dari APBN dan dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan yang bersifat khusus.

Kenaikan Dana Perimbangan selama 5 (lima) tahun terakhir rata-rata sebesar 10,09%. Rata-rata kenaikan tersebut merupakan akumulasi dari 3 (tiga) komponen Dana Perimbangan yaitu Dana Bagi Hasil sebesar 3,55%, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 5,19%, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 63,12%. Rata-rata kenaikan tertinggi dan yang mencolok adalah kenaikan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang mencapai 63,12%. Hal ini dikarenakan adanya DAK non Fisik yang sebelumnya penganggarannya langsung dari pemerintah pusat dan tidak melalui RKUD.

3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus yang didalamnya berupa Dana Insentif Daerah (DID), Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya, dan Dana Desa yang bersumber dari APBN.

Kenaikan Lain-lain Pendapatan yang Sah selama 5 (lima) tahun terakhir rata-rata sebesar 20,38%. Rata-rata kenaikan tersebut terdiri dari Pendapatan Hibah naik rata-rata sebesar 286,22% dikarenakan adanya belanja hibah dana BOS (SD dan SMP) yang harus dianggarkan dalam APBD dan mulai masuk dalam APBD sejak tahun 2018. Bagi Hasil Pajak/Retribusi dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya adalah sebesar 21,97%, namun untuk Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus (Dana Insentif Daerah/DID) mengalami fluktuasi dan selama 5 (lima) tahun terakhir secara rata-rata mengalami penurunan 5,48%, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah daerah lainnya kenaikan rata-rata sebesar 15,76% dan Dana Desa (DD) dari Pemerintah Pusat mengalami kenaikan cukup besar, rata-rata sebesar 38,01%.

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka pengelolaan pendapatan daerah baik Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, maupun Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah:

- 1) Belum optimalnya pemanfaatan sumber-sumber pendapatan asli daerah.
- 2) Terbatasnya sumber-sumber pendapatan asli daerah.
- 3) Masih rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam rangka memberikan pelayanan kepada wajib pajak dan wajib retribusi.
- 4) Kurangnya kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi.
- 5) Belum optimalnya sistem, mekanisme, dan prosedur pengelolaan pendapatan asli daerah.
- 6) Kurangnya sarana/dukungan fasilitas operasional dalam rangka pelayanan perpajakan dan retribusi daerah.
- 7) Belum optimalnya pengendalian dan pengawasan terhadap pemungutan retribusi daerah.
- 8) Belum optimalnya kontribusi BUMD terhadap PAD dalam bentuk deviden.
- 9) Belum optimalnya pemberdayaan aset daerah; dan
- 10) Belum optimalnya koordinasi internal maupun eksternal dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.
- 11) Masih rendahnya nilai jual objek pajak (NJOP) sebagai dasar penetapan PBB-P2.

b. Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran. Belanja Daerah dikelompokkan dalam dua jenis yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari:

- 1) Belanja Pegawai dialokasikan untuk penyediaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 2) Belanja Hibah, dialokasikan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD, badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia dengan mempedomani peraturan perundang-undangan.
- 3) Belanja Bantuan Sosial, dialokasikan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial dengan mempedomani peraturan perundang-undangan.
- 4) Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan daerah kepada Pemerintah Desa.
- 5) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik, terdiri dari bantuan keuangan yang bersifat umum dan khusus dari pemerintah daerah kepada Pemerintah Desa dan Partai Politik.
- 6) Belanja Tidak Terduga, digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta sifatnya tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program/kegiatan.

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja:

- 1) Belanja pegawai merupakan pengeluaran untuk honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
- 2) Belanja barang dan jasa merupakan pengeluaran untuk pembelian/pengadaan barang yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
- 3) Belanja modal merupakan pengeluaran untuk pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

Belanja Daerah baik Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung pada APBD Tahun Anggaran 2013-2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja
Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013		2014		2015		2016		2017		Rata-rata	
5	BELANJA	1.000.841.225.195	100,00%	1.170.880.302.872	100,00%	1.505.003.745.055	100,00%	1.739.541.988.789	100,00%	1.768.574.354.911	100,00%	1.436.968.323.364	100,00%
	Persentase pertumbuhan belanja	-	-	-	16,99%	-	28,54%	-	15,58%	-	1,67%	-	15,69%
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	713.737.922.696	71,31%	743.761.033.296	63,52%	896.584.646.674	59,57%	1.018.552.299.313	58,55%	1.047.845.099.079	59,25%	884.096.200.212	62,44%
5.1.1	Belanja Pegawai	573.983.834.062	57,35%	609.072.551.329	52,02%	672.248.809.793	44,67%	693.357.561.140	39,86%	642.534.721.385	36,33%	38.239.495.542	46,05%
5.1.2	Belanja Bunga	1.352.611.525	0,14%	1.006.766.714	0,09%	4.424.201.466	0,29%	4.955.946.912	0,28%	3.541.451.133	0,20%	3.056.195.550	0,20%
5.1.4	Belanja Hibah	58.141.919.542	5,81%	70.509.291.100	6,02%	48.055.711.613	3,19%	27.922.492.123	1,61%	50.894.631.610	2,88%	51.104.809.198	3,90%
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	29.564.076.045	2,95%	17.601.444.713	1,50%	16.220.719.040	1,08%	20.041.633.799	1,15%	10.510.353.625	0,59%	18.787.645.444	1,46%
5.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa	4.316.725.502	0,43%	4.507.625.240	0,38%	3.981.017.942	0,26%	4.568.849.675	0,26%	4.566.985.731	0,26%	4.388.240.818	0,32%
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa	45.249.304.525	4,52%	39.677.734.025	3,39%	150.720.020.000	10,01%	265.602.847.579	15,27%	334.704.544.100	18,93%	167.190.890.046	10,42%
5.1.7	Belanja Bantuan kepada Partai Politik	907.606.495	0,09%	969.204.175	0,08%	819.266.820	0,05%	1.139.683.410	0,07%	1.092.411.495	0,06%	985.634.479	0,07%
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	221.845.000	0,02%	416.416.000	0,04%	114.900.000	0,01%	963.284.675	0,06%	0	0,00%	43.289.135	0,02%
5.2	BELANJA LANGSUNG	287.103.302.499	28,69%	427.119.269.576	36,48%	608.419.098.381	40,43%	720.989.689.476	41,45%	720.729.255.832	40,75%	52.872.123.153	37,56%
5.2.1	Belanja Pegawai	36.481.807.690	3,65%	40.060.522.279	3,42%	39.338.729.402	2,61%	42.514.652.935	2,44%	69.192.283.338	3,91%	45.517.599.129	3,21%
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	146.815.985.535	14,67%	188.606.981.218	16,11%	248.741.874.870	16,53%	279.987.740.632	16,10%	338.102.120.108	19,12%	240.450.940.473	16,51%
5.2.3	Belanja Modal	103.805.509.274	10,37%	198.451.766.079	16,95%	320.338.494.109	21,28%	398.487.295.909	22,91%	313.434.852.386	17,72%	266.903.583.551	17,85%

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kab. Temanggung (data diolah) Tahun 2018

Belanja Daerah Kabupaten Temanggung selama kurun waktu tahun 2013-2017 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 15,69%. Realisasi penggunaan belanja daerah terbesar masih untuk Belanja Tidak Langsung dengan rata-rata mencapai 62,44%, sedangkan Belanja Langsung sebesar 37,56%.

Namun demikian, tingginya Belanja Tidak Langsung ini bukan menggambarkan rendahnya belanja yang dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat, mengingat pada Belanja Tidak Langsung terdapat belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan yang secara riil diperuntukan bagi masyarakat maupun Pemerintah Desa dalam kerangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Proporsi belanja tidak langsung terutama dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah berkaitan dengan belanja pegawai. Jika dilihat dari nilai nominal, proporsi belanja langsung selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun kecuali tahun 2017 yang mengalami penurunan dari tahun 2016.

c. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan komponen APBD yang digunakan untuk menutup defisit APBD atau untuk memanfaatkan surplus APBD. Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari Sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), pinjaman daerah, hasil divestasi, dan penerimaan perhitungan pihak ketiga. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain dapat digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada pihak lain, penyertaan modal, dan pengeluaran perhitungan pihak ketiga.

Pembiayaan daerah APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2013-2017 adalah seperti tersebut pada tabel berikut:

Tabel 3.2.
Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja
Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata Pertumbuhan
PEMBIAYAAN NETTO	49.994.800.899	137.122.879.189	223.830.640.416	172.135.410.735	55.202.694.522	48,29%
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	59.438.956.293	146.196.105.574	252.760.379.283	231.549.706.413	122.630.756.590	52,62%
Sisa Lebih perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	41.776.547.255	102.999.147.464	192.382.144.363	188.309.853.466	111.281.501.116	64,51%
Pencairan Dana Cadangan	12.867.002.883	0	0	0	0	(25,00%)
Penerimaan Pinjaman dan Obligasi Daerah	0	37.579.771.350	51.378.500.450	28.207.575.074	0	(61,27%)
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	243.081.070	110.592.998	120.001.232	263.730.458	224.960.186	43,56%
Penerimaan perhitungan pihak ketiga	4.552.325.085	5.506.593.762	8.879.733.238	14.768.547.415	11.124.295.288	29,84%
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	9.444.155.394	9.073.226.385	28.929.738.867	59.414.295.678	67.428.062.068	82,32%
Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	7.500.000.000	8.082.241.633	1,94%
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	4.533.609.000	4.500.000.000	5.000.000.000	9.950.000.000	10.000.000.000	27,63%
Pembayaran Pokok Hutang	0	0	18.000.000.000	33.460.784.816	34.500.000.000	22,25%
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	4.910.546.394	4.573.226.385	5.929.738.867	8.503.510.862	14.845.820.435	36,53%
SiLPA	102.999.147.464	192.382.144.363	188.309.853.466	111.281.501.116	66.478.733.932	(11,20%)

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kab. Temanggung (data diolah) Tahun 2018

Dari tabel di atas diketahui bahwa pembiayaan netto pada APBD Kabupaten Temanggung memiliki angka pertumbuhan yang cenderung fluktuatif. Hal tersebut terlihat utamanya pada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) setiap tahunnya yang juga fluktuatif. Masih adanya SiLPA pada APBD menunjukkan adanya dua kemungkinan perhitungan, yaitu ketidakakuratan pada saat perencanaan anggaran belanja program/kegiatan atau karena efisiensi pada saat pelaksanaan program/kegiatan.

2. Analisis Keuangan Daerah

Dalam melakukan analisis keuangan daerah Kabupaten Temanggung selama periode tahun 2013-2017, digunakan beberapa indikator, sebagai berikut:

a. Derajat Desentralisasi Fiskal

Salah satu indikator kemampuan keuangan daerah adalah derajat yang menggambarkan perbandingan antara kontribusi realisasi PAD terhadap total pendapatan atau penerimaan daerah di APBD. Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Temanggung periode tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel 3.4.

Tabel 3.3.
Derajat Desentralisasi deks
Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017

TAHUN	PAD (Rp)	PENDAPATAN (Rp)	%
2013	102.080.197.094	1.053.845.571.760	9,69
2014	160.726.943.432	1.226.139.568.046	13,11
2015	212.498.139.929	1.469.482.958.105	14,46
2016	281.328.148.970	1.678.688.079.170	16,76
2017	308.466.748.340	1.779.850.394.321	17,33
Rata-rata	213.020.035.553	1.441.601.314.280	14,78

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kab. Temanggung (data diolah) Tahun 2018

Dari tabel di atas, diketahui bahwa rata-rata derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Temanggung periode tahun 2013-2017 adalah sebesar 14,78%. Angka tersebut menunjukkan bahwa peran PAD dalam pendanaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dikatakan masih kecil. Upaya untuk meningkatkan PAD melalui peningkatan tata kelola potensi pajak dan retribusi daerah, serta sumber-sumber PAD lainnya masih harus terus dilaksanakan dengan harapan dapat meningkatkan peran dan proporsi PAD sebagai sumber dana pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan.

b. Indeks Kinerja Keuangan (IKK)

Indeks Kinerja Keuangan (IKK) diukur dengan 4 (empat) indikator yaitu:

1) Ketergantungan Fiskal (KF)

Ketergantungan Fiskal merupakan persentase dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang sudah dikurang belanja pegawai dalam total pendapatan anggaran daerah di APBD. Belanja pegawai dalam hal ini adalah belanja pegawai yang diperuntukan bagi PNS, Bupati dan Wakil Bupati serta hak-hak yang diterima oleh DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indeks Ketergantungan Fiskal Kabupaten Temanggung selama tahun 2013-2017 sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 3.4.
Ketergantungan Fiskal Kabupaten Temanggung
Tahun 2013-2017

TAHUN	DAU (Rp)	BLJ.PEGAWAI (Rp)	BLJ PEGAWAI TERHADAP DAU (%)	SISA (Rp)	PENDAPATAN (Rp)	%
2013	651.171.674.000	437.961.152.975	67,26	213.210.521.025	1.053.845.571.760	20,23
2014	708.764.753.000	457.461.951.163	64,54	251.302.801.837	1.226.139.568.046	20,50
2015	731.733.741.000	490.999.627.900	67,10	240.734.113.100	1.469.482.958.105	16,38
2016	807.995.010.000	505.444.694.559	62,56	302.550.315.441	1.678.688.079.170	18,02
2017	793.801.136.000	456.498.669.584	57,51	337.302.466.416	1.779.850.394.321	18,95
Rata- rata	738.693.262.800	469.673.219.236	63,58	269.020.043.564	1.441.601.314.280	18,82

Sumber: Laporan realisasi APBD Kab. Temanggung (data diolah) Tahun 2018

Dari data tersebut dapat di lihat bahwa rata-rata DAU yang digunakan untuk belanja pegawai adalah sebesar 63,58%. Dengan demikian Dana Alokasi Umum (DAU) yang diperoleh Kabupaten Temanggung tidak semuanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai. Hal tersebut tampak pada angka indeks yang rata-rata adalah sebesar 18,82%. Angka tersebut memberikan gambaran bahwa masih ada DAU yang dialokasikan atau digunakan untuk membiayai pembangunan daerah.

2) Kapasitas Penciptaan Pendapatan (KPP)

Kapasitas Penciptaan Pendapatan merupakan indikator yang digunakan untuk menunjukkan kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD berdasarkan Kapasitas Penciptaan Pendapatan di daerah. Proporsi PAD

disini tidak dinyatakan terhadap total nilai APBD namun dinyatakan sebagai persentase dari PDRB kabupaten.

Kapasitas Penciptaan Pendapatan selama tahun 2013-2017 sebagai berikut:

Tabel 3.5.
Kapasitas Penciptaan Pendapatan
Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017

TAHUN	PAD(Rp)	PDRB(Rp)	%
2013	102.080.197.094	13.088.402.250.000	0,78
2014	160.726.943.432	14.592.453.380.000	1,10
2015	212.498.139.929	16.107.061.670.000	1,32
2016	281.328.148.970	17.526.473.010.000	1,61
2017	308.466.748.340	18.833.169.010.000	1,64
Rata-rata	213.020.035.553	16.029.511.864.000	1,33

Sumber: Laporan realisasi APBD dan PDRB Kab. Temanggung (data diolah)
Tahun 2018

Dari tabel di atas diketahui bahwa kapasitas pemerintah daerah dalam menciptakan kenaikan pendapatan masih cukup rendah yaitu berada di angka 1,33%. Hal ini berarti harus diupayakan kegiatan-kegiatan yang menjadi pemacu untuk dapat terus mengupayakan peningkatan pendapatan asli daerah.

3) Proporsi Belanja Modal (PBM)

Proporsi Belanja Modal merupakan indikator yang menunjukkan arah pengelolaan belanja pemerintah yang memberikan manfaat jangka panjang sehingga memberikan efek *multiplier* yang lebih besar terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. PBM dirumuskan sebagai persentase belanja modal dengan total belanja pada APBD.

Tabel 3.6.
Proporsi Belanja Modal Kabupaten Temanggung
Tahun 2013-2017

TAHUN	BELANJA MODAL (Rp)	BELANJA (Rp)	%
2013	103.805.509.274	1.000.841.225.195	10,37
2014	198.451.766.079	1.170.880.302.872	16,95
2015	320.338.494.109	1.505.003.745.055	21,28
2016	398.487.295.909	1.739.541.988.789	22,91
2017	313.434.852.386	1.768.574.354.911	17,72
Rata-rata	266.903.583.551	1.436.968.323.364	18,57

Sumber: Laporan realisasi APBD Kab. Temanggung (data diolah) Tahun 2018

Proporsi Belanja modal menggambarkan besarnya persentase belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja modal. Selama periode tahun 2013-2017 alokasi belanja modal mengalami fluktuasi sangat tergantung pada penetapan skala prioritas pada perencanaan pembangunan daerah tahun sebelumnya. Selain itu, hal ini juga sering dipengaruhi oleh kebijakan posting anggaran terkait dengan pengakuan/pencatatan aset pada akhir tahun kegiatan.

4) Kontribusi Sektor Pemerintah (KSP)

Kontribusi Sektor Pemerintah merupakan indikator yang menunjukkan kontribusi pemerintah dalam menggerakkan perekonomian, dimana dinyatakan sebagai persentase total belanja pemerintah terhadap PDRB Kabupaten.

Tabel 3.7.
Kontribusi Sektor Pemerintah Kabupaten Temanggung
Tahun 2013-2017

TAHUN	BELANJA	PDRB	%
2013	1.000.841.225.195	13.088.402.250.000	7,65
2014	1.170.880.302.872	14.592.453.380.000	8,02
2015	1.505.003.745.055	16.107.061.670.000	9,34
2016	1.739.541.988.789	17.526.473.010.000	9,93
2017	1.768.574.354.911	18.833.169.010.000	9,39
Rata-rata	1.436.968.323.364	16.029.511.864.000	8,96

Sumber: Laporan realisasi APBD Kab. Temanggung (data diolah) Tahun 2018

Kontribusi sektor pemerintah dalam menggerakkan pembangunan daerah berada di kisaran angka rata-rata 8,96%. Hal ini menunjukkan bahwa belanja sektor pemerintah relatif stabil setiap tahunnya. Berdasarkan 4 (empat) indikator di atas maka dapat diketahui Indeks Kinerja Keuangan Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017 sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 3.8.
Indeks Kinerja Keuangan Kabupaten Temanggung
Tahun 2013-2017

Tahun	KF	KPP	PBM	KSP	Jumlah	IKK
2013	20,23	0,78	10,37	7,65	39,03	9,76
2014	20,50	1,10	16,95	8,02	46,57	11,64
2015	16,38	1,32	21,28	9,34	48,32	12,08
2016	18,02	1,61	22,91	9,93	52,47	13,12
2017	18,95	1,64	17,72	9,39	47,70	11,93
Rata-	18,82	1,33	18,57	8,96	47,68	11,92

Sumber: Laporan realisasi APBD Kab. Temanggung (data diolah) Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas dimana angka IKK berada di angka yang relatif stabil menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah di Kabupaten Temanggung cenderung tidak mengalami fluktuasi yang tinggi. Hal ini dapat diartikan sebagai kestabilan kinerja keuangan daerah namun dapat juga diartikan sebagai belum optimalnya upaya daerah dalam menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerah sehingga belanja pembangunan cenderung juga mengalami stagnasi ketersediaan alokasi anggaran.

c. Belanja Kebutuhan Aparatur

Belanja kebutuhan aparatur menunjukkan besarnya belanja pegawai dan belanja untuk operasional perkantoran yang terdiri dari 3 (tiga) program yaitu Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dan Peningkatan Disiplin Aparatur.

Selama kurun waktu 2013-2017 besarnya Belanja Kebutuhan Aparatur sebagai berikut:

Tabel 3.9.
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Temanggung
Tahun 2013-2017

NO.	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	573.983.834.062	609.072.551.329	672.248.809.793	693.357.561.140	642.534.721.385
	Persentase pertumbuhan belanja tidak langsung	-	6,11%	10,37%	3,14%	-7,33%
1	Belanja Pegawai	573.983.834.062	609.072.551.329	672.248.809.793	693.357.561.140	642.534.721.385
B	BELANJA LANGSUNG	42.971.961.732	58.528.858.817	101.846.987.725	94.443.284.529	125.615.236.759
1	Belanja Pelayanan Administrasi Perkantoran	26.893.945.669	31.499.357.159	39.253.867.193	43.582.576.581	72.497.995.649
2	Belanja Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	15.760.387.513	24.837.137.083	62.099.376.142	48.134.948.489	52.556.109.460
3	Belanja Peningkatan Disiplin Aparatur	317.628.550	2.192.364.575	493.744.390	2.725.759.459	561.131.650
	JUMLAH	616.955.795.794	667.601.410.146	774.095.797.518	787.800.845.669	768.149.958.144

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kab. Temanggung (data diolah) Tahun 2018

Keterangan:

Belanja Pegawai meliputi:

1. Gaji PNS, Bupati dan Wakil Bupati, DPRD
2. Tambahan Penghasilan Pegawai
3. Iuran BPJS Ketenagakerjaan PNSD
4. Tunjangan profesi Guru PNSD
5. Tambahan Penghasilan Guru PNSD
6. Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa kebutuhan aparatur mengalami fluktuasi yaitu sempat meningkat pada tahun 2013-2016 tetapi mengalami penurunan pada tahun 2017.

Adapun gambaran proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10.
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017

No	Tahun Anggaran	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja+Pengeluaran Pembiayaan) (Rp)	Persentase
1	2013	616.955.795.794	1.010.285.380.589	61,07%
2	2014	667.601.410.146	1.179.953.529.257	56,58%
3	2015	774.095.797.518	1.533.933.483.922	50,46%
4	2016	787.800.845.669	1.798.956.284.467	43,79%
5	2017	768.149.958.144	1.836.002.416.979	41,84%

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kab. Temanggung (data diolah) Tahun 2018

Dari tabel tersebut dapat di lihat bahwa proporsi pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran cenderung menurun, sehingga alokasi anggaran yang dialokasikan untuk pembiayaan pembangunan masyarakat semakin meningkat.

d. Belanja Wajib

Belanja wajib bertujuan untuk menjamin kelangsungan pendanaan pelayanan dasar masyarakat serta belanja mengikat yang dibutuhkan secara terus menerus seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.

Jika dilihat dari belanja wajib dan mengikat Kabupaten Temanggung tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.11.
Pengeluaran Wajib dan mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata Pertumbuhan
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	575.336.445.587	610.079.318.043	676.673.011.259	698.313.508.052	646.076.172.518	3,17%
1	Belanja Pegawai	573.983.834.062	609.072.551.329	672.248.809.793	693.357.561.140	642.534.721.385	3,07%
2	Belanja Bunga	1.352.611.525	1.006.766.714	4.424.201.466	4.955.946.912	3.541.451.133	74,34%
B	BELANJA LANGSUNG	42.971.961.732	58.528.858.817	101.846.987.725	94.443.284.529	125.615.236.759	33,99%
1	Belanja Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran	26.893.945.669	31.499.357.159	39.253.867.193	43.582.576.581	72.497.995.649	29,78%
2	Belanja Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	15.760.387.513	24.837.137.083	62.099.376.142	48.134.948.489	52.556.109.460	48,58%
3	Belanja Peningkatan Disiplin Aparatur	317.628.550	2.192.364.575	493.744.390	2.725.759.459	561.131.650	221,35%
C	PEMBIAYAAN	-	-	18.000.000.000	40.960.784.816	42.582.241.633	32,88%
1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	7.500.000.000	8.082.241.633	1,94%
2	Pembayaran pokok hutang	-	-	18.000.000.000	33.460.784.816	34.500.000.000	22,25%
	JUMLAH	618.308.407.319	668.608.176.860	796.519.998.984	833.717.577.397	814.273.650.910	7,40%

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kab. Temanggung (data diolah) Tahun 2018

e. Analisis Pembiayaan

Analisis Pembiayaan Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap *surplus/defisit* belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Defisit riil APBD Kabupaten Temanggung selama kurun tahun 2013-2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12.
Defisit Riil Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	REALISASI PENDAPATAN DAERAH	1.053.845.571.760	1.226.139.568.046	1.469.482.958.105	1.678.688.079.170	1.779.850.394.321
	Dikurangi Realisasi:					
2	Belanja Daerah	1.000.841.225.195	1.170.880.302.872	1.505.003.745.055	1.739.541.988.789	1.768.574.354.911
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	9.444.155.394	9.073.226.385	28.929.738.867	59.414.295.678	67.428.062.068
A	Defisit Riil	43.560.191.171	46.186.038.789	(64.450.525.817)	(120.268.205.297)	(56.152.022.658)
	Ditutup oleh Realisasi Penerimaan Pembiayaan					
4	SILPA	41.776.547.255	102.999.147.464	192.382.144.363	188.309.853.466	111.281.501.116
5	PENCAIRAN DANA CADANGAN	12.867.002.883	0	0	28.207.575.074	0
6	PENERIMAAN PINJAMAN	0	37.579.771.350	51.378.500.450	263.730.458	0
7	PENERIMAAN KEMBALI PEMBERIAN PINJAMAN	243.081.070	110.592.998	120.001.232	14.768.547.415	224.960.186
8	PENERIMAAN RETENSI	4.552.325.085	5.506.593.762	8.879.733.238	0	11.124.295.288
B	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan	59.438.956.293	146.196.105.574	252.760.379.283	231.549.706.413	122.630.756.590
A-B	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	102.999.147.464	192.382.144.363	188.309.853.466	111.281.501.116	66.478.733.932

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kab. Temanggung (data diolah) Tahun 2018

Sedangkan komposisi untuk menutup defisit dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 3.13.
Komposisi penutup Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017

No.	Uraian	Proporsi dari Total Defisit Riil				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Sisa Lebih perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	70,28%	70,45%	76,11%	81,33%	90,75%
2	Pencairan Dana Cadangan	21,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3	Penerimaan Pinjaman dan Oblogasi Daerah	0,00%	25,71%	20,33%	12,18%	0,00%
4	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,41%	0,08%	0,05%	0,11%	0,18%
5	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	7,66%	3,77%	3,51%	6,38%	9,07%

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kab. Temanggung (data diolah) Tahun 2018

Untuk menutup defisit riil anggaran dimaksud, komponen SiLPA mempunyai proporsi yang cukup signifikan. Adapun komposisi SiLPA adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.14.
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013		2014		2015		2016		2017	
		Rp.	%								
1	Jumlah SILPA	102.999.147.464,00	100,00%	192.382.144.363,00	100,00%	188.309.853.466,00	100,00%	111.281.501.116,00	100,00%	66.478.733.932,00	100,00%
2	Pelampauan penerimaan PAD	10.113.655.094,00	9,82%	31.360.183.050,00	16,30%	17.144.843.166,00	9,10%	22.263.140.184,00	20,01%	1.383.413.084,00	2,08%
3	Pelampauan penerimaan Dana Perimbangan	(6.645.691.209,00)	-6,45%	(5.056.162.239,00)	-2,63%	(11.280.304.066,00)	-5,99%	(20.292.793.880,00)	-18,24%	(14.155.264.916,00)	-21,29%
4	Pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan daerah yang Sah	11.205.169.875,00	10,88%	(37.886.114.147,00)	-19,69%	3.331.345.242,00	1,77%	(32.297.922.383,00)	-29,02%	10.530.303.482,00	15,84%
5	Sisa penghematan belanja	174.660.254.968,00	169,57%	196.249.693.639,00	102,01%	224.182.177.521,00	119,05%	141.592.965.167,00	127,24%	72.712.290.643,00	109,38%
6	Selisih anggaran dan realisasi penerimaan pembiayaan	(86.348.771.977,00)	-83,83%	(37.303.041.940,00)	-19,39%	(44.667.767.837,00)	-23,72%	4.520.276.071,00	4,06%	(3.668.923.004,00)	-5,52%
7	Selisih anggaran dan realisasi pengeluaran pembiayaan	(14.530.713,00)	-0,01%	(45.017.586.000,00)	-23,40%	400.440.560,00	0,21%	4.504.164.043,00	4,05%	(323.085.357,00)	-0,49%

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kab. Temanggung (data diolah) Tahun 2018

Sisa Lebih perhitungan Anggaran tahun sebelumnya selama kurun tahun 2013-2017 dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu adanya pelampauan target pendapatan daerah, utamanya PAD, efisiensi/penghematan belanja dan adanya retensi yang dibayarkan pada tahun anggaran selanjutnya.

B. Neraca Daerah dan Rasio Keuangan

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif.

Kinerja Neraca Daerah Pemerintah Kabupaten Temanggung selama kurun waktu tahun 2013-2017 dapat dijelaskan secara rinci sebagaimana Tabel 3.16, sebagai berikut:

Tabel 3.15.
Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-Rata Pertumbuhan
ASET LANCAR						
Kas di Kas Umum Daerah	91.906.927.721,00	169.025.327.575,00	159.986.682.092,00	93.726.869.243,00	48.768.747.487,00	-2,71%
Kas di Bendahara Pengeluaran	597.584.215,00	284.452.334,00	1.183.505.924,00	280.268.390,00	246.362.544,00	43,81%
Kas di Bendahara Penerimaan	11.579.575,00	173.967.372,00	769.185.700,00	10.948.600,00	113.769.796,00	646,26%
Kas di BLUD	10.561.433.580,00	17.907.390.974,00	19.459.416.516,00	12.714.466.834,00	8.740.721.574,00	3,08%
Kas di Rekening JKN	0,00	5.087.173.688,00	7.553.463.978,00	4.598.055.207,00	3.427.957.517,00	-4,02%
Kas di bendahara BOS	0,00	1.328.286.643,00	3.083.436.863,00	3.629.136.839,00	5.241.782.257,00	48,57%
Piutang Pajak	6.193.691.290,00	7.091.212.655,00	7.171.105.688,50	7.209.585.836,50	7.803.737.385,50	6,10%
Penyisihan Piutang Pajak	0,00	(5.176.986.053,00)	(5.502.240.416,90)	(5.713.776.846,70)	(5.811.873.170,80)	2,96%
Piutang Retribusi	7.282.746.960,00	614.709.993,00	50.896.862.240,00	9.899.668.065,00	8.562.807.965,00	1998,55%
Penyisihan Piutang Retribusi	0,00	(255.262.159,00)	(413.436.548,00)	(523.584.562,00)	(583.725.393,00)	25,02%
Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	0,00	3.488.349.722,00	6.716.000,00	14.796.525.625,08	6.061.648.783,08	55014,67%
Piutang Pendapatan Lain-lain	620.679.592,00	6.305.461.341,00	18.711.126.957,00	28.076.924.650,00	28.912.185.838,00	291,42%
Penyisihan Piutang Lain-lain	0,00	(67.747.225,00)	(59.136.903,00)	(61.960.673,00)	(66.961.555,00)	0,03%
Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi	0,00	9.113.746.216,35	4.593.624.904,00	0,00	10.079.045.082,00	-37,40%

Beban dibayar di muka	0,00	377.189.469,14	821.934.508,00	596.036.552,00	350.471.931,00	12,31%
Piutang Bunga Deposito	0,00	300.598.933,56	7.150.685,00	0,00	0,00	-49,41%
Bagian Lancar TPTGR	33.333.029,00	29.833.029,00	23.313.029,00	23.313.029,00	23.313.029,00	-8,09%
Persediaan	9.465.296.890,26	12.398.256.437,90	13.998.729.710,20	16.967.718.943,62	19.436.808.378,74	19,91%
Jumlah Aset Lancar	126.673.272.852,26	228.025.960.945,95	282.291.440.926,80	186.230.195.732,50	141.306.799.448,52	11,41%
INVESTASI JANGKA PANJANG						
Investasi Non Permanen	4.465.716.012,00	1.680.226.153,43	1.468.439.669,40	841.160.008,40	848.253.221,40	-29,21%
Dana Bergulir	4.465.716.012,00	5.093.369.341,40	4.973.368.109,40	4.709.102.914,40	4.484.142.728,40	0,40%
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Penyisihan Dana Bergulir	0,00	(3.413.143.187,97)	(3.504.928.440,00)	(3.867.942.906,00)	(3.635.889.507,00)	1,76%
Investasi Permanen	80.008.519.684,50	88.482.799.639,05	100.426.821.108,29	141.904.966.445,75	136.059.585.479,85	15,32%
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	80.008.519.684,50	88.482.799.639,05	100.426.821.108,29	141.904.966.445,75	136.059.585.479,85	15,32%
Jumlah Investasi Jangka Panjang	84.474.235.696,50	90.163.025.792,48	101.895.260.777,69	142.746.126.454,15	136.907.838.701,25	13,94%
ASET TETAP						
Tanah	508.821.079.494,00	512.865.902.990,00	549.379.429.404,00	530.553.596.450,00	537.500.479.535,00	1,45%
Peralatan dan Mesin	232.555.227.820,00	266.759.074.237,00	336.148.355.885,00	412.081.005.472,00	485.171.606.838,00	20,26%
Gedung dan Bangunan	719.664.857.548,00	745.138.735.795,00	928.841.756.298,00	1.052.442.639.896,84	1.212.322.072.038,84	14,17%
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	995.006.970.943,00	1.048.693.364.956,00	1.387.464.580.838,00	1.516.493.611.115,00	1.606.042.305.966,00	13,23%
Aset Tetap Lainnya	53.721.016.707,00	50.916.710.485,10	57.202.400.405,81	57.064.746.161,14	63.576.599.307,61	4,57%
Konstruksi Dalam Pengerjaan	2.081.675.000,00	47.095.660.161,00	45.843.048.381,00	5.876.337.750,00	194.669.760,00	493,97%
Akumulasi Penyusutan	0,00	(874.807.054.297,89)	(1.113.852.738.390,07)	(1.174.691.927.564,70)	(1.289.933.286.215,92)	10,65%

Jumlah Aset Tetap	2.511.850.827.512,00	1.796.662.394.326,21	2.191.026.832.821,74	2.399.820.009.280,28	2.614.874.447.229,53	2,99%
DANA CADANGAN						
Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	7.500.000.000,00	15.582.241.633,00	26,94%
Jumlah Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	7.500.000.000,00	15.582.241.633,00	26,94%
ASET LAINNYA						
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	800.638.976,00	801.989.539,00	801.989.539,00	0,00	0,00	-24,96%
Aset Tak Berwujud	2.765.768.898,00	2.108.679.017,00	2.708.077.287,00	3.598.005.372,00	4.074.660.725,00	12,69%
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	0,00	0,00	0,00	(2.403.269.274,75)	(2.956.432.612,28)	5,75%
Aset Lain	20.585.910.065,00	70.252.358.414,00	63.997.962.499,00	55.312.901.312,00	57.396.282.635,50	55,64%
Akumulasi Penyusutan	0,00	(1.692.893.049,50)	(34.379.213.731,63)	(27.427.361.281,67)	(24.081.999.953,80)	474,59%
Jumlah Aset Lainnya	24.152.317.939,00	71.470.133.920,50	33.128.815.593,37	29.080.276.127,58	34.432.510.794,42	37,11%
JUMLAH ASET	2.747.150.653.999,76	2.186.321.514.985,14	2.608.342.350.119,60	2.765.376.607.594,51	2.943.103.837.806,72	2,83%
KEWAJIBAN						
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	78.377.627,00	96.167.580,00	642.400.744,00	49.107.158,00	60.607.243,00	130,44%
Utang Bunga	0,00	48.540.538,00	540.498.677,00	354.833.120,00	155.643.887,00	230,75%
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	18.000.000.000,00	29.447.668.800,00	34.500.000.000,00	31.205.062.058,00	17,80%
Pendapatan Diterima di muka	0,00	1.128.686.004,55	13.839.261.514,24	46.671.449.802,78	30.092.453.469,66	331,96%
Utang Belanja	0,00	2.301.650.707,00	14.329.202.914,00	18.056.751.354,84	30.870.121.003,84	154,88%
Utang Jangka Pendek Lainnya	6.569.116.824,71	5.529.298.307,00	8.501.387.956,00	14.703.204.259,00	11.076.011.762,00	21,55%
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	6.647.494.451,71	27.104.343.136,55	67.300.420.605,24	114.335.345.694,62	103.459.899.423,50	129,10%
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						

Utang Dalam Negeri Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Utang Dalam Negeri Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Utang Dalam Negeri Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00	0,00	13.694.459.058,00	0,00	-25,00%
Utang Dalam Negeri Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	19.579.771.350,00	41.510.603.000,00	17.510.603.000,00	0,00	-11,45%
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	0,00	19.579.771.350,00	41.510.603.000,00	31.205.062.058,00	0,00	-3,20%
JUMLAH KEWAJIBAN	6.647.494.451,71	46.684.114.486,55	108.811.023.605,24	145.540.407.752,62	103.459.899.423,50	185,05%
EKUITAS						0,00%
Ekuitas	2.740.503.159.548,05	2.139.637.400.498,59	2.499.531.326.514,36	2.619.836.199.841,89	2.839.643.938.383,22	2,02%
JUMLAH EKUITAS	2.740.503.159.548,05	2.139.637.400.498,59	2.499.531.326.514,36	2.619.836.199.841,89	2.839.643.938.383,22	2,02%
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2.747.150.653.999,76	2.186.321.514.985,14	2.608.342.350.119,60	2.765.376.607.594,51	2.943.103.837.806,72	2,83%

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kab. Temanggung (data diolah) Tahun 2018

Aset daerah merupakan aset yang memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang. Selama kurun waktu 2013-2017, pertumbuhan rata-rata jumlah aset daerah Pemerintah Kabupaten Temanggung mencapai 2,83% yang berarti bahwa jumlah aset Pemerintah Kabupaten Temanggung meningkat sebesar 2,83% setiap tahun.

Selanjutnya, tingkat kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat diketahui berdasarkan analisis rasio atau perbandingan antara kelompok/elemen laporan keuangan yang satu dengan kelompok yang lain. Beberapa rasio yang dapat diterapkan di sektor publik adalah rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio utang. Rasio likuiditas terdiri rasio lancar (*current ratio*), rasio kas (*cash ratio*) dan rasio cepat (*quick ratio*). Sedangkan rasio lancar (*current ratio*) adalah rasio standar untuk menilai kesehatan organisasi. Rasio ini menunjukkan apakah pemerintah daerah memiliki aset yang cukup untuk melunasi kewajiban yang jatuh tempo. Kualitas pengelolaan keuangan daerah dikategorikan baik apabila nilai rasio lebih dari satu.

Untuk menganalisa neraca daerah maka dapat menggunakan analisa rasio likuiditas sebagai berikut:

1. Rasio Lancar

Rasio ini menunjukkan hubungan antara kas dan aset lancar lainnya dalam hal ini dari entitas pemerintah daerah dengan kewajiban lancarnya untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban lancarnya.

Tabel 3.16.
Rasio Lancar Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017

TAHUN	AKTIVA LANCAR	KEWAJIBAN JK PENDEK	RASIO
2013	126.673.272.852,26	6.647.494.451,71	19,06
2014	228.025.960.945,95	27.104.343.136,55	8,41
2015	282.291.440.926,80	67.300.420.605,24	4,19
2016	186.230.195.732,50	114.335.345.694,62	1,63
2017	141.306.799.448,52	103.459.899.423,50	1,37
Rata-rata	192.905.533.981,21	63.769.500.662,32	3,03

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kab. Temanggung (data diolah) Tahun 2018

Meski terlihat mengalami trend penurunan terutama di 3 (tiga) tahun terakhir namun rasio lancar di Tahun 2017 menunjukkan Pemerintah Kabupaten Temanggung masih sangat sehat karena aktiva lancar masih lebih besar daripada kewajiban jangka pendek yang harus dipenuhi.

2. Rasio Cepat

Rasio ini merupakan rasio lancar yang dikurangi tingkat persediaan dari aset sekarang (*current asset*).

Tabel 3.17.
Rasio Cepat Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017

TAHUN	AKTIVA LANCAR	KEWAJIBAN JK PENDEK	PERSEDIAAN	RASIO
2013	126.673.272.852,26	6.647.494.451,71	9.465.296.890,26	17,63
2014	228.025.960.945,95	27.104.343.136,55	12.398.256.437,90	7,96
2015	282.291.440.926,80	67.300.420.605,24	13.998.729.710,20	3,99
2016	186.230.195.732,50	114.335.345.694,62	16.967.718.943,62	1,48
2017	141.306.799.448,52	103.459.899.423,50	19.436.808.378,74	1,18
Rata-rata	192.905.533.981,21	63.769.500.662,32	14.453.362.072,14	2,80

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kab. Temanggung (data diolah) Tahun 2018

Meski mengalami penurunan terutama di 3 (tiga) tahun terakhir namun rasio cepat di Tahun 2017 menunjukkan Pemerintah Kabupaten Temanggung masih sangat sehat karena aktiva lancar yang sudah dikurangi persediaan masih lebih besar dari pada kewajiban jangka pendek yang harus dipenuhi.

3. Rasio total hutang terhadap total aset

Rasio ini merupakan rasio yang memberikan gambaran atas jaminan kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan jaminan kemampuan membayar hutang kepada para pemberi pinjaman berdasarkan aset yang dimiliki.

Tabel 3.18.
Rasio Total Hutang terhadap Total Aset
Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017

TAHUN	HUTANG	ASET	RASIO
2013	6.647.494.451,71	2.747.150.668.999,76	0,002
2014	46.684.114.486,55	2.186.321.514.985,14	0,021
2015	108.811.023.605,24	2.608.342.350.119,60	0,042
2016	145.540.407.752,62	2.765.376.607.594,51	0,053
2017	103.459.899.423,50	2.943.103.837.806,72	0,035
Rata-rata	82.228.587.943,92	2.650.058.992.901,15	0,031

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kab. Temanggung (data diolah) Tahun 2018

Angka rasio yang relatif kecil menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Temanggung memiliki kemampuan untuk membayar hutang yang menjadi kewajiban pemerintah daerah karena hutang yang dimiliki masih jauh lebih kecil dari nilai aset yang dimiliki.

4. Rasio hutang terhadap modal

Rasio ini merupakan rasio yang memberikan gambaran atas jaminan kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan jaminan kemampuan membayar hutang kepada para pemberi pinjaman berdasarkan modal yang dimiliki.

Tabel 3.19.
Rasio Hutang terhadap Modal Kabupaten Temanggung
Tahun 2013-2017

TAHUN	HUTANG	MODAL	RASIO
2013	6.647.494.451,71	2.740.503.174.548,05	0,002
2014	46.684.114.486,55	2.139.637.400.498,59	0,022
2015	108.811.023.605,24	2.499.531.326.514,36	0,044
2016	145.540.407.752,62	2.619.836.199.841,89	0,056
2017	103.459.899.423,50	2.839.643.938.383,22	0,036
Rata-rata	82.228.587.943,92	2.567.830.404.957,22	0,032

Sumber : Laporan realisasi APBD Kab. Temanggung (data diolah) Tahun 2018

Angka rasio yang relatif kecil menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Temanggung memiliki kemampuan untuk membayar hutang yang menjadi kewajiban pemerintah daerah karena hutang yang dimiliki masih jauh lebih kecil dari nilai modal yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Sehubungan periode RPJMD sebelumnya sampai dengan Tahun Anggaran 2018, maka untuk melihat kondisi keuangan daerah pada tahun tersebut sebagai bagian dari analisis kebijakan anggaran pada periode RPJMD berikutnya, maka kondisi keuangan daerah (APBD) pada tahun anggaran 2018 sebagai berikut:

Tabel 3.20.
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018

No. Rek	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN	1.699.841.115.051	1.746.113.814.151	46.272.699.100
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	241.191.966.721	261.511.805.053	20.319.838.332
4.1.1	Hasil Pajak Daerah	36.046.000.000	39.015.524.832	2.969.524.832
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	17.109.186.000	17.109.186.000	0
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.594.000.000	24.220.827.623	11.626.827.623
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	175.442.780.721	181.166.266.598	5.723.485.877
4.2	DANA PERIMBANGAN	1.078.044.419.330	1.074.002.691.654	(4.041.727.676)
4.2.1	Dana Bagi Hasil	52.099.367.330	52.099.367.330	0
4.2.2	Dana Alokasi Umum	793.801.136.000	793.801.136.000	0
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	232.143.916.000	228.102.188.324	(4.041.727.676)
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	380.604.729.000	410.599.317.444	29.994.588.444
4.3.1	Pendapatan Hibah	63.789.400.000	63.329.107.444	(460.292.556)
4.3.2	Dana Darurat	-		
4.3.3	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	86.450.000.000	89.258.209.000	89.258.209.000
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	18.750.000.000	18.750.000.000	0

4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	26.219.390.000	26.219.390.000
4.3.6	Dana Desa	211.615.329.000	213.042.611.000	1.427.282.000
5	BELANJA DAERAH	1.723.357.367.620	1.782.793.336.326	59.435.968.706
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.062.781.934.268	1.122.648.574.436	59.866.640.168
5.1.1	BELANJA PEGAWAI	637.071.589.273	664.754.547.441	27.682.958.168
5.1.2	BELANJA BUNGA	4.000.000.000	4.000.000.000	0
5.1.3	BELANJA SUBSIDI	-	0	0
5.1.4	BELANJA HIBAH	78.581.198.500	86.918.998.500	8.337.800.000
5.1.5	BELANJA BANTUAN SOSIAL	8.947.905.000	8.947.905.000	0
5.1.6	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PEMERINTAHAN DESA	4.985.000.000	4.985.000.000	0
5.1.7	BELANJA BANTUAN KEUANGAN	328.696.241.495	337.654.302.093	8.958.060.598
5.1.8	BELANJA TIDAK TERDUGA	500.000.000	500.000.000	0
5.2	BELANJA LANGSUNG	660.575.433.352	809.326.129.136	148.750.695.784
5.2.1	BELANJA PEGAWAI	83.523.899.416	85.992.969.287	2.469.069.871
5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	350.312.268.138	385.177.814.456	34.865.546.318
5.2.3	BELANJA MODAL	226.739.265.798	338.155.345.393	111.416.079.595
	DEFISIT	(23.516.252.569)	(35.973.068.019)	(12.456.815.450)
6	PEMBIAYAAN	23.516.252.569	35.973.068.019	12.456.815.450
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	76.514.203.661	96.640.862.499	20.126.658.838

6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)	46.514.203.661	66.482.643.932	19.968.440.271
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	15.000.000.000	15.607.678.240	607.678.240
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	-	-	-
6.1.6	Penerimaan piutang daerah	-	-	-
6.1.7	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	15.000.000.000	14.030.183.227	(969.816.773)
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	52.997.951.092	60.147.246.380	7.149.295.288
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	9.997.951.092	21.022.951.092	11.025.000.000
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	28.000.000.000	28.000.000.000	-
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-
6.2.7	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	15.000.000.000	11.124.295.288	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	0	0	0

Sumber : Perda No.22 Tahun 2017 Tentang APBD Kab. Temanggung Tahun Anggaran 2018



BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGI DAERAH



Pesona Keindahan Alam Temanggung

TEMANGGUNG

MAREM GANDEM

TENTREM



Gambaran kondisi Kabupaten Temanggung yang telah diuraikan pada bab sebelumnya menunjukkan fakta bahwa masih ada persoalan pembangunan daerah yang harus diselesaikan dalam lima tahun kedepan. Permasalahan pembangunan daerah juga tidak terlepas dari pengaruh global, regional, dan nasional, seperti kondisi sosial, politik, dan ekonomi global, serta berbagai kebijakan di tataran global dan nasional. Kondisi lingkungan global, regional, dan nasional yang semakin dinamis dan *unpredictable* dalam jangka menengah akan menjadi tantangan sekaligus peluang dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung lima tahun kedepan.

A. Lingkungan Strategis

1. Lingkungan Global

Kondisi lingkungan global yang menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pembangunan daerah Jawa Tengah lima tahun kedepan antara lain:

Pertama, pemulihan perekonomian global yang diprediksikan semakin membaik secara moderat, meskipun bisa dikatakan belum pulih sepenuhnya.

Perekonomian negara-negara maju mulai ke arah tumbuh kembali dan tidak lagi terseret permintaan negara-negara berkembang. Perekonomian di kawasan Eropa, Jepang, Cina dan negara-negara *emerging market* lainnya diperkirakan akan tumbuh sekitar 2-5 persen. Demikian pula perekonomian Amerika Serikat yang mulai pulih, dengan mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang mulai meningkat. Meskipun pertumbuhan ekonomi global mulai menunjukkan gejala positif, perlu tetap diwaspadai terjadinya inflasi global yang meningkat, seperti yang terjadi di Amerika Serikat, Cina, dan negara-negara sedang berkembang Eropa. Ditambah dengan gejolak harga minyak dunia dimana disatu sisi memberi dampak positif pada perekonomian nasional, namun juga dapat berdampak pada tekanan inflasi apabila tidak diantisipasi sejak awal.

Kebijakan perekonomian AS saat ini juga perlu tetap diantisipasi dampaknya ke depan, terkait dengan normalisasi kebijakan moneter seperti meningkatkan suku bunga FFR (*Federal Funds Rate*), yang berpotensi memicu gejolak di pasar keuangan. Gejolak tersebut dapat mengakibatkan arus modal keluar (*capital outflow*) tiba-tiba dari negara-negara berkembang, seperti Indonesia, yang dapat memicu kenaikan pinjaman dan fluktuasi harga saham sehingga investasi bisa terhambat. Kebijakan perpajakan AS (*tax policy*) yang baru juga dapat memberikan pengaruh pada kondisi perekonomian Indonesia, dimana Pemerintah AS berencana memotong pajak AS yang dapat mendorong perpindahan arus modal ke AS dan pelemahan mata uang global terhadap dolar AS. Selain kebijakan Pemerintah AS, kebijakan ekonomi Pemerintah Cina yang sedang melakukan restrukturisasi perekonomian dalam upaya menyeimbangkan komposisi pertumbuhan ekonominya dinilai juga dapat berpengaruh pada perekonomian nasional dan daerah.

Kedua, pergeseran peran ekonomi Kawasan Asia Pasifik dalam perekonomian global.

Kawasan Asia Pasifik mulai mengalami pergeseran gravitasi perekonomian global karena kurang lebih 41 persen penduduk dunia berada di kawasan ini dan 50 persen transaksi dunia terjadi di kawasan ini. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, perekonomian Asia Pasifik mulai pulih dan membaik. Pertumbuhan kawasan akan terus ditopang oleh permintaan domestik yang kuat, termasuk dari publik dan investasi swasta. Tren ini akan ditopang oleh kenaikan ekspor secara bertahan, seiring dengan pemulihan perekonomian yang berkembang. Berbagai kerjasama lintas negara Asia Pasifik yang dibangun dalam beberapa tahun ini menempatkan posisi kawasan Asia Pasifik sebagai kawasan ekonomi perdagangan yang semakin kuat. Beberapa kerjasama tersebut antara lain *Trans Pacific Partnerships*(TPP), ASEAN

Regional Forum (ARF), Shanghai Cooperation Organization (SCO), East Asia Summit (EAS), serta Expand ASEAN Maritime Forum (EAMF).

Ketiga, stabilitas politik global yang dinamis. Kebijakan proteksi ekonomi Amerika Serikat dengan jargon *America First*, dan diikuti dengan penarikan diri AS dari komitmen Kemitraan Trans Pasifik/TPP, akan memberikan pengaruh pada inisiatif perdagangan dunia, termasuk Indonesia, karena AS merupakan salah satu negara tujuan ekspor komoditas Indonesia. Selain itu, ketegangan politik di kawasan Korea Utara dan Timur Tengah saat ini, serta di negara Arab Saudi juga dapat mempengaruhi ketidakstabilan ekonomi dan politik regional dan global.

Gerakan radikalisme dan terorisme juga terus menjadi tantangan stabilitas politik nasional, serta merebaknya peredaran NAPZA lintas negara yang semakin tidak terbendung. Perkembangan transportasi dunia yang semakin cepat, berakibat pada terbukanya kemudahan akses distribusi barang dan jasa, serta pergerakan manusia lintas negara. Hal ini perlu menjadi perhatian dalam pembangunan kedepan, untuk bisa lebih pro aktif mengantisipasi perubahan dan pergerakan tersebut.

Keempat, keterbukaan pasar ASEAN dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang sudah diimplementasikan sejak tahun 2016. Pemberlakuan MEA sebagai pasar tunggal ASEAN, tetap menjadi sebuah peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia dan bahkan Jawa Tengah kedepan. Kebutuhan pasar tenaga kerja terampil, aliran barang, investasi, dan modal yang lintas batas negara, menuntut kesiapan negara dan daerah mengantisipasinya secara tepat dan cepat. Apalagi Indonesia yang memiliki penduduk dengan jumlah terbesar ketiga dunia, merupakan potensi pasar komoditas utama MEA. Disisi lain, ketersediaan tenaga kerja produktif, terampil, dan kompeten, seharusnya menjadi peluang kompetitif, mengingat jumlah penduduk Indonesia yang cukup banyak.

Kelima, perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat dengan menembus batas-batas negara. Globalisasi yang terjadi saat ini salah satunya ditandai dengan kecepatan arus informasi dan ekonomi digital yang tidak dapat dilepaskan oleh pengaruh besar teknologi. Kemampuan teknologi dalam mengintegrasikan tradisi perdagangan, dapat mengubah bentuknya menjadi lebih sempurna, universal, dan spasial temporal (mampu menembus ruang dan waktu). Bagaimana kemudian teknologi juga mampu menggerakkan arus informasi dan gagasan tanpa batas, sehingga yang diperlukan adalah kemampuan mentransformasikan teknologi informasi menjadi sebuah aktivitas positif, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya yang tetap sejalan dengan nilai-nilai luhur kepribadian Bangsa Indonesia. Selain itu, bagaimana mengantisipasi dimulainya era industri 4.0 (industri yang mengkombinasikan kecerdasan buatan, data raksasa, komputasiawan, serba internet dan cetak tiga dimensi) terutama pada garmen, petrokimia, otomotif, serta industri makanan dan minuman dan lainnya, yang saat ini masih menjadi komoditas industri unggulan nasional maupun Jawa Tengah serta bagaimana mengkombinasikan dengan pencerapan dan penciptaan lapangan kerja baru.

2. Lingkungan Nasional

Lingkungan strategis nasional juga menjadi penting untuk diperhatikan dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah Jawa Tengah lima tahun kedepan, antara lain:

Pertama, kebhinekaan bangsa Indonesia dari segi geografis, etnis, ras, budaya, dan agama. Perbedaan dan keragaman bangsa Indonesia juga menjalar sampai ke daerah, yang menjadikan kondisi tersebut peluang sekaligus tantangan pembangunan kedepan. Modal sosial berupa keberagaman tersebut dijadikan sebagai

satu pondasi penguat bangunan bangsa. Namun disisi lain, keberagaman juga menimbulkan kerentanan tersendiri, berupa kerenggangan dan konflik horisontal antar kelompok masyarakat yang saat ini mulai marak terjadi. Pemahaman ideologi Pancasila menjadi penting sebagai upaya antisipatif membendung perpecahan, konflik vertikal dan horisontal yang mengancam keutuhan bangsa.

Kedua, kebijakan pembangunan nasional di Jawa Tengah. Dilaksanakannya pembangunan infrastruktur strategis nasional diantaranya jalan tol (Brebes – Semarang, Semarang – Solo, Solo – Kertosono, Semarang – Demak, Bawen – Yogya), Jaringan Jalan Lintas Selatan, Pengembangan Bandara (Jenderal Soedirman, Dewadaru, Ngloram, Tunggul Wulung, Adi Sumarmo dan Ahmad Yani), Pengembangan Pelabuhan (Tanjung Emas, Tanjung Intan, Sluke dan Batang), Revitalisasi Rel Kereta Api (Semarang – Demak – Kudus – Pati – Rembang, Kedungjati – Tuntang, Ambarawa – Secang – Magelang - Yogyakarta), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Borobudur yang meliputi Kawasan Borobudur – Yogyakarta - Dieng, Solo - Sangiran, dan Semarang - Karimunjawa, Pembangunan Kawasan Industri Kendal, Pembangunan Bendungan/Waduk (Logung, Bener, Pidekso, Gondang, Randugunting, Jatibarang), Pengembangan SPAM Regional (Wosusokas, Bregas, Keburejo) dan Pembangunan PLTU. Infrastruktur Strategis ini akan memberikan peluang bagi percepatan pembangunan di Jawa Tengah.

Ketiga, bonus demografi. Indonesia mempunyai peluang untuk dapat menikmati ‘bonus demografi’, yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi akibat berubahnya struktur umur penduduk yang ditandai dengan menurunnya rasio ketergantungan (*dependency ratio*) penduduk non-usia kerja kepada penduduk usia kerja. Perubahan struktur ini memungkinkan bonus demografi tercipta karena meningkatnya suplai angkatan kerja (*labor supply*), tabungan (*saving*), dan kualitas sumber daya manusia (*human capital*).

Bonus demografi tidak diperoleh secara otomatis, tetapi harus diupayakan dan diraih dengan arah kebijakan yang tepat. Berbagai kebijakan yang tepat diperlukan untuk menyiapkan kualitas sumber daya manusia yang akan masuk ke angkatan kerja; menjaga penurunan fertilitas; menyiapkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja; dan kebijakan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja, fleksibilitas pasar tenaga kerja, keterbukaan perdagangan dan tabungan serta dukungan sarana dan prasarana.

Selain memperhatikan lingkungan strategis, dalam penentuan isu strategis pembangunan daerah dilakukan juga dengan memperhatikan isu-isu global, nasional, maupun regional yang teridentifikasi sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Isu-Isu Pembangunan Global, Nasional, dan Daerah

Isu Global (SDG's)	Isu Nasional (RPJMN 2014-2019)	Isu Daerah (RPJPD 2005-2025)
1. Kemiskinan	1. Stabilitas politik dan keamanan	1. Pemerintahan
2. Pangan dan Gizi	2. Tata kelola birokrasi efektif dan efisien	2. Politik
3. Kesehatan	3. Pemberantasan korupsi	3. Hukum
4. Pendidikan	4. Pertumbuhan ekonomi	4. Keamanan ketertiban masyarakat
5. Gender	5. Percepatan pemerataan dan keadilan	5. Sosial
6. Air bersih dan sanitasi	6. Keberlanjutan pembangunan	6. Budaya
7. Energi		7. Ilmu pengetahuan dan teknologi
8. Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja		8. Ekonomi
9. Infrastruktur		9. Sarana dan prasarana

<p>10. Kesenjangan</p> <p>11. Kota dan Permukiman</p> <p>12. Produksi dan konsumsi berkelanjutan</p> <p>13. Perubahan iklim</p> <p>14. Sumberdaya kelautan</p> <p>15. Ekosistem daratan</p> <p>16. Masyarakat inklusif dan damai, akses keadilan, dan membangun kelembagaan</p> <p>17. Kemitraan global</p>	<p>7. Peningkatan kualitas SDM</p> <p>8. Kesenjangan antar wilayah</p> <p>9. Percepatan pembangunan kelautan</p>	<p>10. Sumber daya alam dan lingkungan hidup</p>
---	--	--

B. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah terjadi karena kondisi daerah yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang belum diatasi, peluang yang belum dimanfaatkan, dan ancaman yang belum diantisipasi. Perumusan permasalahan pembangunan daerah bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan kinerja pembangunan Kabupaten Temanggung.

Permasalahan pembangunan Kabupaten Temanggung diuraikan berdasarkan faktor-faktor yang dianggap penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan/atau terhadap beberapa urusan yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, guna menentukan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah. Permasalahan Pembangunan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pelayanan Umum Urusan Wajib Dasar

a. Bidang Pendidikan

- 1) Belum tercapainya angka rata-rata Lama Sekolah (ARLS) pendidikan dasar 12 tahun. Pada Tahun 2017 capaian angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Temanggung sebesar 6,9 tahun yang artinya rata-rata tingkat Pendidikan masyarakat Temanggung baru mencapai SMP kelas satu atau masih dibawah target wajib belajar pendidikan dasar.
- 2) Angka Harapan Lama Sekolah (AHL) AHL Kabupaten Temanggung tahun 2017 sekitar 12,07 tahun artinya secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2017 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,07 tahun atau setara dengan diploma 1.

- 3) Masih adanya anak putus sekolah.
 - 4) Akses dan kualitas layanan pendidikan belum optimal.
- b. Bidang Kesehatan
- 1) Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup
Angka kematian ibu di Kabupaten Temanggung dari tahun ke tahun cenderung fluktuatif. Jumlah ibu yang meninggal karena hamil, bersalin dan nifas dibagi jumlah kelahiran hidup di Kabupaten Temanggung pada tahun 2017 mencapai 67,45 per 100.000 kelahiran hidup.
 - 2) Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup
Masih adanya kematian bayi di Kabupaten Temanggung, angka kematian bayi pada tahun 2017 sebesar 13,20 per 1.000 kelahiran hidup, angka tersebut lebih besar dibandingkan AKB Jawa Tengah yaitu sebesar 8,93 per 1.000 kelahiran hidup.
 - 3) Prosentase balita Gizi Buruk (0-60 bulan) dan stunting.
Masih ditemukannya balita dengan gizi buruk di Kabupaten Temanggung. Pada tahun 2017 mencapai 0,35% yaitu termasuk kategori rendah menurut WHO (di bawah 10%) dan masih berada di bawah target nasional (kurang dari 5 persen). Prevalensi stunting di Kabupaten Temanggung pada Balita 0-59 Bulan masih cukup tinggi yaitu sebesar 30% masih di atas target Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yaitu 20%.
 - 5) Meningkatnya kasus penyakit tidak menular
- c. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 1) Masih perlunya peningkatan Persentase Infrastruktur Kondisi Baik.
Infrastruktur yang ditingkatkan meliputi Infrastruktur jalan, jembatan, air bersih, dan jaringan irigasi.
 - 2) Perlunya pengendalian penataan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
 - 3) Belum tersedianya infrastruktur pendukung di kawasan peruntukan industri.
 - 4) Belum optimalnya pemanfaatan kawasan peruntukan industri.
- d. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Belum optimalnya penyediaan rumah tinggal bersanitasi layak.

- e. Bidang Ketentraman Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
 - 1) Masih adanya tindak kriminalitas. Angka kriminalitas pada tahun 2017 sebesar 2,03 per 10.000 jumlah penduduk. Tindak kriminal pada tahun 2017 sebanyak 157 kasus dengan perincian jumlah kasus narkoba sebanyak 21 kasus, pembunuhan sebanyak 1 kasus, kejahatan seksual sebanyak 19 kasus, penganiayaan sebanyak 9 kasus, pencurian sebanyak 87 kasus, dan penipuan sebanyak 20 kasus.
 - 2) Masih perlunya peningkatan cakupan pelayanan penanganan pemadam kebakaran.
 - 3) Perlunya peningkatan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
 - 4) Belum optimalnya kesadaran hukum masyarakat di Kabupaten Temanggung.

f. Bidang Sosial

- 1) Masih cukup tingginya jumlah Rumah Tidak Layak Huni.
- 2) Masih perlunya peningkatan PMKS yang mendapat perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Persentase PMKS yang mendapat perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di Kabupaten Temanggung tahun 2017 sebanyak 42,22 persen atau sejumlah 20.468 dari 48.470 PMKS.
- 3) Belum optimalnya pelaksanaan desa/kelurahan tangguh bencana. Persentase desa/kelurahan tangguh bencana sampai dengan tahun 2017 telah terbentuk 12 desa/kelurahan tangguh bencana atau 6,52 % dari 184 desa/kelurahan rawan bencana.

2. Pelayanan Umum Urusan Wajib Non-Dasar

a. Bidang Tenaga Kerja

Belum optimalnya kesempatan kerja untuk menyerap angkatan kerja yang ada di Kabupaten Temanggung.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Temanggung pada tahun 2017 baru mencapai 74,37%.

b. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- 1) Masih terjadi kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan.

Pada tahun 2015 IPG Kabupaten Temanggung sebesar 96. Walaupun demikian IPG Kabupaten Temanggung masih lebih tinggi dari IPG Jawa Tengah sebesar 91,94 dan IPG Nasional yang nilainya sebesar 91,03.

- 2) Belum optimalnya Penguatan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Temanggung.
Pada Tahun 2017 IDG Kabupaten Temanggung sebesar 82,49, angka tersebut lebih tinggi dari IDG Provinsi Jawa Tengah sebesar 75,10 dan IDG Nasional sebesar 71,74.
 - 3) Belum optimalnya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Temanggung Tahun 2016 sebesar 39 kasus dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 43 kasus atau ada kenaikan sebesar 10,26 persen.
- c. Bidang Pangan
- Perlunya peningkatan Skor Pola Pangan Harapan. Skor Pola Pangan Harapan di Kabupaten Temanggung Tahun 2017 mencapai 87,5, dengan angka idealnya 100.
- d. Bidang Pertanian
- Perlu peningkatan fasilitasi sertifikasi tanah milik Pemerintah Daerah. Tanah milik Pemerintah Daerah yang belum bersertifikat yaitu sejumlah 1.372 bidang dari 2.611 bidang tanah milik Pemerintah Daerah.
- e. Bidang Lingkungan Hidup
- 1) Perlunya peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), IKLH Kabupaten Temanggung tahun 2017 baru mencapai 63,68 persen.
 - 2) Meningkatnya pencemaran lingkungan air, yang ditunjukkan dengan semakin menurunnya indeks kualitas air (IKA).
 - 3) Belum optimalnya penanganan sampah di Kabupaten Temanggung. Pada tahun 2017 jumlah sampah yang terkelola di TPS3R baru mencapai 41,47%, yang dikelola oleh bank sampah 13,26% dan sampah terkelola di TPA 9,8%.
- f. Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
- 1) Belum optimalnya kepemilikan Kartu Keluarga. Prosentase kepemilikan Kartu Keluarga di Kabupaten Temanggung Tahun 2017 sudah mencapai 96,30 persen. Namun diperlukan updating atau pembaharuan data.
 - 2) Masih perlunya peningkatan kepemilikan Kartu Penduduk (KTP.El). Presentase kepemilikan Kartu Penduduk (KTP.El) di Kabupaten Temanggung tahun 2017 telah mencapai 96,87 persen

atau 592,650 jiwa dan penduduk yang belum ber KTP sebanyak 3,13 persen atau 19.197 orang.

- g. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - 1) Masih rendahnya kepatuhan Aparatur Pemerintahan Desa terhadap regulasi.
 - 2) Belum optimalnya pengembangan ekonomi masyarakat desa.
 - 3) Belum optimalnya pengembangan dan penerapan inovasi desa.
- h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kurang optimalnya penanganan Laju Pertumbuhan Penduduk. Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Temanggung tahun 2017 mencapai 0,88 persen.
- h. Bidang Perhubungan
 - 1) Belum optimalnya sarana dan prasarana lalu lintas.
 - 2) Masih perlunya pengurangan jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Temanggung. Pada tahun 2017 masih terjadi 337 kasus kecelakaan.
- i. Bidang Komunikasi dan Informatika
 - 1) Masih perlunya peningkatan Nilai Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik. Nilai Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik di Kabupaten Temanggung tahun 2017 mencapai 70,80.
 - 2) Belum optimalnya cakupan teknologi, informasi, dan komunikasi di tingkat Desa di Kabupaten Temanggung.
 - 3) Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi informasi.
 - 4) Belum optimalnya integrasi sistem informasi pemerintah daerah.
- j. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 - 1) Masih perlunya peningkatan jumlah koperasi sehat.
 - 2) Masih perlunya peningkatan jumlah UKM aktif. Capaian persentase UKM aktif di Kabupaten Temanggung tahun 2017 sebesar 7,6 persen.
 - 3) Belum optimalnya kualitas dan daya saing sektor UMKM.
 - 4) Masih lemahnya akses permodalan.
- k. Bidang Penanaman Modal
 - 1) Laju Investasi di Kabupaten Temanggung masih fluktuatif. Laju Investasi tahun 2017 sebesar 39,92%.
 - 2) Belum banyak investasi yang masuk ke komoditas unggulan daerah.
 - 3) Persebaran investasi yang belum merata.

1. Bidang Kepemudaan dan Olahraga
 - 1) Masih perlunya penguatan organisasi kepemudaan yang aktif. Capaian organisasi pemuda yang aktif di Kabupaten Temanggung sebesar 62,96 %.
 - 2) Perlunya peningkatan prestasi olah raga. Capaian prestasi cabang olah raga di Kabupaten Temanggung sekitar 40 %.

m. Bidang Statistik

Data statistik sangat diperlukan sebagai bahan perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan daerah, baik data statistik dasar maupun data statistik sektoral. Permasalahan yang dihadapi adalah belum tersedianya data statistik dasar pada tahun berjalan karena baru tersedia pada awal semester II tahun berikutnya sehingga terjadi *leg 2* tahun dengan tahun perencanaan, belum adanya sumber daya manusia yang berbasis statistik, masih ada beberapa data yang berbeda dihasilkan dari sumber data yang sama.

n. Bidang Kebudayaan

- 1) Belum optimalnya pelestarian cagar budaya dan sejarah. Capaian pelestarian cagar budaya dan sejarah di Kabupaten Temanggung tahun 2017 sebesar 4,69%.
- 2) Masih kurangnya kesadaran kelompok seni untuk mendaftar/registrasi ulang.
- 3) Belum optimalnya sentuhan penanganan kelompok pelestari dan pecinta bahasa/sastra.

o. Bidang Perpustakaan

- 1) Masih rendahnya pengunjung perpustakaan daerah.
- 2) Belum optimalnya kesadaran dan minat budaya baca (literasi).

p. Bidang Kearsipan

Perlunya peningkatan kualitas cakupan penerapan arsip di tingkat desa secara baku.

3. Pelayanan Umum Urusan Pilihan

a. Bidang Kelautan dan Perikanan

Perlunya peningkatan konsumsi ikan. Tingkat konsumsi ikan di Kabupaten Temanggung tahun 2017 masih tergolong rendah dimana tingkat konsumsi ikan baru mencapai 19,73 kg/kap/th dibandingkan tingkat konsumsi ikan Provinsi Jawa Tengah (29,17 kg/kap/th) dan tingkat konsumsi ikan Nasional (50,65 kg/kap/th). Tingginya biaya produksi budidaya perikanan mengakibatkan produksi ikan konsumsi Kabupaten Temanggung baru mencukupi 60 persen dari kebutuhan konsumsi.

- b. Bidang Pariwisata
 - 1) Lemahnya daya dukung infrastruktur dan SDM lokal serta kelembagaan pariwisata.
 - 2) Perlunya perluasan jaringan dan promosi pariwisata.
 - 3) Perlunya pengembangan wisata.
Pertumbuhan jumlah wisatawan domestik dan mancanegara di Kabupaten Temanggung sampai dengan tahun 2017 sebesar 14,55 persen, dengan jumlah total wisatawan 491.144 jiwa. Serta lama tinggal wisatawan (*Length of stay*) sekitar kurang lebih 10 jam atau belum mencapai 1 hari.
 - c. Bidang Pertanian
 - 1) Perlunya peningkatan Produktivitas Komoditas Unggulan.
Produktivitas komoditas unggulan di Kabupaten Temanggung tergolong rendah untuk itu perlu ditingkatkan.
 - 2) Perlunya peningkatan produktivitas ternak sapi. Di Kabupaten Temanggung tahun 2017 mencapai 173 kg/ekor.
 - 3) Perlunya peningkatan produktivitas ternak kambing dan domba melalui peningkatan bibit unggul dan pakan yang berkualitas.
 - 4) Perlunya peningkatan produktivitas ternak ayam pedaging.
 - 5) Belum optimalnya pemasaran produk pertanian.
 - 6) Belum efektif dan efisiennya sarana dan prasarana pertanian khususnya infrastruktur irigasi tersier.
 - d. Bidang Perdagangan
 - 1) Perlunya peningkatan sarana prasarana perdagangan.
 - 2) Perlunya peningkatan kemitraan antara pelaku usaha dengan swalayan/ toko modern.
 - 3) Perlunya peningkatan manajemen pengelolaan pasar.
 - 4) Belum optimalnya informasi harga pasar hasil produk pertanian.
 - e. Bidang Perindustrian
 - 1) Perlunya peningkatan nilai tambah komoditas pertanian unggulan di sektor industri.
 - 2) Perlunya peningkatan kapasitas industri kecil.
4. Penunjang Urusan Pemerintahan
- a. Bidang Perencanaan
 - 1) Perlunya mengoptimalkan integrasi sistem *e-planning* dan *e-budgetting*.
 - 2) Perlunya peningkatan kualitas pengendalian evaluasi pelaksanaan program pembangunan.

- b. Bidang Penelitian dan Pengembangan
 - 1) Belum optimalnya hasil-hasil penelitian dan pengkajian yang belum ditindaklanjuti dengan kebijakan;
 - 2) Belum adanya sumber daya manusia khususnya fungsional peneliti bidang penelitian dan pengembangan.
- c. Bidang Kepegawaian
 - 1) Rasio ASN di Kabupaten Temanggung yang mengikuti diklat masih rendah;
 - 2) Belum optimalnya rasio ASN dan beban kerja.
- d. Bidang Keuangan

Belum optimalnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Capaian PAD Kabupaten Temanggung sebesar 17,3 persen karena keterbatasan sumber PAD yang potensial.
- e. Bidang Pengawasan

Perlunya peningkatan kualitas dan jumlah aparatur pemeriksa di Kabupaten Temanggung.
- f. Bidang Lainnya
 - 1) Belum optimalnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Kabupaten Temanggung. Capaian penilaiannya mendapatkan predikat CC.
 - 2) Besarnya Raperda menjadi Perda jumlahnya belum sesuai dengan yang diajukan dalam Propemperda pada setiap tahunnya.
 - 3) Belum optimalnya kualitas dan kuantitas fasilitas publik.
 - 4) Belum optimalnya bisnis proses birokrasi pelayanan publik.

C. Isu-Isu Strategis

Isu-Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa datang.

Isu strategis disusun berdasarkan gambaran kondisi daerah dan permasalahan perangkat daerah, memperhatikan juga dokumen rencana pembangunan RPJPD Kabupaten Temanggung, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2020, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah 2018-2023, berdasarkan Peraturan Daerah RTRW Nomor: 1 Tahun 2012 Kabupaten Temanggung 2011-2031.

Isu strategis Kabupaten Temanggung dalam periode 2018-2023 lebih berorientasi pada masa yang telah melalui analisis suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun peluang dalam periode pemerintahan lima tahun ke depan. Adapun Isu-Isu Strategis Kabupaten Temanggung sebagai berikut :

1. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang sangat kompleks, bukan hanya masalah pendapatan, akan tetapi juga menyangkut kerentanan dan kerawanan orang atau sekelompok orang. Penanggulangan kemiskinan merupakan sasaran utama dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan pada tingkat global, nasional, provinsi maupun di Kabupaten Temanggung. Bahkan dalam amanat SDG's di tahun 2030 diupayakan menjadi nol (*zero poverty*).

Penduduk Kabupaten Temanggung yang berada pada garis kemiskinan sampai dengan Maret 2018 sebanyak 9,87 persen atau 75.390 jiwa. Capain ini lebih baik dibandingkan tahun 2017 sebesar 11,46 persen atau 86.770 jiwa. Capain tersebut lebih baik dari Jawa Tengah dimana angka kemiskinan sebesar 11,46 persen atau sebanyak 3.897.200 jiwa. Namun angka tersebut masih dibawah nasional yaitu sebesar 9,82 persen.

Penduduk miskin di Kabupaten Temanggung memiliki ciri-ciri antara lain rendahnya tingkat pendapatan, rendahnya kondisi kesehatan, rendahnya tingkat pendidikan dan terbatasnya keahlian, rendahnya akses terhadap tanah dan modal, sangat rentan terhadap gejolak ekonomi, bencana alam, dan rendahnya partisipasi dalam proses pengambilan kebijakan, serta masih kurangnya keamanan individu. Adapun faktor yang mempengaruhi kemiskinan antara lain tingkat pendapatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender dan kondisi lingkungan.

Dalam rangka mengoptimalkan ketepatan sasaran program dan kegiatan maupun lokasi intervensi penanganan kemiskinan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung telah melakukan upaya yang komprehensif dalam penanggulangan kemiskinan dengan mensinergikan antara peran masyarakat, pemerintahan desa dan kebijakan Pemerintah Daerah. Bahkan pada tahun 2017, Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung secara kelembagaan telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 124 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Tim Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Temanggung.

Kemiskinan juga dipengaruhi oleh dimensi politik yang dikarenakan oleh struktur ekonomi politik yang timpang sehingga pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat secara luas dalam proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan pembangunan yang mengacu pada strategi penanggulangan kemiskinan yaitu memperbaiki program perlindungan sosial, meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar, pemberdayaan kelompok masyarakat miskin dan menciptakan pembangunan yang inklusif, memperluas pertumbuhan sektor ekonomi kerakyatan dan kesempatan kerja, dan melakukan evaluasi efektivitas program/ kegiatan penanggulangan kemiskinan.

2. Kualitas Sumber Daya Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data BPS pada tahun 2017 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Temanggung sebesar 68,34 dengan kategori sedang (peringkat 26 se-Jawa Tengah), yang meliputi (1) Angka Harapan Hidup (AHH) 75,42 tahun (2) Angka Harapan Lama Sekolah (AHL) 12,07 tahun dan Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS) 6,9 tahun. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa Angka IPM Kabupaten Temanggung berada di bawah rata-rata kabupaten/kota lain di Jawa Tengah ataupun nasional.

Angka IPM yang belum optimal, dikarenakan belum optimalnya kemampuan masyarakat mengakses kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Akses masyarakat terhadap pelayanan dasar dapat didefinisikan melalui perspektif jarak maupun keterjangkauan layanan. Kabupaten Temanggung sampai pada tahun 2017 teridentifikasi beberapa pelayanan pendidikan belum sepenuhnya terpenuhi. Seperti cakupan akses layanan angka lama sekolah misalnya, yang berdasarkan analisis disebutkan masih rendah. Demikian pula halnya dengan akses pendidikan 12 tahun yang belum mampu tercapai secara optimal. Selain itu, akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi dan pendidikan inklusif di Kabupaten Temanggung juga masih rendah. Sedangkan di bidang kesehatan masih perlu peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia kesehatan.

Dengan ditetapkan UU No 6 tahun 2014 menjadi isu strategis yang sangat penting untuk dapat meningkatkan kapasitas pemerintah dan kelembagaan desa. Karena pemerintahan desa mempunyai peran strategis dalam pembangunan dan pemberdayaan serta sebagai tempat terdepan pelayanan yang bersentuhan dengan masyarakat. Sehingga peningkatan kapasitas SDM di desa menjadi sangat penting untuk membentuk pemerintahan desa dan masyarakat desa yang berkualitas.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan Indeks pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Temanggung perwujudan peningkatan aksesibilitas serta optimalisasi kualitas pelayanan baik itu di bidang kesehatan, pendidikan maupun kebutuhan dasar lainnya perlu untuk menjadi skala prioritas, mengingat sumberdaya manusia yang berkualitas merupakan wujud nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Ekonomi Kerakyatan

Parameter keberhasilan pembangunan Kabupaten Temanggung salah satunya diukur dengan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data lima tahun terakhir rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung tahun 2017 sebesar 4,68 persen. Namun pertumbuhan ekonomi lebih didominasi sektor konsumsi keluarga dan tidak diimbangi dengan peningkatan sektor investasi. Satu hal sisi positif perekonomian di Kabupaten Temanggung adalah rendahnya laju inflasi pada tahun 2017 sebesar 3,12 persen, tingkat inflasi tersebut dibawah pertumbuhan ekonomi Temanggung.

Pertumbuhan ekonomi dan daya saing akan lebih signifikan jika didorong pula peningkatan sarana dan prasarana penunjang produktivitas pertanian, dan pemasaran produksi pertanian yang difasilitasi dengan kemudahan akses pasar produk-produk pangan lokal yang sehat yang didukung dengan penyediaan jaringan informasi tepat guna hingga level desa guna memudahkan akses informasi pasar dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan pertanian lokal.

Dalam rangka pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah di Kabupaten Temanggung perlu distimulasi melalui penguatan peranan UMKM dalam peningkatan daya saing daerah, melalui Pembinaan dan pembekalan sumberdaya wirausahawan agar usaha mikro dan informal dapat meningkatkan produktivitas.

Selain sektor pertanian dan sektor UMKM, pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah juga ditingkatkan melalui sektor pariwisata, khususnya pariwisata yang berbudaya dan berwawasan lingkungan dengan mempertimbangkan potensi geografis dan sosiografis yang dimiliki Temanggung dan diharapkan dapat dikembangkan menjadi daya tarik serta sektor unggulan yang memiliki keterkaitan ke depan (*forward linkage*) dan ke belakang (*backward linkage*) yang kuat sebagai motor penggerak produktivitas perekonomian daerah. Pengembangan pariwisata juga diarahkan dengan menempatkan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan serta didukung interkoneksi antar desa, pemerintah, swasta, perguruan tinggi, komunitas dan pelaku wisata.

Bukan hanya daya saing ekonomi, namun juga ekonomi yang berkualitas, inklusif, dan merata untuk mengatasi kesenjangan antara wilayah desa dan kota. Untuk itu membuka akses antar wilayah menjadi isu penting, terutama untuk menghubungkan daerah-daerah yang jauh dari pusat-pusat pertumbuhan, transportasi kota-desa, pergantian antar moda, serta untuk meningkatkan kemudahan distribusi barang dan jasa dengan penyediaan akses infrastruktur berupa prasarana jalan dan jembatan, dilengkapi dengan transportasi publik yang memadai, jaringan komunikasi, dan jaringan energi yang penting.

4. Tata Kelola Pemerintahan dan kualitas pelayanan publik

Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan kualitas pelayanan publik yang berkualitas merupakan bagian dari manajemen pembangunan yang meliputi kualitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN), akuntabilitas kinerja pembangunan, serta pelayanan publik yang prima. Keterbukaan dan transparansi informasi serta komunikasi menjadi relevan untuk menciptakan pelayanan publik yang prima dalam perijinan, kemudahan berusaha, pelayanan administrasi kependudukan, hingga pelayanan pendidikan dan kesehatan .

Dengan dikembangkan teknologi informasi sebagai dasar pelayanan kepada masyarakat ruang komunikasi dengan masyarakat semakin terbuka dan mudah diakses sehingga dapat meningkatkan nilai aparatur sipil Negara, selain itu masyarakat dengan mudah dan cepat dapat memberikan masukan dan pengaduan.

Untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintah kabupaten Temanggung akan diukur dengan beberapa kriteria yaitu:

- a. Indeks Reformasi Birokrasi, belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Temanggung terlihat pada hasil penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 58,45 pada tahun 2017.
- b. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat, pada Tahun 2017 telah mencapai 82 dengan predikat B. Capain tersebut mencerminkan tingkat pelayanan publik yang akuntabel, transparansi, supremasi hukum, serta mampu menjawab pengguna layanan.
- c. Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Nilai AKIP Kabupaten Temanggung Tahun 2017 sebesar 58,32 dengan predikat CC. Dengan hasil tersebut masih diperlukan perbaikan secara bertahap agar dapat meningkat menjadi kategori B (baik), bahkan A (sangat baik).

- d. Pengukuran Nilai Kepatuhan Terhadap Standar Layanan. Pada tahun 2018 mendapatkan nilai 84,04 termasuk zona hijau, meskipun telah mengalami peningkatan diperlukan peningkatan secara terus menerus.
- e. Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) indeks ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien, dan berkesinambungan. Adapun hasil Pemerintah Kabupaten Temanggung telah melakukan tahapan penilaian evaluasi SPBE ini dan mendapatkan nilai kematangan 2.04 dengan predikat cukup dan masih diperlukan peningkatan.
- f. Indeks profesionalisme ASN digunakan untuk mengukur dan mewujudkan profesionalitas ASN.
- g. Indeks Manajemen Kearsipan (IMK) merupakan nilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan.

Tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih akan tercapai apabila didukung oleh ASN yang berkualitas dan profesional, serta kelembagaan yang efektif. Untuk itu peningkatan kompetensi dan kualitas ASN serta penempatan ASN sesuai dengan kompetensinya menjadi hal sangat penting yang harus dilakukan.



BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN



Tugu Pancasila Temanggung

TEMANINGUNG

MAREM GANDEM

TENTREM



Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan prioritas, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018–2023 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun dengan berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan manusia dan pemberdayaan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah yang berkelanjutan, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.

Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dengan pendekatan teknokratis, politis, dan partisipatif maka dirumuskan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018–2023.

A. Visi Pembangunan Daerah

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan. Visi pembangunan daerah merupakan Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah dan menjadi arah pembangunan yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Temanggung periode RPJMD Tahun 2018–2023 adalah **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”**.

Penjabaran dari Visi tersebut antara lain adalah:

Tentrem	: Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
Marem	: Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata.
Gandem	: Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

B. Misi Pembangunan Daerah

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas;

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1)Kecepatan, 2)Ketepatan, 3)Keramahan, dan 4)Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

C. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program. Tujuan dan sasaran dirumuskan untuk mendukung atau mewujudkan misi RPJMD. Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Temanggung dalam RPJMD Tahun 2018–2023 berdasarkan pada visi dan misi yang telah ditetapkan.

1. Tujuan dan Sasaran Misi 1 “Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya”

Tujuan yang akan dicapai pada Misi 1 (pertama) adalah “Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya”, dengan memperhatikan 2 (dua) indikator tujuan yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Angka Kemiskinan, yang sasarannya meliputi:

- a. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang Pendidikan;
- b. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang Kesehatan;
- c. Meningkatnya budaya literasi masyarakat;
- d. Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga;
- e. Meningkatnya pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal;

- f. Meningkatnya nilai kehidupan bermasyarakat dan wawasan kebangsaan;
- g. Meningkatnya Penanganan, Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- h. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk;
- i. Meningkatnya pengarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak;

2. Tujuan dan Sasaran Misi 2 (Kedua) “Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan”.

Tujuan Pembangunan Misi 2 adalah “Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan”, yang pencapaiannya dapat diukur melalui Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Pendapatan Perkapita dan Tingkat Pengangguran Terbuka. Adapun sasarannya meliputi:

- a. Meningkatnya kesejahteraan petani;
- b. Meningkatnya kedaulatan pangan;
- c. Meningkatnya pariwisata daerah;
- d. Meningkatnya investasi sektor riil;
- e. Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah;
- f. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

3. Tujuan dan Sasaran Misi 3 (Ketiga) “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas”

Tujuan pembangunan dari Misi Ketiga adalah “Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas”, dengan memperhatikan 2 (dua) indikator tujuan yaitu Indeks Reformasi Birokrasi dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Adapun sasarannya meliputi:

- a. Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan;
- b. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa;
- c. Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
- d. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana.

Masing-masing sasaran pada setiap misi telah diukur dengan indikator sasaran yang secara rinci dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 5.1.

Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2018-2023

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM DAN GANDEM				
MISI 1 : Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter dan berdaya				
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	URUSAN / BIDANG
Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya.	1. Indek Pembangunan Manusia (IPM) 2. Angka kemiskinan	1. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang Pendidikan	1. Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS) 2. Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)	Pendidikan
		2. Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga	3. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Pemuda dan Olah Raga
		3. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang Kesehatan	4. Angka Harapan Hidup (AHH)	Kesehatan
			5. Angka Kematian Ibu (AKI)	
			6. Angka Kematian Bayi (AKB)	
			7. Prevalensi balita gizi buruk	
			8. Persentase rumah tangga yang memiliki jamban	
		9. Indeks Kinerja RSUD	10. Persentase peminjam di perpustakaan	Perpustakaan
			5. Meningkatnya pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal	11. Persentase pelestarian cagar budaya
		12. Persentase kelompok seni budaya yang aktif		
		6. Meningkatnya nilai kehidupan bermasyarakat dan wawasan kebangsaan	13. Indek Gotong Royong	Kesatuan Bangsa dan Politik
			14. Indek Toleransi	
		7. Meningkatnya Penanganan, Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	15. Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Sosial
			16. Persentase rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial di luar panti sosial	

		8. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	17. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Pengendalian Penduduk
		9. Meningkatnya pengarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	18. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			19. Persentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	

MISI 2 : Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	URUSAN / BIDANG	
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan	3. Pertumbuhan Ekonomi	1. Meningkatnya kesejahteraan petani	20. Nilai Tukar Petani (NTP)	Pertanian	
		2. Meningkatnya kedaulatan pangan	21. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Pangan	
	4. Inflasi	3. Meningkatnya pariwisata daerah	22. Tingkat Konsumsi Ikan		Perikanan
			23. Pertumbuhan jumlah wisatawan		Pariwisata
	5. Pendapatan PerKapita	4. Meningkatnya investasi sektor riil	24. Lama tinggal wisatawan		
			25. Kontribusi sektor perindustrian		Perindustria
			26. Kontribusi sektor perdagangan		Perdagangan
			27. Persentase Koperasi sehat		Koperasi dan UKM
			28. Persentase UKM aktif		
			29. Pertumbuhan investasi daerah		Penanaman Modal
			30. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)		Tenaga
	6. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5. Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah	31. Persentase Infrastruktur Kondisi Baik		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			32. Persentase pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang		

			33. Persentase kawasan kumuh perkotaan	Perumahan dan Kawasan Permukiman
			34. Persentase menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	Perhubungan
		6. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	35. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Lingkungan Hidup

MISI 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas

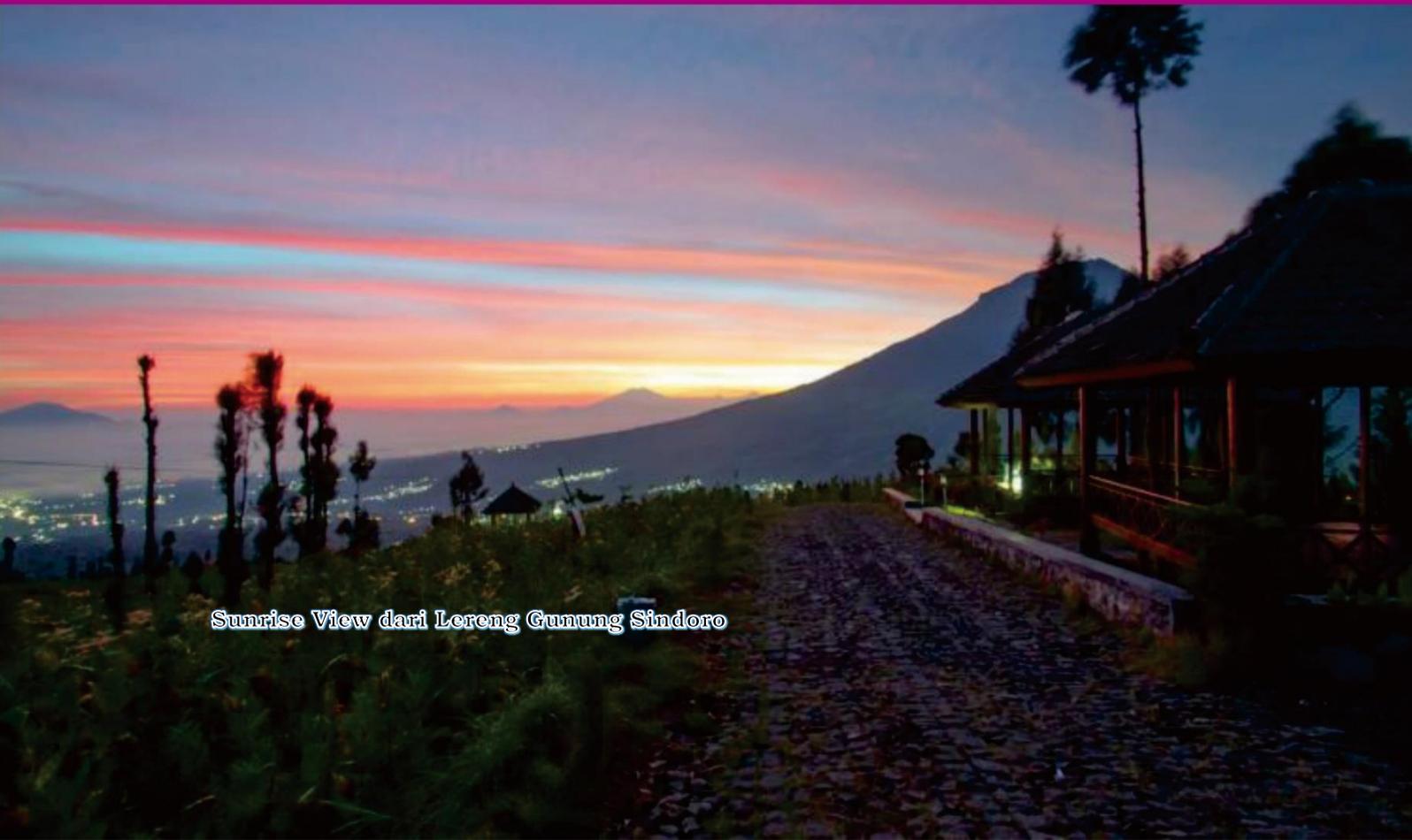
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	URUSAN / BIDANG
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.	7. Indek Reformasi Birokrasi 8. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	1. Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	36. Tingkat Konsistensi Program Pembangunan	Perencanaan
			37. Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Keuangan
			38. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	Administrasi Pemerintahan
			39. Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu	
			40. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	
			41. Indeks Kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Pengawasan
			42. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	
			43. Indeks Profesionalisme ASN	Kepegawaian dan Diklat
			44. Indeks Manajemen Kearsipan	Kearsipan
45. Persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu	Sekretariat Dewan			

		2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	46. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Komunikasi dan Informatika
			47. Nilai Keterbukaan Informasi Publik	
			48. Nilai Tingkat Kepatuhan Penyelenggara Layanan Publik	Adminduk
		3. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa	49. Rata-rata Nilai Indeks Desa Membangun	Pemberdayaan Masyarakat
			50. Persentase desa yang berpredikat mandiri	
		4. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	51. Indek Rasa Aman	Ketentraman dan Ketertiban Umum
		5. Meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana	52. Cakupan Desa tangguh bencana	Sosial-Kebencanaan



BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN



Sunrise View dari Lereng Gunung Sindoro

TEMANGGUNG

MAREM GANDEM

TENTREM



A. Strategi

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan panduan dalam menentukan program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran pada setiap misi dijabarkan sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir dan selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan di berbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertindak sesuai dengan situasi.

Dengan ukuran tujuan pada misi ini yaitu terwujud masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya, maka beberapa strategi yang akan dilakukan yaitu:

1. Memaksimalkan penyediaan layanan dasar infrastruktur, pendidikan dan kesehatan;
2. Peningkatan kompetensi dan daya saing generasi muda;
3. Keberpihakan kepada masyarakat miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
4. Peningkatan cakupan mutu dan pelayanan KB;
5. Penguatan pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak.

2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang di kelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk di kembangkan oleh Pemerintah Daerah. Dalam

hal ini berupa sektor/komoditas di Kabupaten Temanggung. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan. Dengan tujuan pada misi ini yaitu meningkatnya perekonomian daerah, dengan beberapa strategi yang akan dilakukan:

1. Memaksimalkan teknologi yang mampu menghasilkan produk pertanian yang berkualitas unggul;
2. Mengembangkan potensi wisata dan daerah tujuan wisata;
3. Mengoptimalkan *entrepreneurship* masyarakat dan promosi investasi;
4. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dengan memperhatikan kesesuaian rencana tata ruang;
5. Peningkatan kualitas lingkungan yang berkelanjutan.

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas;

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana pembangunan (*development*) dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*), yang meliputi akuntabilitas, pengawasan, daya tanggap, profesionalisme, efisiensi dan efektifitas, transparansi, kesetaraan, wawasan ke depan, dan partisipasi merupakan pedoman utama dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1) Kecepatan, 2) Ketepatan, 3) Keramahan, dan 4) Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan loyalitas

masyarakat kepada organisasi (institusi) yang bersangkutan. Dengan tujuan pada misi ini yaitu terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas berbasis teknologi dan informasi, dengan beberapa strategi yang akan dilakukan:

- 1) Peningkatan kapasitas, manajemen dan kinerja pemerintah daerah dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi;
- 2) Peningkatan kapasitas, manajemen dan kinerja pemerintah desa serta partisipasi masyarakat;
- 3) Inovasi percepatan dan perbaikan pelayanan publik;
- 4) Peningkatan peranserta masyarakat dalam mewujudkan nilai wawasan kebangsaan, ketrentaman dan ketertiban umum;
- 5) Optimalisasi mitigasi bencana.

Penjabaran strategi pada masing-masing misi, tujuan, dan sasaran dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 6.1.

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pembangunan Daerah Tahun 2018-2023

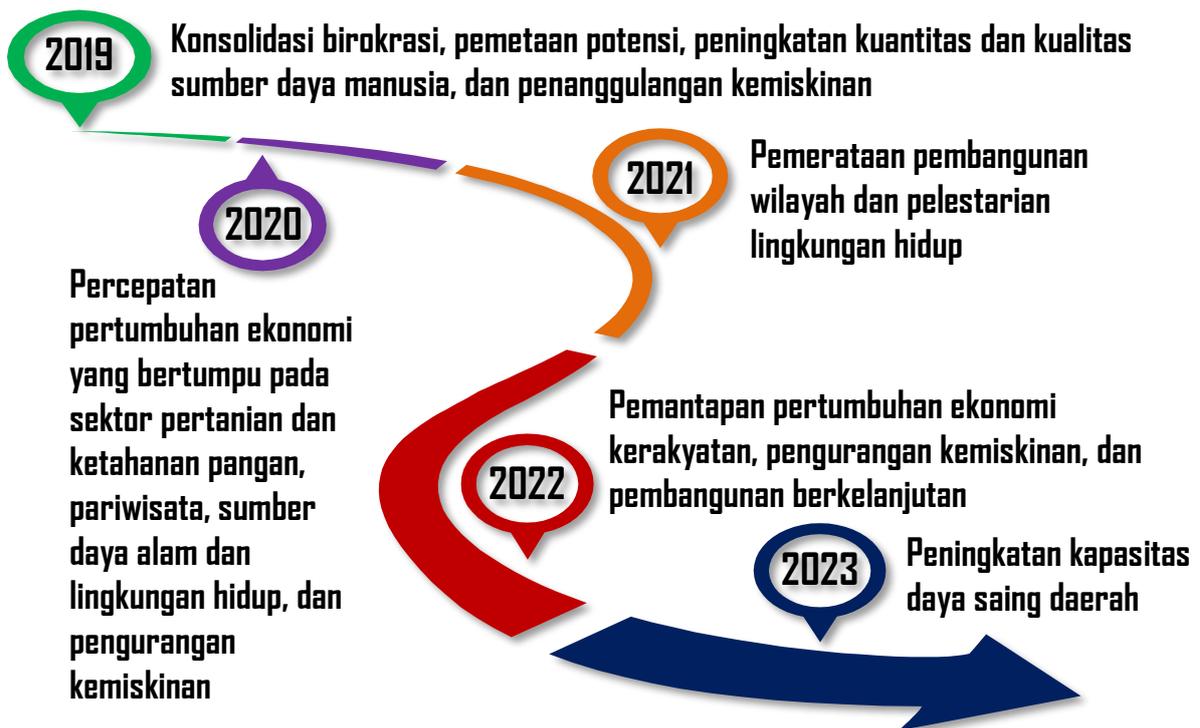
VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM DAN GANDEM		
MISI 1 : MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS, BERKARAKTER DAN BERDAYA		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya	1. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang Pendidikan	Memaksimalkan penyediaan layanan dasar infrastruktur pendidikan dan kesehatan
	2. Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga	
	3. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang Kesehatan	
	4. Meningkatnya budaya literasi masyarakat	
	5. Meningkatnya pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal	Peningkatan kompetensi dan daya saing generasi muda
	6. Meningkatnya nilai kehidupan bermasyarakat dan wawasan kebangsaan	Peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan nilai wawasan kebangsaan
	7. Meningkatnya Penanganan, Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Keberpihakan kepada masyarakat miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial
	8. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Peningkatan cakupan mutu dan pelayanan KB
	9. Meningkatnya pengarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	Penguatan pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak
MISI 2 : MEWUJUDKAN PEMBERDAYAAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERBASIS POTENSI UNGGULAN DAERAH DAN BERKELANJUTAN		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan	1. Meningkatnya kesejahteraan petani	Memaksimalkan teknologi yang mampu menghasilkan produk pertanian yang berkualitas unggul
	2. Meningkatnya kedaulatan pangan	

	3. Meningkatnya pariwisata daerah	Mengembangkan potensi wisata dan daerah tujuan wisata
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
	4. Meningkatnya investasi sektor riil	Mengoptimalkan kewirausahaan masyarakat dan promosi investasi
	5. Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dengan memperhatikan kesesuaian rencana tata ruang
	6. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Peningkatan kualitas lingkungan yang berkelanjutan
MISI 3 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	1. Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	Peningkatan kapasitas, manajemen dan kinerja pemerintah daerah dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi
	2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Inovasi percepatan pelayanan publik
	3. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa	Peningkatan kapasitas, manajemen dan kinerja pemerintah desa serta partisipasi masyarakat
	4. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum
	5. Meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana	Optimalisasi mitigasi bencana

B. Arah Kebijakan

1. Arah Kebijakan Pembangunan Tahunan dan Program Prioritas dalam RPJMD Tahun 2018-2023

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sejalan dengan visi dan misi pembangunan Temanggung lima tahun ke depan, ditetapkan arah kebijakan pembangunan. Arah kebijakan ini diharapkan menjadi pedoman dan acuan penentuan fokus dan prioritas pembangunan setiap tahunnya. Arah kebijakan pembangunan dimulai pada tahun 2019 sebagai tahun pertama pelaksanaan RPJMD Tahun 2018-2023.



Gambar 6.1.
Arah Kebijakan Pembangunan Tahunan dalam RPJMD
Tahun 2018-2023

Sedangkan secara rinci arah kebijakan pembangunan selama 5(lima) tahun dibagi pada tahapan tahunan sebagai berikut:

1) Arah Kebijakan Tahun 2019

Tahun 2019 merupakan tahun pertama untuk pembangunan jangka menengah Kabupaten Temanggung lima tahun ke depan. Pembangunan Tahun 2019 ditujukan untuk konsolidasi birokrasi, pemetaan potensi, peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, dan penanggulangan kemiskinan, dengan prioritas sebagai berikut:

- a) Pemenuhan kebutuhan pendidikan dasar masyarakat;
- b) Pemenuhan kebutuhan kesehatan dasar masyarakat;
- c) Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas Sumber Daya Manusia;
- d) Penanggulangan kemiskinan.

2) **Arah Kebijakan Tahun 2020**

Pembangunan tahun 2020 ditujukan pada percepatan pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada sektor pertanian dan ketahanan pangan, pariwisata, sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan pengurangan kemiskinan, dengan prioritas sebagai berikut:

- a) Penguatan ketahanan pangan;
- b) Penguatan daya saing ekonomi dan pariwisata daerah;
- c) Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- d) Percepatan Pengurangan kemiskinan.

3) **Arah Kebijakan Tahun 2021**

Pada tahun 2021 ini pembangunan ditujukan pada pemerataan pembangunan wilayah dan pelestarian lingkungan hidup, dengan prioritas sebagai berikut:

- a) Reformasi birokrasi (*good governance*);
- b) Percepatan pengurangan kemiskinan;
- c) Pemerataan pembangunan wilayah;
- d) Peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap tata ruang dan lingkungan hidup.

4) **Arah Kebijakan Tahun 2022**

Kebijakan pada tahun 2022 ditujukan untuk pemantapan pertumbuhan ekonomi kerakyatan, pengurangan kemiskinan, dan pembangunan berkelanjutan, dengan prioritas sebagai berikut:

- a) Optimalisasi reformasi birokrasi (*good governance*);
- b) Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan;
- c) Pembangunan wilayah berkelanjutan;
- d) Percepatan pembangunan ekonomi kerakyatan.

5) **Arah Kebijakan Tahun 2023**

Pada akhir tahun periode RPJMD Kabupaten Temanggung ditujukan untuk peningkatan kapasitas daya saing daerah, dengan prioritas sebagai berikut:

- a) Pemantapan reformasi birokrasi (*good governance*) dan jejaring (*networking*);
- b) Pemantapan pengurangan kemiskinan;
- c) Pemantapan kapasitas dan daya saing ekonomi kerakyatan.

Strategi dan arahan kebijakan tersebut di atas dituangkan dalam rumusan program prioritas sebagai berikut :

1. Program peningkatan akses pendidikan SD;
2. Program peningkatan akses pendidikan SMP;
3. Program pelayanan kesehatan;
4. Program pengelolaan dan pengembangan perpustakaan;
5. Program pembinaan kepemudaan;
6. Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga;
7. Program pengelolaan kebudayaan;
8. Program pengembangan wawasan kebangsaan;
9. Program penanganan fakir miskin;
10. Program perlindungan dan jaminan sosial;
11. Program pengendalian penduduk dan Informasi keluarga;
12. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak;
13. Program peningkatan produktivitas, penerapan teknologi dan agri bisnis tanaman pangan;
14. Program peningkatan produktivitas, penerapan teknologi dan agri bisnis tanaman hortikultura;
15. Program peningkatan produktivitas ternak dan hasil ternak;
16. Program peningkatan ketahanan pangan;
17. Program pengembangan perikanan;
18. Program pengembangan pariwisata;
19. Program perencanaan, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
20. Program penataan kelembagaan, tata laksana dan peningkatan pelayanan publik;
21. Program peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan;
22. Program pengelolaan keuangan daerah;
23. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
24. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah;
25. Program pengelolaan aplikasi informatika;
26. Program pengembangan kelembagaan masyarakat dan desa;
27. Program peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk;
28. Program peningkatan pelayanan pencatatan sipil;
29. Program pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum; dan
30. Program pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;
31. Program pengembangan kawasan strategis.

Sedangkan program-program yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan pada masing-masing urusan pemerintahan adalah sebagai berikut:

1. Bidang Pendidikan
 - a. Program peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. Program peningkatan akses pendidikan Sekolah Dasar;
 - c. Program peningkatan mutu pendidikan SD;
 - d. Program peningkatan akses pendidikan SMP;
 - e. Program peningkatan mutu pendidikan SMP;
 - f. Program peningkatan akses pendidikan PAUD;
 - g. Program peningkatan mutu PAUD; dan
 - h. Program peningkatan mutu pendidikan nonformal.
2. Bidang Kesehatan
 - a. Program pengembangan sumber daya kesehatan;
 - b. Program kesehatan masyarakat;
 - c. Program pencegahan dan pengendalian penyakit;
 - d. Program pelayanan kesehatan;
 - e. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin;
 - f. Program peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit; dan
 - g. Program peningkatan kualitas pelayanan kesehatan rumah sakit.
3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - a. Program penyelenggaraan jalan;
 - b. Program penyelenggaraan jembatan;
 - c. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya;
 - d. Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong;
 - e. Program pembinaan jasa konstruksi;
 - f. Program penyelenggaraan tata ruang; dan
 - g. Program pengembangan kawasan strategis.
4. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 - a. Program pengembangan perumahan dan permukiman; dan
 - b. Program pengembangan dan penataan kota.
5. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
 - a. Program pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - b. Program peningkatan perlindungan masyarakat;
 - c. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran;
 - d. Program pendidikan politik masyarakat;
 - e. Program peningkatan kewaspadaan nasional;
 - f. Program ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan, dan ekonomi;
 - g. Program pengembangan wawasan kebangsaan; dan
 - h. Program pembinaan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba.
6. Bidang Sosial
 - a. Program perlindungan dan jaminan sosial;

- b. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial;
 - c. Program pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial;
 - d. Program penanganan fakir miskin;
 - e. Program penanganan tanggap darurat bencana;
 - f. Program pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;
 - g. Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana; dan
 - h. Program pengelolaan Taman Makam Pahlawan.
7. Bidang Tenaga Kerja
- a. Program perluasan kesempatan kerja;
 - b. Program perlindungan tenaga kerja dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan; dan
 - c. Program peningkatan produktivitas tenaga kerja.
8. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- a. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak.
9. Bidang Ketahanan Pangan
- a. Program peningkatan ketahanan pangan.
10. Bidang Pertanahan
- a. Program Administrasi Pertanahan.
11. Bidang Lingkungan Hidup
- a. Program perlindungan dan konservasi lingkungan hidup;
 - b. Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - c. Program pentaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup; dan
 - d. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan.
12. Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- a. Program peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk;
 - b. Program peningkatan pelayanan pencatatan sipil; dan
 - c. Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data.
13. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- a. Program pengembangan kelembagaan masyarakat dan desa;
 - b. Program pembinaan dan fasilitasi perencanaan, evaluasi, pengelolaan keuangan dan pembangunan desa;
 - c. Program pengembangan lembaga ekonomi masyarakat/desa dan pemberdayaan kawasan perdesaan; dan
 - d. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan pengelolaan aset desa.
14. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- a. Program pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
 - b. Program kepesertaan dan peningkatan pelayanan KB; dan

- c. Program peningkatan kualitas dan pembinaan ketahanan keluarga.
- 15. Bidang Perhubungan
 - a. Program pengelolaan lalu lintas dan parkir;
 - b. Program peningkatan kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor; dan
 - c. Program peningkatan pelayanan angkutan.
- 16. Bidang Komunikasi dan Informatika
 - a. Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik; dan
 - b. Program pengelolaan aplikasi informatika.
- 17. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 - a. Program pengembangan koperasi dan UKM.
- 18. Bidang Penanaman Modal
 - a. Program pengkajian potensi investasi dan pengembangan kinerja;
 - b. Program peningkatan iklim investasi;
 - c. Program peningkatan kualitas pelayanan perizinan; dan
 - d. Program pengawasan, pengendalian, pengaduan dan advokasi perizinan.
- 19. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
 - a. Program pembinaan kepemudaan; dan
 - b. Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga.
- 20. Bidang Statistik
 - a. Program pengembangan data Statistik.
- 21. Bidang Persandian
 - a. Program penyelenggaraan pengamanan informasi pemerintah daerah.
- 22. Bidang Kebudayaan
 - a. Program pengelolaan kebudayaan.
- 23. Bidang Perpustakaan
 - a. Program pengelolaan dan pengembangan perpustakaan.
- 24. Bidang Kearsipan
 - a. Program pengelolaan dan pelestarian arsip daerah.
- 25. Bidang Kelautan dan Perikanan
 - a. Program pengembangan perikanan.
- 26. Bidang Pariwisata
 - a. Program pengembangan pariwisata.
- 27. Bidang Pertanian
 - a. Program peningkatan produktivitas, penerapan teknologi dan agribisnis Tanaman Pangan;
 - b. Program peningkatan produktivitas penerapan teknologi dan agribisnis Hortikultura;
 - c. Program peningkatan produktivitas penerapan teknologi dan agribisnis Perkebunan;
 - d. Program pemberdayaan SDM dan kelembagaan pertanian;

- e. Program peningkatan produktivitas ternak dan hasil ternak;
 - f. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan; dan
 - g. Program pemenuhan pangan asal hewan.
28. Bidang Perdagangan
- a. Program pengembangan perdagangan; dan
 - b. Program pengelolaan pasar.
29. Bidang Perindustrian
- a. Program Pengembangan Industri.
30. Bidang Transmigrasi
- a. Program pemberdayaan transmigran.
31. Fungsi penunjang bidang Perencanaan
- a. Program perencanaan, evaluasi, dan informasi pembangunan daerah;
 - b. Program perencanaan dan evaluasi bidang ekonomi, sumber daya alam dan infrastruktur; dan
 - c. Program perencanaan dan evaluasi bidang pembangunan manusia dan pemerintahan.
32. Fungsi penunjang bidang Keuangan
- a. Program perencanaan, pendataan dan pelayanan pendapatan daerah;
 - b. Program pengelolaan data dan penetapan pendapatan daerah;
 - c. Program peningkatan pendapatan daerah;
 - d. Program pengelolaan keuangan daerah;
 - e. Program pengelolaan aset; dan
 - f. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah.
33. Fungsi penunjang bidang Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan
- a. Program pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - b. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur; dan
 - c. Program pembinaan, kesejahteraan aparatur, dan informasi kepegawaian.
34. Fungsi penunjang bidang Penelitian dan Pengembangan
- a. Program penelitian dan pengembangan.
35. Fungsi penunjang bidang Pengawasan
- a. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah; dan
 - b. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.
36. Fungsi penunjang lainnya bidang Administrasi Pemerintahan
- a. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah;
 - b. Program peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan;
 - c. Program penyusunan dan penataan produk hukum;
 - d. Program pengembangan dan pengendalian perekonomian daerah;
 - e. Program pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan;

- f. Program layanan pengadaan;
 - g. Program pengembangan keagamaan, kesejahteraan rakyat dan bina mental;
 - h. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah;
 - i. Program penataan kelembagaan, tatalaksana dan peningkatan pelayanan publik;
 - j. Program penyelenggaraan kehumasan;
 - k. Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan;
 - l. Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan;
 - m. Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan;
 - n. Program peningkatan ketrentaman dan ketertiban masyarakat di Kecamatan;
 - o. Program peningkatan sarana dan prasarana lingkungan kelurahan; dan
 - p. Program pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan kelurahan.
37. Pendukung Urusan Pemerintahan di semua Perangkat Daerah
- a. Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah;
 - b. Program pelayanan administrasi perkantoran;
 - c. Program peningkatan sarana prasarana aparatur; dan
 - d. Program peningkatan disiplin aparatur.

2. Arah Pengembangan Wilayah berbasis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Temanggung

Sesuai amanat RPJPD Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 dalam mewujudkan visi pembangunan daerah keempat dan kelima, yaitu: (4) mewujudkan ketersediaan dan pemerataan prasarana dan sarana pelayanan dasar dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan mobilitas ekonomi dan non ekonomi, pengembangan kawasan serta pengurangan kesenjangan antar wilayah dan (5) mewujudkan pembangunan daerah secara berkelanjutan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara lestari berbasis pada partisipasi aktif segenap pemangku kepentingan dan memperhatikan dimensi tata ruang, maka strategi dan kebijakan pembangunan dan pengembangan wilayah dalam Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 tetap memperhatikan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031.

Pembangunan dan pengembangan wilayah di Kabupaten Temanggung tidak lepas dari pembangunan dan pengembangan wilayah skala regional di Provinsi Jawa Tengah. Arah pengembangan wilayah Provinsi Jawa Tengah ditujukan untuk mewujudkan ruang wilayah yang berdaya saing berbasis pertanian, industri dan pariwisata dengan memperhatikan kelestarian alam dan pemerataan pembangunan wilayah yang berkelanjutan.

Kebijakan pengembangan wilayah Provinsi Jawa Tengah dibagi menjadi 5 (lima) poros pengembangan, dan pengembangan wilayah Kabupaten Temanggung masuk dalam 3 (tiga) poros pengembangan, yaitu:

- a. Poros Pengembangan Selatan-Selatan yang membentang dari BARLINGMASCAKEB-PURWOMANGGUNG (Kabupaten Purworejo, Wonosobo, Magelang, Kota Magelang dan Kabupaten Temanggung)-SUBOSUKAWONOSRATEN dengan mempercepat pembangunan di Koridor Selatan, sehingga dapat mengurangi ketimpangan ekonomi wilayah;
- b. Poros pengembangan Utara-Selatan yang menghubungkan BREGASMALANG dengan BARLINGMASCAKEB, PETALONG dengan PURWOMANGGUNG, KEDUNGSEPUR dengan SUBOSUKAWONOSRATEN dan PURWOMANGGUNG, serta WANARAKUTI dan BANGLOR dengan SUBOSUKAWONOSRATEN dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi wilayah;
- c. Poros pengembangan Bagian Tengah Jawa Tengah diarahkan untuk meningkatkan fungsi konservasi di wilayah bagian tengah Provinsi Jawa Tengah (hulu DAS) pada daerah Gunung Slamet – Sindoro – Sumbing – Merbabu – Merapi – Lawu.

Sedangkan strategi pengembangan wilayah Provinsi Jawa Tengah yang dapat diterapkan di Kabupaten Temanggung, antara lain:

1. Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru;
2. Peningkatan keterhubungan perkotaan-perdesaan;
3. Pengembangan prasarana wilayah;
4. Peningkatan pengelolaan kawasan lindung;
5. Pemertahanan lahan pertanian;
6. Pengembangan kawasan industri;
7. Pengembangan destinasi dan daya tarik wisata strategis; dan
8. Pengembangan sistem permukiman perkotaan yang kompak.

Kebijakan pengembangan struktur ruang Kabupaten Temanggung tetap memperhatikan struktur ruang Provinsi Jawa Tengah dengan pengembangan sarana dan prasarana untuk mempercepat pertumbuhan perekonomian wilayah dengan mewujudkan keterhubungan/ koneksitas antar Pusat Kegiatan baik Nasional, Wilayah dan Lokal (PKN, PKW dan PKL) dan di Kabupaten Temanggung hanya ada Pusat Kegiatan Lokal (PKL).

Kebijakan pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya di Kabupaten Temanggung tetap memperhatikan kebijakan ditingkat Provinsi Jawa Tengah. Upaya Kabupaten Temanggung tetap memperhatikan kebijakan pengelolaan kawasan lindung yang dilakukan oleh Provinsi Jawa Tengah, yaitu:

- a. Rehabilitasi dan konservasi kawasan yang berfungsi lindung baik hutan dan non hutan berbasis Daerah Aliran Sungai (DAS) ;

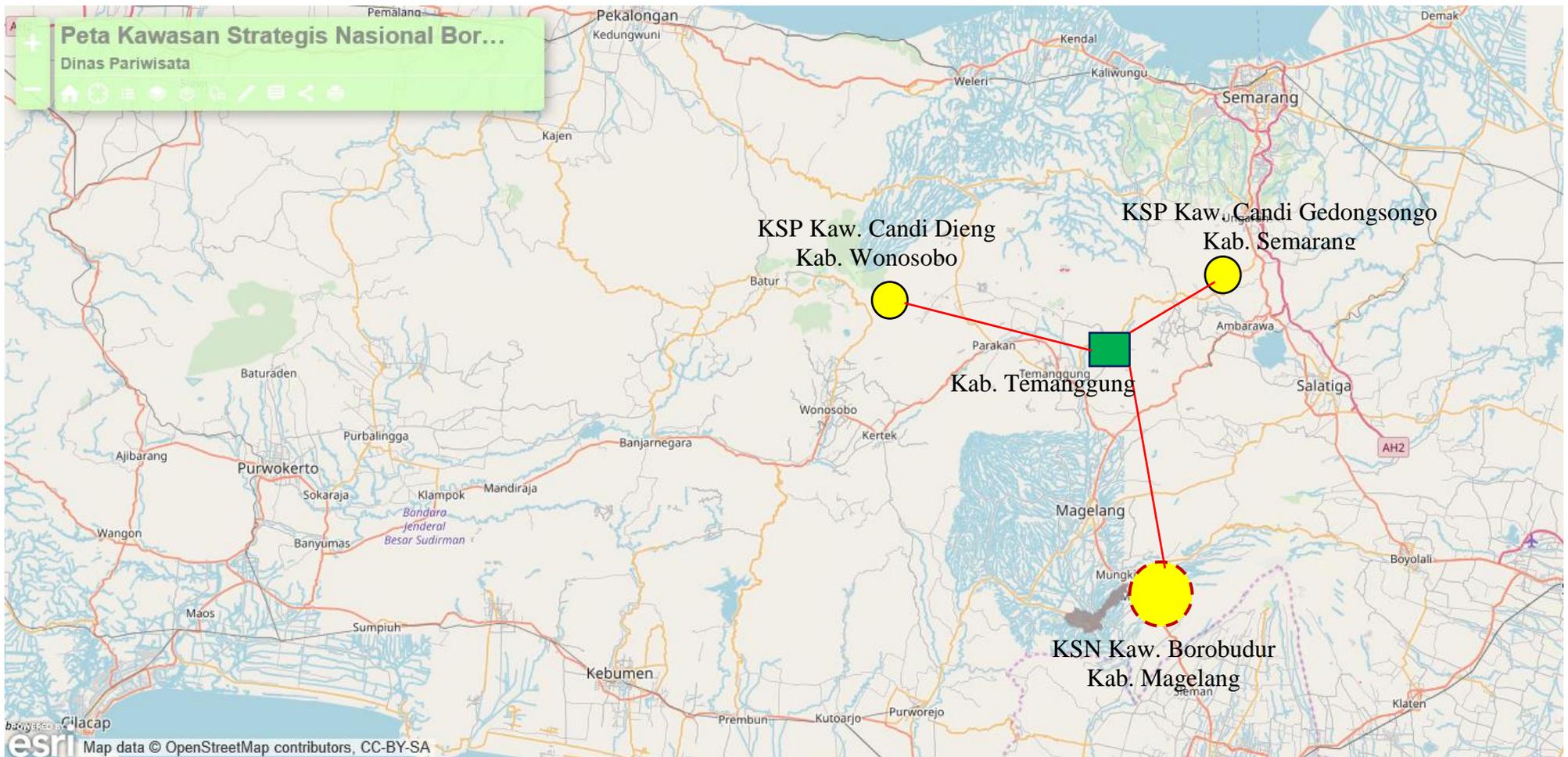
- b. Peningkatan luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan perkotaan sebesar 30 % yang terdiri RTH Publik minimal 20 % dan RTH Privat minimal 10 %;
- c. Rehabilitasi lahan kritis;
- d. Rehabilitasi daerah resapan air guna mempertahankan ketersediaan air; dan
- e. Peningkatan upaya mitigasi pada kawasan rawan bencana.

Sedangkan upaya Kabupaten Temanggung dalam pengelolaan kawasan budidaya tetap memperhatikan upaya pengelolaan yang dilakukan oleh Provinsi Jawa Tengah, yaitu:

- a. Rehabilitasi dan pemantapan kawasan hutan produksi;
- b. Pemantapan dan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
- c. Pengembangan kawasan agropolitan;
- d. Pengembangan kawasan industri;
- e. Pengembangan kawasan pariwisata; dan
- f. Peningkatan kawasan permukiman.

Kebijakan pengembangan kawasan strategis Provinsi Jawa Tengah didasarkan atas fungsi keutamaan kawasan yang mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Provinsi terhadap ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan bagi kepentingan tingkat/skala Provinsi. Kawasan strategis Provinsi terbagi dalam 3 (tiga) sudut kepentingan yang mampu memberikan keterhubungan wilayah dengan Kabupaten Temanggung, yaitu:

1. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, letak/ posisi Kabupaten Temanggung berada diantara Kawasan Strategis Nasional (KSN) Kawasan Borobudur dan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kawasan Candi Dieng serta Candi Gedongsongo;
2. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah, letak/ posisi Kabupaten Temanggung masuk dalam kawasan strategis pariwisata terpadu Kawasan Borobudur-Dieng-Kebumen dan sekitarnya; dan
3. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, lokasi kawasan strategis yang berada di Kabupaten Temanggung adalah KSP Kawasan Gunung Sindoro-Sumbing dan Kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS).

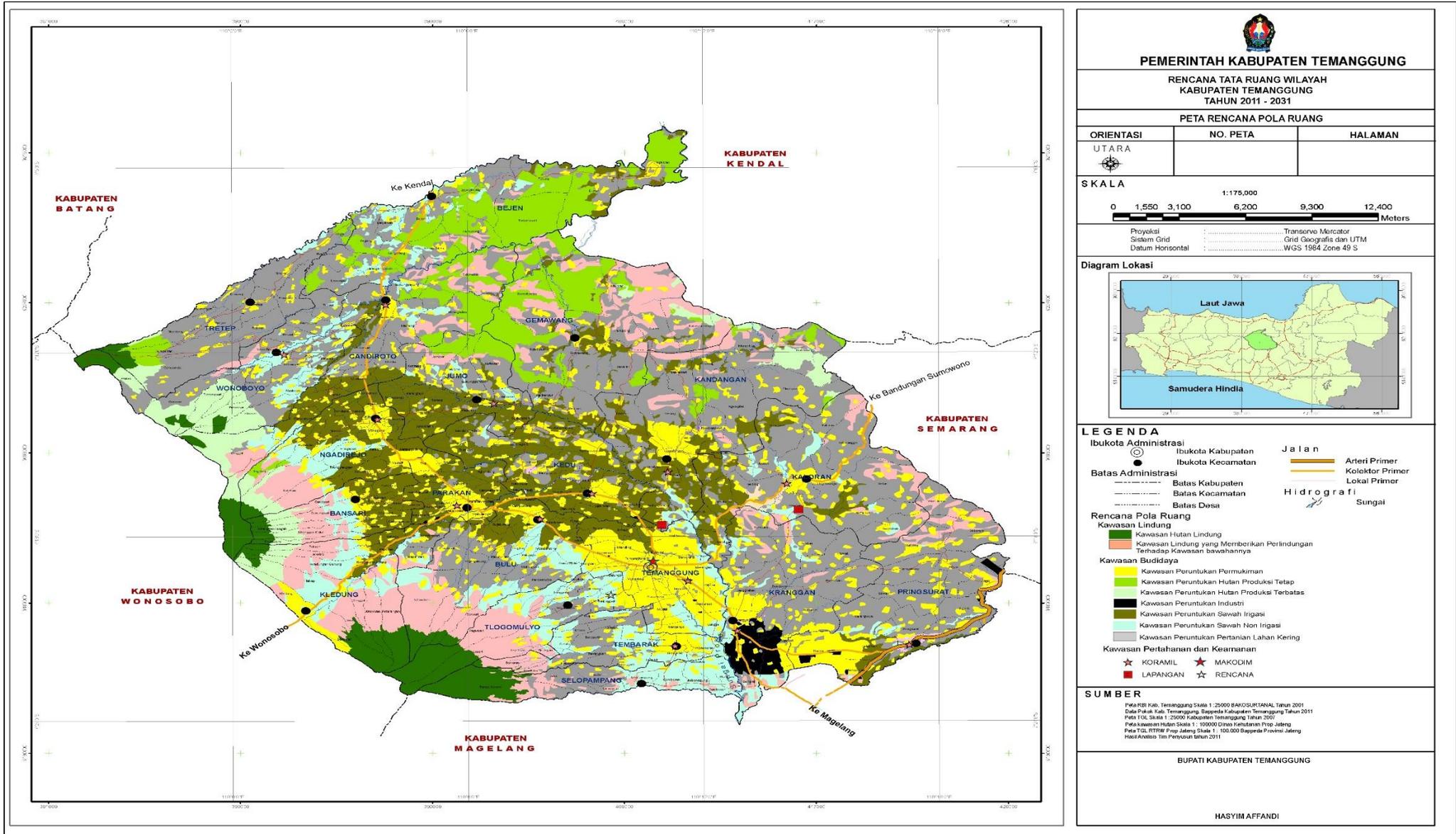


Gambar 6.2.
Peta Posisi Kabupaten Temanggung sangat Strategis
Terhadap KSN. Kawasan Borobudur, KSP. Candi Dieng dan KSP. Candi Gedongsongo

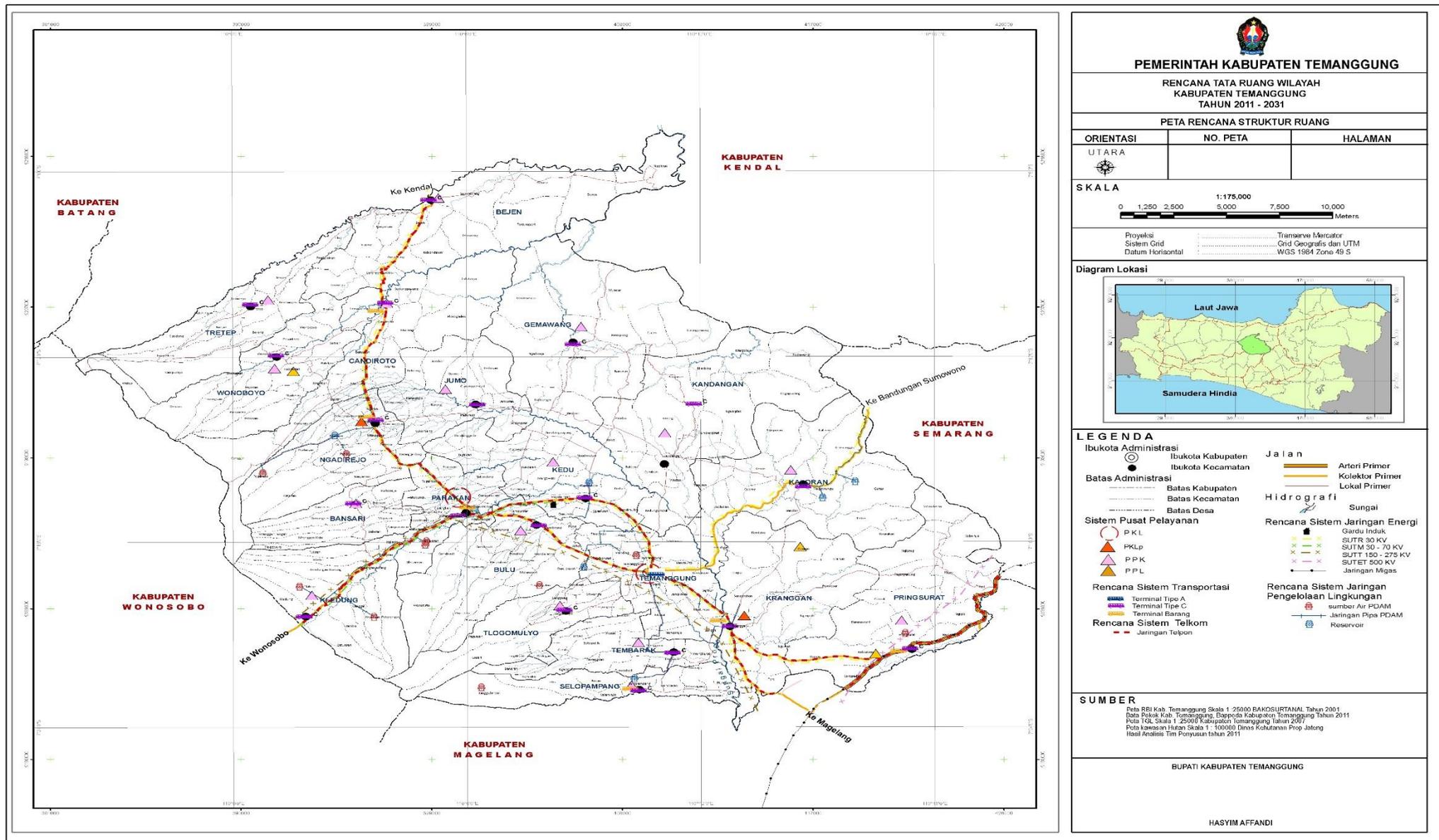
Strategi dan kebijakan pembangunan dan pengembangan wilayah Kabupaten Temanggung tetap memperhatikan strategi dan kebijakan Provinsi Jawa Tengah dan dilaksanakan secara terpadu sehingga mampu menghemat investasi sarana dan prasarana dasar. Diharapkan pembangunan dan pengembangan wilayah yang direncanakan mampu menjadikan magnet atau motor penggerak dan memberikan efek ikutan (*trickle down effect*) ke bawah sehingga mampu menggerakkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Temanggung. Untuk mendukung kebijakan Nasional (KSN) dan Provinsi (KSP), salah satunya dengan pembangunan jalan lingkar Parakan yang akan dimulai dalam RPJMD ini sehingga aksesibilitas barang dan jasa serta warga masyarakat semakin mudah dan nyaman.

a. Pengembangan Wilayah Terpadu di Kabupaten Temanggung

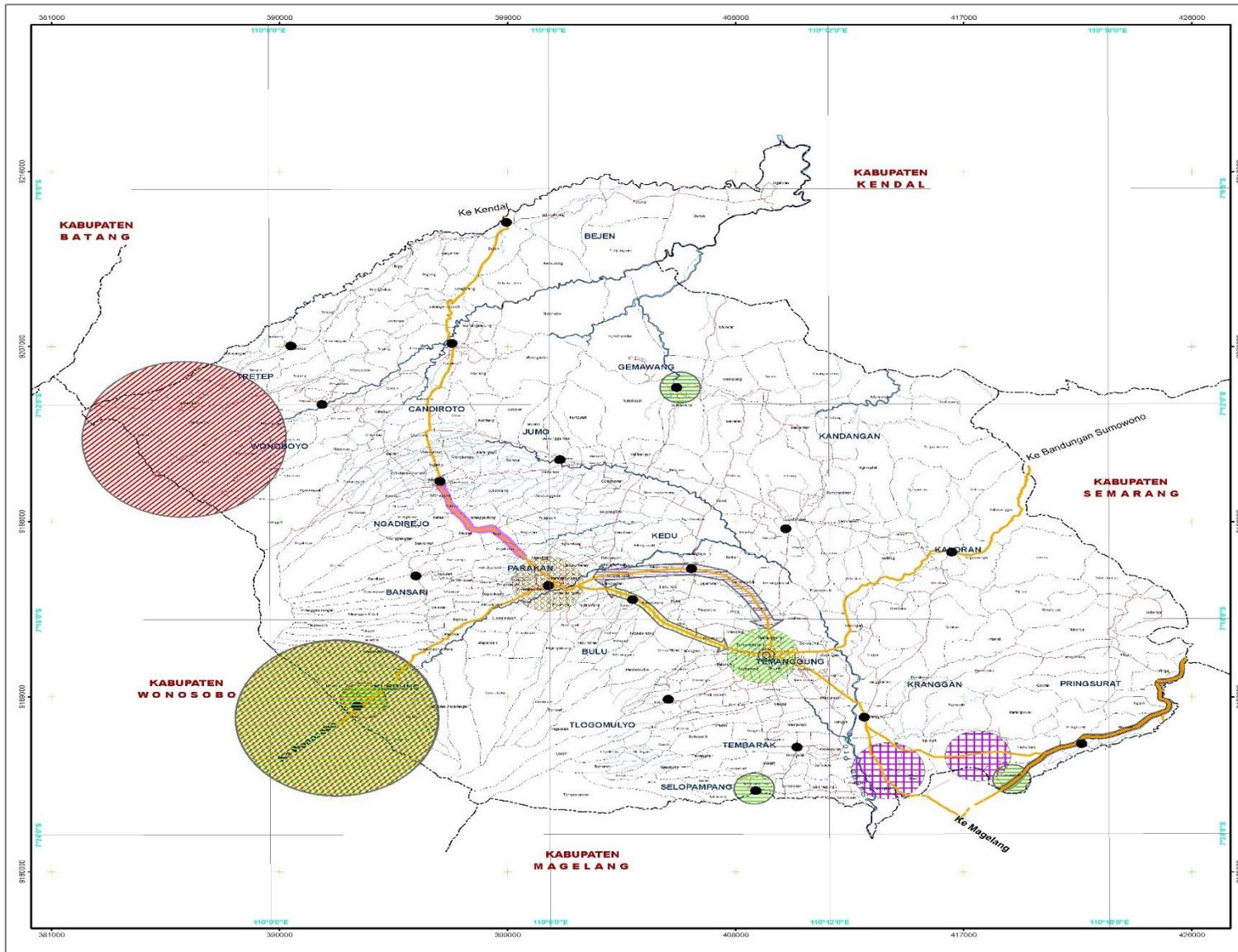
Amanat PERDA Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031 bahwa penataan ruang Daerah bertujuan mewujudkan ruang Kabupaten berbasis pertanian yang didukung industri, perdagangan, pariwisata, dan sosial budaya masyarakat dalam kesatuan sistem Wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Salah satu strategi pengembangan kawasan yaitu dengan mengoptimalkan pengembangan Kawasan Agropolitan.



Gambar 6.3. Gambar Peta Pola Ruang Kabupaten Temanggung



Gambar 6.4. Peta Struktur Ruang Kabupaten Temanggung



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2011 - 2031**

PETA RENCANA KAWASAN STRATEGIS

ORIENTASI UTARA	NO. PETA	HALAMAN
---------------------------	-----------------	----------------

SKALA 1:175,000

0 1,600 3,200 6,400 9,600 12,800 Meters

Proyeksi Sistem Grid : Transverse Mercator
Datum Horizontal : Grid Geografis dan UTM
WGS 1984 Zone 49 S

Diagram Lokasi

LEGENDA

<ul style="list-style-type: none"> ● Ibukota Kabupaten ● Ibukota Kecamatan — Batas Administrasi — Batas Kabupaten — Batas Kecamatan — Batas Desa 	<ul style="list-style-type: none"> — Jalan — Arteri Primer — Kolektor Primer — Lokal Primer — Hidrografi — Sungai
--	---

Rencana Kawasan Strategis Provinsi

- Kawasan Strategis Daya Dukung Lingkungan
- Kawasan Strategis Sindoro - Sumbing
- Kawasan Strategis Bidang Pertumbuhan Ekonomi
- Kawasan Strategis Temanggung-Parakan

Rencana Kawasan Strategis Kabupaten

<ul style="list-style-type: none"> — Kawasan Strategis Bidang Pertumbuhan Ekonomi — Kawasan Koridor Jalan Kedu — Kawasan Perkotaan Parakan — Kawasan Peruntukan Industri — Kawasan Koridor Jalan Bulu — Kawasan Perkotaan Temanggung — Kawasan Strategis Bidang Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan — Kawasan Sindoro-Sumbing — Kawasan Gunung Prau 	<ul style="list-style-type: none"> — Kawasan Agropoltan Gemawang, Kledung, Ptingrat dan Sekelopring — Kawasan Koridor Parakan Ngadireja — Kawasan Koridor Soropadan Pringsurat — Kawasan Strategis Bidang Sosial Budaya — Kawasan Candi Gondokusri — Kawasan Candi Ptinggus
--	---

SUMBER

Peta RBI Kab. Temanggung Skala 1:25000 BAKOSURTANAL Tahun 2006
Data Pollok Kab. Temanggung, Bepeda Kabupaten Temanggung Tahun 2011
Hasil Analisis Tim Penyusun RTRW Kabupaten Temanggung 2011

BUPATI KABUPATEN TEMANGGUNG

HASYIM AFFANDI

Gambar 6.5. Peta Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Temanggung

Konsep kawasan agropolitan dalam konteks penataan ruang lebih diarahkan kepada bagaimana memberikan arahan pengelolaan tata ruang suatu wilayah agropolitan, khususnya kawasan sentra produksi komoditas unggulan dan menjadi alternatif solusi dalam pengembangan kawasan perdesaan secara terpadu.

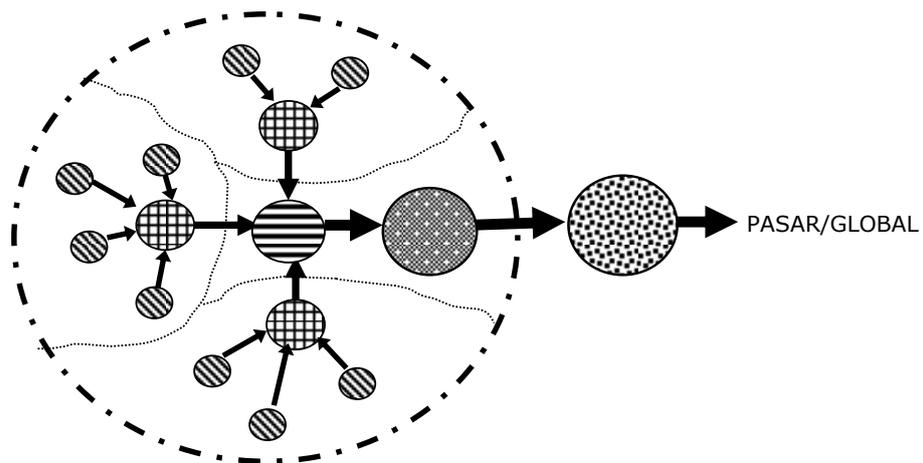
Tujuan pengembangan kawasan agropolitan menjadi pengembangan wilayah terpadu yaitu untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui percepatan pengembangan wilayah dan peningkatan keterkaitan desa dan kota dengan mendorong berkembangnya sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing berbasis kerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisasi di kawasan agropolitan.

Pengembangan wilayah terpadu yang akan dilaksanakan di Kabupaten Temanggung merupakan implementasi ragam program/ kegiatan dalam upaya pembangunan wilayah dan antar wilayah yang bersifat lintas sektoral untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta penanggulangan kemiskinan.

Pada dasarnya, pengembangan wilayah terpadu ini selain berorientasi pada strategi pemerataan pembangunan di wilayah Kabupaten Temanggung juga diharapkan mampu mengerakkan potensi-potensi kawasan untuk dapat dikembangkan baik yang berada dalam satu wilayah dan/atau dapat berorientasi regional (lintas wilayah).

Program/ kegiatan pembangunan dan pengembangan wilayah dalam 5 (lima) tahun ke depan berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan manusia dan pemberdayaan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah yang berkelanjutan sedangkan pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana fisik tetap ada namun tidak menjadi prioritas pembangunan dan hanya sebagai komponen pendukung program/ kegiatan.

Pengembangan Wilayah Terpadu di Kabupaten Temanggung diarahkan untuk mengoptimalkan potensi lokal, mempertahankan keberagaman hasil produk serta menciptakan pemerataan pembangunan yang memiliki ciri kuat produk unggulan. Dalam rangka memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada khususnya yang terkait dengan pengembangan pertanian dalam arti luas maka diupayakan suatu pendekatan/pengelolaan tata ruang kawasan sentra produksi komoditas unggulan di Kabupaten Temanggung.

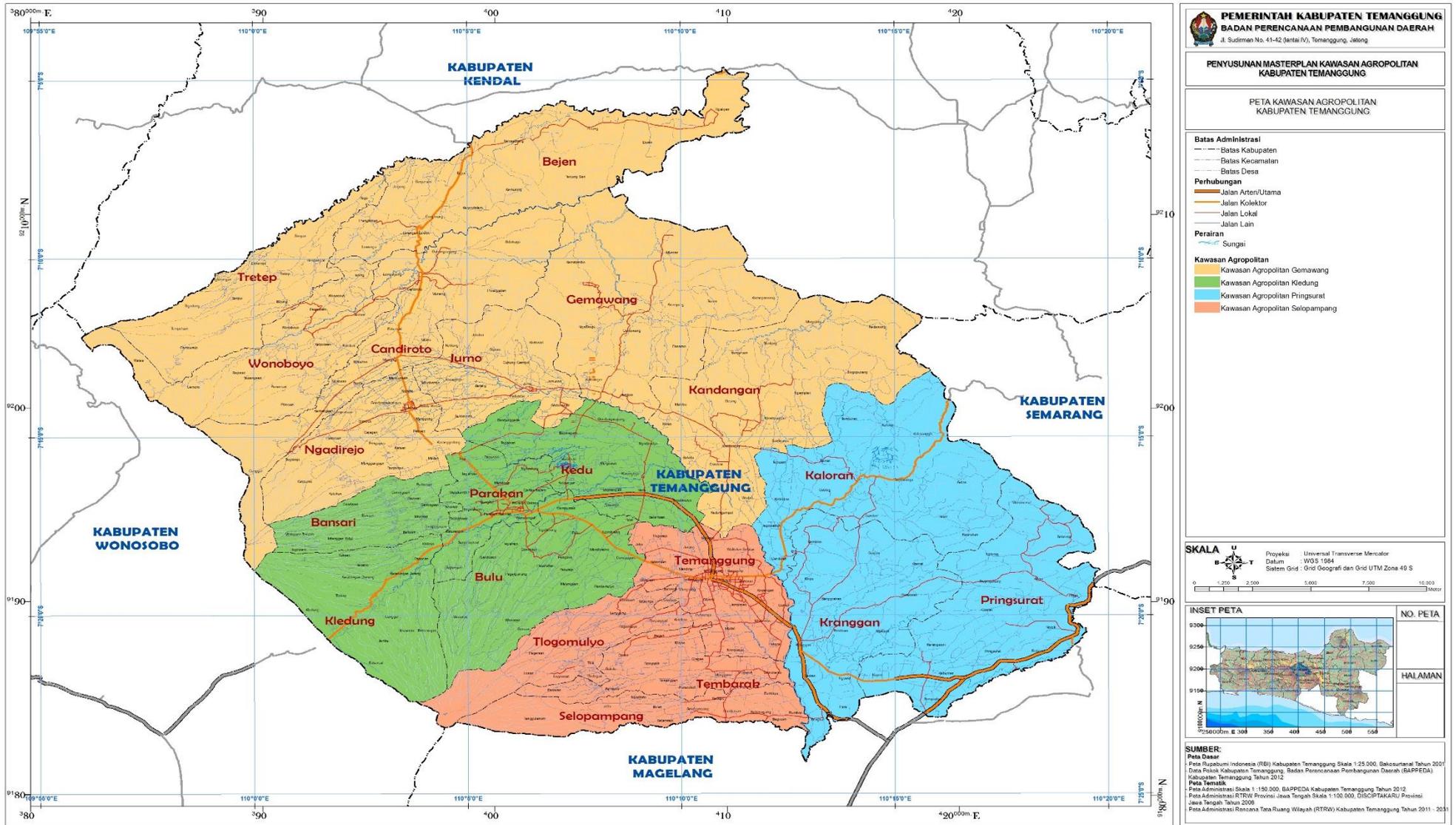


Gambar 6.6. Proses Kumulatif dari Pertumbuhan Suatu Wilayah oleh Tempat Pemusatan Agropolitan

Keterangan:



- Penghasil bahan baku
- Pengumpul bahan baku
- Sentra produksi
- Kota kecil/ pusat regional
- Kota sedang/ besar (*outlet*)
- Jalan dan dukungan sarpras
- Batas kawasan lindung, budidaya, dll
- Batas kawasan agropolitan



Gambar 6.7. Peta Kawasan Agropolitan Kabupaten Temanggung

Pembagian Kawasan Agropolitan Kabupaten Temanggung dibagi dalam 4 (empat) kawasan agropolitan, yaitu:

1. Kawasan Agropolitan Pringsurat yang selanjutnya disebut Kawasan Agropolitan PRINGKRAKAL, yaitu meliputi: Kecamatan Pringsurat, Kranggan, dan Kaloran;
2. Kawasan Agropolitan Kledung yang selanjutnya disebut Kawasan Agropolitan PADUNGBANDULU, yang meliputi: Kecamatan Parakan, Kledung, Bansari, Kedu, dan Bulu;
3. Kawasan Agropolitan Gemawang yang selanjutnya disebut Kawasan Agropolitan KAGEM CABE TEMOYOREJO, yang meliputi: Kecamatan Kandangan, Gemawang, Candiroto, Bejen, Tretep, Jumo, Wonobojo, dan Ngadirejo; dan
4. Kawasan Agropolitan Selopampang yang selanjutnya disebut Kawasan Agropolitan TEMBOGOPANGGUNG, yang meliputi: Kecamatan Tembarak, Tlogomulyo, Selopampang, dan Temanggung.

Rencana pengembangan tata ruang kawasan agropolitan di Kabupaten Temanggung pada dasarnya bertujuan untuk:

- a) Menyediakan wadah bagi segala kegiatan agribisnis;
- b) Menyediakan wadah bagi aktivitas usaha tani dalam suatu kawasan sentra produksi;
- c) Mewujudkan, meningkatkan, dan mengembangkan sarana dan prasarana agribisnis pada kawasan;
- d) Membuka wilayah baru sebagai koridor pengembangan aktivitas agribisnis;
- e) Menciptakan dan mewujudkan pola-pola aliran komoditas agribisnis pada kawasan, maupun ke daerah yang ada di sekitarnya; dan
- f) Meningkatkan keterhubungan antar wilayah dalam kawasan dan antar kawasan.

Rencana ruang spasial pada Kawasan Agropolitan PRINGKRAKAL adalah menciptakan suatu wadah dari berbagai kegiatan agropolitan yang sudah berjalan maupun yang akan dikembangkan. Rencana ruang spasial ditetapkan atas dasar:

- a) Pola sirkulasi komoditas unggulan;
- b) Aktivitas sistem usaha tani pada ruang terbuka;
- c) Aktivitas yang memerlukan ruang tertutup/ massa bangunan;

- d) Tingkat kemudahan aksesibilitas menuju ke kawasan, berdasarkan waktu tempuh atau jarak tempuh dari titik kegiatan satu ke titik kegiatan yang lainnya;
- e) Pola aliran barang/ jasa atau orang dalam ruang dengan pencapaian skala harian; dan
- f) Hinterland kecamatan/ desa didasarkan atas jarak capai/ radius keterikatan dan ketergantungan kecamatan/ desa pada Kawasan Agropolitan.

Rencana pengembangan tata ruang Kawasan Agropolitan dapat diuraikan sebagai berikut:

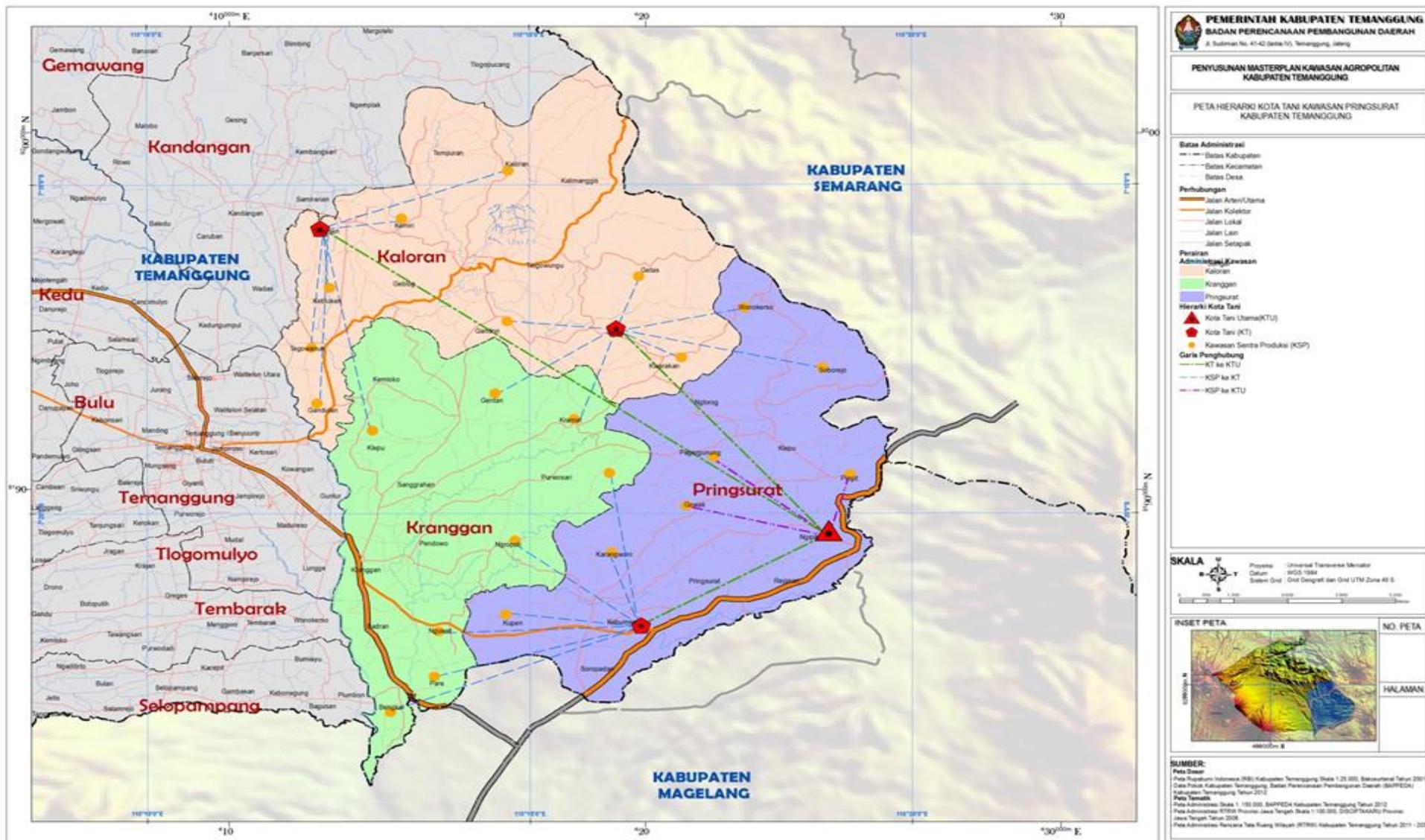
1. Kawasan Agropolitan PRINGKRAKAL

Komoditas unggulan pada Kawasan Agropolitan PRINGKRAKAL adalah buah-buahan. Komoditas unggulan seperti durian, rambutan, kelengkeng, pisang dan salak banyak ditanam sehingga dapat mendukung klaster buah-buahan di Kawasan Agropolitan PRINGKRAKAL. Hal ini menjadi faktor bahwa Kawasan Agropolitan PRINGKRAKAL ditetapkan sebagai klaster atau sentra buah-buahan. Selain buah-buahan yang menjadi prioritas, Kawasan Agropolitan PRINGKRAKAL juga memiliki komoditas unggulan dan potensial lainnya sebagai komoditas pendukung, seperti: tanaman pangan, sayuran, perkebunan, dan ternak.

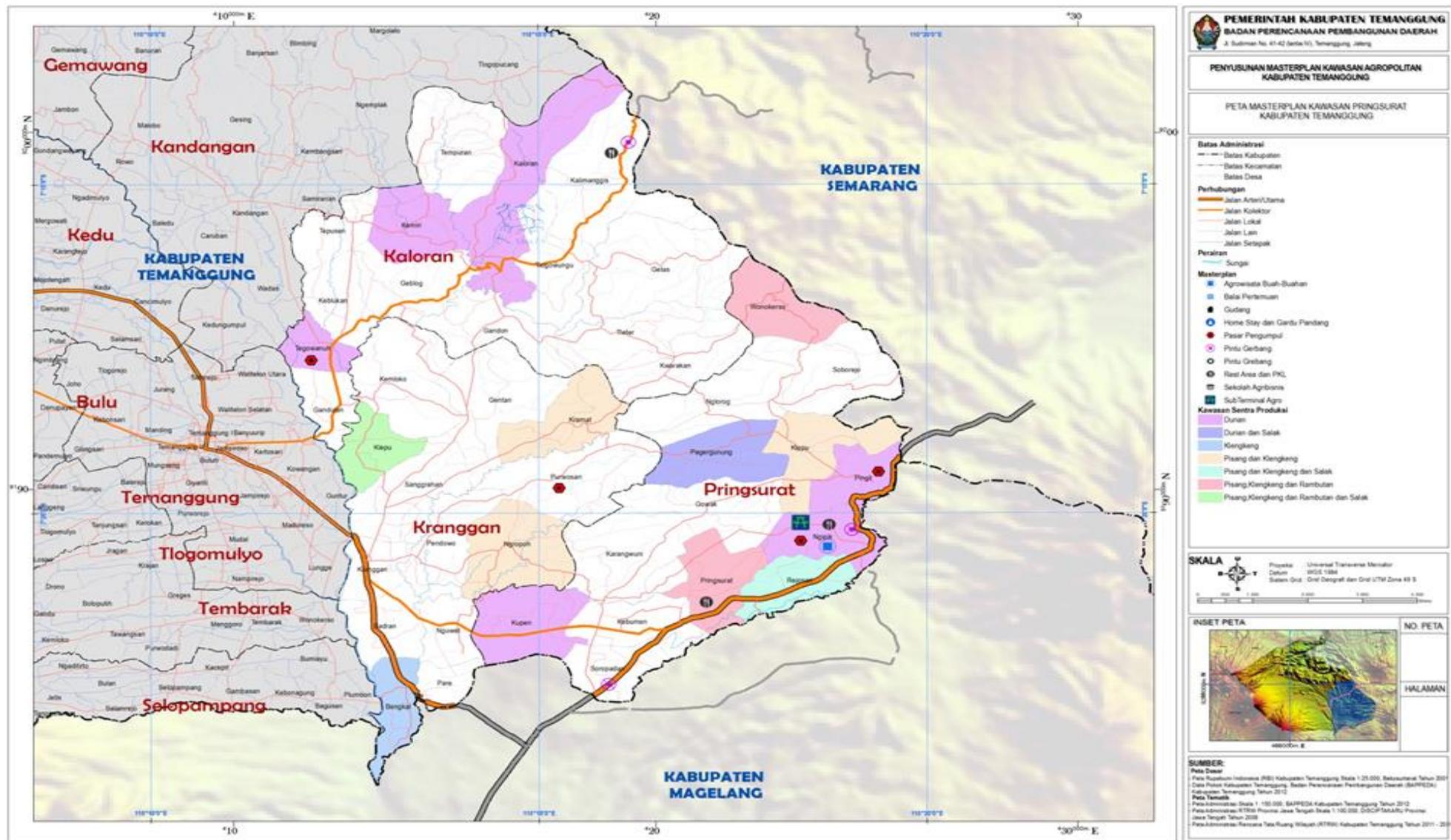
Tanaman pangan yang menjadi komoditas pendamping klaster adalah jagung dan ketela pohon. Sayuran yang menjadi komoditas pendamping klaster adalah kubis dan lombok.

Perkebunan yang menjadi komoditas pendamping klaster adalah: kakao, jahe, dan kayu manis. Ternak yang menjadi komoditas pendamping klaster adalah sapi, kambing, dan ayam ras. Di Kecamatan Kranggan dan Pringsurat diketahui sebagai daerah yang identik dengan ternak karena memiliki kandang komunal kambing di 2 (dua) kecamatan tersebut.

Pada Kawasan Agropolitan PRINGKRAKAL sudah tersedia sarana dan prasarana sub terminal agribisnis (STA) yang terdapat di Kelurahan Kranggan, Kecamatan Kranggan. Namun sarana dan prasarana lain masih terbatas.



Gambar 6.8. Struktur Tata Ruang Kawasan Agropolitan PRINGKRAKAL



Gambar 6.9. Peta Rencana Kawasan Agropolitan PRINGKRAKAL

2. Kawasan Agropolitan PADUNGBANDULU

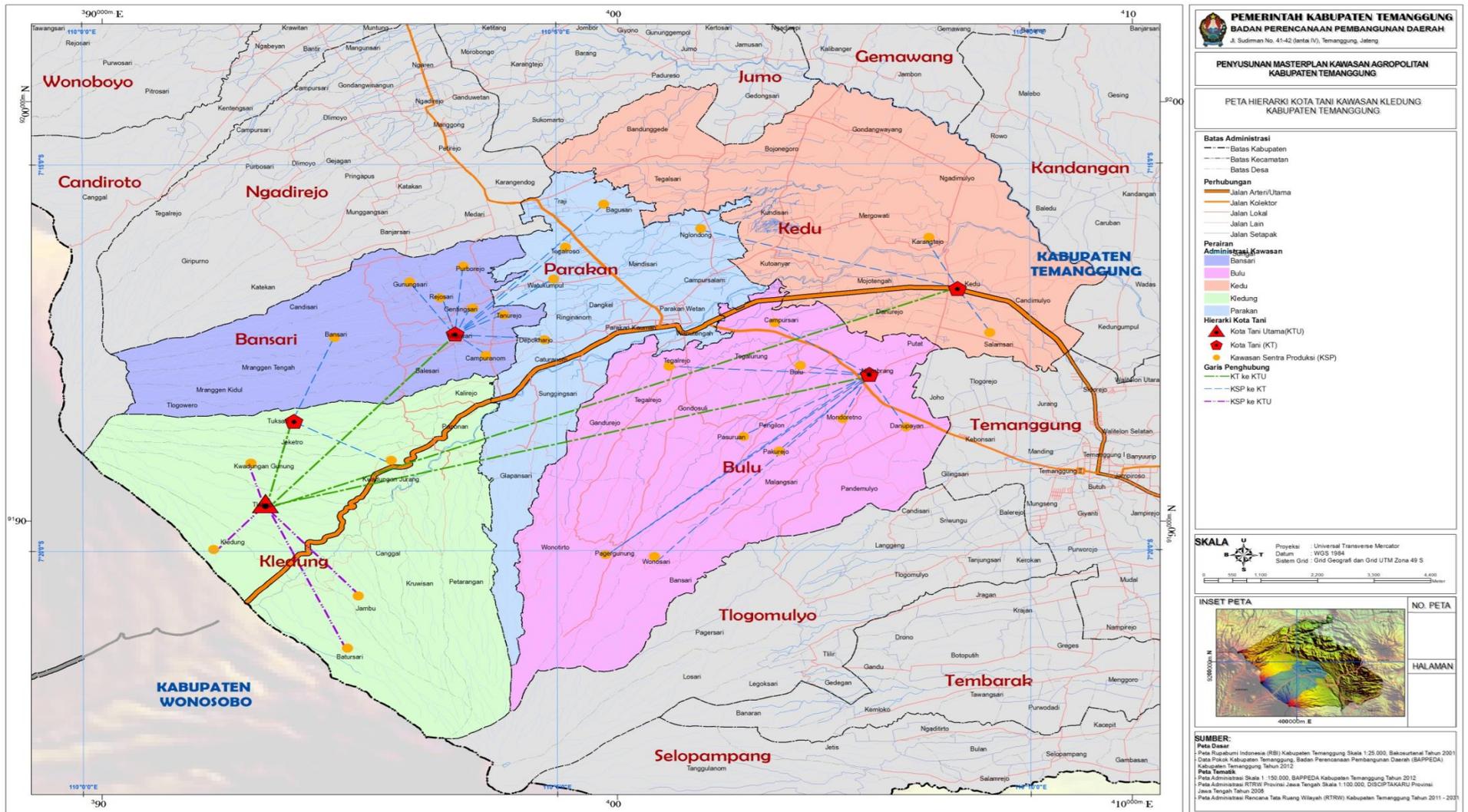
Pada Kawasan Agropolitan PADUNGBANDULU, komoditas dari subsektor tanaman pangan yang termasuk unggulan adalah padi, jagung dan kacang kedelai. Padi menjadi komoditas unggulan di Kecamatan Parakan, Bansari dan Kedu. Jagung dan kacang kedelai menjadi komoditas unggulan di Kecamatan Bansari. Untuk komoditas ketela pohon menjadi komoditas yang belum berkembang pada keseluruhan kecamatan pada kawasan ini. Komoditas pertanian di Kawasan Agropolitan PADUNGBANDULU selain memiliki skala lokal juga memiliki skala regional dan internasional. Komoditas yang memiliki skala regional diantaranya adalah: kubis, lombok, sawi, bawang putih, kentang, padi, pisang, papaya, jambu biji, kacang merah, domba dan Ayam, sedangkan kopi memiliki skala regional dan internasional. Komoditas kopi tersebut nantinya diusahakan dalam bentuk biji kopi dan bubuk kopi dengan skala industri kecil dan menengah, begitu juga dengan kentang yang diusahakan dalam bentuk kentang segar dan keripik kentang, dengan jenis usaha berupa usaha home industry/ industri kecil. Untuk komoditas potensial kambing/ domba di usahakan dalam bentuk dendeng, daging segar, dan dapat dimanfaatkan dalam industri penyamakan kulit dengan jenis usaha industri kecil dan menengah.

Kawasan Agropolitan PADUNGBANDULU memiliki komoditas unggulan utama yaitu: tanaman sayur-sayuran yang terdiri dari kentang, kubis, sawi, Lombok, dan kacang merah. Dari identifikasi produk pertanian unggulan, maka Kawasan Agropolitan PADUNGBANDULU dijadikan sebagai cluster/ sentra tanaman sayuran. Meskipun demikian terdapat beberapa komoditas pendukung lainnya seperti padi, jagung, pisang, papaya, jambu biji, kopi arabika, sapi potong, domba, kelinci dan ayam ras di beberapa desa pada Kawasan Agropolitan PADUNGBANDULU. Desa Tlahap yang berada di Kecamatan Kledung menerapkan system mix farming, dimana beberapa tanaman seperti: kopi arabika, tembakau, dan kacang merah ditanam berdekatan karena kopi arabika dapat menjaga struktur tanah yang peka terhadap erosi. Selain itu di Desa Tlahap terhadap balai pembibitan kentang yang dapat dijadikan faktor pendukung penetapan klaster sayuran di Kawasan Agropolitan PADUNGBANDULU.

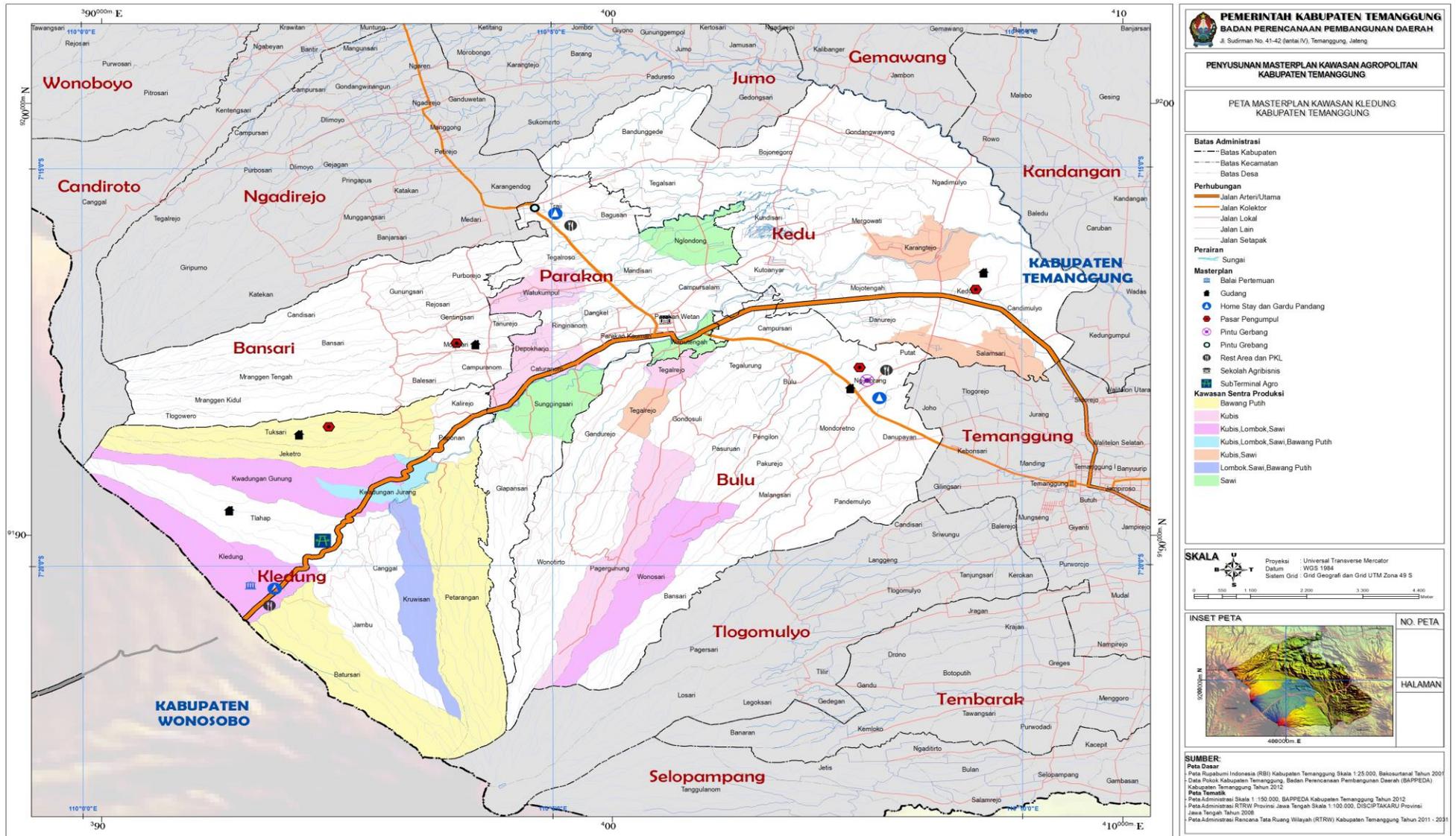
Berdasarkan kriteria penentuan Kota Tani Utama, maka Desa Tlahap cocok dijadikan sebagai Kota Tani Utama (KTU). Selain sesuai dengan kriteria, Desa Tlahap di Kecamatan Kledung memiliki kondisi fisik

alam yang mendukung yaitu memiliki tingkat kesuburan tinggi yang berpotensi untuk pengembangan sektor pertanian baik dan juga didukung oleh akses yang lebih baik dibanding daerah lainnya, selain itu Desa Tlahap juga pernah dijadikan contoh karena pernah melakukan mixfarming atau pertanian terpadu di wilayah tersebut.

Rencana struktur tata ruang Kawasan Agropolitan PADUNGBANDULU ditetapkan berdasarkan kebutuhan ruang untuk mewadahi kegiatan agribisnis, sehingga untuk mengembangkan kawasan agropolitan diperlukan suatu hirarki pusat-pusat pertumbuhan di kawasan agropolitan. Pusat-pusat pertumbuhan yang terbentuk berjenjang dan berkaitan dengan kegiatan agribisnis sebagai suatu sistem. Sistem ini diklasifikasi sebagai sub sistem budidaya yang secara ruang terdapat di desa-desa di Kawasan Agropolitan PADUNGBANDULU. Hirarki pusat-pusat pertumbuhan yang terwadahi dalam ruang di Kawasan Agropolitan PADUNGBANDULU sebagai berikut:



Gambar 6.10.
 Struktur Tata Ruang Kawasan Agropolitan PADUNGBANDULU



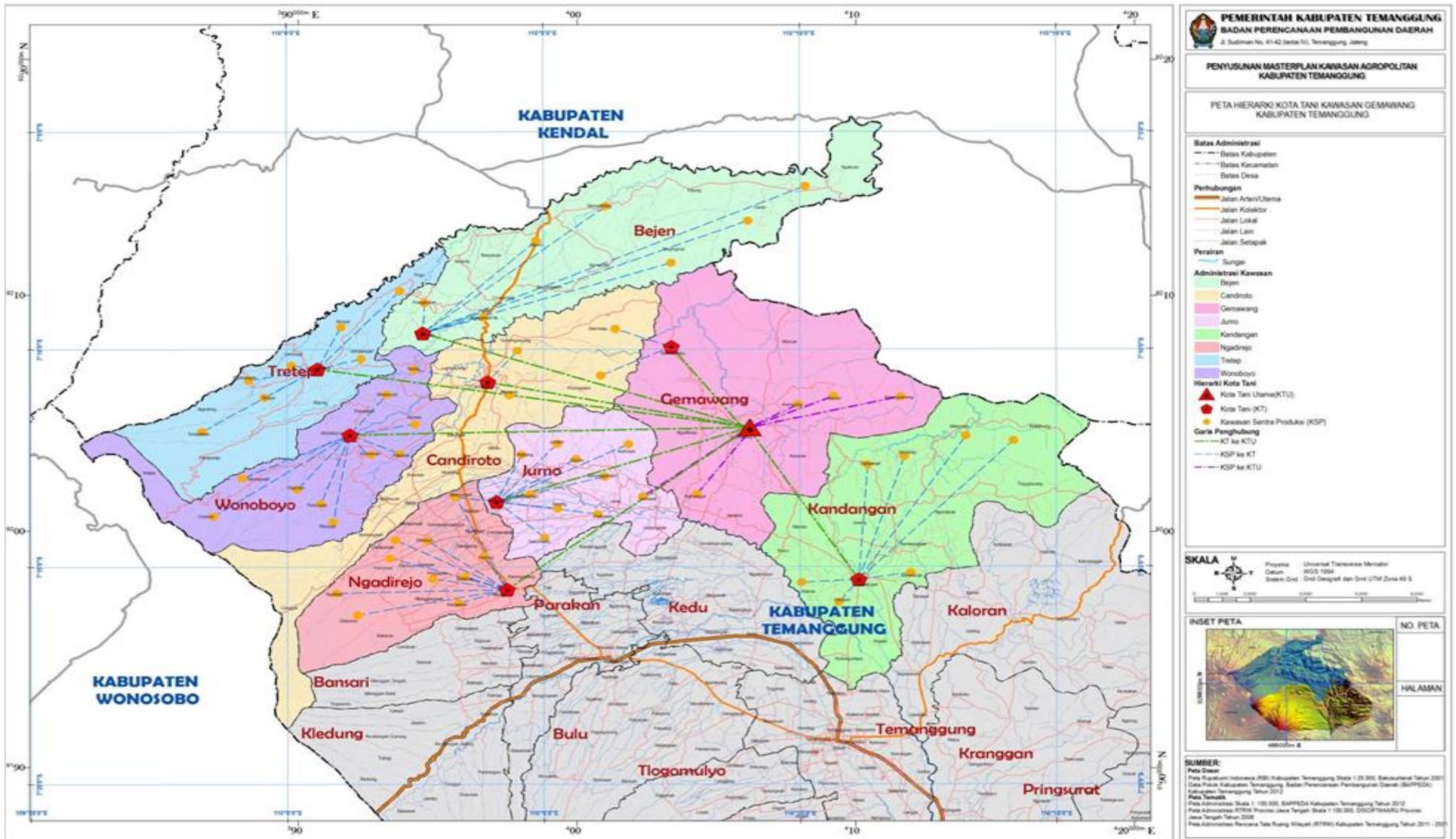
Gambar 6.11.
 Peta Rencana Kawasan Agropolitan PADUNGBANDULU

3. Kawasan Agropolitan KAGEM CABE TEMOYOREJO

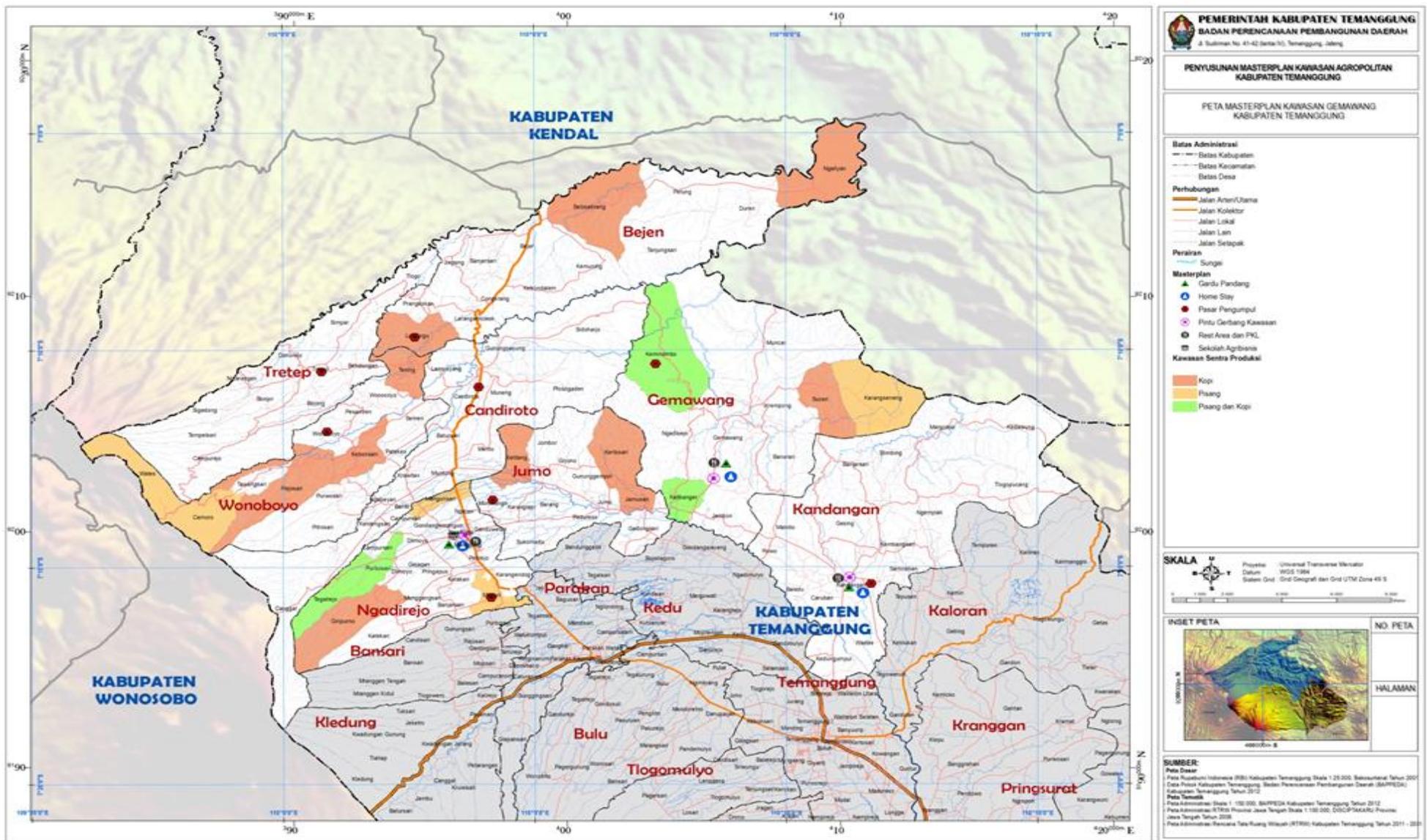
Kawasan Agropolitan KAGEM CABE TEMOYOREJO dijadikan sebagai cluster/ sentra tanaman perkebunan. Mengingat kawasan ini memiliki komoditas pertanian yang unggulan dan potensial di subsektor perkebunan. Selain tanaman perkebunan juga terdapat komoditas unggulan dan potensial pendukung lainnya.

Komoditas perkebunan yang menjadi prioritas dalam pengembangan klaster adalah kopi robusta. Komoditas unggulan dan potensial lainnya yang menjadi komoditas pendukung klaster, seperti: tanaman pangan, sayuran, buah-buahan, perkebunan, dan peternakan.

Kawasan Agropolitan KAGEM CABE TEMOYOREJO memiliki potensi pertanian dan wisata yang dapat dikembangkan secara optimal, penetapan KAG sebagai kawasan agropolitan akan dapat meningkatkan produksi pertanian yang sudah ada (kopi, tembakau, kubis, jagung, kentang, bawang merah, bawang putih, kacang merah, dll).



Gambar 6.12.
 Struktur Tata Ruang Kawasan Agropolitan KAGEM CABE TEMOYOREJO



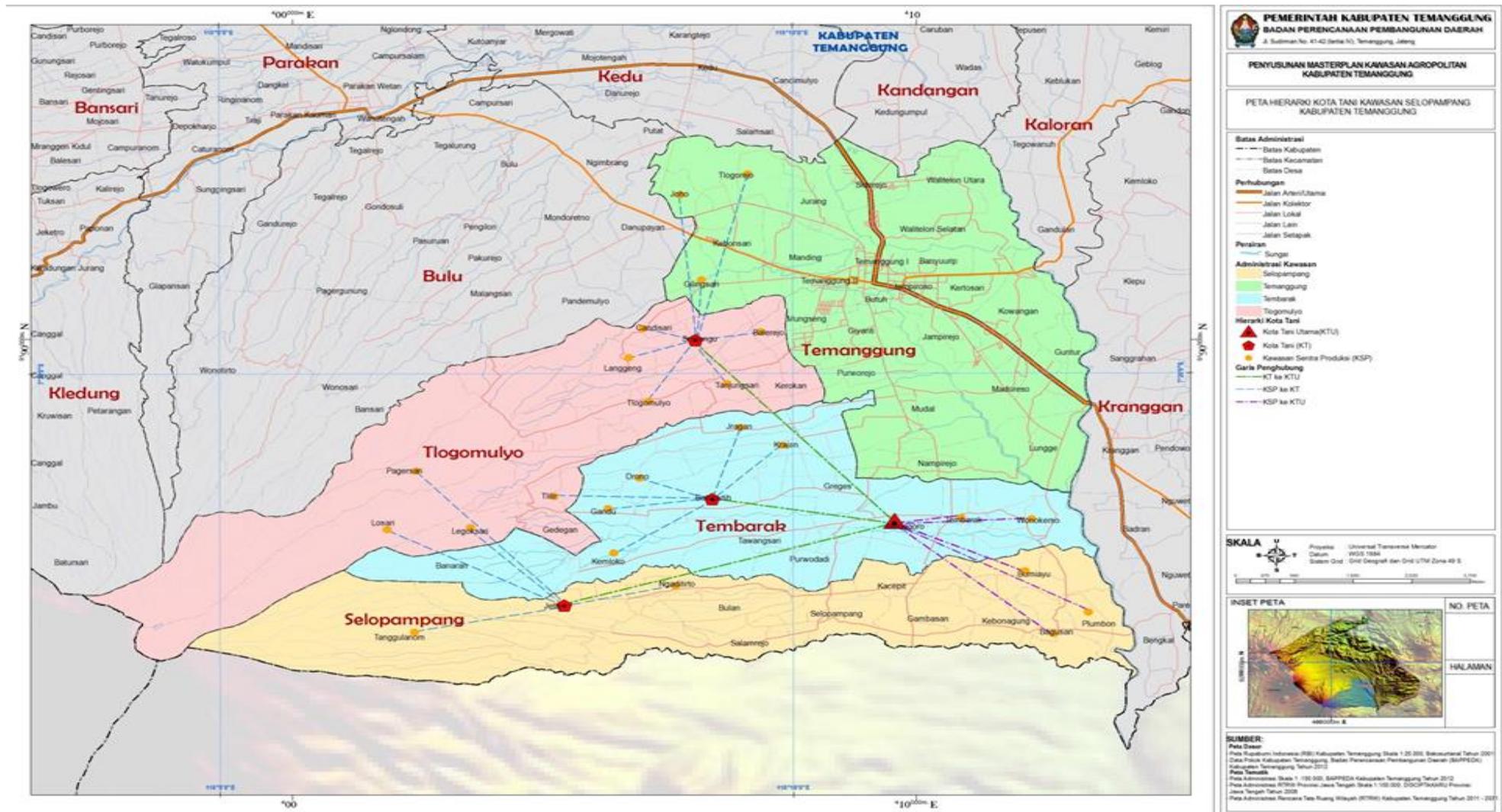
Gambar 6.13.
 Peta Rencana Kawasan Agropolitan KAGEM CABE TEMOYOREJO

4. Kawasan Agropolitan TEMBOGOPANGGUNG

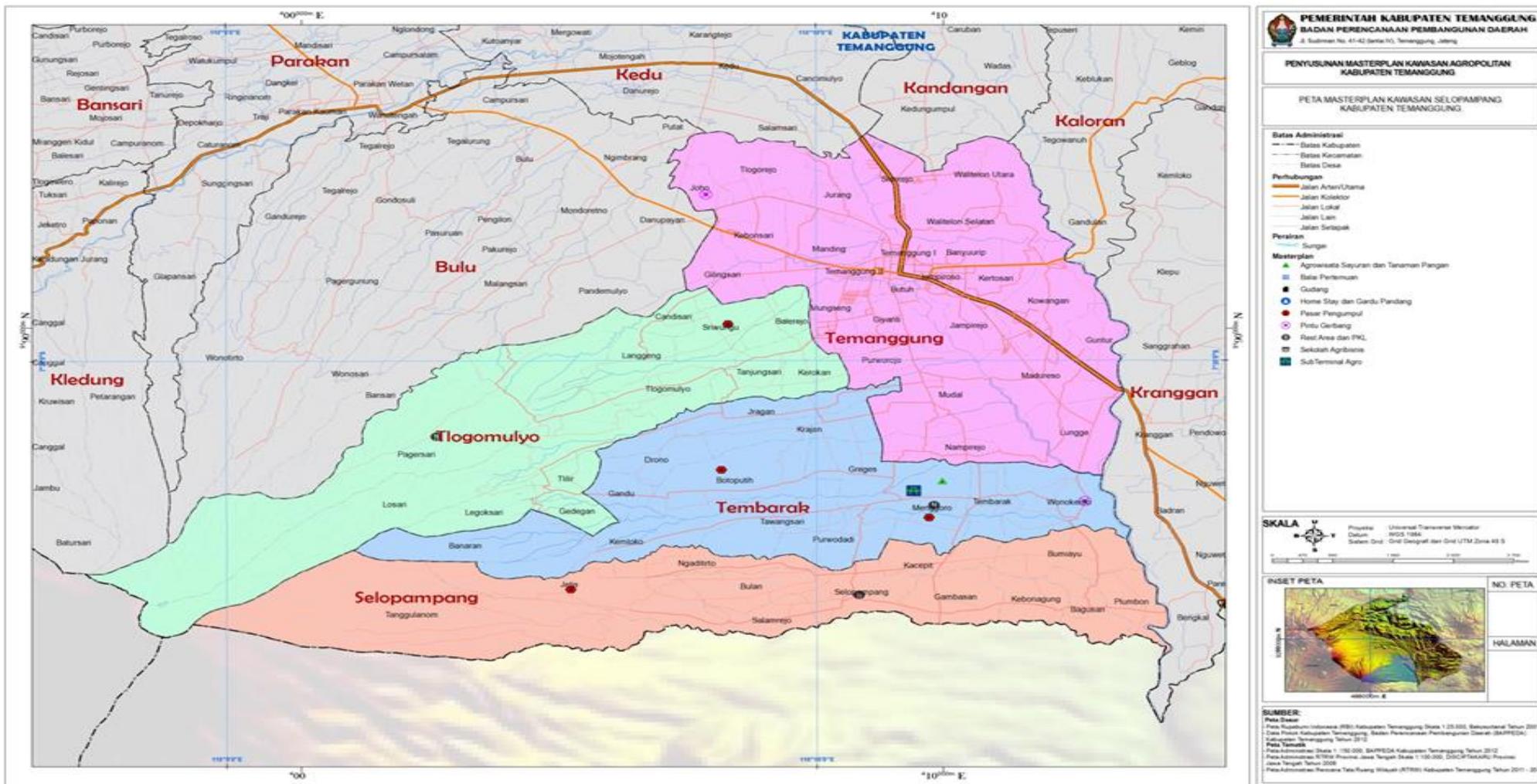
Perencanaan tata ruang Kawasan Agropolitan TEMBOGOPANGGUNG didasarkan pada identifikasi potensi sumber daya alam dan analisis yang telah dilakukan, maka Kawasan Agropolitan TEMBOGOPANGGUNG ditetapkan sebagai klaster atau sentra campuran antara tanaman pangan dan sayuran. Jenis tanaman pangan yang menjadi prioritas dalam pengembangan klaster adalah padi, sedangkan komoditas sayuran yang menjadi prioritas dalam pengembangan klaster adalah lombok. Kecamatan Selopampang memiliki jenis padi merah dan padi hitam yang menjadi satu-satunya di Kabupaten Temanggung. Hal ini dapat menjadi faktor utama dalam pengembangan klaster pangan dan sayuran. Kawasan Agropolitan TEMBOGOPANGGUNG juga memiliki komoditas unggulan dan potensial lainnya yang dijadikan komoditas pendukung klaster, seperti: tanaman pangan, sayuran, buah-buahan, perkebunan, dan ternak.

Tanaman pangan yang menjadi komoditas pendamping klaster adalah jagung. Sedangkan sayuran yang menjadi komoditas pendamping klaster adalah: kubis, sawi, dan baby buncis. Seperti yang sudah diketahui bahwa *baby buncis* di kawasan ini sudah sampai tahap ekspor dalam pemasarannya. Sedangkan buah-buahan yang menjadi komoditas pendamping klaster adalah: durian, jambu biji, dan pisang. Perkebunan yang menjadi komoditas pendamping klaster adalah kakao dan jahe. Ternak yang menjadi komoditas pendamping klaster adalah sapi, domba, ayam ras, dan itik.

Kota Tani Utama yang ditetapkan di Kawasan Agropolitan TEMBOGOPANGGUNG adalah Desa Menggoro yang terletak di Kecamatan Tembarak. Hal ini didasarkan pada kriteria Kota Tani Utama (KUT) dan Desa Menggoro memiliki fasilitas yang mendukung seperti pasar yang menjual hasil produksi pertanian dan kemudahan akses yang juga mendukung aktivitas pemasaran hasil produksi pertanian.



Gambar 6.14.
 Struktur Tata Ruang Kawasan Agropolitan TEMBOGOPANGGUNG



Gambar 6.15.
 Peta Rencana Kawasan Agropolitan TEMBOGOPANGGUNG

b. Rencana Pengelolaan Kawasan Agropolitan

Pengelolaan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Temanggung diarahkan dengan sistem LOS (Lestari, Optimal, Sinergis), yang artinya:

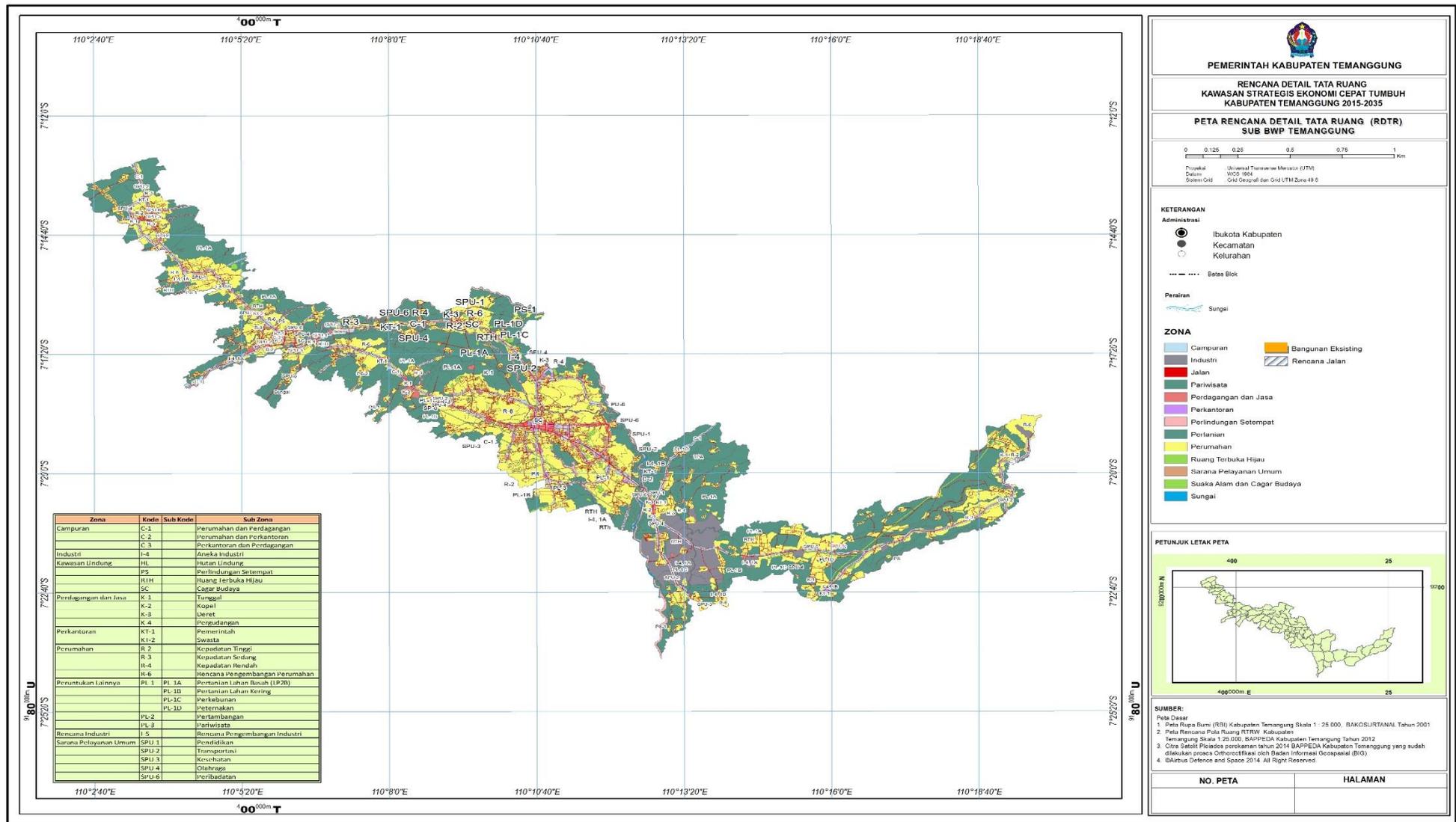
- a. Lestari adalah pengelolaan lingkungan hidup diusahakan dapat memberikan dampak positif terhadap kawasan agropolitan dan *hinterland*-nya, hal ini dilakukan dengan cara mempertahankan kawasan lahan pertanian produktif tetap berfungsi sebagaimana mestinya tanpa mengalami perubahan yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Cara lain adalah dengan mengendalikan alih fungsi lahan pertanian untuk menjadi area terbangun;
- b. Optimal artinya pengelolaan kawasan akan dilakukan secara maksimal agar memberikan hasil yang optimal, dengan cara memadukan teknologi dan sumber daya manusia yang ada di kawasan agropolitan untuk mengolah sumber daya alam secara terpadu dan terintegrasi; dan
- c. Sinergis artinya bahwa seluruh komponen yang terlibat dalam pengelolaan kawasan agropolitan harus dapat bekerjasama secara serasi dan seimbang. Perlu adanya suatu sistem kelembagaan yang mampu mewadahi seluruh aktivitas masyarakat agropolitan, sehingga terbentuk sistem yang sinergis dalam pengelolaan kawasan agropolitan.

c. Kawasan Strategis Ekonomi Cepat Tumbuh di Kabupaten Temanggung

Sesuai amanat Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031 Pasal 9, Pasal 77 dan Pasal 78, maka perlu adanya perencanaan detail tata ruang berupa perencanaan Kawasan Strategis Ekonomi Cepat Tumbuh di Kabupaten Temanggung. Kawasan Strategis Ekonomi Cepat Tumbuh ini direncanakan untuk mengarahkan pembangunan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna dan berhasil guna, berbudaya dan berkelanjutan, dan sebagai dasar pengendalian pemanfaatan ruang.

Tujuan Kawasan Strategis Ekonomi Cepat Tumbuh Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi daerah adalah untuk mewujudkan kawasan ekonomi cepat tumbuh secara berkelanjutan dan ramah lingkungan berdasar pada RTRW Kabupaten Temanggung dalam penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program/ kegiatan pembangunan. Sehingga nantinya dapat tercipta keterkaitan antar kegiatan yang selaras, serasi dan efisien, serta dapat terjaga konsistensi perwujudan tata ruang melalui pengendalian program-program pembangunan.

Lokasi Kawasan Strategis Ekonomi Cepat Tumbuh berada di koridor yang membentang dari Kecamatan Pringsurat sampai dengan Kecamatan Ngadirejo, yang terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan yaitu Kecamatan Temanggung, Parakan, Ngadirejo, Kranggan, Pringsurat, Kedu dan Kecamatan Bulu.



Gambar 6.16.
Gambar Peta Rencana Kawasan Strategis Ekonomi Cepat Tumbuh Kabuapten Temanggung

Kawasan Strategis Ekonomi Cepat Tumbuh berada di koridor pertumbuhan ekonomi yang membentang dari Kecamatan Pringsurat sampai dengan Kecamatan Ngadirejo yang bercirikan kawasan perkotaan. Kawasan perkotaan merupakan wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Kabupaten Temanggung secara alamiah mempunyai beberapa wilayah sebagai pusat-pusat pertumbuhan dimana masing-masing memiliki tingkat pelayanan tersendiri yang didukung dengan keberadaan kawasan *hinterland*. Perbedaan-perbedaan tingkat pelayanan tersebut dilihat dari aspek jumlah penduduk, ketersediaan fasilitas, aktifitas ekonomi, serta aspek lainnya.

Secara umum struktur kota digunakan untuk mengetahui sistem perkotaan pada wilayah yang lebih luas (kabupaten). Struktur kota dapat dilihat dari perkembangan suatu daerah yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor eksternal digunakan untuk mengetahui hubungan fungsional antar kota, dan faktor internal digunakan untuk mengetahui struktur keruangan kota itu sendiri. Hal ini berguna untuk mengintegrasikan kota dalam wilayah yang lebih luas.

Pola perkembangan kota lebih banyak dipengaruhi oleh perkembangan penduduk, perkembangan prasarana, kondisi relief, dan aksesibilitas yang mempengaruhi pergerakan barang atau orang. Untuk daerah yang landai dengan aksesibilitas tinggi seperti: Kecamatan Pringsurat, Kranggan, Temanggung, Kedu, Parakan cepat berkembang.

Salah satu kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi menurut RTRW Kabupaten Temanggung berada di Kawasan Peruntukan Industri (KPI) yaitu di Kecamatan Pringsurat dan Kecamatan Kranggan. Namun kawasan yang berkembang masih berada di koridor Jalan Nasional dan Provinsi, yaitu:

- ruas jalan Secang-Pringsurat;
- ruas jalan Pringsurat-Bawen;
- ruas jalan Kranggan-Secang; dan
- ruas jalan Pringsurat-Kraggan.

Konsep Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) Kabupaten Temanggung yaitu berupa penyediaan infrastruktur pengembangan KPI berupa penyediaan oleh Pemerintah Daerah maupun pihak investor. Infrastruktur yang dapat disediakan oleh pihak Pemerintah Daerah diantaranya adalah sarana dan prasarana jaringan jalan, utilitas energi, utilitas air bersih, sedangkan infrastruktur yang disediakan oleh pihak investor adalah infrastruktur yang berkaitan dengan kegiatan industri di kawasan tersebut.

Konsep penyediaan infrastruktur juga dapat berupa kerjasama pemerintah dengan pihak swasta (KPS). KPS atau Public Private Partnership (PPP) dapat diterjemahkan sebagai perjanjian kontrak antara pihak swasta dan pemerintah, yang keduanya bergabung bersama dalam sebuah kerjasama untuk menggunakan keahlian dan kemampuan masing-masing untuk meningkatkan pelayanan kepada publik dimana kerjasama tersebut dibentuk untuk menyediakan kualitas pelayanan terbaik dengan biaya yang optimal.

Pengembangan infrastruktur, sarana dan prasarana dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan yang direncanakan di KPI. Prinsip utama dalam penyediaan infrastruktur ini adalah mengintegrasikan antara eksisting dengan rencana.

Untuk mengembangkan KPI, perlu dilakukan peningkatan dan pembangunan infrastruktur jalan baru untuk membuka kawasan yang berada di KPI. Analisis dan Kajian pengembangan KPI telah dilakukan dan sarana prasarana pendukung perlu direncanakan dan dipersiapkan. Kemudahan aksesibilitas akan mempercepat arus pendistribusian barang dan jasa serta mobilitas manusia di KPI menuju bandara dan atau pelabuhan terdekat sehingga kelancaran pendistribusian bahan baku dan hasil produksi ke berbagai wilayah di Indonesia maupun luar negeri.

Penyediaan pelayanan, sarana dan prasarana lainnya, seperti: jaringan listrik, jaringan air bersih dan jaringan telekomunikasi di KPI didukung oleh BUMN/ BUMD, seperti: PT. PLN, PT. Telkom dan PDAM Kabupaten Temanggung serta Swasta.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi lainnya yaitu kawasan perkotaan Parakan yang berada di sebelah Barat Kota Temanggung. Lokasi Kota Parakan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sangat strategis yaitu menghubungkan simpul ke arah Barat Daya (Wonosobo/Purwokerto-jalur tengah), arah Barat Laut (Sukorejo-Kendal/Jakarta) dan ke arah Timur (Magelang/Yogyakarta dan Semarang). Kota Parakan sebagai simpul pertemuan ini perlu direncanakan dengan baik karena arus transportasi darat kedepan semakin ramai dan padat. Hal ini telah terbukti pada hari-hari libur/ perayaan keagamaan terjadi kemacetan yang cukup lama karena hanya ada 1 (satu) ruas jalan yang menjadi tumpuan (dari ruas jalan Parakan-Pertigaan Bulu-ruas jalan Diponegoro Parakan dan ruas jalan menuju batas Kabupaten Wonosobo).

Untuk mengurangi kemacetan ruas jalan di perkotaan Parakan telah disusun perencanaan jalan lingkar Parakan bahkan sudah sampai disusun *Detail Engineering Design* (DED). Harapan adanya jalan lingkar Parakan dapat memecah kepadatan lalu lintas di Pusat Kota Parakan sehingga pengguna jalan/ masyarakat yang hanya lewat Kota Parakan dapat melewati jalan lingkar Parakan.

d. Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Kegiatan pengendalian pembangunan, atau pengendalian pemanfaatan ruang, merupakan suatu kegiatan yang tak terpisahkan dari kebijakan penggunaan lahan. Pada dasarnya kegiatan pengendalian pembangunan (*development control*) adalah suatu usaha untuk mempengaruhi pasar (investasi publik dan masyarakat) guna mencapai suatu tujuan-tujuan sosial tertentu yang telah ditentukan sebelumnya (Tang dan Tang 1999). Tujuan-tujuan tersebut dapat berupa suatu penciptaan tatanan kehidupan kota yang teratur, penciptaan kualitas lingkungan yang baik, pelestarian warisan-warisan (*heritage*) baik yang berupa warisan lingkungan alami maupun warisan lingkungan buatan manusia beserta nilai-nilai budayanya, dan lain sebagainya, dimana pada intinya biasanya tujuan-tujuan tersebut merupakan suatu upaya penciptaan kualitas hidup dan kehidupan yang lebih baik.

Pengendalian pemanfaatan ruang berusaha untuk menjamin tercapainya konsistensi pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, pengendalian pemanfaatan ruang merupakan mekanisme untuk memastikan rencana tata ruang dan pelaksanaannya telah berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Fenomena yang sering menjadi permasalahan pada wilayah perkotaan adalah kegiatan pembangunan kota yang terjadi cenderung untuk mendorong pembangunan yang bersifat terpotong-potong (*piecemeal*). Untuk itu pengendalian pemanfaatan lahan diperlukan, sehingga bentukan dari rencana tata guna lahan pada masa yang akan datang akan sesuai dengan apa yang direncanakan dalam rencana tata ruangnya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa perencanaan dan pengendalian merupakan dua aspek yang memiliki keterkaitan yang sangat erat, yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Apabila perencanaan diartikan sebagai suatu upaya untuk mencapai tujuan, maka pengendalian pembangunan merupakan upaya untuk mewujudkan apa yang sudah di rencanakan (Khublall and Yuen 1991).

Pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Strategis Kabupaten diselenggarakan melalui kegiatan perizinan, pengawasan, dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang berdasarkan mekanisme perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, pemberian kompensasi, mekanisme pelaporan, mekanisme pemantauan, mekanisme evaluasi dan mekanisme pengenaan sanksi. Kegiatan pengendalian ini dilaksanakan oleh Bupati dengan peran serta masyarakat dan dunia usaha.



BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH



TEMANGGUNG

MAREM GANDEM

TENTREM



A. Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2018-2023

1. Pendapatan Daerah

Mendasarkan pada perkembangan capaian pendapatan daerah selama 5(lima) tahun terakhir (tahun 2013-2017) dan rencana tahun 2018, maka untuk melakukan proyeksi pendapatan daerah tahun 2019-2023 perlu mempertimbangkan hal-hal yang terkait dengan pendapatan daerah, antara lain:

1. Permasalahan yang dihadapi pada sisi pendapatan asli daerah (PAD).
2. Perubahan-perubahan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait dengan dana perimbangan dan dana transfer lainnya.

Berkaitan dengan hal tersebut maka dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu adanya upaya peningkatan kinerja pendapatan daerah melalui kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah sebagai berikut:

1. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan dengan memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat. Upaya yang perlu dilakukan adalah:

- a. Melakukan pemetaan potensi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
- b. Melakukan pemutakhiran data subyek/obyek sumber pendapatan asli daerah.
- c. Memperbaiki sistem, mekanisme, dan prosedur pengelolaan dan pelayanan pendapatan asli daerah.
- d. Melakukan review atas peraturan yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah dan melakukan kajian guna mengembangkan dan menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah.
- e. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia pemungut dan pengelola pendapatan asli daerah.
- f. Meningkatkan sosialisasi kepada wajib pajak dan wajib retribusi, serta memberikan penghargaan dan sanksi guna meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak.
- g. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan.
- h. Memperbaiki sistem pengelolaan pemungutan pajak dan retribusi yang dilakukan pihak lain.
- i. Peningkatan pendayagunaan aset milik pemerintah daerah sebagai sumber pendapatan daerah.
- j. Meningkatkan tata kelola BUMD.
- k. Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal dengan SKPD Pendapatan sehingga dapat berjalan efektif.

2. Perlunya menggerakkan sektor-sektor lain sebagai sumber pembiayaan, seperti peran serta swasta melalui CSR (*Corporated Social Responsibility*).

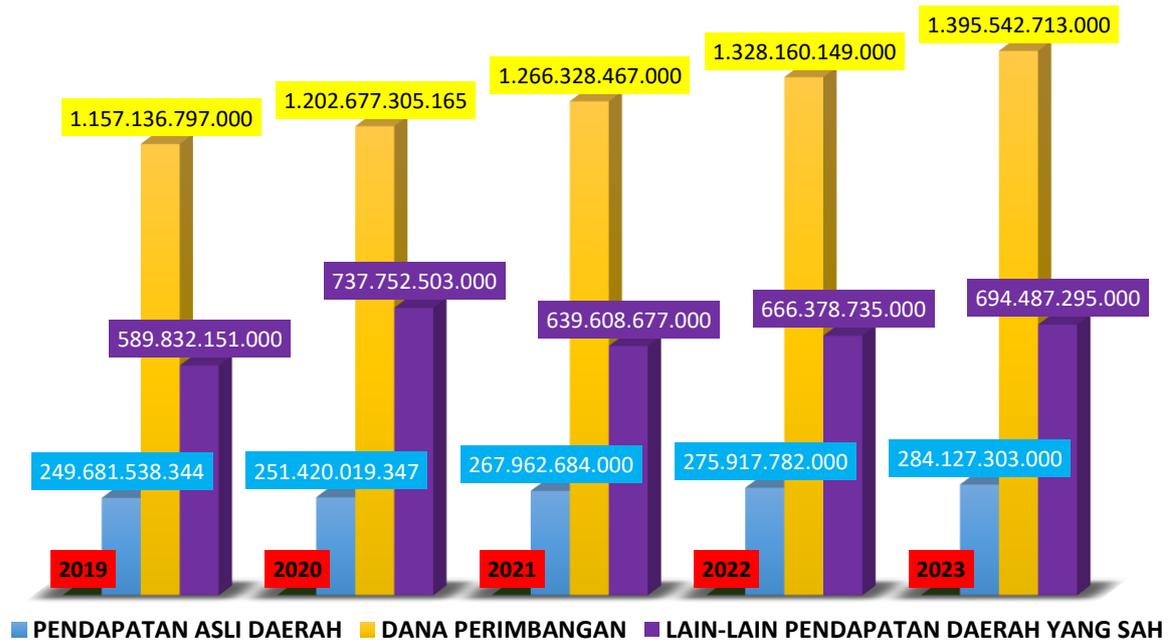
Selanjutnya dalam rangka peningkatan dana yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dilakukan dengan meningkatkan koordinasi di bidang pendapatan daerah dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, baik dalam hal penyediaan data-data yang diperlukan dalam perhitungan pendanaan untuk daerah maupun peningkatan kinerja daerah di segala bidang.

Proyeksi Pendapatan Daerah tahun 2019-2023 didasarkan pada rata-rata pertumbuhan selama 5 (lima) tahun terakhir dengan tetap mempertimbangkan asas rasionalitas. Adapun proyeksi Pendapatan Daerah selama kurun tahun 2019-2023 sebagaimana Tabel 7.1.

Tabel 7.1.
Proyeksi Pendapatan Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

KODE	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	PENDAPATAN	1.996.650.486.344	2.191.849.827.512	2.173.899.828.000	2.270.456.666.000	2.374.157.311.000
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	249.681.538.344	251.420.019.347	267.962.684.000	275.917.782.000	284.127.303.000
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	38.176.000.000	42.349.702.000	43.465.528.000	44.626.063.000	45.833.649.000
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	14.575.467.500	14.939.854.000	15.313.350.000	15.696.183.000	16.088.587.000
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.594.000.000	13.097.760.000	13.621.670.000	14.166.536.000	14.733.197.000
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	184.336.070.844	181.032.703.347	195.562.136.000	201.429.000.000	207.471.870.000
1.2	DANA PERIMBANGAN	1.157.136.797.000	1.202.677.305.165	1.266.328.467.000	1.328.160.149.000	1.395.542.713.000
1.2.1	Dana Bagi Hasil	48.589.699.000	52.410.168.465	52.050.499.000	53.872.266.000	55.757.795.000
1.2.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	823.754.719.000	840.229.813.000	857.034.409.000	874.175.097.000	891.658.598.000
1.2.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	284.792.379.000	310.037.323.700	357.243.559.000	400.112.786.000	448.126.320.000
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	589.832.151.000	737.752.503.000	639.608.677.000	666.378.735.000	694.487.295.000
1.3.1	Pendapatan Hibah	62.439.400.000	62.439.400.000	62.439.400.000	62.439.400.000	62.439.400.000
1.3.2	Dana Darurat		-	-	-	-
1.3.3	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah	90.000.000.000	94.500.000.000	99.225.000.000	104.186.250.000	109.395.562.000
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	41.768.103.000	41.768.103.000	41.768.103.000	41.768.103.000	41.768.103.000
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi	153.680.000.000	329.045.000.000	169.432.200.000	177.903.810.000	186.799.000.000
1.3.6	Dana Desa	241.944.648.000	210.000.000.000	266.743.974.000	280.081.172.000	294.085.230.000

Sumber: Hasil Analisis

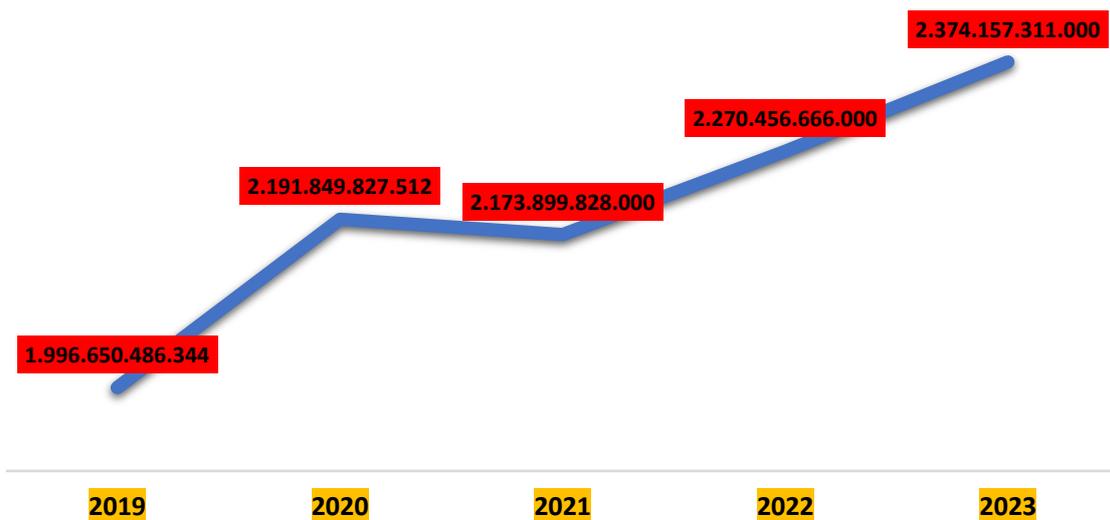


Grafik 7.1.
 Proyeksi Pendapatan Daerah
 Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

Dari gambar tersebut, terlihat bahwa sumber pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung semakin naik meskipun masih didominasi oleh Dana Perimbangan yang berasal dari Pemerintah Pusat. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah menempati urutan kedua dan yang terkecil berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), meskipun kedua sumber pendapatan ini terlihat kenaikannya tidak signifikan.

Peningkatan PAD perlu dilakukan dengan menggali potensi- potensi PAD yang ada dan mengoptimalkan pos-pos pendapatan yang selama ini telah dilakukan dengan baik. Gerakan peningkatan PAD ini diharapkan tidak membebani masyarakat sehingga perlu kajian dan analisis yang komprehensif dan berpeluang untuk terus dapat ditingkatkan.

Proyeksi total Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 sebagaimana grafik 7.2.



Grafik 7.2.
 Proyeksi Jumlah Total Pendapatan Daerah
 Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

Gambar tersebut terlihat bahwa jumlah total Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung dari tahun ke tahun diproyeksikan semakin naik meskipun kenaikannya tidak begitu signifikan, setiap tahun hanya naik sekitar 1 milyar rupiah. Kenaikan pendapatan daerah tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan visi dan misi Kepala Daerah.

2. Belanja Daerah

Kerangka pendanaan pembangunan daerah melalui belanja daerah dibagi menjadi 2 jenis yaitu:

1. Belanja Tidak Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja Tidak Langsung terdiri dari:

- a. Belanja Pegawai; merupakan belanja yang dianggarkan untuk gaji pokok dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kerangka pendanaan di belanja pegawai ini dimaksudkan untuk mendorong kinerja pegawai. Oleh karena itu selain berupa belanja gaji maka diberikan pula Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) sesuai kelas jabatan. Untuk mengantisipasi kebutuhan belanja gaji berkaitan dengan perubahan struktur gaji dianggarkan akses 2,5%.
- b. Belanja Bunga; digunakan untuk pembayaran bunga atas pinjaman pemerintah daerah kepada pihak lainnya. Terkait dengan pinjaman daerah akan dilakukan manakala terdapat kebutuhan belanja daerah yang memerlukan pembiayaan besar.

- c. Belanja Hibah; merupakan pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.
 - d. Bantuan Sosial; merupakan pemberian bantuan berupa uang atau barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial yang diarahkan untuk mendukung percepatan pengentasan kemiskinan antara lain bantuan pendidikan, kesehatan, dan sosial.
 - e. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa; meliputi belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. Belanja Bantuan Keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik; merupakan bantuan keuangan yang bersifat umum maupun khusus kepada pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan pemerintah desa serta partai politik.
 - g. Belanja Tak Terduga; merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup;
2. Belanja Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan program dan kegiatan, meliputi :
- a. Belanja Pegawai, untuk pengeluaran honorarium PNS, honorarium non PNS dan uang lembur, Belanja Pegawai BLUD, Belanja Pegawai pada program BOS dan Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat yang berkaitan dengan penghargaan atas prestasinya.
 - b. Belanja Barang dan Jasa, untuk pengeluaran bahan pakai habis, bahan material, jasa kantor, Belanja Premi Asuransi, Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor, Belanja Cetak dan Penggandaan, Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir, Belanja Sewa Sarana Mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan alat kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian lapangan, pakaian khusus, perjalanan dinas, beasiswa pendidikan, Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis, Belanja Pemeliharaan, Belanja Jasa Konsultansi, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Barang dan Jasa Dana BLUD, Belanja Barang yang akan

diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga, Belanja Kepesertaan, dan Belanja Tuntutan Hukum.

- c. Belanja Modal, untuk pengeluaran pengadaan tanah, alat-alat berat, alat-alat angkutan darat bermotor, alat-alat angkutan darat tidak bermotor, alat-alat bengkel, pengolahan pertanian dan peternakan, peralatan kantor, perlengkapan kantor, komputer dan lain-lain.

Kerangka pendanaan belanja langsung dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintahan daerah dan pelaksanaan pembangunan daerah. Untuk pelaksanaan pembangunan daerah diarahkan pada pelaksanaan visi, kebijakan, strategi, program dan kegiatan guna pencapaian visi daerah. Berkaitan dengan hal tersebut maka kerangka pendanaan belanja daerah untuk periode tahun 2019-2013 diarahkan untuk:

- a. Melaksanakan program prioritas sesuai visi dan misi daerah;
- b. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- c. Pemenuhan belanja daerah yang bersifat wajib untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat;
- d. Melaksanakan program dalam rangka pelaksanaan standar pelayanan minimal;
- e. Melaksanakan program pembangunan daerah yang merupakan aspirasi masyarakat melalui tahapan musrenbang;

Proyeksi kerangka pendanaan belanja daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 7.2.
Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	PAGU INDIKATIF				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	6	7	8	9	10
	BELANJA	2.064.535.909.821	2.347.409.797.123	2.265.969.161.501	2.284.799.180.002	2.382.201.352.003
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.187.688.416.352	1.234.799.406.916	1.338.232.000.000	1.423.127.000.000	1.518.850.000.000
1	BELANJA PEGAWAI	728.414.947.777	759.436.239.041	825.000.000.000	850.000.000.000	875.000.000.000
2	BELANJA BUNGA	-	-	-	7.000.000.000	3.500.000.000
3	BELANJA HIBAH	55.126.600.000	37.103.500.000	57.882.000.000	60.777.000.000	75.000.000.000
4	BELANJA BANTUAN SOSIAL	23.557.112.500	34.341.320.000	50.000.000.000	50.000.000.000	60.000.000.000
5	BELANJA BANTUAN KEUANGAN	375.239.756.075	398.568.347.875	400.000.000.000	450.000.000.000	500.000.000.000
	Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.205.347.875	1.205.347.875	1.265.615.269	1.328.896.032	1.395.340.834
	Bantuan Keuangan kepada Desa	374.034.408.200	397.363.000.000	398.734.384.731	448.671.103.968	498.604.659.166
6	BELANJA BAGI HASIL	4.850.000.000	4.850.000.000	4.850.000.000	4.850.000.000	4.850.000.000
7	BELANJA TIDAK TERDUGA	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000
B	BELANJA LANGSUNG	876.847.493.469,00	1.112.610.390.207	927.737.161.501	861.672.180.002	863.351.352.003

Sumber: Hasil Analisis

3. Pembiayaan

Dalam struktur APBD tahun 2019-2023 menerapkan anggaran defisit sehingga diperlukan kebijakan untuk menutup defisit tersebut melalui kerangka pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan utamanya adalah dari pemanfaatan silpa, pembentukan dana cadangan, dan perhitungan pihak ketiga. Sedangkan untuk penarikan pinjaman daerah dilakukan apabila terdapat belanja daerah dengan kebutuhan pendanaan yang besar.

Pengeluaran pembiayaan utamanya adalah untuk pembayaran perhitungan pihak ketiga yang merupakan hak pihak ketiga dan dibayarkan pada tahun berikutnya, serta untuk penyertaan modal pada BUMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan untuk pembayaran pokok hutang dan bunga pinjaman dilakukan apabila pemerintah melakukan pinjaman.

Prediksi belanja pembiayaan dalam APBD tahun 2019-2023 adalah sebagaimana tabel 7.3.

Tabel 7.3.
Proyeksi Belanja Pembiayaan Kabupaten Temanggung
Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
A	PEMBIAYAAN NETTO	67.885.423.477	155.559.969.611	92.069.333.501	7.342.514.002	4.544.041.003
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	82.885.423.477	190.559.969.611	117.069.333.501	67.342.514.002	64.544.041.003
	Sisa Lebih perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	67.885.423.477	175.559.969.611	32.069.333.501	52.342.514.002	49.544.041.003
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
	Penerimaan Pinjaman dan Obligasi Daerah	-	-	70.000.000.000	-	-
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-	-
	Penerimaan perhitungan pihak ketiga	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	15.000.000.000	35.000.000.000	25.000.000.000	60.000.000.000	60.000.000.000
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	20.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
	Pembayaran Pokok Hutang	-	-	-	35.000.000.000	35.000.000.000
	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000

Sumber: Hasil Analisis

Prediksi belanja pembiayaan daerah dari data tersebut selama 5 (lima) tahun dapat diketahui bahwa tidak mengalami perubahan yang signifikan dan cenderung stabil. Hanya saja pada pengeluaran pembiayaan terdapat penyertaan modal pemerintah daerah kepada BUMD yang juga tidak mengalami banyak perubahan, namun penyertaan modal pada tahun 2019 tidak dianggarkan karena masih menunggu peraturan daerah tentang *roadmap* penyertaan modal disahkan. Untuk mencukupi rencana belanja daerah, pemerintah kabupaten Temanggung akan melakukan pinjaman dan/atau obligasi daerah pada periode RPJMD ini.

B. Indikasi Rencana Program Prioritas Perangkat Daerah

Indikasi Rencana Program Prioritas Perangkat Daerah dengan memperhatikan pendapatan daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dapat dijabarkan dalam tabel 7.4 berikut ini:

Tabel 7.4.
Indikasi Rencana Program Prioritas Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Akhir
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	BELANJA				2.065.550.653.821	2.342.263.572.643	2.188.823.803.501	2.175.820.080.002	2.231.086.711.003	
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG				1.187.688.416.352	1.235.449.406.916	1.260.645.642.000	1.313.706.900.000	1.367.294.359.000	
	BELANJA PEGAWAI				728.414.947.777	759.436.239.041	772.913.642.000	801.579.900.000	833.379.359.000	
	BELANJA BUNGA				-	-	-	7.000.000.000	3.500.000.000	
	BELANJA HIBAH				55.126.600.000	37.103.500.000	57.882.000.000	60.777.000.000	63.815.000.000	
	BELANJA BANTUAN SOSIAL				23.557.112.500	34.341.320.000	24.500.000.000	26.000.000.000	27.250.000.000	
	BELANJA BANTUAN KEUANGAN				375.239.756.075	398.568.347.875	400.000.000.000	413.000.000.000	434.000.000.000	
	BELANJA BAGI HASIL				4.850.000.000	5.500.000.000	4.850.000.000	4.850.000.000	4.850.000.000	
	BELANJA TIDAK TERDUGA				500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	
B	BELANJA LANGSUNG				877.862.237.469	1.106.814.165.727	928.178.161.501	862.113.180.002	863.792.352.003	
101	PENDIDIKAN				122.482.157.720	167.979.710.000	173.148.041.000	176.543.443.000	180.108.615.000	
101.01	Program peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan				30.730.112.100	31.934.180.000	30.740.000.000	30.740.000.000	30.740.000.000	
		Persentase pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik	%	86,23	88,11	90,00	92,00	94,00	95,00	95,00
		Persentase pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik	%	84,05	86,00	88,00	90,00	93,00	94,00	94,00
		Persentase pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik	%	49,00	50,00	51,00	53,00	55,00	56,00	56,00

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Akhir
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101.02	Program peningkatan akses pendidikan Sekolah Dasar				55.025.592.020	64.899.800.000	67.908.041.000	71.303.443.000	74.868.615.000	
		Persentase APK SD sederajat	%	110,39	109,40	108,59	107,41	106,23	105,05	105,05
		Rasio APK Perempuan/Laki-laki SD/SDLB/MI/Paket A		0,940	0,945	0,950	0,955	0,960	0,965	0,965
		Persentase APM SD sederajat	%	96,88	96,7	97,1	97,5	97,9	98,3	98,3
		Rasio APM Perempuan/Laki-laki SD/SDLB/MI/Paket A		0,950	0,955	0,960	0,965	0,970	0,975	0,975
		Persentase ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik	%	76,12	77,07	78,02	78,96	79,91	80,86	80,86
101.03	Program peningkatan mutu pendidikan SD				1.686.630.800	2.275.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	
		Persentase SD terakreditasi minimal B	%	94,39	95,37	95,77	96,17	96,57	96,97	96,97
		Angka kelulusan SD sederajat	%	100	100	100	100	100	100	100
		Angka putus sekolah SD sederajat	%	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04	0,03	0,03
101.04	Program peningkatan akses pendidikan SMP				27.626.991.000	50.976.730.000	55.000.000.000	55.000.000.000	55.000.000.000	
		Persentase APK SMP sederajat	%	96,42	98,20	98,38	98,45	98,52	98,59	98,59
		Rasio APK Perempuan/Laki-laki SMP/SMPLB/MTs/Paket B		1,02	1,014	1,009	1,004	1,000	1,000	1,000
		Persentase APM SMP sederajat	%	84,43	84,50	85,38	86,26	87,14	88,00	88,00

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Rasio APM Perempuan/Laki-laki SMP/SMPLB/MTs/Paket B		1,08	1,075	1,070	1,065	1,060	1,055	1,055	
		Angka Melanjutkan dari SD sederajat ke SMP sederajat	%	97,35	97,70	97,90	98,10	98,30	98,50	98,50	
		Persentase ruang kelas SMP Negeri dalam kondisi baik	%	88,78	92,03	93,59	95,15	96,71	98,27	98,27	
101.05	Program peningkatan mutu pendidikan SMP				1.157.850.500	1.626.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000		
		Prosentase SMP terakreditasi minimal B	%	85,50	90,54	90,65	91,59	94,39	97,20	97,20	
		Angka kelulusan SMP sederajat	%	100	100	100	100	100	100	100	
		Angka putus sekolah SMP sederajat	%	0,30	0,28	0,26	0,24	0,22	0,20	0,20	
101.06	Program peningkatan akses pendidikan PAUD				352.685.000	180.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000		
		Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 4-6 Tahun)	%	73,72	74,28	74,86	75,44	76,02	76,60	76,60	
		Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 0-6 Tahun)	%	32,91	34,41	35,91	37,41	38,91	40,41	40,41	
101.07	Program peningkatan mutu PAUD				230.765.500	450.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000		
		Prosentase TK terakreditasi minimal B	%	46,50	47,85	48,64	49,43	50,22	51,00	51,00	
101.08	Program peningkatan mutu pendidikan nonformal				5.671.530.800	15.638.000.000	15.300.000.000	15.300.000.000	15.300.000.000		

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Persentase angka melek huruf usia ≥ 15 tahun	%	98,51	98,51	98,54	98,57	98,61	98,64	98,64	
		Persentase angka lulusan pendidikan kesetaraan	%	96,69	96,79	96,89	96,99	97,09	97,19	97,19	
		Ratio Guru Keagamaan terhadap anak usia sekolah	%	n.a	15,80	15,80	15,80	15,80	15,80	15,80	
102	KESEHATAN				270.561.759.369,00	263.242.128.607	264.939.075.000	265.136.028.000	265.342.829.000		
102.01	Program pengembangan sumber daya kesehatan				25.558.015.000	24.275.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000		
		Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi	%	90,00	90,00	92,00	95,00	97,00	100	100	
		Persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan	%	97,25	97,00	97,20	97,40	97,80	98,00	98,00	
		Persentase puskesmas yang sarprasnya sesuai standar	%	80,10	84,62	85,00	90,00	95,00	100	100	
102.02	Program kesehatan masyarakat				17.214.172.975	17.004.080.000	17.000.000.000	17.000.000.000	17.000.000.000		
		Presentase balita umur 7-23 bulan mendapat ASI Eksklusif	% minimal	84	80	80	80	80	80	80	
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak Baduta (0-48 bulan)	% maksimal	29,87	29	28,5	28	27,5	27	27	

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Prevalensi gizi kurang (underweight) pada anak balita (0-60 bulan)	% maksimal	3,64	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	
		Prevalensi anemia pada ibu hamil	% maksimal	17,66	20	20	19,5	19,5	19	19	
		Persentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Rumah Tangga (RT) Strata Utama dan Paripurna	%	83,00	83,00	83,03	83,05	83,07	83,09	83,09	
		Persentase desa bebas rawan gizi	%	100	100	100	100	100	100	100	
		Persentase rumah sehat	%	77,50	80,00	80,50	81,00	81,50	82,00	82,00	
102.03	Program pencegahan dan pengendalian penyakit				9.075.501.617,00	3.751.500.000,00	3.939.075.000	4.136.028.000	4.342.829.000		
		Persentase anak umur 1 tahun diimunisasi campak	% minimal	95,63	95,60	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	
		Angka Penemuan Kasus Baru Kusta	Maksimal per 100.000 penduduk	0,38	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	
		Persentase orang dengan Tuberculosis (TB) mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
		Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Angka penemuan penderita Demam Berdarah Dengue (Inciden Rate DBD) per 100.000 penduduk	Per 100.000 penduduk	20	< 20	< 20	< 20	< 20	< 20	< 20	
		Angka penemuan penderita malaria per 1.000 penduduk	Per 1.000 penduduk	0,001	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	
		Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	23,46	100	100	100	100	100	100	
		Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	13,25	100	100	100	100	100	100	
		Persentase Universal Child Immunisation (UCI) Desa dan/atau Kelurahan	%	99,65	100	100	100	100	100	100	
		Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	69	100	100	100	100	100	100	
		Persentase desa dan/atau kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100	100	100	100	100	100	100	
102.04	Program pelayanan kesehatan				63.935.064.977,00	59.866.548.607	60.000.000.000	60.000.000.000	60.000.000.000		

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Akhir
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Angka kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup	per 1000 KH	9,7	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
		Persentase Neonatal dengan Komplikasi yang ditangani	%	100	65	68	68	70	72	72
		Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup	per 1000 KH	14,3	14,0	14,0	13,8	13,8	13,6	13,6
		Persentase pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	99,60	100	100	100	100	100	100
		Persentase pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase kunjungan baru di pelayanan kesehatan dasar (kunjungan rawat jalan di Puskesmas)	%	46,53	41,50	42,00	42,50	43,00	43,50	43,50
		Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah terakreditasi utama	%	7,69	19,23	34,62	38,46	50,00	53,85	53,85
		Persentase kepuasan masyarakat di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) minimal 90%	%	100	100	100	100	100	100	100

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Cakupan bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
		Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
		Persentase anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
		Persentase ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan antenatal sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
		Persentase warga negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	77,90	100	100	100	100	100	100	
		Cakupan warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	94,4	100	100	100	100	100	100	
102.05	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin				1.000.000.000	-	-	-	-		

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Persentase pelayanan kesehatan penduduk miskin di RSUD	%	100	100	100	100	100	100	100	
102.06	Program peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit				7.930.819.900	31.345.000.000	32.000.000.000	32.000.000.000	32.000.000.000		
		Prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana rumah sakit	%	94,72	46	48	50	52	54	54	
102.07	Program peningkatan kualitas pelayanan kesehatan rumah sakit				145.848.184.900,00	127.000.000.000	127.000.000.000	127.000.000.000	127.000.000.000		
		Indeks Kinerja RSUD	%	n.a	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	
		Cakupan nilai akreditasi RSUD	%	100	100	100	100	100	100	100	
103	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				78.774.262.100	105.179.693.000	112.565.000.000	112.565.000.000	112.565.000.000		
103.01	Program penyelenggaraan jalan				47.903.085.900	81.415.000.000	81.415.000.000	81.415.000.000	81.415.000.000		
		Persentase jalan kabupaten kondisi mantap (baik dan sedang)	%	84,15	84,25	84,45	84,65	84,85	85,00	85,00	
		Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan di wilayah kabupaten temanggung	%	100	100	100	100	100	100	100	
103.02	Program penyelenggaraan jembatan				14.419.031.300,00	4.700.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000		

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Akhir
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Persentase jembatan kabupaten kondisi baik	%	92	92,54	92,84	93,13	93,43	93,73	93,73
103.03	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya				14.303.639.300,00	16.341.693.000	16.000.000.000	16.000.000.000	16.000.000.000	
		Persentase jaringan irigasi kondisi baik	%	55,81	57,32	57,82	58,32	58,82	59,32	59,32
103.04	Program pembangunan saluran drainase/gorong - gorong				1.853.355.500,00	2.113.000.000	1.800.000.000	1.800.000.000	1.800.000.000	
		Persentase pelayanan drainase skala kawasan/kota sehingga tidak terjadi genangan	%	41	46	47	48	49	50	50
104.05	Program pembinaan jasa konstruksi				40.994.900,00	50.000.000,00	50.000.000	50.000.000	50.000.000	
		Tersedianya layanan informasi jasa konstruksi	%	100	90	90	90	90	90	90
103.06	Program penyelenggaraan tata ruang				254.155.200,00	560.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	
		Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai rencana tata ruang	%	87,6	87,70	87,80	87,90	88,00	88,10	88,10
103.07	Program Pengembangan Kawasan Strategis				-	-	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Akhir
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Prosentase kawasan strategis yang dikembangkan	%	n.a	-	-	35	50	60	60
104	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				26.188.553.170	32.543.800.000	33.500.000.000	33.500.000.000	33.500.000.000	
104.01	Program pengembangan perumahan dan permukiman				4.940.752.900	11.043.800.000	12.000.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000	
		Persentase rumah tinggal yang terlayani air bersih layak	%	85,82	86	87	88	89	90	90
		Persentase rumah layak huni	%	86,84	87,15	87,73	88,30	88,87	89,42	89,42
		Persentase kawasan kumuh perkotaan	%	19,50	19,25	19,00	18,75	18,50	18,25	18,25
104.02	Program pengembangan dan penataan kota				21.247.990.270	21.500.000.000	21.500.000.000	21.500.000.000	21.500.000.000	
		Cakupan RTH Publik	%		0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
		Persentase penerangan jalan umum di luar jalan kabupaten	%		8,85	10,2	11,56	12,91	14,26	14,26
105	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				3.942.121.600	4.388.019.000	3.360.000.000	3.360.000.000	3.360.000.000	
105.01	Program pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum				1.280.046.500	1.040.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Akhir
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati	%	87,3	100	100	100	100	100	100
		Rasio Petugas Satpol PP	rasio		1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18
105.02	Program peningkatan perlindungan masyarakat				373.237.000	1.075.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	
		Rasio Linmas per RT	rasio		1,48	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62
105.03	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran				1.230.507.300	1.130.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	
		Cakupan penanganan bencana kebakaran kabupaten	%	60,64	60,64	60,64	60,64	60,81	61	61
		Tingkat Waktu Tanggap (response time rate)	%	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8
		Persentase aparatur yang memenuhi standar kualifikasi	%	39,6	40	41	42	43	44	44
105.04	Program pendidikan politik masyarakat				132.670.800	133.349.000	130.000.000	130.000.000	130.000.000	
		Persentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya	%		87	87	87	87	87	87
		Persentase keterwakilan perempuan di lembaga politik	%	30	30	30	30	30	30	30
		Persentase keterwakilan perempuan di DPRD	%	31,11	30	30	30	30	30	30

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Akhir
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105.05	Program peningkatan kewaspadaan nasional				678.758.300	679.670.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	
		Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik politik dan keamanan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
105.06	Program ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan, dan ekonomi				116.403.000,00	120.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000	
		Cakupan terbentuknya FKUB di Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik seni, budaya, agama, kemasyarakatan, dan ekonomi	%	100	100	100	100	100	100	100
105.07	Program pengembangan wawasan kebangsaan				114.835.700	195.000.000	195.000.000	195.000.000	195.000.000	
		Persentase sekolah yang mendapatkan pemahaman kebangsaan	%	60	60	60	62	62	62	62
		Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan	%	0,69	10	10	10	10	10	10
105.08	Program pembinaan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba				15.662.200	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba	%	0,34	5	10	10	10	10	10	
		Persentase sekolah yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba	%	17,85	30,3	35	35	35	35	35	
106	SOSIAL				10.309.584.400	24.036.321.000	21.830.000.000	21.830.000.000	21.830.000.000		
106.01	Program perlindungan dan jaminan sosial				675.449.400	746.652.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000		
		Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial	%	100	100	100	100	100	100	100	
		Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	%	100	100	100	100	100	100	100	
		Persentase Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan perlindungan sosial	%	n.a	5,00	5,00	6,00	6,50	7,00	7,00	
106.02	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial				2.280.735.700	15.607.501.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000		

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Persentase anak terlantar dan lanjut usia terlantar yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial berbasis keluarga, masyarakat dan panti/barehsos	%	100	100	100	100	100	100	100	
		Persentase penyandang disabilitas yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial berbasis keluarga, masyarakat dan panti/barehsos	%	100	100	100	100	100	100	100	
		Persentase tuna sosial dan orang terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial melalui rumah perlindungan sosial dan panti/barehsos	%	100	100	100	100	100	100	100	
106.03	Program pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial				873.302.900	760.543.000	760.000.000	760.000.000	760.000.000		
		Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan dan Keluarga dalam usaha kesejahteraan sosial	%	100	100	100	100	100	100	100	
		Cakupan pemberdayaan PSKS Masyarakat dan kelembagaan dalam	%	100	100	100	100	100	100	100	

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		usaha kesejahteraan sosial									
106.04	Program penanganan fakir miskin				333.776.500,00	375.270.000,00	375.000.000	375.000.000	375.000.000		
		Persentase fakir miskin yang memperoleh penanganan sosial usaha ekonomi produktif	%	0,68	0,11	0,10	0,13	0,16	0,19	0,19	
		Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%		48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	
106.05	Program penanganan tanggap darurat bencana				2.379.285.900,00	2.920.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000		
		Persentase tertanganinya pemulihan sementara kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	
		Persentase Tertanganinya korban bencana pada masa tanggap darurat bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	
106.06	Program pencegahan dan kesiapsiagaan bencana				430.952.500,00	1.485.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000		
		Cakupan desa tangguh bencana	%	5,71	6,67	7,62	8,57	9,52	10,47	10,47	

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Akhir
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Persentase desa mitigasi terhadap desa rawan bencana	%	30,5	53,8	62	70,1	78,3	86,4	86,4
106.07	Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana				3.236.081.500,00	2.045.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	
		Persentase tertanganinya pemulihan kerusakan fisik akibat bencana pada pasca bencana	%	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase tertanganinya korban bencana pada pasca bencana	%	100	100	100	100	100	100	100
106.08	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan				100.000.000,00	96.355.000,00	95.000.000	95.000.000	95.000.000	
		Persentase terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	%	100	100	100	100	100	100	100
201	TENAGA KERJA				1.772.815.600	1.457.160.000	1.455.000.000	1.455.000.000	1.455.000.000	
201.01	Program perluasan kesempatan kerja				255.500.000	1.277.500.000	1.275.000.000	1.275.000.000	1.275.000.000	
		Persentase peserta pelatihan yang menjadi wirausaha baru	%	45,18	60	65	70	75	80	80
		Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	%	41,06	70	75	77	80	82	82
		Persentase pencari kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	51,65	55,00	57,00	60,00	62,00	65,00	65,00

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Tingkat setengah pengangguran	%	6,2	6,1	6	5,9	5,8	5,7	5,7	
		Presentase tenaga kerja formal	%	27	27	28	29	30	31	31	
201.02	Program perlindungan tenaga kerja dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan				99.866.000	104.660.000	105.000.000	105.000.000	105.000.000		
		Proporsi Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	%	74,04	75,00	76,00	77,00	78,00	79,00	79,00	
		Persentase perusahaan yang membayar upah sesuai UMK	%	11,34	80	83	85	87	88	88	
		Persentase perusahaan yang memenuhi sarana hubungan industrial	%	15,62	25	30	35	40	45	45	
		Persentase perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	%	100	100	100	100	100	100	100	
201.03	Program peningkatan produktivitas tenaga kerja				1.417.449.600	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000		
		Persentase peserta pelatihan kewirausahaan yang menjadi wirausaha berkembang	%	33,75	25,00	30,00	35,00	40,00	45,00	45,00	

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Akhir
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
202	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK				206.979.150	255.000.000	255.000.000	255.000.000	255.000.000	
202.03	Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak				206.979.150	255.000.000	255.000.000	255.000.000	255.000.000	
		Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan	%	26,30	26,00	25,90	25,67	25,56	25,00	25,00
		Persentase keterwakilan perempuan di lembaga Pemerintah	%	2,29	2,30	2,31	2,32	2,33	2,34	2,34
		Persentase Perempuan dan anak korban kekerasan	%		0,015	0,014	0,013	0,012	0,011	0,011
		Persentase terbentuknya kecamatan layak anak	%	20	20	20	30	50	60	60
		Rasio Perangkat Daerah yang menerapkan kebijakan responsif gender dalam penyusunan Renja PD		32,28	38,57	38,57	38,57	45,71	45,71	45,71
203	PANGAN				1.460.092.500	2.325.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	
203.02	Program peningkatan ketahanan pangan				1.460.092.500	2.325.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	
		Tingkat Ketersediaan Energi per Kapita	kcal/kapita/hari	2.912	2.915	2.920	2.925	2.930	2.935	2.935
		Tingkat ketersediaan Protein per Kapita	gr/kapita/hari	102,99	103	103,2	103,40	103,6	103,80	103,80
204	PERTANAHAN				215.251.500	186.545.000.000	70.047.250.000	49.612.000	52.092.000	

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Akhir
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
204.01	Program Administrasi Pertanahan				215.251.500	186.545.000.000	70.047.250.000	49.612.000	52.092.000	
		Prosentase penyelesaian fasilitasi pertanahan	%	100	100	100	100	100	100	100
		Terlaksananya pengadaan tanah jalan lingkar Parakan	%	n.a	0	0	100	0	0	100
205	LINGKUNGAN HIDUP				19.841.822.425	52.618.000.000	8.850.000.000	8.850.000.000	8.850.000.000	
205.01	Program perlindungan dan konservasi lingkungan hidup				10.758.135.525	2.516.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	%	74,33	74,33	74,33	74,33	74,33	74,33	74,33
		Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%	52,33	54,4	56,4	58,45	60,5	62,73	62,73
		Proporsi luas lahan kritis terhadap total luas lahan Temanggung	%	n.a	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067
205.02	Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup				2.679.029.200	1.825.000.000	1.050.000.000	1.050.000.000	1.050.000.000	
		Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100
		Indeks Kualitas Air	Mg/l	30,00	38	42	46	46	50	50

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Akhir
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Indeks Kualitas Udara	µh/m3	83,50	84	84,5	85	85,5	86	86
205.03	Program pentaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup				512.059.400	2.327.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	
		Cakupan sekolah berwawasan lingkungan	sekolah	183	10	10	10	10	10	233
205.04	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan				5.892.598.300	45.950.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	
		Persentase sampah yang tertangani	%		31,9	33,54	35,04	36,7	38,2	38,2
		Cakupan pelayanan persampahan	Desa		70	70	70	70	70	70
206	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				3.779.977.400	3.696.860.000	3.744.360.000	3.744.360.000	3.744.360.000	
206.01	Program peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk				293.705.400	260.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	
		Persentase kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	%	96,98	97	97,1	97,2	97,3	97,4	97,4
		Persentase kepemilikan KTP el	%	96,80	97,4	97,8	98,2	98,6	99	99
		Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	45,51	70	70,1	70,2	70,3	70,4	70,4
		Persentase pelayanan surat pindah datang tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Akhir
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
206.02	Program peningkatan pelayanan pencatatan sipil				178.418.500	162.500.000	170.000.000	170.000.000	170.000.000	
		Persentase kepemilikan akta kelahiran	%	67,68	69	70	75	80	90	90
		Persentase penerbitan akta kematian	%	100	95	96	96,5	97	97,5	97,5
		Cakupan pelayanan akta perkawinan dan perceraian tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100
206.03	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data				3.307.853.500	3.274.360.000	3.274.360.000	3.274.360.000	3.274.360.000	
		Persentase sarana prasarana ADMINDUK dalam kondisi baik	%	54	85	85	90	90	90	90
		Persentase kerjasama pemanfaatan data kependudukan	%	33,3	60	70	80	90	100	100
		Persentase inovasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	%	38,71	30	40	50	60	70	70
207	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				2.190.599.000	2.756.750.000	2.350.000.000	2.350.000.000	2.350.000.000	
207.01	Program pengembangan kelembagaan masyarakat dan desa				1.127.395.000	1.178.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	
		Persentase jumlah desa yang	%	20	23	25	30	35	40	40

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		berklasifikasi swasembada									
		Persentase Desa/ Kelurahan yang Cepat Berkembang berdasarkan Indeks Pembangunan Desa	%	25	27	30	33	35	37	37	
		Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif	%	12	14	20	25	30	35	35	
207.03	Program pembinaan dan fasilitasi perencanaan, evaluasi, pengelolaan keuangan dan pembangunan desa				201.628.500	359.750.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000		
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan RKPDes tepat waktu dan sesuai aturan	%	21,5	50	60	70	80	90	90	
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan APBDes tepat waktu dan sesuai aturan	%	23,7	50	60	70	80	90	90	
		Persentase jumlah desa yang menerapkan pengelolaan keuangan desa yang sesuai aturan	%	55	65	70	75	80	85	85	

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan semua kegiatan di APBDes tepat waktu	%	81,8	85	90	95	100	100	100	
207.05	Program pengembangan lembaga ekonomi masyarakat/desa dan pemberdayaan kawasan perdesaan				110.348.500	180.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000		
		Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang aktif	%	20	20	23	26	29	32	32	
		Persentase pemberdayaan di kawasan yang telah ditetapkan	%	100	100	100	100	100	100	100	
		Persentase lembaga ekonomi masyarakat desa yang aktif	%	10	10	10	10	10	10	10	
207.07	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan pengelolaan aset desa				751.227.000	1.039.000.000	900.000.000	900.000.000	900.000.000		
		Persentase Pelanggaran disiplin kepala desa	%	10	10	10	10	10	10	10	
		Persentase laporan administrasi desa yang tepat waktu	%	75	75	77	80	83	85	85	
		Persentase desa yang tertib pengelolaan aset	%	75	75	77	80	83	85	85	

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Akhir
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				8.231.011.900	1.668.000.000	1.460.000.000	1.460.000.000	1.460.000.000	
208.01	Program pengendalian penduduk dan informasi keluarga				617.893.600	903.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	
		Persentase Penyediaan Data Mikro Keluarga di Desa/ Kelurahan	%	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi/unmetneed	%	7,16	6,9	6,83	6,72	6,65	6,5	6,5
		Persentase Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun	%	2,08	2,08	2,07	2,06	2,05	2,04	2,04
		Angka Kelahiran Remaja Usia 15-19 th (ASFR 15-19 th)		n.a	27,20	27,00	26,80	26,50	26,30	26,30
208.02	Program kepesertaan dan peningkatan pelayanan KB				7.512.911.400	560.000.000	560.000.000	560.000.000	560.000.000	
		Persentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern	%	83,27	85,10	86,28	87,36	90,08	90,08	90,08
		Angka pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR)	%	83,27	79,79	80,78	81,23	81,34	82,00	82,00

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		suatu cara (<i>all methods</i>) pada perempuan usia 15-49									
		Persentase kepesertaan KB aktif	%	83,27	79,79	80,78	81,23	81,34	82,00	82,00	
		Persentase keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang	%	48,72	49,45	49,65	49,85	50,15	50,35	50,35	
208.03	Program peningkatan kualitas dan pembinaan ketahanan keluarga				100.206.900	205.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000		
		Persentase keluarga sejahtera III	%	26,37	45,6	46	46,5	47	47,5	47,5	
		Persentase keluarga sejahtera III plus	%	n.a	3,8	4	4	4,2	4,3	4,3	
		Persentase kampung KB yang memenuhi Indeks Desa Membangun (IDM)	%	41,67	48,33	48,33	48,33	48,33	48,33	48,33	
209	PERHUBUNGAN				13.978.208.960	7.988.000.000	6.922.000.000	6.922.000.000	6.922.000.000		
209.01	Program pengelolaan lalu lintas dan parkir				2.850.791.500	2.340.500.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000		
		Persentase ruas jalan yang didukung sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang memadai	%	37,50	33,82	34,78	36,23	37,68	38,65	38,65	
		Persentase potensi titik parkir yang tertangani	%	93,64	95,45	96,36	97,27	98,18	100	100	

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Akhir
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
209.03	Program peningkatan kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor				1.606.930.960	925.500.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	
		Presentase kendaraan bermotor yang laik jalan	%	108,80	99,32	99,04	99,68	99,53	99,50	99,50
		Persentase bengkel umum kelas 1 yang memenuhi standar	%	n.a	25,00	25,00	25,00	25,00	50,00	50,00
		Persentase bengkel umum kelas 2 yang memenuhi standar	%	n.a	12,50	25,00	37,50	50,00	62,50	62,50
		Persentase bengkel umum kelas 3 yang memenuhi standar	%	n.a	43,48	47,83	56,52	60,87	65,22	65,22
209.04	Program peningkatan pelayanan angkutan				9.520.486.500	4.722.000.000	4.722.000.000	4.722.000.000	4.722.000.000	
		Persentase angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan trayek	%	81,82	82,05	84,62	84,62	87,18	87,18	87,18
		Persentase Terminal Tipe C Yang Aktif	%	85,71	100	100	100	100	100	100
		Persentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik	%	57,14	71,43	71,43	85,71	85,71	100	100
210	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				4.275.059.460	10.874.150.000	4.700.000.000	4.820.000.000	4.747.219.000	
210.01	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik				2.275.054.700	2.276.150.000	2.400.000.000	2.520.000.000	2.447.219.000	
		Persentase PPID badan publik yang aktif	%	6,70	9,00	12,00	15,00	18,00	20,00	20,00

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Akhir
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Persentase kelompok informasi masyarakat yang aktif	%	5,00	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00	30,00
		Persentase kepatuhan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) terhadap norma siaran	%	100	100	100	100	100	100	100
210.02	Program pengelolaan aplikasi informatika				2.000.004.760	8.598.000.000	2.300.000.000	2.300.000.000	2.300.000.000	
		Persentase ketersediaan akses internet publik	%	41,00	80,00	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Persentase ketersediaan jaringan intranet	%	59,49	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Persentase sistem informasi yang terintegrasi	%	7,00	15,00	20,00	30,00	40,00	50,00	50,00
		Persentase sistem informasi yang berfungsi optimal	%	38,00	40,00	45,00	50,00	55,00	60,00	60,00
211	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				208.293.920	507.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	
211.01	Program pengembangan koperasi dan UKM				208.293.920	507.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	
		Persentase koperasi sehat	%	7,45	9,05	9,80	10,5	11,2	12,01	12,01
		Persentase penambahan nilai aset dan omset koperasi	%	25,00	50,10	50,20	50,30	50,40	50,50	50,50
		Persentase usaha mikro yang berkembang	%	3,20	3,50	3,90	4,10	4,60	4,80	4,80
212	PENAMAMAN MODAL				1.081.128.580	1.511.000.000	1.400.000.000	1.400.000.000	1.400.000.000	

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Akhir
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.01	Program pengkajian potensi investasi dan pengembangan kinerja				204.074.700	265.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	
		Persentase tersedianya kajian teknis potensi investasi	%	9,50	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	59,50
		Persentase ketersediaan SDM bidang PM dan Perizinan yang terlatih	%	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan	%	100	100	100	100	100	100	100
212.02	Program peningkatan iklim investasi				341.988.200	480.000.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000	
		Persentase Laju Investasi	%	362	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
		Nilai Realisasi Investasi	Milyar	760,488	300	360	432	520	625	2.997,448
212.03	Program peningkatan kualitas pelayanan perizinan				346.058.000	510.000.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000	
		Persentase pelayanan perizinan online	%	21,23	100	100	100	100	100	100
		Persentase perijinan yang bebas calo	%	82,85	100	100	100	100	100	100
		Persentase perijinan yang diterbitkan tepat waktu	%	54,5	95	95	95	95	95	95
212.04	Program pengawasan, pengendalian,				189.007.680	256.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Akhir
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	pengaduan dan advokasi perizinan									
		Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Perzinan yang diterbitkan	%	98,86	100	100	100	100	100	100
		Persentase Pengaduan masyarakat yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase tertanganinya gugatan hukum di dalam pengadilan	%	n.a	100	100	100	100	100	100
213	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA				46.421.959.650	3.795.000.000	3.400.000.000	3.400.000.000	3.400.000.000	
213.01	Program pembinaan kepemudaan				131.279.000	1.495.000.000	1.400.000.000	1.400.000.000	1.400.000.000	
		Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	6,29	65,3	69,2	73	76,9	80,76	80,76
213.02	Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga				46.290.680.650	2.300.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	
		Prosentase pelatih olahraga bersertifikat	%	30,83	27	28	29	30	31	31
		Persentase prestasi olah raga	%	46,15	30	33	36	38	41	41
		Persentase atlet berprestasi	%	12,56	17	18	19	20	21	21
214	STATISTIK				437.668.000	475.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	
214.01	Program pengembangan data Statistik				437.668.000	475.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	
		Cakupan ketersediaan data makro daerah	%	87,00	100	100	100	100	100	100

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
215	PERSANDIAN				-	165.000.000	165.000.000	165.000.000	165.000.000		
215.01	Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah				-	165.000.000	165.000.000	165.000.000	165.000.000		
		Tingkat penilaian persiapan/ pengelolaan resiko keamanan informasi	%	8,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	5,0	
216	KEBUDAYAAN				2.434.757.000	6.365.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000		
216.01	Program pengelolaan kebudayaan				2.434.757.000	6.365.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000		
		Persentase pelestarian cagar budaya dan sejarah	%	5,16	6,10	7,04	7,98	9,38	10,79	10,79	
		Persentase kelompok pelestari dan pecinta bahasa/ sastra yang aktif	%	40,32	48,38	56,45	64,51	72,58	80,64	80,64	
		Persentase kelompok seni dan nilai budaya yang aktif	%	38,60	44,33	45,16	46,00	46,84	47,67	47,67	
217	PERPUSTAKAAN				1.897.894.700	6.835.500.000	6.800.000.000	6.800.000.000	6.800.000.000		
217.01	Program pengelolaan dan pengembangan perpustakaan				1.897.894.700	6.835.500.000	6.800.000.000	6.800.000.000	6.800.000.000		
		Persentase pertumbuhan jumlah pengunjung perpustakaan	%	16,71	20	25	30	35	40	40	
		Persentase perpustakaan yang aktif	%	34,27	34,54	34,81	35,08	35,35	35,62	35,62	

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Akhir
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
218	KEARSIPAN				300.990.600	356.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	
218.01	Program pengelolaan dan pelestarian arsip daerah				300.990.600	356.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	
		Persentase Pengelolaan Arsip Secara Baku	%	15,99	20,35	23,26	26,16	29,07	31,98	31,98
		Persentase arsip vital konvensional yang dialihmediakan	%	n.a	10	20	30	40	50	50
301	KELAUTAN DAN PERIKANAN				2.040.439.200	1.691.250.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	
301.01	Program pengembangan perikanan				2.040.439.200	1.691.250.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	
		Produktivitas Ikan Nila	Kg/m2	3,19	3,60	4,10	4,70	5,40	6,20	6,20
		Produktivitas Ikan Lele	Kg/m2	8,73	9,60	10,50	11,50	12,60	13,80	13,80
		Produktivitas Ikan Mas	Kg/m2	5,23	5,40	5,60	5,70	5,80	6,00	6,00
302	PARIWISATA				33.673.686.700	33.318.500.000	34.000.000.000	34.000.000.000	34.000.000.000	
302.01	Program pengembangan pariwisata				33.673.686.700	33.318.500.000	34.000.000.000	34.000.000.000	34.000.000.000	
		Persentase obyek wisata yang berkembang	%	20,83	25,00	29,16	33,33	37,50	41,66	41,66
		Pertumbuhan peningkatan jumlah wisatawan	%	15,41	17,00	18,00	19,00	20,00	21,00	21,00
		Persentase desa wisata wisata	%	5,26	6,01	6,76	7,51	8,27	9,02	9,02
303	PERTANIAN				22.848.831.875	19.669.000.000	20.625.000.000	20.625.000.000	20.625.000.000	

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Akhir
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
303.01	Program peningkatan produktivitas, penerapan teknologi dan agribisnis Tanaman Pangan				5.716.463.575	6.120.000.000	7.500.000.000	7.500.000.000	7.500.000.000	
		Produktivitas padi	kwintal/ha	62,15	62,85	62,95	63,00	63,15	63,30	63,30
		Produktivitas jagung	kwintal/ha	45,70	45,75	45,80	45,85	45,95	46,00	46,00
		Produktivitas Ubi Kayu	kwintal/ha	339,00	339,10	339,35	339,60	339,70	339,80	339,80
303.02	Program peningkatan produktivitas penerapan teknologi dan agribisnis Hortikultura				456.113.600	970.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	
		Produktivitas bawang putih	kwintal/ha	79,00	79,10	79,25	79,35	79,45	79,60	79,60
		Produktivitas bawang merah	kwintal/ha	79,70	79,75	79,85	79,95	80,00	80,15	80,15
		Produktivitas cabai rawit	kwintal/ha	54,50	54,60	54,75	54,85	55,00	55,15	55,15
		Produktivitas cabai besar	kwintal/ha	69,00	69,10	69,25	69,35	69,40	69,50	69,50
		Produktivitas kentang	kwintal/ha	212,00	212,25	212,40	212,60	212,75	212,80	212,80
		Produktivitas durian	kwintal/pohon	0,95	0,96	0,97	0,98	0,99	1,00	1,00
		Produktivitas jambu biji	kwintal/pohon	0,90	0,92	0,93	0,94	0,95	0,96	0,96
303.03	Program pemberdayaan SDM dan kelembagaan pertanian				442.589.400	680.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan Desa (Posluhdes)	%	n.a	4,40	4,84	5,29	6,17	6,61	6,61	
		Persentase kelompok tani yang naik kelas	%	n.a	0,59	0,68	0,78	0,83	0,98	0,98	
		Persentase perkembangan lembaga ekonomi petani	%	n.a	0,49	0,64	0,73	0,88	0,93	0,93	
303.04	Program peningkatan produktivitas ternak dan hasil ternak				12.139.386.000	5.970.000.000	5.870.000.000	5.870.000.000	5.870.000.000		
		Produktivitas ternak sapi	Kg/Ekor	176,65	176,80	177,00	177,20	177,40	177,60	177,60	
		Produktivitas ternak domba	Kg/Ekor	13,66	13,67	13,68	13,69	13,70	13,71	13,71	
		Produktivitas ternak kambing	Kg/Ekor	13,66	13,67	13,68	13,69	13,70	13,71	13,71	
		Produktivitas ternak ayam ras pedaging	Kg/Ekor	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	
		Produktivitas ternak ayam ras petelur	Kg/Ekor	10,30	10,88	10,88	10,88	10,88	10,88	10,88	
		Produktivitas ternak ayam buras	Kg/Ekor	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	
303.05	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan				319.392.500	674.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000		
		Prevalensi penyakit Sapi	%	5,00	10	10	10	10	10	10	
		Prevalensi penyakit Domba	%	2,00	2	2	2	2	2	2	

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Akhir
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Prevalensi penyakit Kambing	%	4,00	6	6	6	6	6	6
		Prevalensi penyakit Unggas	%	0,10	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
303.06	Program pemenuhan pangan asal hewan				63.509.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	
		Persentase peningkatan pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat	%	60	60	65	65	70	70	70
303.07	Program peningkatan produktivitas penerapan teknologi dan agribisnis Perkebunan				3.711.377.800	5.175.000.000	5.175.000.000	5.175.000.000	5.175.000.000	
		Produktivitas tembakau	kwintal/h a	6,53	6,60	6,65	6,70	6,75	6,80	6,80
		Produktivitas kopi robusta	kwintal/h a	6,90	6,95	7,00	7,10	7,20	7,25	7,25
		Produktivitas kopi arabika	kwintal/h a	6,70	6,73	6,75	6,80	6,90	7,00	7,00
		Produktifitas Cengkeh	kwintal/h a	2,04	2,08	2,10	2,25	2,35	2,45	2,45
		Produktivitas Vanili	kwintal/h a	2,83	2,85	2,88	2,90	2,93	2,95	2,95
306	PERDAGANGAN				5.611.974.300	5.695.000.000	4.400.000.000	4.400.000.000	4.400.000.000	
306.01	Program pengembangan perdagangan				2.278.359.500	1.075.000.000	900.000.000	900.000.000	900.000.000	

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Akhir
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Persentase ketersediaan informasi harga bahan pokok dan bahan lainnya penyebab Inflasi	%	66,84	67,21	67,85	68,42	68,37	68,41	
		Persentase pedagang kaki lima yang menempati ruang sesuai peruntukan	%	18,63	25	27	30	32	34	
		Cakupan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang ditera ulang	unit	350	5000	6000	7000	8000	9000	
		Nilai ekspor non migas	dolar	156.040.782,98	162.282.414,29	168.524.045,60	174.765.676,91	181.007.308,22	187.248.939,53	187.248.939,53
306.02	Program pengelolaan pasar				3.333.614.800	4.620.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	
		Persentase pasar daerah dalam kondisi baik	%	60	62	65	67	70	75	75
		Persentase kepatuhan pedagang pasar sesuai zonasi peruntukan pedagang	%	27,68	30	40	50	60	70	70
		Persentase realisasi penerimaan pendapatan pasar	%	59,41	60	70	80	90	100	100
307	PERINDUSTRIAN				655.789.300	1.522.000.000	1.522.000.000	1.522.000.000	1.522.000.000	
307.01	Program Pengembangan Industri				655.789.300	1.522.000.000	1.522.000.000	1.522.000.000	1.522.000.000	
		Persentase IKM industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah	%	29,29	30	31	32	33	35	35

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Akhir
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
308	TRANSMIGRASI				-	76.000.000	76.000.000	76.000.000	76.000.000	
308.01	Program pemberdayaan transmigran				-	76.000.000	76.000.000	76.000.000	76.000.000	
		Persentase calon transmigran yang mendapatkan pembekalan	%	100	100	100	100	100	100	100
401	PERENCANAAN				2.557.848.200	3.050.000.000	2.600.000.000	2.600.000.000	2.600.000.000	
401.01	Program perencanaan, evaluasi, dan informasi pembangunan daerah				969.577.500	1.600.000.000	1.300.000.000	1.300.000.000	1.300.000.000	
		Persentase penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase tersusunnya laporan evaluasi pembangunan daerah tepat waktu	%	75	75	80	85	90	95	95
401.02	Program perencanaan dan evaluasi bidang ekonomi, sumber daya alam dan infrastruktur				962.827.900	675.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	
		Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang ekonomi	%	90	90	90	90	90	90	90

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang sumber daya alam	%	90	90	90	90	90	90	90	
		Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang infrastruktur	%	90	90	90	90	90	90	90	
401.03	Program perencanaan dan evaluasi bidang pembangunan manusia dan pemerintahan				625.442.800	775.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000		
		Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang kesejahteraan rakyat	%	90	90	90	90	90	90	90	
		Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang sumber daya manusia	%	90	90	90	90	90	90	90	
		Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra	%	90	90	90	90	90	90	90	

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Akhir
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		perangkat daerah sub bidang pemerintahan								
402	KEUANGAN				6.696.980.150	6.354.715.160	6.073.000.000	6.073.000.000	6.073.000.000	
402.01	Program perencanaan, pendataan dan pelayanan pendapatan daerah				1.075.289.000	897.418.160	800.000.000	800.000.000	800.000.000	
		Persentase Peningkatan data jumlah obyek pajak	%	3,56	0,93	0,73	0,72	0,96	1,27	1,27
		Persentase terverifikasinya perubahan data yang tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100
402.02	Program pengelolaan data dan penetapan pendapatan daerah				347.783.700	550.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	
		Prosentase pemutakhiran obyek pajak	%	2,5	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
		Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100
402.03	Program peningkatan pendapatan daerah				69.282.500	106.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
		Persentase realisasi penerimaan pendapatan daerah	%	99,87	90	90	90	90	95	95
		Persentase pelaporan pendapatan daerah tepat waktu	%	93,54	90	95	95	95	95	95
402.04	Program pengelolaan keuangan daerah				1.465.663.550	1.728.297.000	1.700.000.000	1.700.000.000	1.700.000.000	

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Akhir
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Realisasi belanja terhadap APBD	%	86,63	87,92	89,35	91,07	90,51	89,96	89,96
		Prosentase konsistensi penganggaran terhadap Perencanaan	%	85,41	90	100	100	100	100	100
		Prosentase dokumen penganggaran tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100
		Prosentase penerbitan SP2D yang tepat waktu	%	100	98	98	98	100	100	100
402.05	Program pengelolaan aset				1.009.746.400	835.000.000	835.000.000	835.000.000	835.000.000	
		Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja	%	79,76	80,95	82,74	84,52	86,31	88,10	88,1
		Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja	%	95,45	98,33	98,49	98,70	98,90	99,10	99,1
402.06	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah				2.729.215.000	2.238.000.000	2.238.000.000	2.238.000.000	2.238.000.000	
		Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel	%	94	95	95	95	97	98	98
		Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	%	90	95	95	95	97	98	98

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Akhir
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
403	KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN				5.030.634.664	2.455.040.000	2.426.500.000	2.426.500.000	2.426.500.000	
403.01	Program pengelolaan administrasi kepegawaian				278.963.500	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	
		Persentase penyusunan formasi pegawai	%	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase penyelesaian usulan pensiun PNS tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase penyelesaian usulan kenaikan pangkat tepat waktu	%	99,81	100	100	100	100	100	100
403.02	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				4.630.675.300	1.928.540.000	1.900.000.000	1.900.000.000	1.900.000.000	
		Persentase pejabat tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas yang memenuhi kompetensi diklat kepemimpinan	%	35,63	37,6	40,8	44,0	47,2	50,5	50,5
		Persentase ASN yang memenuhi kompetensi diklat teknis dan fungsional	%	10,00	3	4,5	4,5	4,5	4,5	21
		Persentase keterisian jabatan tinggi pratama, jabatan administrator, dan jabatan pengawas	%	95,17	80	80	80	80	80	80

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Akhir
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Persentase perempuan pada jabatan eselon I, II, III dan IV	%	44,79	45,50	46,00	47,00	47,00	48,00	48,00
403.03	Program pembinaan, kesejahteraan aparatur, dan informasi kepegawaian				120.995.864	176.500.000	176.500.000	176.500.000	176.500.000	
		Persentase pelanggaran disiplin ASN	%	0,17	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2
		Persentase penyelesaian penanganan kasus pelanggaran disiplin ASN	%	100	90	90	90	90	90	90
		Persentase pelaksanaan updating data kepegawaian	%	100	80	85	90	95	95	95
404	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				941.748.500	3.525.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	
404.01	Program penelitian dan pengembangan				941.748.500	3.525.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	
		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase hasil kreasi dan inovasi yang dikembangkan	%	42,85	45	50	55	60	65	65
405	PENGAWASAN				1.100.868.500	1.558.460.000	1.150.000.000	1.150.000.000	1.150.000.000	
405.01	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan				919.087.500	1.409.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah										
		Prosentase penanganan hasil temuan pemeriksaan pada IRBAN I	%	100	100	100	100	100	100	100	
		Persentase perangkat daerah yang SAKIP-nya dievaluasi pada IRBAN I	%	100	100	100	100	100	100	100	
		Prosentase penanganan hasil temuan pemeriksaan pada wilayah IRBAN II	%	100	100	100	100	100	100	100	
		Persentase perangkat daerah yang SAKIP-nya dievaluasi pada wilayah IRBAN II	%	100	100	100	100	100	100	100	
		Prosentase penanganan hasil temuan pemeriksaan pada IRBAN III	%	100	100	100	100	100	100	100	
		Persentase perangkat daerah yang SAKIP-nya dievaluasi pada wilayah IRBAN III	%	100	100	100	100	100	100	100	
		Prosentase penanganan hasil temuan pemeriksaan pada IRBAN IV	%	100	100	100	100	100	100	100	
		Persentase perangkat daerah yang SAKIP-nya dievaluasi pada wilayah IRBAN IV	%	100	100	100	100	100	100	100	

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Akhir
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
405.02	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan				181.781.000	149.460.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	
		Persentase APIP yang memiliki sertifikasi profesi	%	29,16	29,16	33	38	42	47	47
406	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN				51.474.706.862	63.055.210.800	61.022.287.001	61.022.287.002	61.022.287.003	
406.01	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah				13.201.366.800	13.247.839.300	13.250.000.000	13.250.000.000	13.250.000.000	
		Persentase jumlah peraturan daerah inisiatif terhadap jumlah raperda	%	18,75	26,67	26,67	26,67	26,67	26,67	26,67
		Persentase kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sesuai rencana	%	93,98	100	100	100	100	100	100
		Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan	%	42,16	54,00	55,00	56,00	57,00	58,00	58,00
406.02	Program peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan				398.491.000	279.000.000	279.000.000	279.000.000	279.000.000	
		Cakupan pilar batas yang terinventarisir	%	62,74	75	75	100	100	100	100
		Persentase pelaporan SPM Perangkat Daerah tepat waktu	%	93,33	100	100	100	100	100	100
		Cakupan kecamatan tertib administrasi	%	95	100	100	100	100	100	100

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Akhir
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
406.05	Program penyusunan dan penataan produk hukum				1.027.835.000	1.133.956.000	1.130.000.000	1.130.000.000	1.130.000.000	
		Persentase peraturan daerah yang ditindaklanjuti dengan peraturan bupati	%		30	30	30	30	30	30
		Persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH	%		20	100	100	100	100	100
		Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan secara non litigasi	%		24	83	83	83	83	83
		Persentase permasalahan hukum yang ditangani secara litigasi	%		7	17	17	17	17	17
406.07	Program pengembangan dan pengendalian perekonomian daerah				597.027.000	1.080.000.000	1.080.000.000	1.080.000.000	1.080.000.000	
		Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi	%	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase jaminan keamanan produk barang bersubsidi	%	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	%	100	100	100	100	100	100	100
406.08	Program pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan				152.480.000	240.000.000	240.000.000	240.000.000	240.000.000	

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Akhir
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Persentase pelaksanaan kegiatan yang selesai tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100
406.20	Program Layanan Pengadaan				430.948.200	1.300.000.000	1.300.000.000	1.300.000.000	1.300.000.000	
		Persentase pengadaan barang/jasa tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100
		Cakupan perangkat daerah yang menyampaikan daftar rencana umum pengadaan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan	%	77,20	80,00	83,00	86,00	89,00	92,00	92,00
406.09	Program pengembangan keagamaan, kesejahteraan rakyat dan bina mental				3.402.170.850	2.645.000.000	2.645.000.000	2.645.000.000	2.645.000.000	
		Persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik	%	80	82	84	86	88	90	90
406.10	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah				2.457.749.775	2.785.000.000	2.785.000.000	2.785.000.000	2.785.000.000	
		Persentase pemenuhan	%	100	100	100	100	100	100	100

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Akhir
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		kebutuhan kedinasan kepala daerah								
406.11	Program penataan kelembagaan, tatalaksana dan peningkatan pelayanan publik				476.465.800	595.000.000	595.000.000	595.000.000	595.000.000	
		Persentase perangkat daerah berpredikat B dalam pembuatan LKjIP	%	50	53,2	57,4	63,8	70,2	74,5	74,5
		Persentase perangkat daerah yang telah masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) / Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	%	12,70	21,80	30,90	40,00	49,10	58,20	58,20
406.13	Program penyelenggaraan kehumasan				7.242.701.998	6.620.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	
		Persentase pengaduan masyarakat melalui media resmi pemda yang ditindaklanjuti	%	93	100	100	100	100	100	100
		Persentase peningkatan pengunjung website	%	-3,15	25	25	25	25	25	25
		Persentase jumlah kegiatan pemkab yang terdokumentasi dan terpublikasi	%	98,2	100	100	100	100	100	100
406.14	Program peningkatan pengelolaan tata				1.778.030.250	1.927.870.000	1.916.902.000	1.916.902.000	1.916.902.000	

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Akhir
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	pemerintahan di Kecamatan									
		Persentase kepemilikan KTP-EI di kecamatan	%	96,80	100	100	100	100	100	100
		Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	%	n.a	1	0.7	0.5	0.3	0	0
		Persentase realisasi penerimaan PBB	%	100	100	100	100	100	100	100
406.15	Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan				1.185.602.300	1.430.300.000	1.430.025.000	1.430.025.000	1.430.025.000	
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100
406.16	Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan				474.835.650	650.950.000	670.758.000	670.758.000	670.758.000	
		Persentase tempat ibadah kondisi baik	%	75	75	75	75	75	75	75
		Persentase RTLH	%	10,57	10,57	9,13	7,72	6,35	5,00	5,00
406.17	Program peningkatan ketrentaman dan ketertiban masyarakat di Kecamatan				433.570.250	509.670.000	518.328.000	518.328.000	518.328.000	

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Akhir
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Angka kriminalitas kecamatan	%	4,3	4,3	3,3	2,3	1,3	1	1
		Persentase penanganan laporan kejadian	%	100	100	100	100	100	100	100
406.18	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan				13.319.844.927	22.350.674.000	22.350.674.001	22.350.674.002	22.350.674.003	
		Persentase sarana dan prasarana lokal kelurahan kondisi layak	%	100	100	100	100	100	100	100
406.19	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Kelurahan				4.895.587.062	6.259.951.500	4.831.600.000	4.831.600.000	4.831.600.000	
		Persentase lembaga masyarakat kelurahan yang aktif	%	100	100	100	100	100	100	100
407	PENDUKUNG URUSAN PERANGKAT DAERAH				61.586.808.564	77.280.898.160	60.192.648.500	60.412.950.000	58.390.450.000	
407.01	Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah				1.801.611.390	2.929.238.400	2.847.200.000	2.847.200.000	2.847.200.000	
		Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok, dan pelaporan perangkat daerah.	%	100	100	100	100	100	100	100

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Akhir
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
407.02	Program pelayanan administrasi perkantoran				37.250.298.749	35.055.213.440	33.214.500.000	33.214.500.000	33.214.500.000	
		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100	100	100	100	100	100	100
407.03	Program peningkatan sarana prasarana aparatur				21.443.873.625	36.202.023.520	23.054.948.500	21.252.750.000	21.252.750.000	
		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur	%	100	100	100	100	100	100	100
407.04	Program peningkatan disiplin aparatur				1.091.024.800	3.094.422.800	1.076.000.000	3.098.500.000	1.076.000.000	
		Persentase kepatuhan ASN dalam penggunaan pakaian dan atributnya	%	100	100	100	100	100	100	100



BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN

PEMERINTAH DAERAH



TAMAN WISATA POSONG

TEMANGGUNG

MAREM GANDEM

TENTREM



Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah perlu ditetapkan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah terdiri dari indikator tujuan sebagai indikator kinerja utama dan indikator sasaran.

Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 secara teknis dirumuskan dari indikator kinerja tujuan yang juga menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja sasaran (*impact*).

Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada akhirnya menjadi ukuran efektivitas dan efisiensi sebuah tata kelola pemerintahan secara umum yang sasaran utamanya adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui ketersediaan pelayanan publik. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran pada setiap tahun periode RPJMD Tahun 2018-2023.

Penyajian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada bab ini meliputi: indikator kinerja, satuan, realisasi kinerja Tahun 2017, prediksi capaian kinerja Tahun 2018, dan penetapan target kinerja Tahun 2019-2023. Selain itu juga ditambahkan rumus formulasi penghitungan realisasi kinerja dan penjelasan indikator kinerja serta Perangkat Daerah penanggung jawab. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 8.1.
Indikator Kinerja Tujuan Sebagai Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2017	KONDISI 2018	TARGET					RUMUS INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
					2019	2020	2021	2022	2023			
Misi 1												
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	-	68,34	68,69	69,22	69,54	69,84	70,16	70,49	Angka BPS	Tahun 2018 = angka prediksi	Dinkominfo
2	Angka Kemiskinan	%	11,46	9,87	9,36	8,85	8,34	7,83	7,32	Angka BPS		Dinas Sosial
Misi 2												
3	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,68	4,80	5,20	5,30	5,60	5,80	6,00	PDRB tahun berjalan dikurangi PDRB tahun sebelumnya dibagi PDRB tahun sebelumnya dikali 100%	Tahun 2018 = angka prediksi	Dinkominfo
4	Inflasi	%	3,12	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	menggunakan rumus Indeks Laspeyres yang sudah dimodifikasi (<i>Modified Laspeyres</i>)	Tahun 2018 = angka prediksi	Dinkominfo
5	Pendapatan per Kapita	Juta rupiah	24,8	26,2	27,5	28,7	29,8	30,9	31,9	PDRB ADHB dibagi jumlah penduduk	Tahun 2018 = angka prediksi	Dinkominfo
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,97	3,24	3,20	3,15	3,10	3,05	2,97	Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja dibagi Jumlah penduduk angkatan kerja dikali 100%		Dinkominfo

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2017	KONDISI 2018	TARGET					RUMUS INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
					2019	2020	2021	2022	2023			
Misi 3												
7	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	58,45	60	62	64	66	68	70	Kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi, pemerintah yang bersih, bebas kkn dan kualitas pelayanan publik	Dinilai oleh Kementerian PAN dan RB	Bagian Ortala Setda
8	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	82	83	84	85	86	87	89	Hasil survey indeks kepuasan masyarakat: nilai rata-rata dari hasil survey di perangkat daerah hasil analisis komisi Ombudsman		Bagian Ortala Setda

Tabel 8.2
Indikator Kinerja Sasaran Sebagai Indikator Kinerja Kunci
Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2017	KONDISI 2018	TAHUN					RUMUS INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
					2019	2020	2021	2022	2023			
MISI 1												
1	Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS)	tahun	6,90	7,05	7,20	7,35	7,50	7,65	7,80	jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal	Tahun 2018 = angka prediksi	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
2	Angka Harapan Lama Sekolah (AHLs)	tahun	12,07	12,14	12,21	12,28	12,35	12,42	12,49	lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang	Tahun 2018 = angka prediksi	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
3	Indek Pembangunan Pemuda (IPP)	Angka	n.a	n.a	0,63	0,64	0,65	0,66	0,67	Penghitungan dilakukan oleh pihak ketiga/independen	Belum pernah dilakukan penghitungan	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
4	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	75,41	75,43	75,45	75,47	75,49	75,51	75,53	dihitung dengan program MCPDA atau <i>Mortpack</i>	Tahun 2018 = angka prediksi	Dinas Kesehatan
5	Angka Kematian Ibu (AKI)	Angka maks	67,45	87,62	83,50	79,50	75,50	71,50	67,50	jumlah ibu yang meninggal karena hamil bersalin, dan nifas di suatu wilayah pada kurun waktu 1 tahun dibagi jumlah kelahiran hidup di suatu wilayah dalam kurun waktu 1 tahun yang sama dikali 100.000 kelahiran hidup		Dinas Kesehatan

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2017	KONDISI 2018	TAHUN					RUMUS INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
					2019	2020	2021	2022	2023			
6.	Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1000 kelahiran	13,20	12,85	12,80	12,60	12,40	12,20	12,00	jumlah bayi (berumur kurang dari 1 tahun) yang meninggal di suatu wilayah pada kurun waktu 1 tahun dibagi jumlah kelahiran hidup di suatu wilayah dalam kurun waktu 1 tahun yang sama dikali 1.000 kelahiran hidup		Dinas Kesehatan
7	Prevalensi Balita Gizi Buruk	%	0,35	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	jumlah balita gizi buruk (0 sampai 60 bulan) yang ditemukan dibagi jumlah seluruh anak balita dikali 100%	Standar SDGs kurang dari 0,5	Dinas Kesehatan
8	Prosentase Rumah tangga yang memiliki jamban	%	68,96	77,92	79,84	80,84	81,84	82,84	83,84	Jumlah rumah tangga yang memiliki jamban dibagi jumlah rumah tangga dikali 100%		Dinas Kesehatan
9	Indeks Kinerja RSUD	Angka	78,95	79,00	79,20	79,40	79,60	79,80	80,00	Total score aspek penilaian kinerja keuangan ditambah kinerja non keuangan(Kategori Sehat > 65)		RSUD
10	Persentase peminjam di perpustakaan	%	68,66	74,39	75,00	76,00	78,00	80,00	82,00	Jumlah peminjam buku dibagi jumlah pengunjung perpustakaan dikali 100%		Dinarpus
11	Persentase pelestarian cagar budaya	%	4,69	5,16	6,10	7,04	7,98	9,38	10,79	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan dibagi jumlah cagar budaya yang ada dikali 100%	Setiap tahun ditargetkan bertambah 2 cagar budaya yang dilestarikan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2017	KONDISI 2018	TAHUN					RUMUS INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
					2019	2020	2021	2022	2023			
12	Persentase kelompok seni budaya yang aktif	%	32,34	38,60	44,33	45,16	46,00	46,84	47,67	Jumlah kelompok seni budaya teregistrasi yang aktif dibagi jumlah keseluruhan kelompok seni budaya yang teregistrasi		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
13	Indeks Gotong-Royong	Angka	n.a	n.a	0,63	0,64	0,65	0,66	0,67	Indeks gotong royong terdiri dari 4 parameter yaitu 9.kerjasama sosial, jejaring sosial, aksi kolektif dan kepercayaan sosial	0,63-0,81 = kategori baik	Dinpemades
14	Indeks Toleransi	Angka	n.a	n.a	0,63	0,64	0,65	0,66	0,67	Diukur dengan 4 parameter yaitu inklusi terhadap minoritas, dukungan sosial kepada minoritas, penerimaan terhadap sosial budaya dan kesetaraan gender	0,63-0,81 = kategori baik	Kantor Kesbangpol
15	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	%	14,47	12,04	10,57	9,13	7,72	6,35	5,00	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dibagi jumlah rumah dikali 100%	Perkiraan jumlah rumah tinggal tahun 2023 = 216.221 rumah	Dinas Sosial
16	Persentase rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial di luar panti sosial	%	1,37	1,18	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial di luar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial dasar dibagi jumlah disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar di luar panti sosial yang membutuhkan rehabilitasi sosial dikali 100%	Target diambil dari rata-rata realisasi selama 6 tahun terakhir	Dinas Sosial
17.	Laju Pertumbuhan	%	0,86	0,85	0,84	0,83	0,82	0,81	0,80	Jumlah penduduk tahun n dikurangi jumlah penduduk tahun		Dindalduk KBPPPA

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2017	KONDISI 2018	TAHUN					RUMUS INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
					2019	2020	2021	2022	2023			
	Penduduk (LPP)									sebelumnya dibagi jumlah penduduk tahun sebelumnya dikali 100%		
18.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	94,75	94,65	94,55	94,45	94,35	94,25	94,15	$IPG = 1/3[(Xede(1) + Xede(2) + linc-dis)]$	Xede(1)= Xede untuk harapan hidup Xede(2)= Xede untuk harapan pendidikan linc-dis = indeks distribusi pendapatan Variabel untuk menyusun indikator ini diperoleh juga dari Sakernas, SUPAS dan Sensus Penduduk.	Dindalduk KBPPPA
19.	Persentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	%	0,023	0,016	0,015	0,014	0,013	0,012	0,011	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dibagi jumlah rumah tangga		Dindalduk KBPPPA
MISI 2												
20	Nilai Tukar Petani (NTP)	Angka	102,17	102,6	102,8	103,0	103,2	103,4	103,6	Indeks yang diterima petani dibagi indeks yang dibayar petani dikali 100	Tahun 2018 = angka prediksi	Dintan Pangan
21	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	-	85,8	72,8	73,1	73,4	73,7	74,0	74,3	Persentase Angka Kecukupan Gizi (AKG) dikali bobot masing-masing kelompok pangan	Realisasi tahun 2018 turun drastis dikarenakan perubahan metode penghitungan	Dintan Pangan

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2017	KONDISI 2018	TAHUN					RUMUS INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
					2019	2020	2021	2022	2023			
22	Tingkat Konsumsi Ikan	kg/kap/t h	19,73	20,91	21,11	21,17	21,23	21,29	21,34	Jumlah Konsumsi Ikan per orang dalam satu tahun		Dinas Perikanan dan Peternakan
23	Pertumbuhan jumlah wisatawan	%	14,55	15,41	17,00	18,00	19,00	20,00	21,00	Jumlah wisatawan tahun berjalan dikurangi jumlah wisatawan tahun sebelumnya dibagi jumlah wisatawan tahun sebelumnya dikali 100%	Jumlah kunjungan yang terdata pada obyek wisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
24	Lama tinggal wisatawan (<i>Length of Stay</i>)	Hari	1	1	1	1	1	1	2	Jumlah LOS Hotel di Temanggung dibagi jumlah hotel		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
25	Kontribusi sektor perindustrian	%	26,83	26,83	26,83	26,83	26,83	26,83	26,83	Kontribusi Lapangan Usaha Industri terhadap PDRB		Disperindagkop & UKM
26	Kontribusi sektor perdagangan	%	20,35	20,35	20,35	20,35	20,35	20,35	20,35	Kontribusi Lapangan Usaha Perdagangan terhadap PDRB		Disperindagkop & UKM
27	Persentase Koperasi Sehat	%	6,62	7,45	9,05	9,80	10,5	11,2	12,01	Jumlah koperasi sehat dibagi jumlah koperasi dikali 100%		Disperindagkop & UKM
28	Persentase UKM Aktif	%	26	35	36	37	38	39	40	Jumlah UKM binaan dibagi jumlah seluruh UKM dikali 100%		Disperindagkop & UKM
29	Pertumbuhan Investasi Daerah	%	39,92	362	20	20	20	20	20	Nilai investasi tahun berjalan dikurangi nilai investasi tahun sebelumnya dibagi nilai investasi tahun sebelumnya dikali 100%	Pertumbuhan 20 % terhadap nilai investasi tahun sebelumnya	DPMPSTP
30	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	74,37	73,96	75,53	75,56	75,59	75,62	75,65	Jumlah penduduk Angkatan Kerja dibagi Jumlah penduduk usia kerja (15-64 Tahun) dikali 100%	Angka BPS	Dinas Tenaga Kerja

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2017	KONDISI 2018	TAHUN					RUMUS INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
					2019	2020	2021	2022	2023			
31	Persentase Infrastruktur Kondisi Baik	%	76,66	79,51	80,03	80,53	81,03	81,53	82,01	Rata-rata dari variabel-variabel persentase infrastruktur kondisi baik	Jalan, Jembatan, Irigasi, Air bersih	DPUPKP
32.	Persentase pemanfaatan tata ruang sesuai rencana tata ruang	%	87,60	87,60	87,70	87,80	87,90	88,00	88,10	Luasan yang sesuai peruntukannya dibagi luas kabupaten temanggung dikali 100%		DPUPKP
33.	Persentase kawasan kumuh Perkotaan	%	19,75	19,50	19,25	19,00	18,75	18,50	18,25	Luasan kumuh perkotaan di bagi luasan permukiman perkotaan dikali 100%		DPUPKP
34	Persentase menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	%	18,80	2,37	1,22	1,54	1,56	1,59	1,61	Angka kecelakaan lalu lintas tahun n dikurangi angka kecelakaan lalu lintas tahun (n-1) dibagi angka kecelakaan tahun (n-1) dikali 100%		Dinas Perhubungan
35	Indeks Kualitas lingkungan hidup (IKLH)	%	63,68	63,78	66,33	67,68	69,03	69,18	70,53	$(30\% \times IKU) + (30\% \times IKA) + (40\% \times IKTL)$		Dinas Lingkungan Hidup
MISI 3												
36	Tingkat Konsistensi Program Pembangunan	%	100	100	100	100	100	100	100	Jumlah program dalam RKPd dibagi Jumlah Program dalam RPJMD dikali 100		Bappeda
37	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Penyajian sesuai SAP Kepatuhan peraturan perundangan Tingkat materialitas temuan Sistem pengendalian internal	WTP = 4 WDP = 3 TW = 2 Disclaimer = 1	BPPKAD

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2017	KONDISI 2018	TAHUN					RUMUS INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
					2019	2020	2021	2022	2023			
38	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Angka	3,2	3,25	3,3	3,35	3,40	3,45	3,50	Akumulasi dari penilaian terhadap variabel indek capaian kinerja		Bagian PemerintahanSetda
39	Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	Jumlah kegiatan yang selesai tepat waktu dibagi jumlah kegiatan yang dilaksanakan dikali 100%		Bagian Pembangunan Setda
40	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	-	CC	CC	B	B	B	BB	BB	Nilai kumulatif dari perencanaan pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan capaian di Kabupaten Temanggung	dinilai oleh Kementerian PAN dan RB	Bagian Ortala Setda
41	Indeks Kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	2,28	3,045	3,045	3,045	3,15	3,15	3,3	Penilaian maturitas SPIP atas unsur-unsur SPIP yang didukung oleh semua PD di Kabupaten Temanggung		Inspektorat
42	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	Angka	n.a	3,34	3,40	3,50	3,60	3,70	3,80	Nilai IPAK diperoleh dengan mensurvey atas aspek-aspek yang ditentukan oleh Kementerian PAN dan RB	Yang berkompeten mengeluarkan nilai IPAK adalah Kementerian PAN dan RB yang diperoleh dari hasil survey yang dilakukan oleh Tim survey Kabupaten	Inspektorat
43	Indeks Profesionalisme ASN	Angka	n.a	46	49	52	55	58	61	Indikator penilaian Indeks Profesionalisme ASN, dihitung dari angka kumulatif dimensi : kualifikasi pendidikan (bobot 25%), dimensi kompetensi (bobot 40%),	Yang berkompeten mengeluarkan indeks profesionalisme ASN adalah BKN Pusat.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2017	KONDISI 2018	TAHUN					RUMUS INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
					2019	2020	2021	2022	2023			
										dimensi kinerja (bobot 30%), dan dimensi disiplin (5%). Dihitung dengan formula rumus : $IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$ =IP1+IP2+IP3+IP4	Adapun input data dari Kabupaten/Kota . Kategori Tingkat Profesionalisme ASN : ≤60 sangat rendah 61-70 rendah 71-80 sedang 81-90 tinggi 91-100 sangat tinggi	
44	Indeks Manajemen Kearsipan	Angka	n.a	n.a	61	63	65	67	69	Akumulasi dari hasil audit internal dan eksternal		Dinas Arsip dan Perpustakaan
45	Persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu	%	100	93,75	50	60	70	80	90	Jumlah raperda yang diajukan dibagi jumlah perda yang ditetapkan dikali 100%		Sekretariat Dewan
46	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	n.a	2,04	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	Bobot Nilai dari 3 Domain Tingkat Kematangan : Domain Kebijakan Internal, Domain Tata Kelola, Domain Layanan.	4,2-5,0 = memuaskan 3,5-<4,2 = sangat baik 2,6-<3,5 = baik 1,8-<2,6 = cukup <1,8 = kurang	Dinkominfo
47	Nilai keterbukaan informasi publik	Angka	70,80	77,90	78,30	78,70	79,10	79,50	80,00	Bobot Nilai dari 4 Indikator : mengumumkan informasi publik, menyediakan informasi publik, pelayanan informasi publik dan pengelolaan informasi dan dokumentasi informasi publik	97-100 = informatif 96-80 = menuju informatif 60-79 = cukup informatif 40-59 = kurang informatif 0-39 = tidak informatif	Dinkominfo

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2017	KONDISI 2018	TAHUN					RUMUS INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
					2019	2020	2021	2022	2023			
48	Nilai Tingkat kepatuhan Penyelenggaraan Layanan Publik	Angka	55	76	77	78	79	80	81	Bobot dari 10 komponen indikator : standar pelayanan, maklumat layanan, SIPP, sarpras fasilitas, pelayanan khusus, pengelolaan pengaduan, penilaian kinerja, visi misi dan moto layanan, atribut, pelayanan terpadu	0-50 = rendah 51-80 = sedang 81-100 = tinggi	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
49	Rata-rata Nilai Indeks Desa Membangun	Angka	0,62	0,62	0,63	0,64	0,65	0,66	0,67	Akumulasi nilai IDM seluruh desa dibagi jumlah desa		Dinpermades
50	Persentase desa yang berpredikat mandiri	%	3,38	3,76	4,14	4,51	5,38	6,24	6,62	Jumlah desa yang berpredikat mandiri dibagi jumlah desa dikali 100%		Dinpermades
51	Indeks Rasa Aman	Angka	n.a	n.a	0,63	0,64	0,65	0,66	0,67	Diukur dengan 4 indikator yakni kesadaran hukum, organisasi sipil, mitigasi resiko sosial dan penyelesaian sengketa secara beradab	0,63-0,81 = kategori baik	Satpol PP Damkar
52	Cakupan Desa Tangguh Bencana	%	6,52	5,71	6,67	7,62	8,57	9,52	10,47	Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dibagi Jumlah Desa/ Kelurahan rawan bencana dikali 100%	Dengan asumsi setiap tahun bertambah 2 desa/kelurahan tangguh bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah



BAB IX

PENUTUP



EMBUNG KLEDUNG

TEMANGGUNG

MAREM GANDEM

TENTREM



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung tahun 2018-2023 disusun berdasarkan pada RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan RPJPD Kabupaten Temanggung. Dokumen ini merupakan penjabaran visi-misi Bupati dan Wakil Bupati yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menjadi arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah di Kabupaten Temanggung Periode 2018-2023 sehingga dapat secara sinergis, terpadu dan searah dengan pembangunan nasional serta pembangunan provinsi selama lima tahun mendatang. Sinkronisasi antar dokumen perencanaan sudah dilakukan secara lengkap mulai dari sinkronisasi misi, tujuan, sasaran dan permasalahan isu strategis. Oleh karena itu unsur Perangkat Daerah, masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPJMD dengan sebaik- baiknya. Oleh karena itu, RPJMD harus terpublikasi dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat, para pemangku kepentingan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung.

Dalam merencanakan pembangunan daerah periode 2018-2023 sebagaimana yang tertuang di dalam dokumen RPJMD, Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun rencana strategis (Renstra) yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah untuk kemudian menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya. Perangkat Daerah berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah melalui proses pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan serta hasil RPJMD sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017.

Prioritas pembangunan lima tahun ke depan berupa pemantapan pembangunan secara menyeluruh dan menjawab isu-isu strategis daerah guna mewujudkan pembangunan yang menitikberatkan pada:

- a. Mengupayakan penanggulangan kemiskinan menjadi nol (*zero poverty*) sebagaimana amanat SDG's. Penanggulangan kemiskinan merupakan sasaran utama dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan pada tingkat global, nasional, provinsi maupun di Kabupaten Temanggung. Pada tahun 2023 target yang akan dicapai Kabupaten Temanggung sebesar 7,71 persen, Upaya-upaya strategis antara lain untuk mengatasi masih rendahnya akses pelayanan dasar (*basic needs access*) meliputi akses rumah layak, pangan terjangkau, pendidikan, dan kesehatan serta lemahnya pengembangan kehidupan ekonomi berkelanjutan (*sustainable livelihood*) yang ditunjukkan dengan rendahnya kesempatan berusaha dan bekerja, akses permodalan, pasar, aset produksi, keterampilan, dan produktivitas yaitu ketidakmampuan rumah tangga untuk menghasilkan pendapatan.

- b. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat yang bermoral, beretika, berbudaya, beretos kerja, berkemampuan, sehat, dan cerdas berbasis pada nilai-nilai luhur bangsa dan keagamaan dalam rangka pencapaian masyarakat yang sejahtera. Keberhasilan pembangunan SDM salah satunya diukur dari nilai IPM. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga sebagai ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat. IPM yang ingin dicapai pada tahun 2023 mencapai 70,49. Upaya membangun kualitas manusia tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai dalam rangka mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
- c. Mewujudkan perekonomian daerah yang semakin kuat berbasis pada ekonomi kerakyatan, potensi sektor unggulan daerah, dan cluster usaha tingkat pedesaan dalam rangka meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah. Mewujudkan ketersediaan dan pemerataan prasarana dan sarana pelayanan dasar dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan mobilitas ekonomi dan non ekonomi, pengembangan kawasan serta pengurangan kesenjangan antar wilayah.
- d. Mewujudkan pemerintahan yang bersendikan pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, kapasitas daerah, dan jaringan kerjasama dalam rangka optimalisasi kinerja pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam suasana politik yang demokratis.

Penyusunan RPJMD ini selanjutnya juga akan diikuti dengan penyusunan RPJM-Desa bagi Desa yang baru saja melaksanakan pemilihan Kepala Desa, oleh karenanya diharapkan Pemerintah Desa juga mengikuti Tujuan dan Sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD ini. Hal tersebut adalah dalam rangka menjaga sinergitas pembangunan di wilayah Kabupaten Temanggung.

Demikian prakata penutup dari Kami dan sekaligus mewakili Pemerintah Kabupaten Temanggung, Kami mengajak semua pemangku kepentingan pembangunan yang ada untuk bersama membangun Temanggung.

BUPATI TEMANGGUNG

ttd

M. AL KHADZIQ

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG



RUSLIANA INDRAWATI, S.H, M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 196110271989032001